DUA MENYEMAI DAMAI

Peran dan Kontribusi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Perdamaian dan Demokrasi

Muhammad Najib Azca - Hairus Salim
Moh Zaki Arrobi - Budi Asyhari - Ali Usman

PUSAT STUDI KEAMANAN DAN PERDAMAIAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA

Dua Menyemai Damai

Peran dan Kontribusi
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama
dalam Perdamaian dan Demokrasi

Prakata PSKP UGM

Buku hasil riset ini diawali oleh perbincangan ringan bernada galau di suatu sore di sebuah café di Jalan Kaliurang pada pertengahan Agustus tahun lalu.

Rangkaian panjang acara dalam rangka kenduri hari lahir Republik Indonesia baru saja usai, namun ruang dan diskursus publik kita telah kembali kusut oleh sengkarut sengketa gara-gara beda dukungan capres dan partai politik dan aneka konflik lainnya. Belum lagi banjir bandang *hoax* dan gelombang fitnah yang mengarus tanpa henti di media sosial maupun media massa. Sehingga terpantik tanya dan sekaligus ide: tidak adakah keping inspirasi berharga yang bisa dipersembahkan oleh bangsa ini bagi dunia? *Masa'* narasi yang muncul dari negeri Katulistiwa nan kaya raya ini hanya rentetan cerita tentang pertikaian dan perselisihan atau akumulasi permusuhan dan kebencian yang menggunung dan memuncratkan amarah dan laknat belaka?

Lalu meletiklah ide tentang riset ini. Ihwal perlunya kita mengangkat narasi damai yang indah dan cemerlang yang telah dipahatkan oleh segenap anak bangsa dalam merawat dan membangun bangsa besar yang amat bhinneka ini; lebih dari seperempat milyar warga menghuni wilayah yang terbentang luas dari ujung timur Papua hingga terdiri lebih dari 17.000 pulau besar dan kecil, dengan aneka budaya, adat istiadat, bahasa dan agama. Bukan kelahirannya benar (sebagai Bangsa) yang menusuk kalbu; tapi bagaimana kebhinekaan yang kaya raya itu bisa tetap bertahan dan terawat sebagai satu keutuhan dalam harmoni itu yang lebih menguras energi dan pengorbanan.

Maka, perlahan muncullah gagasan riset yang akhirnya menjadi buku ini: mengumpulkan narasi-narasi kecil maupun besar yang dilakukan oleh berbagai aktor yang terhimpun dalam dua ormas keagamaan Islam terbesar sejagat, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, yang bergerak di berbagai arena dan aras, yang akhirnya membentuk Islam yang berwajah Keindonesiaan, yang damai, demokratis dan berkeadaban.

Di tengah krisis dan citra Islam yang buruk dan buram di pentas global, yang sebagian didominasi oleh tindakan kelompok ekstremisme kekerasan dan konflik sektarian berdarah berkepanjangan, maka seperti disampaikan oleh Buya Syafii Maarif di sampul belakang buku ini, "kehadiran Islam Indonesia yang dipresentasikan oleh Muhammadiyah dan NU mampu menjadi oase dan kiblat baru bagi masa depan Islam di dunia."

Mungkin, bagi sebagian orang, cara pandang seperti itu dianggap agak sentimentil. Namun Buya Syafii tidak sendirian. Sejumlah pakar dan peneliti yang rajin melakukan penelitian komparatif juga menemukan 'isyarat' yang sama. Catatan Prof. Robert Hefner dari Boston University, Prof. Greg Barton dan Deakin University, juga refleksi diplomat senior dari Munk School of Global Affairs di Universitas Toronto Scott Gilmore menemukan petikan inspirasi serupa.

Meski mengusung optimisme, kita tentu tak boleh terjatuh pada sikap romantik yang tidak kritis. Bahwa kenyataannya Islam di Indonesia, termasuk Muhammadiyah dan NU, masih jauh dari paripurna. Bahkan, seperti diperingatkan oleh sejumlah peneliti seperti Singh (2007) dan Menchik (2018) bahwa kita dikepung oleh gelombang radikalisme dan intoleransi yang bukan mustahil berujung pada menguatnya apa yang disebut Singh sebagai "*Talibalization*" atau, minimal, seperti kata Menchik, terjadinya "*Democratic breakdown*".

Tulisan ini ingin ditutup dengan rasa syukur dan terima kasih. Banyak pihak telah berkontribusi bagi lahir dan hadirnya buku ini. Salah satunya adalah Prof. Pratikno, dosen senior dan mentor, yang

meski sibuk sebagai 'carik republik' masih menyempatkan diri berdiskusi dan melecut adik-adiknya untuk terus menulis, meneliti dan berkarya. Tanpa dukungan dari Ketua MWA UGM ini proyek riset ini mustahil bisa dijalankan.

Dukungan berikutnya datang dari jajaran pimpinan UGM. Tanpa sikap terbuka dan dukungan penuh dari Rektor UGM Prof. Panut Mulyono, Wakil Rektor Dr. Paripurna P. Sugarda, Sekretaris Eksekutif Rektorat Dr. Gugup Kismono dan jajarannya, penerbitan buku ini dan rangkaian acara peluncuran buku dan diskusi publik yang direncanakan tidak akan bisa terwujud.

Buku ini tidak akan lahir tanpa kerja keras tim peneliti dan asisten yang teguh dan tekun bekerja dalam sunyi. Meski waktu riset yang tersedia tidak panjang, kami beruntung mendapatkan tim peneliti dan asisten yang sangat berdedikasi serta memiliki akumulasi pengetahuan yang berlimpah tentang topik yang dikaji. Maka proses riset berjalan dengan cepat, tentu juga karena dukungan para narasumber yang bermurah hati berbagi data dan narasi yang kaya kepada kami, baik melalui wawancara maupun FGD.

Tim dan pasukan kerja di PSKP UGM juga sangat penting mendukung proses dan irama kerja yang cepat dan spartan. Terima kasih kepada Bung 'Kyai' Munjid yang bersedia memimpin pasukan ketika saya 'cuti umroh', Bro Zaki yang selalu siap dengan tugas-tugas tak terduga, Bung Erich yang mengawal komunikasi publik, dan terutama sekali "Srikandi PSKP" yang sigap menuntaskan semua agenda baik substantif maupun teknis: Mbak Arifah, Mbak Didien, Mbak Ayu, Mbak Aang, dan Mbak Indah. Juga Mas Parman, Mas Supri dan Mas Slamet yang acap menemani lembur.

Di luar PSKP, kegiatan ini juga tidak akan lancar tanpa dukungan sebuah jamaah kecil di kampus Fisipol yang solid dalam 'kerja dan guyon'. Matur nuwun mas EAP, mas NPM, mas DA, mas BJ, dan mas Marto.

Khusus dalam dalam persiapan penerbitan buku ini peran sobat lawas mas Yahya tak tergantikan. Dengan sabar, telaten dan

cerewet ia mengawal proses penerbitan buku yang ruwet dan detail. Terima kasih juga untuk mas Erwan dan mas Ipin yang menyumbangkan desan sampul yang keren.

Terakhir, ucapan terima kasih terbesar tentu disampaikan kepada Allah Swt yang telah membimbing kami dalam mengerjakan tugas-tugas kecil dalam merawat kewarasan dan keadaban kehidupan bersama ini. Juga kepada seluruh keluarga yang merelakan kami 'absen' dari sejumlah kewajiban kadang justru di saat-saat penting dan genting.

Akhirul kalam, semoga kontribusi kecil kami bagi ikhtiar merawat kehidupan bersama yang lebih baik ini membawa berkah dan manfaat.

Yogyakarta, 12 Januari 2019
Salam Damai dan Salam Sejahtera

Muhammad Najib Azca

Kata Pengantar Rektor Universitas Gadjah Mada

Rektor Universitas Gadjah Mada menyambut dengan bangga dan gembira penerbitan buku hasil riset yang dilakukan oleh Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) yang berjudul *Dua Menyemai Damai: Peran Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Demokrasi dan Perdamaian*. Kehadiran buku ini sangat tepat waktu dan pada momen yang sangat strategis, yaitu pada saat dunia internasional sedang mengalami masa paceklik narasi dan inspirasi mengenai corak keislaman yang damai, demokratis, dan berkeadaban. Bahkan, hingga tingkat tertentu, wacana keislaman di kancah regional dan global justru didominasi oleh diskursus kekerasan, ekstremisme, dan sektarianisme yang dilakukan oleh sejumlah kelompok yang mengatasnamakan Islam. Sebut saja fenomena ISIS di Timur Tengah dan 'cabangnya' di seantero penjuru dunia yang telah menelan korban kemanusiaan begitu banyak. Di tengah kegersangan wacana keislaman yang damai, demokratis, dan berkeadaban inilah kiprah-kiprah kemanusiaan yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama perlu mendapat apresiasi yang lebih kuat dan luas terutama di kancah komunitas internasional.

Karena alasan itulah maka saya menyambut positif langkah yang dilakukan oleh tim peneliti dari PSKP UGM yang telah melakukan riset mendalam tentang peranan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam pembangunan perdamaian dan demokrasi

di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Hasil dari riset tersebut yang sekarang menjelma menjadi buku yang berada di tangan pembaca. Saya mengapresiasi setinggi-tingginya ikhtiar yang dilakukan oleh tim peneliti PSKP UGM yang berhasil menggali dan kemudian menarasikan salah satu mutiara bangsa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia: Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Kita semua tentu patut bersyukur bahwa bangsa Indonesia telah berhasil melampui sejumlah fase kritis dalam perjalanan kebangsaan dan kenegaraannya. Antara lain mampu melintasi fase kritis Transisi Demokrasi yang dimulai sejak Gerakan Reformasi pada tahun 1998 hingga saat ini proses demokrasi Indonesia telah memasuki fase yang sering disebut oleh para pakar sebagai Konsolidasi Demokrasi. Saat ini Indonesia bahkan dikenal sebagai negara demokrasi dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

Tentu saja proses Transisi Demokrasi maupun Konsolidasi Demokrasi tersebut tidak mungkin bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan kuat dan luas dari Masyarakat Madani, khususnya yang berbasis keagamaan Islam di Indonesia. Seperti ditunjukkan dalam buku ini, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebagai pilar Masyarakat Madani memiliki peran dan kontribusi yang signifikan dalam mengawal proses transisi dan konsolidasi demokrasi yang damai tersebut. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama merupakan 'Dwi Tunggal' organisasi Islam terbesar di Indonesia berdiri di garis terdepan dalam mendorong proses reformasi dan mengawal cita-cita demokrasi hingga saat ini dan ke depan.

Dalam pandangan UGM, kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia itu telah berkontribusi secara aktif dan positif terhadap pembangunan perdamaian dan demokrasi di Indonesia. Kontribusi keduanya dalam bidang pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, ekonomi, kebencanaan, hingga ikhtiar resolusi konflik dan bina damai telah secara nyata dirasakan tidak hanya oleh masyarakat Indonesia namun juga oleh masyarakat di berbagai belahan di dunia. Spektrum kontribusi mereka telah melintasi batas-batas suku, budaya, agama, dan negara.

Universitas Gadjah Mada sebagai universitas nasional, universitas perjuangan, universitas Pancasila, universitas kerakyatan, dan universitas pusat kebudayaan tentu senantiasa berkomitmen untuk turut serta merawat dan mengembangkan nilai-nilai perdamaian dan demokrasi dalam masyarakat Indonesia dan dunia. Oleh karena itu, buku ini sangat gayut dengan komitmen UGM. Semoga dengan ini kita dapat mempromosikan peranan Islam Indonesia dalam pembangunan perdamaian dan demokrasi di kancah nasional, regional, dan internasional sekaligus mengangkat Islam Indonesia sebagai salah satu 'model' Islam yang selaras dengan nilai-nilai demokrasi dan perdamaian di kancah internasional

Akhir kata, saya sangat mengapresiasi penerbitan buku ini dan sangat merekomendasikan seluruh anak bangsa untuk ikut membacanya. Semoga buku ini dapat menjadi salah satu sumbangsih dan 'prasasti' UGM bagi perdamaian dan demokrasi di Indonesia dan di dunia.

Yogyakarta, 10 Januari 2019
Rektor Universitas Gadjah Mada

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

Endorsement

Di tengah-tengah padang sahara kekerasan, ekstremisme, sektarianisme dan kekacauan yang sedang melanda dunia Islam, kehadiran Islam Indonesia yang direpresentasikan oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mampu menjadi oase dan kiblat baru bagi masa depan Islam di dunia. Peran kedua ormas Islam terbesar di dunia ini sangat penting diwartakan agar umat Islam tidak terus menerus berada di buritan peradaban. Buku ini secara apik menarasikan peran keduanya dalam bingkai perdamaian, kemanusiaan, dan demokrasi.

- **Prof Dr Ahmad Syafii Maarif**, Ketua Umum PP Muhammadiyah 2000-2005, Pendiri Maarif Institute for Culture and Humanity

Indonesia punya dua karunia sejarah yang tak dimiliki bangsa mana pun lainnya. Pertama, para Bapak Bangsa memancangkan cita-cita peradaban mulia yang dirumuskan dengan sempurna dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, Indonesia punya aktor-aktor gerakan madani yang sungguh ikhlas berkomitmen pada cita-cita peradaban mulia itu dan tak kenal lelah merengkuh segenap warga Bangsa untuk memperjuangkannya, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Di tengah kemelut yang makin tak menentu hari-hari ini, dua hal itulah yang paling dibutuhkan Dunia. Dunia perlu berkaca pada Indonesia, pada Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, yang dinarasikan dengan cantik di buku ini.

- **KH Yahya Cholil Staquf,** Katib Aam Syuriah PBNU 2015-2020, Co-Founder *Bayt ar Rahmah*, Winston-Salem, Amerika Serikat

Buku ini berangkat dari tesis yang sangat penting dan tepat waktu: bahwa salah satu aktor strategis dalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia adalah organisasi masyarakat sipil berbasis keagamaan Islam di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Sudah lama kedua "*religious social-welfare organizations*" –yang notabene, adalah organisasi sosial Muslim yang terbesar di dunia– diakui dan dihargai sebagai aktor Muslim yang memegang peranan sentral di dalam pembentukan daya sosialiasi keyakinan kultural bahwa nilai-nilai Islam sama sekali tidak bertentangan dengan demokrasi. Namun, walaupun fakta ini diketahui secara umum sejak dasawarsa 1980-an dan 1990-an, peranan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di dalam proses konsolidasi demokrasi pada era Reformasi/pasca-Orde Baru belum diteliti secara sistematis.

Namun, berdasarkan penelitian yang terperinci dan paling *up to date, Dua Menyemai Damai* berhasil memberikan pencerahan tentang peranan *crucial* yang dipegang kedua organisasi ini dalam pembentukan dan pelestarian sebuah budaya politik demokratis di Indonesia. Para penulis menunjukkan dengan meyakinkan aktivitas warga dan lembaga Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam proses perdamaian pada awal era Reformasi, dan dalam pembelaan hak warga kaum minoritas, baik yang non-Muslim maupun yang Muslim. Para penulis juga memperlihatkan berbagai upaya ragam aktor Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam upaya bina damai, baik di kancah regional maupun internasional. Penulis sekaligus menunjukkan betapa besar peranan kedua organisasi ini di dalam upaya meng-*counter* agenda gerakan transnasional dan ekstremis yang menolak demokrasi dan kewargaan multi-etnis dan multi-agamis berdasarkan Pancasila. Lewat uraian yang sedemikian komprehensif dan penting, penulis berhasil membuktikan sebuah kenyataan dasar dari demokrasi di Indonesia: bahwa Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama adalah pilar utama dari sebuah Islam berkeadaban yang menjamin dan melestarikan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Bahkan, lewat aktivitas secemerlang ini, Muhammadiyah dan Nahdlatul

Ulama telah memberikan sebuah pelajaran penting untuk seluruh dunia tentang kompatibilitas Islam dan demokrasi di dunia moderen ini.

- **Prof Robert W Hefner**, former Director Institute on Culture, Religion, and World Affairs (CURA), Boston University, Amerika Serikat

Indonesia bukan saja negara terbesar di dunia Islam tetapi juga negara tersukses—dalam berbagai bidang. Transisi demokrasi yang berlangsung dua dekade di Indonesia disertai transformasi sosial dan ekonomi yang cukup ekstensif. Dalam perubahan ini Islam dan Masyarakat Sipil Muslim berperan amat penting. Sumbangan unik buku ini ialah membongkar dan dan menjelaskan secara mendetail kontribusi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam bina damai dan mengokohkan budaya demokrasi. Budaya Islam Indonesia yang moderat dan progresif memang penting, tetapi hanya bisa menjadi kekuatan transformasional jika digerakkan lewat masyarakat madani. Dalam hal ini, kedua ormas Islam yang tidak ada tandingan di seluruh dunia Islam ini memberi pelbagai sumbangan berharga pada setiap tingkat. Sayangnya, seperti juga peremehan terhadap demokrasi Indonesia sendiri, sumbangan ini sering diremehkan dengan memberi perhatian yang berlebihan pada kelemahan institusional yang manusiawi dan mengabaikan kontribusi substantif dan berkelanjutan yang diberikan. Padahal narasi-narasi tersebut perlu difahami lebih baik oleh mereka yang peduli terhadap reformasi.

- **Prof Greg Barton**, Chair in Global Islamic Politics, Deakin University, Australia

Islam Indonesia adalah Islam *wasathiyah*, Islam jalan tengah yang inklusif, akomodatif, toleran dan damai. Muhammadiyah dan NU adalah lokomotif Islam Indonesia *wasathiyah*; keduanya tidak hanya merupakan *jam'iyah* dakwah dan pendidikan, tapi *Islamic-based civil society* yang menjadi *bridging and mediating force between state and society*. Dengan begitu Muhammadiyah dan NU berperan

instrumental dalam pembangunan *civic culture* dan *civility* yang memungkinkan tumbuhnya budaya politik damai dan demokrasi. Negara-negara Muslim lain beserta umat Islam masing-masing patut belajar dari Islam Indonesia *wasathiyah* dengan Muhammadiyah dan NU sebagai tulang punggungnya untuk membangun religio-politik yang damai dan berkeadaban.

- **Prof Azyumardi Azra**, CBE, UIN Jakarta dan anggota AIPI

Ringkasan Eksekutif

Buku ini bertolak dari pertanyaan kecil mengenai apa dan bagaimana peran Muhammadiyah dan NU dalam pembangunan perdamaian dan demokrasi di kancah nasional, regional, dan internasional? Pertanyaan ini sangat relevan di tengah konflik kekerasan yang berkecamuk dan merebaknya ekstremisme serta sektarianisme di dunia Islam. Acap kali Islam di Indonesia dipandang mampu menampilkan diri sebagai 'model' keislaman yang selaras dengan demokrasi, perdamaian, dan kemanusiaan. Setelah keluar dari otoritarianisme rezim 'orde baru' Suharto, Indonesia tampil secara meyakinkan dan cemerlang sebagai negara demokratis dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Salah satu aktor utama di balik kesuksesan demokratisasi Indonesia ini adalah kekuatan organisasi berbasis keagamaan Islam, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Peranan keduanya sebagai pilar 'Islam sipil' berhasil membangun fondasi yang kokoh bagi proses demokratisasi di Indonesia pasca-reformasi 1998. Bahkan, kedua organisasi massa Islam terkemuka ini semakin aktif berkontribusi pada bidang perdamaian dan demokrasi di aras regional dan internasional.

Capaian Islam Indonesia dalam membangun dan mengukuhkan perdamaian dan demokrasi di negara kepulauan tersebut, tentu, masih jauh dari sempurna. Sejumlah persoalan dan tantangan yang cukup berat masih menghadang perjalanan Islam Indonesia kontemporer. Namun demikian, kontribusi dan peran positif Muhammadiyah dan NU dalam perdamaian dan demokrasi di negara terbesar di Asia Tenggara tersebut tetap patut diapresiasi, khususnya di panggung pergaulan internasional. Untuk tujuan

itulah buku ini diterbitkan dengan mewartakan narasi-narasi keislaman yang demokratis dan damai—baik di aras lokal, nasional, regional hingga internasional—dari 'Dwi Tunggal' organisasi kemasyarakatan keagamaan terbesar di dunia ini.

Metode

Argumen-argumen dalam buku ini dibangun melalui hasil riset pustaka dan riset lapangan selama kurang lebih tiga bulan (Oktober-Desember 2018). Proses riset pustaka telah dimulai sejak bulan Oktober 2018 dengan mengumpulkan data-data sekunder yang terkait dengan peran Muhammadiyah dan NU dalam perdamaian dan demokrasi. Data sekunder ini juga didapat melalui penelusuran di berbagai media baik media luring maupun media daring. Selanjutnya, proses riset lapangan dimulai pada bulan November 2018 dengan mengkombinasikan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*). Riset lapangan berupa wawancara mendalam dilakukan di Yogyakarta, Jakarta, Surakarta, Surabaya, dan Magelang. Sedangkan diskusi kelompok terarah diselenggarakan tiga kali dan berlangsung di Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM. Diskusi kelompok terarah melibatkan total 17 narasumber yang terdiri dari akademisi, praktisi, dan aktivis yang *concern* dengan peran perdamaian dan demokrasi yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan NU. Sedangkan, wawancara mendalam dilakukan terhadap 27 informan yang mayoritas merupakan tokoh dan pegiat Muhammadiyah dan NU.

Temuan dan argumen

Ada tiga argumen yang hendak disampaikan dalam buku ini berdasarkan temuan yang didapatkan dalam riset yang dikerjakan. *Pertama*, proses transisi menuju demokrasi yang terjadi di Indonesia hanya bisa berjalan berkat dukungan yang kuat dan luas dari komponen-komponen masyarakat sipil, terutama sekali oleh

Muhammadiyah dan NU sebagai dua organisasi massa Islam terbesar di Indonesia. Terlepas dari tingginya dinamika internal dan kompleksitas yang melingkupi dua ormas ini, Muhammadiyah dan NU merupakan aktor penting dan strategis yang berada di garda terdepan dalam proses transisi politik dramatis yang penuh turbulensi itu. Peranan Muhammadiyah dan NU ini sangat penting kaitannya dalam memastikan jalannya transisi demokrasi yang damai dan berkeadaban, mengingat di banyak negara sering kali transisi politik dari otoritarianisme menuju demokrasi diwarnai dengan konflik kolektif, perang saudara, hingga kekerasan sektarian berkepanjangan. Kontribusi besar Muhammadiyah dan NU pada era transisi demokrasi terlihat dari kiprah pucuk pimpinan kedua ormas ini, yakni Prof Dr Amien Rais dan KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, sebagai dua tokoh terkemuka reformasi Indonesia. Keduanya bahkan sempat menduduki dua jabatan tertinggi di Indonesia: Amien Rais sebagai Ketua MPR-RI dan Gus Dur sebagai Presiden RI.

Kedua, Muhammadiyah dan NU baik melalui kekuatan struktural dari pusat hingga ranting maupun sayap-sayap kultural yang dimilikinya telah dan terus memainkan peran penting dalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Peran positif sebagai konsolidator demokrasi ini terutama sekali terlihat dalam upaya-upaya Muhammadiyah dan NU dalam membangun 'perdamaian positif' (*positive peace*) melalui berbagai kiprahnya di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, filantropi, kebencanaan, dan dakwah sosial kemasyarakatan. Muhammadiyah menunjukkan kontribusi yang luar biasa dalam upaya-upaya menghadirkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, antara lain melalui aktivisme filantropis dan pelayanan sosial di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan belakangan kebencanaan. Sementara itu, NU nampak menonjol dalam kontribusi kulturalnya dalam mempromosikan dan mengarusutamakan ajaran Islam yang penuh dengan kedamaian dan toleransi, juga dalam upayanya membendung arus ekstremisme dan intoleransi keagamaan yang belakangan merebak.

Ketiga, Muhammadiyah dan NU juga turut aktif berkiprah dalam proses pembangunan perdamaian di aras nasional, regional, dan internasional. Meskipun upaya bina damai di aras regional dan internasional tersebut belum menampakkan dampak yang masif dan gemilang, namun peran aktif kedua organisasi masa Islam tersebut dalam proses perdamaian mampu menjadi 'antidote' dari wajah Islam di panggung internasional, di mana sejumlah tokoh dan gerakan Islam menjadi aktor konflik dan kekerasan yang menonjol, seperti yang terlihat di kawasan Timur Tengah dan Asia Tengah,. Di kancah regional dan internasional, Muhammadiyah berkiprah aktif dengan program filantropi dan bantuan kemanusiaan yang diwujudkan dalam pendirian rumah sakit dan sekolah di Rakhine State, Myanmar dan Palestina, penyediaan ratusan beasiswa penuh untuk komunitas Mindanao di Filipina dan Pattani di Thailand Selatan, serta pemberdayaan ekonomi dan pendidikan di kalangan Bangsa Moro Filipina. Sementara itu, NU memiliki komitmen yang tinggi dalam ikthiar mencari resolusi konflik dan bina damai di sejumlah zona konflik internasional. Misalnya, dalam konflik sektarian di Afghanistan, NU mengirim delegasi-delegasi ulama Indonesia dan mengundang serta mamfasilitasi berbagai pihak yang berperang untuk berdialog dan mencari solusi bersama. Sedangkan dalam konflik berdarah yang berkepanjangan antara Palestina dan Israel, NU mencoba meretas jalan damai yang nyaris mustahil melalui misi perdamaian yang dirintis oleh Gus Dur dan dilanjutkan belakangan oleh KH Yahya Cholil Staquf.

Rekomendasi

Buku ini diakhiri dengan sejumlah rekomendasi kebijakan yang tidak hanya ditujukan bagi para pembuat kebijakan (*policy makers*) dan kedua organisasi masa Islam ini yaitu Muhammadiyah dan NU, namun juga untuk lingkungan strategis dan dunia internasional. Rekomendasi ini tidak hanya terkait dengan promosi pembangunan perdamaian dan demokrasi, namun juga memuat masukan-masukan strategis tentang peran-peran kebangsaan dan

lintas-bangsa yang diharapkan semakin diperankan oleh Muhammadiyah dan NU. Sejumlah rekomendasi utama itu antara lain:

1) Pentingnya membangun hubungan Muhammadiyah dengan NU yang lebih kuat, dekat, sinergis, dan kolaboratif. Kedua pimpinan kedua ormas dan elit-elitnya perlu memiliki kedisiplinan dan komitmen yang tinggi untuk ‘menjaga jarak’ dan menahan diri dari keterlibatan langsung dalam percaturan politik elektoral yang cenderung memecah belah. Muhammadiyah dan NU perlu fokus dan konsisten sebagai ‘jangkar etika’ dan ‘kompas moral’ di tengah panggung sosial, ekonomi, dan politik nasional.

2) Aliansi Islam Indonesia yang digawangi oleh Muhammadiyah-NU perlu memperluas kekuatan dan dukungannya di antara organisasi-organisasi massa Islam lainnya yang memiliki komitmen kuat pada Islam yang damai, demokratis, dan berkeadaban di Indonesia. Poros strategis Muhammadiyah-NU ini perlu diperluas dan diperkuat untuk mempromosikan ‘model’ Islam Indonesia ke pentas regional dan internasional.

3) Muhammadiyah dan NU diharapkan selalu bersifat dan bertindak dewasa, mengayomi, dan melindungi hak dan eksistensi kelompok-kelompok umat beragama lain serta kelompok minoritas di Indonesia. Muhammadiyah dan NU diharapkan bukan menjadi dinding pembatas dan penghalang, namun sebaliknya menjadi ‘jembatan’ dan penyambung umat Islam Indonesia dengan komunitas agama lain dalam konteks bermasyarakat, beragama, berbangsa, dan bernegara.

4) Perlu dikembangkan relasi yang kokoh, saling menghargai, dan saling mendukung antara pemerintah di satu sisi dan Muhammadiyah-NU di sisi yang lain. Relasi yang harmonis sekaligus mutualistik ini harus dibangun di atas dasar

kepentingan kebangsaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan bukan didadasarkan atas proses dan kepentingan politik elektoral yang bersifat jangka pendek.

5) Muhammadiyah dan NU perlu lebih banyak terlibat dan bertindak pro-aktif dalam isu-isu keagamaan, perdamaian, dan demokrasi di tingkat regional dan internasional. Peran kedua ormas dalam bidang keagamaan, perdamaian, dan demokrasi perlu diperluas dan diperdalam spektrum pengaruhnya dengan bersinergi dengan organisasi Islam dan lembaga internasional lainnya. (*)

Executive Summary

This book examines the simple questions: what are and how should the role of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama (NU) progress in peacebuilding and democracy at national, regional, and international levels? These questions are exceptionally relevant amidst widespread violent conflict, extremism, and sectarianism in the Muslim world. It is widely recognised that Islam in Indonesia represents a 'model' of Islam that is compatible with democracy, peace, and humanity. After more than three decades since Suharto's authoritarian regime, Indonesia had undergone a political transition from authoritarianism to democracy.. Indonesia is currently the world's largest Muslim democratic nation. One of the key factors behind the success story of Indonesia's democratisation are Islamic-based mass organisations, namely Muhammadiyah and NU. Their role as the pillars of 'Civil Islam' succeeded in establishing a robust foundation for the democratisation process in post-*Reformasi* Indonesia. Furthermore, these two prominent Islamic organisations in Indonesia increasingly contribute to peacebuilding and democracy at the regional and international level.

The achievements of Indonesian Islam in cultivating and nurturing peace and democracy in this archipelagic country, of course, are still far from perfect. Islam in Indonesia still faces several significant problems and challenges. Nevertheless, the contribution of both Muhammadiyah and NU in peacebuilding and democracy in the largest Southeast Asian country should be acknowledged, particularly in repspect to their roles on the international stage. This book aims to demonstrate the peaceful and

democratic narratives of Islam —at the national, regional, and international levels— from perspective of the world's two largest Islamic organisations.

Method

The arguments in this book are built on the results of library research and fieldwork research conducted over three months (October-December 2018). The library academic research commenced in October 2018 with the collection of secondary data related to the roles of Muhammadiyah and NU in peacebuilding and democracy. This secondary data was collected from online and offline media sources. Meanwhile, fieldwork research was conducted in November 2018 by conjoining in-depth interviews and focus group discussions. In-depth interviews were conducted in Jakarta, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, and Magelang and focus group discussions were organised three times at the Centre for Security and Peace Studies (CSPS) UGM, Yogyakarta. Seventeen participants attended these three rounds of focus group discussions comprising academics, practitioners, and activists who are involved in the role of Muhammadiyah and NU in peacebuilding and democracy. Twenty-seven sources were interviewed, the majority of which were activists and figures within the Muhammadiyah and NU organisations.

Findings and Arguments

There are three proposed main arguments in this book. ***First***, a democratic transition in Indonesia was only made possible by the strong and broad support from civil society groups, especially by Muhammadiyah and NU as the biggest Islamic mass organisations in Indonesia. Apart from the internal dynamic and complexity within both organisations, Muhammadiyah and NU were important and strategic actors at the forefront of dramatic political tran-

sition during a turbulent period . Since political transitions from authoritarianism to democracy in many countries in the world are frequently marked by civil war, communal violence and prolonged conflict, the roles of Muhammadiyah and NU in ensuring a peaceful and civilised democratic transition are extremely noteworthy. Their central role in Indonesia's democratic transition was largely driven by the leaders of these two Islamic organisations at the time, Prof Amien Rais and KH Abdurrahman Wahid, two of the most prominent *Reformasi* figures in Indonesia. Both had the highest position in Indonesia at the time: Amien Rais as Chair of the MPR-RI and Abdurrahman Wahid as President of the Republic of Indonesia.

Second, Muhammadiyah and NU, through their inherent extensive 'structural forces' from the central board in Jakarta to branches board across the archipelago as well as through their 'cultural wings', have played a critical and significant role in the democratic consolidation process in Indonesia. Acting as the consolidators of democracy in Indonesia, Muhammadiyah and NU are renowned for their role in building 'positive peace' through various activities at the grassroots level such as in education, healthcare provision, economic empowerment, philanthropy, disaster responses, and *dakwah* (Islamic proselytism.) activities. Muhammadiyah has demonstrated a remarkable contribution in the provision of social welfare and the promotion of social justice for the community, particularly in education, healthcare, economic, and disaster responses. And, NU promotes and mainstreams a peaceful and tolerant brand of Islam throughout Indonesia. Their cadres have been progressive in countering and combatting the growing religious intolerance and violent extremism narratives, both online and offline. In addition, both organisations have promoted a particular brand of Islam that is compatible with progress, democracy, and peace. Muhammadiyah has promoted '*Islam Berkemajuan*' (Islam with progress) since its 47th national congress in Makassar

2015, while NU has campaigned *'Islam Nusantara'* (Islam in the Archipelago) since its 33rd national congress in Jombang 2015. Both *'Islam Berkemajuan'* and *'Islam Nusantara'* have the potential to become a template of peaceful, tolerant, and democratic Islam that can be emulated by Muslims across the world.

Third, Muhammadiyah and NU have also contributed to peacebuilding processes at the national, regional, and international level. Although their peacebuilding efforts have yet to bring significant and brilliant impact/outcome, their active role in peacebuilding could be regarded as the 'antidote' to the face of Islam at the international level where some Islamic figures and movements have been involved in violent conflict in the Middle East, Central and South Asia. At the regional and international level, Muhammadiyah has delivered its philanthropy and humanitarian assistance in conflict zones including building hospitals in Myanmar's Rakhine State and Palestine; providing full scholarships for local communities in Mindanao in the Philippines and Pattani in southern Thailand; and initiating microeconomic development and education among the Bangsamoro in the Philippines. NU also has a strong commitment to conflict resolution and peacebuilding in several international conflict zones. For instance, in the sectarian conflict in Afghanistan, NU sent delegations of Islamic scholars (Ulema) and invited and facilitated dialogue and discussion between conflicting parties in an effort to formulate solutions to peace and cooperation. The NU's involvement in conflict zones has also been apparent in the long and complex Palestine and Israel conflict. NU attempted to pioneer a peace pathway through a peace mission initiated by Abdurrahman Wahid and later continued by KH Yahya Cholil Staquf.

Recommendations

This book proposes a number of recommendations not merely for policy-makers and the two organization of members of Muhammadiyah and NU but also for their strategic partners include

international communities. Not only related with the promotion of peacebuilding and democracy, it also covers some strategic ideas concerning the expected roles played by Muhammadiyah and NU both in national and international realm. These recommendations include:

1) Building a stronger, closer, and more collaborative relationship between Muhammadiyah and NU. Leaders of both organisations should be committed to distancing themselves from direct involvement in electoral politics that tends to be divisive. Muhammadiyah and NU should instead focus on being a 'moral forces' on the national social, political, and economic stage.
2) Broadening Indonesia'sIslamic alliances initiated by Muhammadiyah and NU by harnessing support from other Islamic organisations that have a strong commitment to peaceful and democratic Islam in Indonesia. A strategic axis of Muhammadiyah and NU needs to be expanded and strengthened to promote a 'model' of Indonesian Islam on the regional and international stage.
3) Encouraging Muhammadiyah and NU to become the defender and protector of the existence and the rights of other religious communities especially minority groups in Indonesia. Muhammadiyah and NU should act as a 'bridge' between Islamic communities and other religious minorities in Indonesia.
4) Developing strong, mutually respectful, and mutually supportive relationships between the government and Muhammadiyah and NU. This mutually constructive and harmonious relationship should be built upon broad national and public interest, not short-term political agendas.
5) Muhammadiyah and NU should be more active and engaged in issues of religion, peace, and democracy at both the regional and international levels. The roles of both orga-

nisations should be broadened in this respect, and their influence must be deepened through collaboration and cooperation with Islamic organisations across the world as well as other international institutions. (*)

Daftar Isi

BAB

1 Pendahuluan

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Bingkai Demokrasi dan Perdamaian

Pasca Reformasi 1998, Indonesia menjadi fenomena penting dan mengkilap dalam lanskap demokrasi global: sebagai negara demokratis dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Mengakhiri rezim Orde Baru di bawah Jenderal Soeharto yang berkuasa sejak 1966, gerakan Reformasi telah membuka babak baru perjalanan bangsa Indonesia dengan merombak sistem politik yang semula bercorak otoritarian menuju sistem politik demokratis. Salah satu hasilnya adalah terbukanya ruang kebebasan dan kesempatan politik untuk mendirikan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan partai politik, di samping adanya jaminan kebebasan pers dan berekspresi. Lebih jauh dari itu, proses demokratisasi yang berjalan terjal tersebut bahkan berhasil mewujudkan transformasi radikal perpolitikan Indonesia dari yang semula bercorak sangat sentralistis menjadi desentralistis. Capaian dramatis yang dilakukan oleh sebuah negara kepulauan besar berpenduduk sekitar 266 juta dengan luas wilayah sebesar 1,9 mil persegi yang terletak pada posisi geopolitik strategis di Asia Tenggara dan diapit oleh Samudera Hindia dan Samudera Atlantik tersebut membuat Indonesia acap

disebut sebagai "*a democratization miracle*" (Kunkler dan Stepan, 2013).

Transformasi sosial politik tersebut terbukti mampu mengerek posisi dan ranking Indonesia dalam peta bumi demokrasi dan kebebasan politik, seperti dipaparkan dalam *The Global State of Democracy Indices* yang dipublikasikan oleh Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). Dalam laporan tersebut disebutkan, ada perbedaan yang kontras terkait kondisi kebebasan sipil (*civil liberties)* di Indonesia antara masa sebelum Reformasi dan masa sesudahnya. Pada masa Orde Baru, selama lebih dari dua dekade Indonesia hanya mampu mencapai skor 3 (dari angka tertinggi 10) dalam hal kebebasan sipil. Seiring berlangsungnya proses demokratisasi pasca Reformasi, angka tersebut terus menanjak, perlahan namun meyakinkan, hingga mencapai angka 7. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa proses transisi dan konsolidasi demokrasi telah mampu mengubah secara signifikan atmosfer perpolitikan Indonesia, terutama dalam hal jaminan kebebasan sipil.

Gambar 1.1
Civil Liberties: 1975-2015
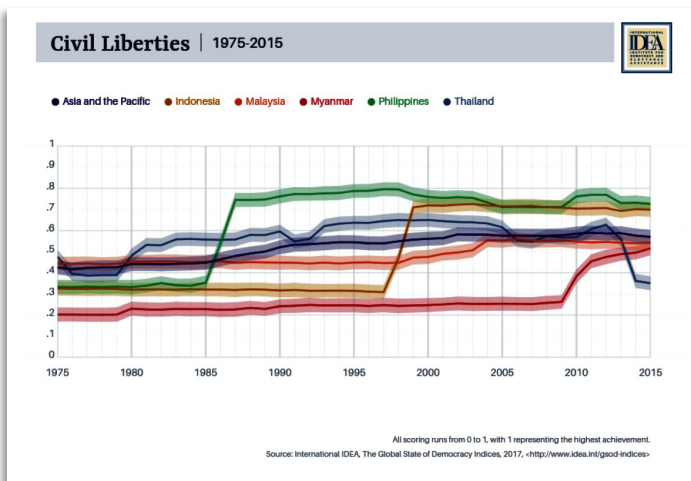
Sumber: Institute for Democracy and Electoral Assistance

Jika dibandingkan dengan beberapa negara Asia Tenggara lainnya, posisi Indonesia sebelum Reformasi tampak lebih buruk dari Malaysia, Thailand, Filipina, meski sedikit lebih baik dari Myanmar. Namun, pada pasca Reformasi, kondisi itu secara drastis berubah, mengungguli hampir semua negara Asia Tenggara kecuali Filipina yang berada dalam posisi relatif sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia relatif berhasil dalam menjalani fase transisi demokrasi dan mengarah pada proses konsolidasi demokrasi.

Tak jauh berbeda dengan kebebasan sipil, posisi Indonesia dalam bidang pemerintahan representatif (*representative government)* juga terpuruk di masa Orde Baru. Dibandingkan beberapa negara otoriter lain di Asia Tenggara, kondisi pemerintahan representatif di Indonesia pada masa itu kurang lebih sama, atau tidak lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa guna merawat dan mempertahankan *status quo,* rezim otoriter Orde Baru yang militeristik tidak hanya menyekap ruang kebebasan sipil, tetapi juga mengendalikan lembaga-lembaga kenegaraan.

Gambar 1.2
Representative Government: 1975-2015
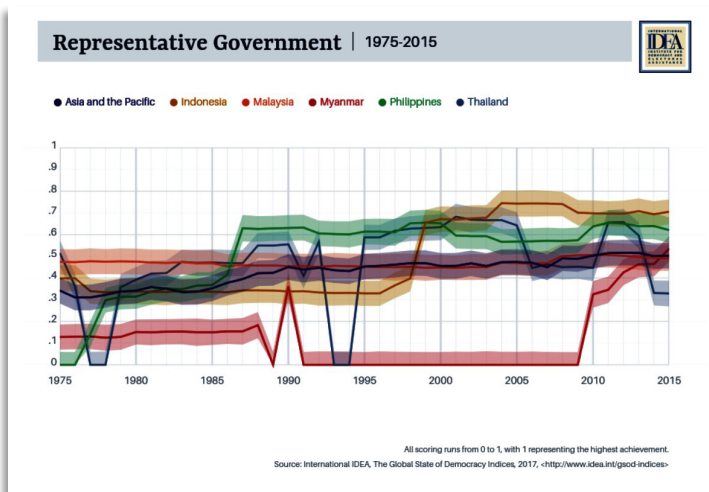
Sumber: Institute for Democracy and Electoral Assistance

Ranking Indonesia dalam bidang pemerintahan representatif berangsur membaik sejak era Reformasi bergulir. Seperti terlihat pada Gambar 1.2, posisi Indonesia berada di angka 3 (tiga) pada akhir 1990-an dan bergerak menuju angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) di masa awal Reformasi. Bahkan dari 2004 hingga 2015 Indonesia berhasil melampaui sejumlah negara Asia Tenggara dalam bidang *representative government*. Kenyataan tersebut menegaskan bahwa dibandingkan dengan negara lain, Indonesia relatif sukses dalam melintasi fase transisi demokrasi dan bahkan mengarah kepada proses konsolidasi demokrasi.

Gambar 1.3
Freedom in the World 2018
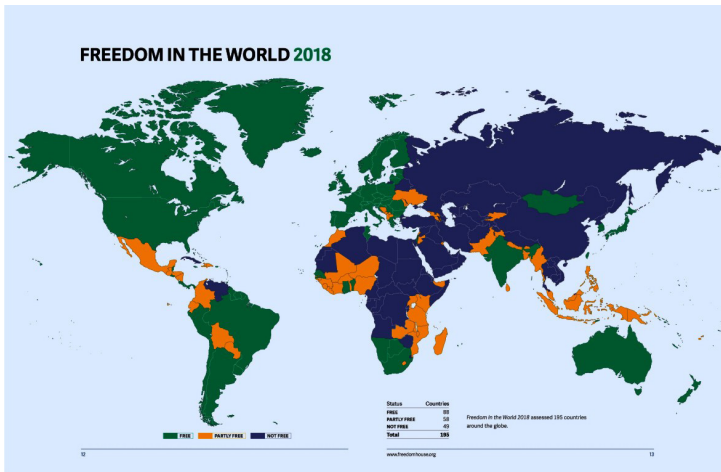
Sumber: Freedom House Report, 2018.

Laporan yang dibuat oleh *Freedom House*, sebuah lembaga kajian mengenai kondisi kebebasan di seluruh dunia yang berbasis di Amerika Serikat, juga memperkuat argument tersebut. Menurut *Freedom House*, sepanjang periode 2006-2013 Indonesia menempati status tertinggi dalam indeks kebebasan yang rutin dirilis lembaga tersebut, yakni memperoleh status *free*, alias negara yang berada dalam kategori *bebas*. Sayangnya, pada periode 2013-2018, indeks kebebasan di Indonesia justru menurun men-

jadi *partly free*, alias *separuh bebas*. Faktor apa yang membuat kemerosotan tersebut? Beralihnya status itu utamanya disebabkan oleh pengesahan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (*FreedomHouse*, 2014) yang dapat mengancam kebebasan sipil (*civil liberty*). UU tersebut kemudian mengalami perubahan dengan Perppu No.2 Tahun 2017 yang selanjutnya disahkan menjadi UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat. Dua komponen ini menjadi alasan utama mengapa posisi Indonesia berada di *partly free*.

Namun demikian posisi Indonesia masih jauh lebih baik bila dibandingkan dengan negara mayoritas muslim lainnya, seperti Mesir dan Turki yang berada pada kategori *not free*. Sementara di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berkedudukan relatif sama dengan Malaysia, Singapura, Filipina –*partly free*– dan berada di atas Myanmar dan Thailand yang *not free*. Dengan kata lain, jika disandingkan dengan negara-negara mayoritas muslim dan negara lain di kawasan Asia Tenggara, Indonesia masih unggul.

Gambar 1.4
2018 Global Peace Index
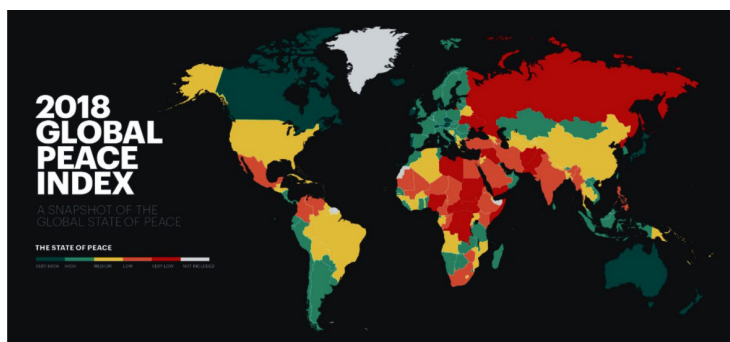
Sumber: Institute for Economics and Peace, 2018.

Sementara itu jika dilihat dari aspek perdamaian dan keamanan, Indonesia berada pada level perdamaian yang tinggi. Terlihat dalam Global Peace Index pada Gambar 1.4, Indonesia menempati warna hijau, yang menunjukkan level *high*. Bila mengacu pada

warna-warna itu, Indonesia secara umum lebih damai atau lebih aman dari sejumlah negara Muslim yang membentang di sepanjang Asia Barat, Asia Selatan dan Afrika Utara –yang sebagian besar berwarna merah, merah muda, dan kuning. Pun di Asia Tenggara, Indonesia hanya berada di bawah Singapura dan Malaysia –dua negara yang masih menerapkan sistem politik otoriter. Dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia mengungguli negara-negara itu.

Dengan demikian, jika ditilik dari indeks kebebasan yang disusun oleh *Freedom House*, indeks demokrasi dari IDEA, dan indeks perdamaian global dari Institute for Economics and Peace, Indonesia di era Reformasi mampu menempati posisi teratas dari sejumlah negara-negara mayoritas muslim dan juga beberapa negara di Asia Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai negara Muslim terbesar di dunia, Indonesia cukup berhasil menjalani masa transisi demokrasi yang terjal dan kemudian relatif mampu melakukan konsolidasi demokrasi selama 20 tahun terakhir. Dari catatan tersebut, Indonesia mampu menampilkan diri sebagai model *par excellence* bagi masyarakat dunia ihwal bagaimana Islam dan demokrasi mampu berjalan seiring dan berjalin berkelindan untuk menciptakan kondisi damai berkeadaban (*democratic and civilized peace*).

Reputasi Indonesia sebagai negara Muslim yang demokratis telah banyak diakui oleh berbagai kalangan dan acap disebut sebagai '*the smiling face of Islam in the world*'. Sejumlah sarjana terkemuka bahkan menyebut 'Islam Indonesia' bersama 'Islam Anatolia' di Turki sebagai masa depan Islam di dunia yang akan menghadirkan perdamaian, inklusif, toleran, ramah terhadap keragaman, berwawasan ke depan dan sejalan dengan nilai-nilai demokrasi (Barton, 2005). Di tengah konflik dan kekacauan yang melanda dunia, terutama di negara-negara muslim di Timur Tengah, Islam di Indonesia menampilkan wajah lain yang mewartakan demokrasi dan perdamaian.

Di tengah keringnya inspirasi keagamaan Islam yang demokratis dan damai seperti itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Rodham Clinton dalam suatu kesempatan menyatakan: "*If you want to know whether Islam, democracy, modernity and women's rights can coexist, go to Indonesia*" (Landler, 2009). Dalam kesempatan lain, Perdana Menteri Inggris David Cameron memuji Indonesia sebagai percontohan bagi proyek demokratisasi dan perdamaian di negara-negara Muslim: "*Indonesia is a model for Muslims*" (Abbas, 2012).

Tabel 1.1
Indeks Perdamaian Global
Negara-Negara Asia Tenggara

No.	Negara	Peringkat
1	Indonesia	55
2	Malaysia	25
3	Thailand	113
4	Filipina	137
5	Myanmar	122
6	Singapura	8
7	Vietnam	60
8	Kamboja	96
9	Timor-Leste	59

Sumber: diolah dari
Global Peace Index, Institute for Economics and Peace, 2018.

Terlepas dari banyak kelemahan dan kekurangan yang ada seperti yang ditemukan oleh sejumlah pengamat dan sarjana, Indonesia masih dilihat sebagai contoh negara yang relatif sukses menjalani transisi demokrasi dan mampu mengkonsolidasikan sistem demokrasi dengan cukup baik. Pertanyaan selanjutnya: siapa aktor penting yang berperan dalam proses demokratisasi dan pembangunan perdamaian di Indonesia?

A. Tesis: Islam, Demokratisasi dan Perdamaian di Indonesia

Tulisan ini berangkat dari tesis bahwa salah satu aktor penting dan strategis dalam proses transisi menuju demokrasi dan konsolidasi demokrasi di Indonesia adalah organisasi dan gerakan masyarakat sipil berbasis keagamaan Islam di Indonesia. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, tentu bukan mengada-ada untuk menyatakan dan menonjolkan peran yang dimainkan oleh dua organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam terbesar di Indonesia, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Tanpa dukungan dari dua pilar utama ormas sipil terkemuka yang terinspirasi oleh Islam ini, proses transisi dan konsolidasi demokrasi sangat sulit terjadi, atau bahkan mungkin mustahil dilakukan. 'Dwi-tunggal' ormas Islam terbesar di Indonesia ini, bahkan di dunia – yang oleh Robert W. Hefner (2000) disebut sebagai pilar utama 'Islam Berkeadaban' (*Civil Islam*) di Indonesia – berhasil mengawal proses transisi demokrasi yang damai di penghujung abad ke-20.

Keberadaan Muhammadiyah dan NU amatlah signifikan dalam memberi ragam warna artikulasi Islam bercorak moderat di Indonesia. Ragam warna artikulasi itu merupakan pengejawantahan dari interpretasi atas sumber Islam dan spirit perjuangan yang berbeda. Muhammadiyah mengemban spirit modernisme – yang dipengaruhi oleh gagasan pembaharuan (*tajdid*) Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho, sementara NU mengokohkan spirit tradisionalisme yang mengacu pada tradisi yang dibangun para ulama salaf. Spirit modernisme ala Muhammadiyah lebih mengedepankan rasionalitas dan pembaharuan dan bahkan pemurnian dengan kecenderungan kuat untuk menampik eksistensi yang bercorak mistis atau berbalut mitos (Madjid, 2008a, 2008b). Sebaliknya, tradisionalisme ala NU bersifat adaptif dan apresiatif terhadap kekayaan tradisi dan budaya lokal dengan kecenderungan kuat untuk merawat dan mempertahankan pola-pola lampau melalui sinkretisme keagamaan (Noer, 1996; Ricklefs, 2012).

Hasil interpretasi dan spirit perjuangan dua ormas ini menjadi acuan bagi, tertutama, para anggotanya dalam praktik keagamaan dan berbagai dimensi kehidupan lainnya. Praktik-praktik keagamaan tersebut pada gilirannya akan membentuk sekaligus mengukuhkan kultur (mencakup cara berpikir, rasa-merasa dan berperilaku) dan identitas ke-Muhammadiyah-an dan ke-NU-an. Memang, kadang kala perbedaan kultur Muhammadiyah dan NU memercikkan ketegangan dan konflik horisontal serta eksklusi sosial. Hal tersebut terlihat mencolok terutama pada fase awal pembentukan kedua organisasi tersebut dimana gerakan 'pemurnian keagamaan' ala Muhammadiyah secara aktif dan demonstratif mengkampanyekan 'perang' melawan *takhayul, bid'ah dan churafat,* acap disingkat sebagai TBC, yang dipersepsikan bak penyakit menular yang berbahaya dan mematikan. Padahal, seperti nanti akan diulas pada Bab 3 buku ini, para ulama dan tokoh NU merupakan pembela serta pengamal hal-hal yang dianggap *takhayul, bid'ah* dan *churafat*, dan karenanya hal-hal tersebut kemudian dianggap dan diyakini sebagai tradisi keagamaan yang sah dan otentik di kalangan NU.

Relasi Muhammadiyah dan NU tidak selalu diametral, atau tidak selalu berada pada posisi yang saling berhadapan dan berseberangan. Dua ormas ini pernah berada dalam satu atap MIAI dan Masyumi, dan bahkan satu suara dalam memperjuangkan Islam sebagai dasar negara di saat berlangsungnya persidangan BPUPKI. Lebih lanjut, di era Reformasi, Muhammadiyah dan NU secara diskursus berjalan sealun-seirama dalam meng-*counter* agenda gerakan transnasional Islam atau ekstremisme yang perlahan-lahan turut mewarnai wajah baru Islam di Indonesia. Dalam konteks fenomena yang disebut terakhir itu, dua ormas ini mengidentifkasi diri sebagai "Islam moderat" dan arus utama (Ricklefs, 2012). Kondisi-kondisi di atas menggambarkan bahwa relasi Muhammadiyah dan NU bersifat sangat dinamis, berselang-seling antara konflik, kompetisi, kontestasi, dan kooperasi. Pasang-surutnya juga turut dipengaruhi dinamika politik lokal, nasional dan global.

Uraian lebih lanjut tentang dua ormas Islam tersebut akan dipaparkan pada Bab 2 dan Bab 3. Di dalamnya akan dijelaskan perihal bagaimana Muhammadiyah dan NU memainkan peran krusial dalam proses transisi dan konsolidasi demokrasi di Indonesia, sekaligus membangun dan mengukuhkan perdamaian di negara kepulauan ini.

Pertanyaan berikutnya: apakah makna demokrasi yang digunakan dalam tulisan ini dan bagaimana pertautannya dengan perdamaian? Pada bagian berikutnya akan diuraikan kerangka konseptual dan teoretis yang digunakan untuk menganalisis kaitan antara konsep demokrasi dan demokratisasi dengan pembangunan perdamaian dengan memfokuskan perhatian pada dua ormas Islam besar di Indonesia, Muhammadiyah dan NU.

B. Bingkai Teoretis: Demokrasi dan Perdamaian

Buku ini berangkat dari tesis bahwa "demokrasi menyebabkan perdamaian" (*democracy causes peace*). Seperti disampaikan oleh Reiter (2017), terdapat banyak bukti yang cukup meyakinkan untuk mendukung pernyataan kausalitas bahwa demokrasi menyebabkan terjadinya perdamaian. Oleh karenanya perdamaian demokratis (*democratic peace*) dapat diperlakukan laksana sebuah 'hukum'.

Di sisi lain, meski juga terdapat bukti-bukti pendukung untuk menyatakan tesis sebaliknya, namun Reiter menyatakan bahwa bukti-bukti tersebut tidak cukup kuat untuk menjadikannya hukum baru yang berbunyi sebaliknya, bahwa perdamaian menyebabkan demokrasi (*peace causes democracy*). Dieter memberi dukungan pendapat ini, dengan menyatakan bahwa budaya politik demokratis akan mengutamakan piranti nir-kekerasan dalam resolusi konflik, seperti penggunaan taktik yang dibenarkan secara hukum dan pengadilan, proses pemilihan, dan kebebasan berpendapat dalam menyelesaikan perselisihan. Sebaliknya, budaya politik nir-demokrasi cenderung mengutamakan penggunaan kekerasan seba-

gaimana politik domestik di bawah rezim kediktatoran biasanya memiliki karakter penggunaan taktik sejenis represi, revolusi elit dan massa, serta brutalitas (Reiter 2017: 4).

Tesis besar bahwa "demokrasi menyebabkan demokrasi" kiranya cukup sahih untuk dijadikan 'dalil', namun demikian tesis ini juga tak dapat menghindarkan diri dari catatan kritis yang cukup tebal. Seperti ditemukan dalam riset dari Jack Snyder (2000: 29), dinyatakan bahwa "konsolidasi demokrasi menyelamatkan konflik etnis, namun periode terjal dalam fase awal transisi demokrasi justru meningkatkannya ..." Dalam kesimpulan atas hasil studi mengenai kaitan antara transisi demokrasi dan terjadinya konflik di sejumlah negara di Eropa, Afrika dan Asia sebagaimana, dimuat bukunya terkenal *From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict,* Snyder berdalil demikian: "terjadinya konflik nasional dan etnis kemungkinannya lebih besar pada fase awal demokratisasi dibandingkan dengan fase transisi menuju konsolidasi demokrasi." (2000: 310).

Tabel 1.2
Kematian dan Insiden Kekerasan Kolektif di Indonesia (1990-2003)

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Deaths	10	25	7	25	14	23	51	1,059	1,442	3,546	2,585	1,615	245	111
Incidents	30	46	62	60	63	79	123	244	432	523	722	523	406	295
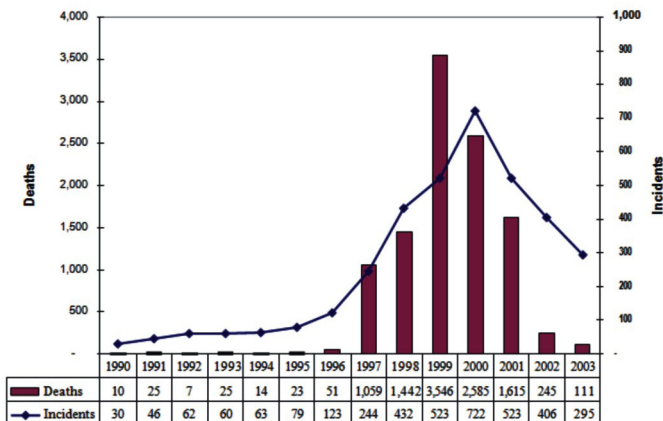
Sumber:
Ashutosh Varshney, Rizal Panggabean, Mohammad Zulfan Tadjoeddin, "Patterns of Collective Violence in Indonesia (1990-2003)", UNSFIR *Working Paper* - 04/03, hal. 24.

Tesis Snyder terbukti benar dalam kasus Indonesia. Riset terhadap berbagai media massa lokal dan nasional di Indonesia bertajuk "Patterns of collective violence in Indonesia, 1990-2003" yang dilakukan oleh Varshney, Panggabean dan Tadjoeddin (2004) menemukan bukti kuat bahwa insiden kekerasan dan jumlah korban meningkat secara signifikan pada periode menjelang dan awal fase transisi demokrasi di Indonesia (1997-2000), namun mengalami penurunan ketika demokrasi mulai terkonsolidasi (2001-2002). Fenomena itu terlihat kasat mata, seperti tampak pada Tabel 1.2.

Dengan kata lain, tesis "demokrasi menyebabkan perdamaian" hanya akan berlaku ketika demokrasi telah terkonsolidasi. Namun tesis itu menjadi tidak sahih pada fase awal transisi demokrasi lantaran yang terjadi justru sebaliknya, angka konflik dan kekerasan justru kolektif meningkat.

Ihwal demokrasi dan demokratisasi, sekurang-kurangnya kita perlu membedakan dua tahapan dalam pergumulan dan pergulatan-nya, yaitu transisi demokrasi dan konsolidasi demokrasi. Ada aneka ragam definisi tentang 'transisi demokrasi'. Dengan merujuk pada studi-studi tentang transisi demokrasi yang dilakukan oleh O'Donnel dan Schmitter, Ethier (1990: 4) menyatakan bahwa tran-sisi demokrasi sebagai "sebuah interval di antara rezim otoriter dan rezim demokratis." Di dalam interval tersebut, terdapat berbagai macam proses yang kompleks. Oleh O'Donnell dan Schmitter's, proses yang kompleks itu bisa diringkas sebagai berikut: "Proses transisi dibatasi, di satu sisi, oleh terjadinya proses penghancuran rezim otoriter dan, di sisi lain, oleh pemasangan sejumlah bentuk instalasi demokrasi, kembalinya bentuk-bentuk tertentu dari ke-kuasaan otoritarian, maupun kemunculan alternatif yang revolu-sioner." (1986, IV, 6)

Dengan kata lain, tidak ada jalur tunggal dalam pengalaman transisi demokrasi di berbagai negara. Dengan merangkum ber-bagai studi, Ethier (1990: 5-6) menyatakan bahwa ada sejumlah jalur dalam proses transisi demokrasi. *Pertama*, transisi yang didorong oleh faktor-faktor internal. *Kedua*, transisi yang merupakan aki-

bat dari intervensi kekerasan oleh sejumlah kekuatan sosial-politik internal. *Ketiga*, evolusi atau transisi berkesinambungan yang diinisiasi dari dalam rezim politik. Merujuk pada studi-studi sebelumnya, Ethier menyimpulkan bahwa transisi demokrasi yang terjadi belakangan di Eropa Selatan, Amerika Latin and Asia Tenggara cocok dengan kategori yang terakhir.

Pengalaman sejumlah negara memberi pelajaran penting bahwa "salah satu konsep kunci untuk menjelaskan transisi demokrasi adalah ketidakpastian (*uncertainties*)", seperti pernah ditausiyahkan oleh O'Donnell dan Schmitter (1986, IV: 1). Periode transisi berarti pergi meninggalkan kekuasaan otoriter menuju 'hal lain' yang tanpa kepastian seperti apa wujud, bentuk dan bahkan arahnya. 'Hal lain' itu bisa berwujud sebagai demokrasi terkonsolidasi atau, sebaliknya, restorasi dari rezim otoriter baru, atau bahkan mungkin lebih buruk dari itu.

Pengalaman Pakistan, Mesir dan Thailand menunjukkan bahwa transisi bisa berujung pada "kembalinya otoritarianisme" dengan militer mengambil alih kekuasaan dari tangan rezim yang terpilih secara demokratis. Sementara pengalaman Filipina, Afghanistan dan Irak (sekadar sebagai contoh) mengabarkan cerita yang lain, bahwa transisi demokrasi bisa berujung pada 'fase transisi yang berkepanjangan' dan bahkan mengarah pada institusionalisasi proses transisi. Artinya, demokrasi tidak kunjung terkonsolidasi meski juga tidak bergerak mundur ke arah berjayanya kembali otoritarianisme. Tentu, ada juga transisi demokrasi yang mengarah pada konsolidasi demokrasi. Indonesia bisa disebut sebagai salah satu kisah sukses tersebut dengan sejumlah tantangan yang menghadangnya (Liddle dan Mujani 2002).

Berikutnya, apakah yang dimaksud dengan konsolidasi demokrasi dan apa pula indikator-indikatornya? Gagasan utama dari tulisan ini mengacu pada kerangka berpikir Larry Diamond (1999) dalam bukunya yang berpengaruh luas, *Developing Democracy, Towards Consolidation*. Merujuk pada Dankwart Rustow, Diamond

(1999: 65) menyatakan bahwa konsolidasi demokrasi mencakup hal yang lazim disebut sebagai "*habituation*", yang di dalamnya terjadi internalisasi norma, prosedur, harapan-harapan terhadap demokrasi sehingga para aktor secara teratur dan instingtif mengacu pada aturan permainan tertulis dan tidak tertulis, bahkan dalam situasi konflik dan kompetisi yang intens sekalipun. Dengan kata lain, di dalamnya berlangsung keterlibatan yang kuat dan teratur kepada demokrasi dan prosedur-prosedurnya –baik pada aras elit maupun pada aras massa– yang mengokohkan elemen-elemen konsolidasi dan, sebagai akibatnya, mengurangi ketidakpastian dalam demokrasi. Lantaran mencakup bagian-bagian yang luas dari kehidupan sosial, maka konsolidasi demokrasi hanya dapat dipahami secara utuh sebagai perkara *budaya politik*.

Lebih lanjut Diamond (1999: 69) mengusulkan rangkaian indikator konsolidasi demokrasi dalam sebuah tabel matriks yang memiliki tiga kolom dan dua baris. Tiga kolom untuk mewadahi tiga aras kehidupan politik, yakni elit, organisasi, massa; sedangkan dua baris dari tabel tersebut merepresentasikan dua dimensi sosial, yakni norma/kepercayaan dan perilaku. Menurutnya, konsolidasi demokrasi akan terjadi ketika terdapat komitmen normatif yang substansial terhadap demokrasi dan terdapat kepatuhan perilaku terhadap aturan dan batas-batas yang ada di dalam enam kolom dalam tabel matriks tersebut.

Mengacu pada kerangka konsepsi Diamond mengenai konsolidasi demokrasi tersebut, tampak bahwa Muhammadiyah dan NU sekaligus menempati tiga aras aktor: elite, organisasi dan massa. Pucuk pimpinan Muhammadiyah dan NU, baik di tingkat nasional maupun lokal, merupakan elit di kancahnya masing-masing. Selain itu, Muhammadiyah dan NU sekaligus juga menempati dua aras aktor di bawahnya: sebagai organisasi dan sebagai kumpulan massa. Oleh karena itu, ketika memahami konsolidasi demokrasi sebagai perkara budaya politik, maka Muhammadiyah dan NU akan memainkan peran kunci strategis melalui aneka program dan aktivitas yang dijalankannya, baik di kancah pendidikan, dakwah,

kesehatan, pelayanan sosial dan sebagainya. Bahkan, seperti nanti akan dilihat dan temukan dalam riset ini, Muhammadiyah dan NU juga memainkan peran yang tidak kecil di bidang resolusi konflik dan bina damai.

Ihwal perdamaian, tulisan ini merujuk pada pendapat Johann Galtung (1964, 1969, 1996) yang membedakan dua ragam konsep perdamaian, yakni 'perdamaian negatif' (*negative peace*) dan 'perdamaian positif' (*positive peace*). Perdamaian negatif berarti keadaan ketika tidak terjadi kekerasan dan perang, "*the absence of violence, absence of war*". Dalam hal ini, makna kekerasan bukan hanya mencakup kekerasan langsung (*direct violence*) namun juga kekerasan personal (*personal violence*). Sedangkan perdamaian positif bermakna "*the absence of indirect or structural violence*", yang bisa berwujud kemiskinan, diskriminasi, keadilan sosial dan sebagainya (Grewal 2003). Dengan kata lain, perdamaian positif menunjuk pada situasi atau kondisi yang didalamnya tidak ada penghalang struktural dan kultural bagi setiap individu untuk merealisasikan potensi kemanusiaannya.

Perdamaian negatif bisa terwujud baik di bawah rezim otoriter maupun di bawah sistem politik demokratis. Di bawah rezim otoriter, situasi dan kondisi tiadanya kekerasan personal maupun kolektif dimungkinkan karena pendekatan represif dan otoriter yang memang menghambat dan mencegah terjadinya aneka kekerasan tersebut. Hal serupa bisa terjadi pula di bawah rezim demokratis. Namun sebaliknya, perdamaian positif hanya bisa terjadi di bawah rezim dan sistem politik yang demokratis. Sebab, di bawah rezim dan sistem politik otoriter, niscaya terjadi penghalangan terhadap aktualisasi potensi individu, baik dalam bentuk represi maupun berupa hambatan struktural yang menghambat. Kondisi seperti ini disebut oleh Ali-Fauzi (2018) sebagai 'perdamaian semu' atau *negative peace*.

Perdamaian positif hanya dimungkinkan terwujud melalui penyemaian cara-cara damai dalam berbagai aspek kehidupan, seperti praktik-praktik demokratisasi, pembangunan yang partisipatif dan

inklusif, dan pendidikan yang berorientasi pada kemajemukan. Pendek kata, terwujudnya perdamaian positif mensyaratkan cara-cara yang damai pula, atau dalam istilah Galtung dikatakan "*peace by peaceful means*", ungkapan yang kemudian menjadi judul bukunya (terbit pada 1996) yang amat terkenal itu.

Proses perdamaian sering kali dibedakan ke dalam tiga pendekatan yang masing-masing memiliki karakter dan proses yang berbeda-beda. Ketiganya adalah *peacemaking, peacekeeping* dan *peacebuilding* (Galtung 1976, 1996; Reychler 2010). *Peacemaking* lazim dipahami sebagai proses penghentian kekerasan atau perang. *Peacekeeping* dimaknai sebagai proses memelihara agar konflik atau perang tidak terjadi (lagi). Sedangkan *peacebuilding* atau bina damai mencakup makna yang lebih luas, yakni semua upaya yang dilakukan baik sebelum terjadinya kekerasan maupun seusai berakhirnya perang dan kekerasan.

Reychler (2010: 4) berpendapat, secara akademik istilah "*peacebuilding*" memiliki pengertian yang lebih luas, yakni mencakup semua aktivitas (sebelum, ketika, ataupun sesudah terjadinya konflik kekerasan) baik untuk mencegah, mengakhiri, ataupun mentransformasikan konflik dan kekerasan, serta menciptakan persyaratan yang perlu demi terbangunnya perdamaian yang langgeng (*sustainable peace*). Dengan kata lain, menurut Reychler, *peacemaking* dan *peacekeeping* merupakan bagian dari *peacebuilding*. Dalam buku ini, peran dan kontribusi Muhammadiyah dan NU sebagai dua ormas Islam terbesar di Indonesia utamanya akan dibahas dalam konteks bina damai ini. Bahasan akan mencakup beragam aktivitas yang menjadi tumpuan gerak organisasi kedua ormas tersebut, seperti bidang pendidikan dan dakwah, kesehatan dan filantropi, hingga dalam resolusi konflik dan perdamaian.

Lalu, bagaimanakah *nexus* antara demokrasi dan perdamaian dalam konteks pengalaman Indonesia? Studi ini melihat transisi demokrasi yang terjadi di Indonesia sejak Reformasi sebagai jalan pembuka bagi terwujudnya pembangunan perdamaian positif. Di era Orde Baru pada rentang yang cukup panjang memang terjadi

'perdamaian negatif' dimana kekerasan kolektif tidak muncul ke permukaan karena pendekatan rezim yang represif dan otoriter. Berbagai aspirasi dan hasrat politik warga terpendam di bawah permukaan karena berada di bawah ancaman represi kekuasan politik rezim otoriter.

Proses reformasi dan transisi menuju demokrasi yang berlangsung sejak 1998, meski diawali dengan melonjaknya insiden dan jumlah korban kekerasan pada fase awal transisi (1997-2000), memberi fondasi yang kokoh bagi pembangunan perdamaian positif di Indonesia. Seperti yang terlihat dalam data pola kekerasan di Indonesia, angka insiden kekerasan dan jumlah korban yang ditimbulkan menurun drastis sejak 2001, yakni sejak demokrasi semakin berhasil dikonsolidasikan. Selain itu, proses demokrasi yang semakin matang membuat Indonesia mampu membangun pola resolusi konflik yang semakin bagus, seperti yang terlihat dalam tercapainya perjanjian damai untuk konflik komunal agama yang berkepanjangan di Poso, Sulawesi Tengah (melalui Perjanjian Damai Malino I tahun 2001) dan di Maluku (melalui Perjanjian Damai Malino II tahun 2002), serta penghentian perang berkepanjangan bercorak separatism/*self-determinism* di Aceh melalui Perjanjian Damai di Helsinki tahun 2005.[1]

Indonesia pasca Orde Baru juga berhasil menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) sejak 1999 sebagaimana mekanisme pergantian kekuasaan secara relatif damai, adil dan demokratis. Bahkan menyusul berlakunya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Keseimbangan Fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diberlakukan 'otonomi daerah' dengan sejumlah pendelegasian otoritas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, termasuk membuat peraturan daerah (Perda) dan melakukan pemilihan kepala daerah

1 Konflik dan perang berdarah berkepanjangan di Timor Leste juga diakhiri melalui Referendum yang dimungkinkan dilakukan oleh keputusan Pejabat Presiden BJ. Habibie yang menggantikan Presiden Soeharto pada tahun 1998. Referendum yang dilakukan pada 30 Agustus 1999 menghasilkan keputusan Timor Leste sebagai negara merdeka memang hingga masih menjadi kontroversi di sejumlah kalangan (ultra) nasionalis yang menganggap peristiwa tersebut sebagai 'kesalahan dan kehilangan' dalam kehidupan bernegara.

secara langsung. Kebijakan desentralisasi tersebut terkadang disebut "*big bang*" alias dentuman besar lantaran adanya perubahan radikal, yakni dengan memberikan otoritas cukup besar kepada pemerintahan daerah tingkat dua, bukan kepada pemerintah provinsi, di berbagai bidang sehingga sistem politik tidak lagi tersentralisasi pada pemerintah pusat seperti yang terjadi sebelumnya (Nordholt and van Klinken 2007, Pratikno dalam Erb dan Sulistyanto 2005).

Desentralisasi dan 'otonomi daerah' bukanlah obat atas segala penyakit bagi gejala otoritarianisme dan korupsi. Sinyalemen ini didukung oleh sejumlah riset yang menemukan indikasi tentang masih bertahannya oligarki kekuatan lama (Robison dan Hadiz 2004, van Klinken 2007, Simanjuntak 2010). Namun demikian proses demokratisasi yang terjadi hingga aras lokal ternyata telah menjadi mekanisme ampuh untuk melakukan resolusi konflik di tingkat lokal, yang berdampak pada menurunnya tingkat konflik sosial di masyarakat (Pirskalla & Sacks, 2017).

Demokrasi pada dasarnya merupakan mekanisme untuk mengelola konflik (Mouffe, 2005). Konflik terjadi karena perbedaan cara pandang dan kepentingan terhadap suatu isu atau persoalan, seperti masalah sumber daya dan kekuasaan. Perbedaan itu memerlukan wadah dan mekanisme demokrasi yang memungkinkan konflik bisa dikelola dan diselesaikan dengan cara-cara damai, seperti dialog, negosiasi, kontestasi, dan lainnya. Dengan kata lain, proses rekonsiliasi atau bina damai hanya bisa berlangsung dengan baik jika hal itu dilakukan di dalam sistem yang demokratis.

Ali-Fauzi (2018) menyatakan bahwa dalam proses perdamaian, negara bersikap inklusif dalam memfasilitasi semua kelompok dan semua pihak untuk berekspresi dan memberi ruang kebebasan bagi tumbuhnya pelbagai inisiatif. Hal terpentingnya adalah bahwa proses perdamaian mensyaratkan adanya relasi yang saling mendukung dan saling menyokong antara negara dan *civil society*. Negara yang demokratis dan *peaceful* selalu memiliki dinamika yang kuat dari berbagai *civil society*.

Dalam pandangan Leslie Fox (sebagaimana dikutip oleh Goran Hyden 1998), *civil society* merupakan aktor dan kekuatan politik non-negara yang berpartisipasi dalam menentukan dan atau mempengaruhi keputusan politik yang menguntungkan hajat hidup orang banyak. Aktor non-negara tersebut biasanya mengacu pada individu-individu yang saling terintegrasi dan tergabung dalam asosiasi *voluntary* yang terhubung secara bersama untuk mengawal proses demokratitasi di suatu negara.

Cendekiawan Muslim terkemuka Nurcholish Madjid (1999) menyatakan bahwa *civil society* atau masyarakat madani[2] tak hanya sebagai semacam asosiasi yang memosisikan diri sebagai perisai antara negara dan warga negara, serta sekaligus prasyarat bagi hadirnya demokrasi, namun juga memuat kualitas *civility* (keadaban) yang tanpanya lingkungan sosial akan mudah terfragmentasi sehingga bisa memicu munculnya pelbagai friksi. Senada dengan Madjid, Hefner (1998, 2000) juga berargumen bahwa *democratic civility* merupakan prasyarat penting bagi proses demokratisasi. Dalam esai teoretis yang memukau tentang konsep *democratic civility* dan implementasinya dalam menganalisis proses demokratisasi di Indonesia, Hefner berargumen bahwa tanpa *democratic civility* –yang mengandung anasir-anasir seperti nilai to-

2 Istilah masyarakat madani kali pertama diperkenalkan oleh Anwar Ibrahim pada Festival Istiqlal 1995. Di sini agama sebagai sumber peradaban merupakan sebuah proses dan masyarakat kota adalah hasilnya. Dengan demikian masyarakat madani mengandung tiga hal, yakni agama, peradaban dan perkotaan. Lihat M. Dawam Rahardjo, *Masyarakat Madani: Agama, Kelas menengah dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: LP3ES, 1999), hal. 145-146. Selain itu, *civil society* yang dipahami sebagai masyarakat madani, oleh Nurcholish Madjid, dipertautkan dengan kondisi historis umat Islam pada masa Nabi Muhammad, yaitu terwujudnya konsensus antaragama dan suku untuk menjalani kehidupan bersama. Hal ini tertuang dalam Piagam Madinah. Masyarakat madani yang dibangun oleh Nabi Muhammad bercirikan egaliter, terbuka, partisipatif, penghargaan pada orang berdasarkan prestasi bukan prestise dan keturunan serta turut serta dalam menentukan pemimpin melalui mekanisme yang demokratis. Lihat Budhy Munawar-Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid: Jilid 3*, (Bandung: Mizan, 2005), hal. 1888. Madjid menjelaskan, “Menghadapi masa depan bangsa kita, khazanah wawasan kenegaraan dan kemasyarakatan Madinah baik sekali kita jadikan rujukan dan teladan. Hal ini dirasakan amat mendesak bagi masyarakat kita, mengingat akhir-akhir ini banyak tersingkap perilaku yang menunjukkan tiadanya kesejatian dan ketulusan dalam mewujudkan nilai-nilai Madani (keadaban politik).” Lihat Nurcholish Madjid, “Menuju Masyarakat Madani”, dalam *Jurnal Ulumul Quran 2*, Vol. VII, 1996, hal. 51-52.

leransi, *open minded*, inklusif, egaliter dan lain-lain– demokratisasi mustahil untuk dilakukan.

Konsepsi *civil society* dan *democratic civility* dapat dijadikan sebagai bingkai untuk membaca proses transisi dan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Peran organisasi massa Islam sebagai bagian dari *civil society* sangat penting dalam kedua fase tersebut. Dalam buku menarik berjudul *Islam dan Civil Society: Pandangan Muslim Indonesia*, Hendro Prasetyo dan Ali Munhanif (2002) menyuguhkan perbedaan tilikan antara kalangan modernis dan tradisionalis terhadap *civil society* ketika dihubungkan dengan negara. Riset mereka pada fase awal Reformasi menemukan bahwa kalangan Muslim modernis cenderung berpandangan positif terhadap negara. Negara bukan dilihat sebagai lawan, namun sebagai mitra yang bisa diajak berkolaborasi dalam membangun masyarakat madani. Sementara kalangan Muslim tradisionalis melihat negara sebagai entitas yang harus dilawan oleh masyarakat sipil, karena negara cenderung bersikap regimentasi dan melakukan penindasan terhadap rakyat.

Tentu saja, konstruksi dan pemaknaan tersebut bukan sepenuhnya statis dan permanen. Saat ini, misalnya, sayap kalangan Muslim tradisionalis, khususnya yang diwakili oleh politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) justru tampak mesra bertemali dengan pemerintahan Joko Widodo sehingga negara niscaya bukan lagi dianggap sebagai lawan. Hal ini berarti relasi *civil society* dengan negara bersifat dinamis dan amat ditentukan oleh dinamika penilaian dan respons mereka terhadap negara. Jika relasinya bisa saling menguntungkan, maka negara diposisikan sebagai mitra. Sebaliknya, bila relasinya bercorak kontrol dan dominasi, maka negara bisa ditempatkan sebagai lawan yang perlu ditampik dan dilawan.

Jadi, secara sederhana pola relasi dan konfigurasi hubungan *civil society* dengan negara bisa diformulasikan sebagai berikut. *Pertama*, *civil society* berdiri sebagai perisai warga negara dari perlakuan negara yang dominatif, otoritarian, dan represif. *Kedua*, jika negara tidak dominan, *civil society* hadir sebagai mitra negara

dalam menyediakan pelayanan untuk keperluan dan kebutuhan masyarakat. *Ketiga*, bila keinginan dan kebutuhan masyarakat secara umum telah diakomodasikan secara baik oleh negara, maka *civil society* berperan sebagai komplementer pada hal-hal yang tidak dilakukan dan tidak disediakan secara memadai oleh negara. Muhammadiyah dan NU memainkan ketiga pola relasi tersebut pada berbagai periode kepolitikan yang berbeda; pola pertama banyak dilakukan pada masa Orde Baru di bawah rezim otoriter, sedangkan dua pola terakhir banyak dilakukan baik pada masa Orde Baru hingga masa Reformasi.

Merujuk pada konseptualisasi tentang *civil society* dan *democratic civility* yang diungkapkan oleh Fox, Madjid dan Hefner di atas, Muhammadiyah dan NU secara jelas telah mengambil posisi utama sebagai wadah publik dalam memperjuangan kemaslahatan bersama (*bonnum commune*). Dua ormas Islam besar tersebut, dengan anasir-anasir yang ada di antara keduanya, secara umum memiliki mekanisme dan sistem organisasi yang relatif mapan, mandiri dan produktif. Ini tampak dari banyaknya amal usaha –meliputi pendidikan, ekonomi, sosial, dan kesehatan– yang mampu menggerakkan, bukan hanya roda organisasi, tetapi juga lingkungan masyarakat luas. Ketimbang mencari keuntungan material, keberadaan berbagai amal usaha tersebut lebih diamanatkan untuk melayani dan membantu kebutuhan masyarakat (umat).

Lalu bagaimanakah Muhammadiyah dan NU berperan dan berkontribusi dalam membangun demokrasi dan perdamaian di tanah air dan bahkan di kancah regional dan internasional?

C. Tiga Argumen

Ada tiga argumen yang hendak disampaikan dalam buku ini. *Pertama*, proses transisi menuju demokrasi yang terjadi di Indonesia bisa berjalan dengan baik karena adanya dukungan yang kuat dan luas dari masyarakat sipil, khususnya oleh Muhammadiyah dan NU sebagai dua organisasi Islam terbesar di Indone-

sia. Dengan segala dinamika internal dan kompleksitas yang melingkunginya, Muhammadiyah dan NU merupakan aktor penting dan strategis dalam proses transisi politik dramatis tersebut. *Kedua*, Muhammadiyah dan NU melalui berbagai sayap kekuatan struktural dan kultural yang dimilikinya memainkan peran penting dalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia, khususnya melalui upaya membangun 'perdamaian positif' (*positive peace*) dalam kiprah-kiprahnya di berbagai lembaga pendidikan, dakwah, sosial dan ekonomi. *Ketiga*, Muhammadiyah dan NU juga berkiprah dalam upaya bina damai di aras nasional, regional dan internasional. Meskipun kiprah bina damai di aras regional dan internasional tersebut belum memiliki dampak masif dan mencolok, namun keterlibatan dua organisasi Islam tersebut di dalam proses perdamaian telah menjadi antidote dari wajah dunia Islam di berbagai belahan bumi dimana umat dan tokoh Islam telah menjadi aktor konflik dan kekerasan yang menonjol, seperti yang terlihat di Asia Tengah dan Timur Tengah.

Menyandingkan dan membandingkan Muhammadiyah dan NU dalam satu lanskap analisa tentu bukannya tanpa kesulitan dan problematika. Seperti yang terjadi dalam proses penelitian ini. Kedua ormas tersebut memiliki 'budaya organisasi' dan tradisi pengelolaan kelembagaan yang berbeda. Muhammadiyah dikelola secara relatif modern dengan dukungan dokumentasi kegiatan yang cukup baik dan tertib. Sementara NU dikelola dengan pola dan cara yang lebih bercorak tradisional dan kurang didukung oleh arsip dan dokumentasi yang tertib dan teratur. Namun demikian, semua aset dan amal usaha kedua lembaga keumatan besar tersebut dimanfaatkan untuk kemashlahatan dan pelayanan umat, serta berorientasi pada kemandirian lembaga.

Menarik untuk dicatat bahwa pada periode awal pasca kemerdekaan, Muhammadiyah dan NU pernah menjadi (bagian dari) partai politik, yakni tatkala menjadi bagian dari partai politik Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) yang didirikan pada 1942, menjelang Proklamasi Kemerdekaan 1945. Menyusul konflik

dan kontestasi internal, NU kemudian keluar dan bertransformasi menjadi partai politik NU. Di sisi lain, banyak tokoh juga terlibat dalam pendirian Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) ketika upaya menghidupkan kembali partai politik Masyumi dihalangi dan dilarang oleh rezim Orde Baru. Namun Muhammadiyah sebagai organisasi, melalui putusan Mukhtamar ke-38 Ujung Pandang tahun 1971, menyatakan netralitasnya terhadap partai politik. Setidaknya terdapat tiga putusan penting dalam mukhtamar itu. *Pertama*, Muhammadiyah menentukan posisi dan bersikap tidak memihak pada kepentingan politik praktis. *Kedua*, menggugurkan putusan Muktamar Ponorogo yang mendukung Parmusi. *Ketiga*, sebagai bagian dari keterbukaan dan kemandirian politik, Muhammadiyah memberikan kebebasan politik bagi anggotanya dalam menggunakan hak politiknya (Jurdi, 2010). Sementara NU, setelah sempat menjadi partai politik pada Pemilu 1955 dan bergabung ke dalam PPP melalui "fusi partai politik" yang dipaksakan oleh rezim Orde Baru pada 1972, akhirnya melalui Kongres Situbondo 1984 memutuskan kembali ke khittah 1926, yaitu kembali ke akar NU sebagai lembaga keagamaan, pendidikan, kultural, sosial dan ekonomi (Fealy, 1996; Ricklefs, 2008).

Dalam posisi sebagai kekuatan sosio-kultural tersebut itulah Muhammadiyah dan NU memainkan peran sentral untuk merawat dan mengembangkan ke-Indonesia-an. Berbeda dengan partai politik yang cenderung berorientasi pada kepentingan politik praktis berjangka pendek dan berpusat pada jangkar syahwat kuasa, Muhammadiyah dan NU memiliki visi dan misi berjangka panjang untuk membangun umat dan bangsa dalam arti luas. Atau, meminjam istilah dari Yudi Latif (2015), Muhammadiyah dan NU merupakan jangkar etika bagi kehidupan bangsa Indonesia yang menjadi acuan dan spirit moralitas pembangunan bangsa.

Mengikuti formulasi yang dibuat oleh guru besar ilmu politik yang juga mantan Ketua Umum Muhammadiyah, Muhammad Amien Rais (1995), Muhammadiyah dan NU bisa memainkan peran Politik Adiluhung atau *high politics*. Berbeda dengan *low politics* yang mengacu pada praktik politik sebagaimana yang dilakukan

oleh partai politik atau dikenal dengan istilah politik praktis, *high politics* bermakna sebagai keterlibatan di arena politik dalam berdimensi moral-etis (Rais, 1995).

Kendati secara prinsip bersikap netral terhadap partai politik, Muhammadiyah dan NU memiliki perhatian pada proses dan dinamika politik, seperti proses legislasi di parlemen dan pengambilan kebijakan pemerintah. Prinsip netralitas itu juga bukan berarti Muhammadiyah dan NU mencegah dan melarang anggotanya terlibat dalam partai politik. Berperan dan berkiprah dalam partai politik merupakan hak pribadi yang tidak dilarang, sejauh hal itu tidak terpaut langsung dengan dimesi struktural organisasi. Karena itulah tidak heran bahwa anggota dan tokoh Muhammadiyah dan NU yang terlibat dalam politik praktis tersebar di berbagai partai politik, baik yang berasaskan agama maupun sekuler.

Meski bukannya tanpa ketegangan dan kontestasi internal yang liat, keterlibatan Muhammadiyah dan NU dalam *high politics* terlihat dari konsistensinya dalam mengawal transisi dan konsolidasi demokrasi. Kedua ormas tersebut mengambil peran dalam berbagai dimensi pembangunan demokrasi dan perdamaian, misalnya program pendidikan kemajemukan, rekonsiliasi konflik, advokasi kalangan tertindas, dan bahkan misi perdamaian regional dan global. Sikap Muhammadiyah dan NU ini juga hendak menegaskan perannya sebagai *civil society* atau masyarakat madani yang secara intens terlibat aktif dalam pembangunan demokrasi dan bina damai.

D. Konteks: Muhammadiyah dan NU di Arena Kontestasi

Peran Muhammadiyah dan NU dalam dinamika demokrasi dan bina damai perlu diletakkan dalam konteks kontemporer, antara lain dalam momentum pasang naik konservatisme di Indonesia. Dalam *Contemporary Developments in Indonesia Islam: Explaining The Concervative Turn* (2013), Bruinessen (ed.) menunjukkan pergeseran wajah Islam di Indonesia pasca Reformasi, yakni dari

Islam ramah (*smiling face*) kepada Islam marah. Pergeseran ini tampak dari berbagai insiden kekerasan, seperti meningkatnya konflik antar dan intra-agama, terorisme, dan penegakan syariat Islam. Studi-studi dari beberapa intelektual muda yang mensejajarkan sejumlah kasus tersebut menegaskan kembali menguatnya konservatisme Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) misalnya –yang sebelumnya sebagai pelayan negara– kini menjadi pelayan umat– mengeluarkan sejumlah fatwa yang mengancam kebebasan sipil, seperti fatwa haram sepilis (sekularisme, pluralisme dan liberalisme), kesesatan Ahmadiyah dan haram pornografi. Di samping itu, menguatnya tensi geopolitik Timur-Tengah berimplikasi terhadap dinamika Islam politik nasional.Hal ini terlihat dari infiltrasi gerakan Islam transnasional ke dalam Muhammadiyah, termasuk perjuangan Islam politik yang menonjol di Solo dan Sulawesi Selatan. Sementara kekuatan sayap Islam 'liberal-progresif' tidak cukup kokoh dalam membendung pasang naik kelompok ini. Dengan intensitas yang berbeda, kondisi serupa juga terjadi di internal NU, yakni mulai merasuknya pengaruh gerakan Islam transnasional yang bercorak konservatif.

Studi Carool Kersten (2015) mencoba memetakan intelektualisme muslim kontemporer dan formasi pertarungan wacana yang berkembang di Indonesia pasca Orde Baru. Kersten membuat pemetaan yang agak longgar –karena tak mau terjebak pada kategori yang esensialistis– dengan membuat dua kategori utama: kalangan protagonis dan antagonis. Kalangan protagonis terdiri dari sejumlah cendekiawan Islam yang berada dalam gugusan mazhab Ciputat dan mazhab Yogya serta dua ormas utama, Muhammadiyah dan NU. Sementara kalangan antagonis diisi oleh aktivis Islam yang ditempa oleh DDII, Masjid Salman (ITB), Masjid al-Ghifari (IPB), dan tergabung dalam Lembaga Dakwah Kampus (LDK). Gagasan keislamannya terinspirasi dari gerakan Islam transnasional yang bercorak konservatif, seperti HTI, Ikhwanul Muslimin, dan salafi.

Pada aspek pertarungan wacana, menurut Kersten, generasi intelektual baru ini belum sepenuhnya beranjak, atau masih berada

di bawah bayang-bayang Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid. Barangkali kenyataan ini dapat dilacak pada wacana yang dipertarungkan, seperti sekularisme, pluralisme, dan liberalisme; Islam, negara dan demokrasi; hukum/syariat Islam; pluralisme, HAM dan kebebasan berpikir. Kendati demikian, generasi baru ini tetap melancarkan serangan kritis, apalagi setelah bersinggungan dengan tradisi post-strukturalisme dan post-kolonial. Pertengkaran intelektual di lingkup internal kalangan protagonis pun menjadi tak terhindarkan, karena masing-masing dari mereka tumbuh-kembang dalam *school of thought* yang berbeda.

Dalam praktik toleransi, Jeremy Menchik (2016) menyuguhkan hasil risetnya perihal bagaimana pemahaman umat Islam Indonesia terhadap toleransi, khususnya mengacu pada tiga ormas Islam: Muhammadiyah, NU dan Persis. Ia menemukan bahwa pemahaman dan praktik toleransi di kalangan ketiga ormas ini melampaui konsepsi liberalisme dan sekularisme atas toleransi yang mendasarkan pada hak individu, sebagaimana yang dikembangkan John Locke dan John Rawls. Menurut Menchik pemaknaan toleransi mereka didasarkan pada hak kelompok dengan mendukung pluralisme hukum dan pemisahan urusan agama dari urusan sosial.Atas dasar itulah Menchik menamai konsepsi mereka sebagai "toleransi komunal". Pada aspek praktik, Menchik menemukan bagaimana ketiga ormas ini cenderung bersikap toleran terhadap Kristen dibandingkan terhadap Ahmadiyah.

Sementara itu Saiful Mujani (2007) dalam bukunya *Muslim Demokrat* menyoroti kontribusi Muhammadiyah dan NU sebagai *civil society* keagamaan dalam proses konsolidasi demokrasi. Dua organisasi ini bahkan turut mendorong partisipasi aktif anggotanya dalam berbagai *civil society* non-keagamaan. Dengan demikian, bila *civil society* merupakan dimensi penting bagi demokrasi, maka melalui penguatan *civil society,* Islam –berangkat dari pengalaman di Indonesia– pun menjadi kekuatan penopang bagi terwujudnya kehidupan yang demokratis.

Temuan Mujani ini memperkuat temuan dan tesis sebelumnya dari Hefner dalam *Civil Islam* yang secara telak membantah argu-

men dan klaim sejumlah ilmuwan Barat, seperti Huntington dan Lewis yang menyatakan bahwa Islam tidak kompatibel dengan demokrasi dan istilah *civil society* tidak dikenal dalam tradisi Islam. Pengalaman di Indonesia justru menunjukkan sebaliknya, bahwa nilai-nilai keislaman yang dianut oleh masyarakat Indonesia selaras dengan demokrasi. Bahkan dua ormas ini berhasil mengawal transisi demokrasi di Indonesia.

Muhammadiyah juga sudah sejak lama turut serta dalam proses pembangunan perdamaian di kancah regional dan global. Seperti diuraikan pada Bab 2, Muhammadiyah berperan aktif dalam penyelesaian konflik melalui forum-forum dialog maupun keterlibatan langsung dengan menjalankan misi perdamaian di zona-zona konflik di Asia Tenggara, seperti di Mindanao, Filipina dan Thailand Selatan. Baru-baru ini mantan Ketua Umum Muhammadiyah, Dien Syamsuddin, sukses mengorganisir *The World Peace Forum* (WPF) ke-7 di Jakarta yang dihadiri lebih dari 100 tokoh perdamaian di dunia. Acara yang diselenggarakan oleh Kantor UKP-DKAAP dan The Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC), serta the Cheng Ho Multi-Cultural and Education Trust of Malaysia itu sukses menelurkan '*Jakarta Message*' yang menyerukan pemimpin-pemimpin dunia untuk kembali ke 'jalan tengah' (*the middle path*) sebagai solusi atas kekacauan dan konflik di berbagai penjuru dunia.

Selain itu, kedua ormas Islam ini juga aktif berkontribusi dalam proses bina damai (*peacebuilding*) di kancah regional dan internasional. Seperti diuraikan dalam Bab 3, PBNU memiliki pengalaman cukup panjang dalam mengawal proses perdamaian di Afghanistan. Sejak 2011, PBNU menjalankan *second track diplomacy* dengan mengirimkan *kiai-kiai* dari berbagai pesantren sebagai juru damai guna menyatukan kabilah-kabilah yang bertikai di Afghanistan (Aziz, 2018). KH Abdurrahman Wahid, semasa menjadi Ketua Umum PBNU maupun sesudahnya, berperan aktif dalam upaya perdamaian dalam konflik Palestina-Israel, meski disambut kontroversi di tanah air. Ikhtiar tersebut belakangan

diteruskan oleh KH Yahya Cholil Staquf, kiai muda yang saat ini menjabat sebagai Katib Am Syuriah PBNU.

Menarik juga untuk mencoba ikhtiar studi komparatif, yakni dengan membandingkan Muhammadiyah dan NU dengan gerakan Islam yang lain dalam konteks global. Greg Barton (2014), misalnya, melakukan studi perbandingan antara Muhammadiyah dan NU dengan gerakan Gulen di Turki. Pada aspek pemikiran Islam, ketiga gerakan ini memiliki kesamaan dalam mempromosikan Islam moderat dan menolak ide Islamisme yang mengandaikan Islam sebagai suatu ideologi. Bagi Gulen, Islam menyuguhkan prinsip-prinsip fundamental atau nilai adiluhung yang diejawantahkan dalam suatu pemerintahan dan mengisi kekosongan kebutuhan hakiki masyarakat modern, yakni kepuasan spiritual. Dari corak warna pemikiran keIslamannya, gerakan Gulen lebih dekat dengan NU yang meneguhkan ortodoksi Islam suni dan sufisme. Sementara pada sisi manajerial organisasi, Gulen lebih dekat dan memiliki kemiripan dengan Muhammadiyah yang dikelola secara modern. Kemiripan lainnya, mereka sangat *concern* pada pelayanan publik dan filantropi –dan terutama pendidikan– sebagai medium bagi pengembangan karakter dan moralitas yang diekstraksi dari ajaran Islam. Namun aspek yang membedakan adalah, gerakan Gulen jauh lebih ekspansif dalam mengembangkan cabang ke berbagai penjuru dunia ketimbang Muhammadiyah dan NU yang kiprah global keduanya terbilang masih ‘minimalis’, dengan lebih banyak bertaut pada kegiatan warganya yang bekerja atau studi di luar negeri.

Jika dibandingkan dengan Turki, wajah Islam Indonesia yang demokratis, damai dan berkeadaban memang masih amat kurang dikenal di pentas dunia (Bruinessen, 2011, Abdullah, 2015). Oleh karena itulah buku ini hadir sebagai salah satu upaya untuk mengumpulkan narasi dan pengalaman Islam Indonesia, khususnya diwakili oleh Muhammadiyah dan NU, dalam pergumulannya membangun demokrasi dan perdamaian di negara yang memiliki kekayaan keberagamaan baik secara etnis, kultur, bahasa serta

agama bernama Indonesia. Diharapkan ikhtiar dan langkah kecil ini bermanfaat untuk turut mengangkat narasi dan pengalaman gerakan Islam di Indonesia sebagai salah satu ‘model’ Islam yang ramah terhadap demokrasi dan perdamaian, baik di kancah nasional, regional, maupun internasional.

Tulisan dalam Bab 2 dan bab 3 dalam buku ini bertolak dari pertanyaan kecil: apakah peran dan kontribusi Muhammadiyah dan NU –dua organisasi Islam terbesar di Indonesia dan bahkan dunia– dalam pembangunan demokrasi dan perdamaian, baik di tingkat lokal, nasional, regional, bahkan global? Pada Bab 4 akan dilakukan diskusi dan analisis komparatif mengenai peran dan kontribusi Muhammadiyah dan NU dalam pembangunan demokrasi dan perdamaian di Indonesia, maupun dalam aras regional serta internasional. Sebuah refleksi dan rekomendasi juga akan dirumuskan pada bab tersebut sebagai penutup dari buku sederhana ini. (*)

BAB

2 Menyemai Damai, Demokrasi dan Keadaban

Narasi Muhammadiyah, dari Lokal hingga Global

Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan aset terbesar di dunia, kontribusi Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, filantropi, dan kesehatan tidak diragukan lagi. Fokus awal yang utama dari aktivitas Muhammadiyah pada *schooling*, *feeding*, dan *healing* telah menjadi *elan vital* gerakan yang tidak lekang dimakan zaman, bahkan terus menghidupi persyarikatan melintasi usia satu abad. Kini aktivitas dan peran Muhammadiyah tidak lagi hanya pada tiga bidang itu, namun telah menyentuh di berbagai bidang, seperti resolusi konflik dan perdamaian, advokasi HAM, kebencanaan, reformasi tata kelola sumber daya alam (SDA), filantropi dengan paradigma baru, dan lain-lain. Tulisan ini berupaya menyajikan peranan Muhammadiyah di berbagai bidang tersebut dilihat dari perspektif pembangunan perdamaian dan demokrasi di level nasional, regional, hingga global.

Persyarikatan Muhammadiyah didirikan pada 18 November 1912 dengan tujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Tujuan itu diderivasikan ke dalam dua bidang garap:

(1) melaksanakan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* dan *tadjid*; dan (2) mewujudkan bentuk amal usaha, program, dan kegiatan melalui kebijakan dan penanggungjawab yang ditentukan oleh Pimpinan Muhammadiyah (Muhammadiyah, 2010). Untuk memudahkan operasionalisasi program dan tujuan, Muhammadiyah membuat lima tingkatan susunan keorganisasian. Pada tingkat paling bawah terdapat *Ranting*, yakni kesatuan anggota dalam suatu tempat atau kawasan tertentu. Pada tingkat kedua ada *Cabang*, berisi kesatuan dari beberapa ranting dalam satu tempat. Di tingkat ketiga, ada tingkat *Daerah*, sebagai kesatuan cabang dalam satu kota atau kabupaten. Selanjutnya, tingkat keempat disebut *Wilayah*, sebagai payung kesatuan daerah di dalam satu provinsi. Dan terakhir, tingkat *Pusat* yang mencakup seluruh wilayah di dalam negara (Muhammadiyah, 2010).

Di samping keberadaan lima tingkatan struktural di atas, Muhammadiyah juga membawahi tujuh organisasi otonom (ortom), yakni Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Hizbul Wathan, Tapak Suci, Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Masing-masing ortom, meskipun di bawah payung Muhammadiyah, tetap dapat menjalankan fungsi spesifik sesuai kebutuhannya.

Selain ortom, Muhammadiyah juga memiliki sayap-sayap organisasi berbentuk majelis dan lembaga yang bergerak di berbagai pelayanan kemasyarakatan, antara lain MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat), MDMC (Muhammadiyah Disaster Management Center), LAZISMU, Majelis Lingkungan Hidup (MLH), Majelis Penolong Kesengsaraan Umum (MPKU), Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP), Majelis Pelayanan Sosial (MPS), dan lain-lain. Di samping cakupan struktural-organisasional, terdapat pula berbagai gerakan, perkumpulan, lembaga, dan lain-lain, yang dapat disambungkan dalam cakupan kultural emosional Muhammadiyah, baik bersifat kelembagaan maupun personal.

Konteks dari tulisan ini adalah untuk melihat peranan Muhammadiyah baik mereka yang berada di dalam cakupan struktural-

organisasional maupun di dalam celupan kultural emosional persyarikatan. Tulisan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama mengupas sejarah singkat Muhammadiyah, khususnya yang berkaitan dengan perdamaian dan demokrasi. Bagian kedua menguraikan peranan Muhammadiyah dalam mengawal reformasi dan demokrasi. Bagian ketiga mendiskusikan peranan Muhammadiyah dalam ranah pendidikan, filantropi, advokasi minoritas dan HAM, bina damai dan rekonsiliasi konflik, serta reformasi sumber daya alam (SDA) dan agraria. Bagian keempat adalah kesimpulan, semacam *concluding remark* yang memayungi keseluruhan pembahasan dalam tulisan ini.

A. Kilasan Sejarah Muhammadiyah

Pada bagian ini dipaparkan latar sejarah dari kiprah Muhammadiyah dalam konteks perdamaian dunia dan demokrasi. Terkait hal itu, sebelumnya secara sekilas akan digambarkan proses berdirinya Muhammadiyah yang berkaitan erat dengan visi kemerdekaan, hak sipil warga negara, perdamaian, dan demokrasi.

Muhammadiyah didirikan pada 1912. Sebagian dari penyebab kelahirannya dipicu oleh faktor-faktor sosial politik yang ada pada saat itu. Rakyat Hindia Belanda, khususnya di Yogyakarta, pada waktu itu berada dalam alam penindasan, baik menyangkut akses politik (pemerintahan Kolonial Belanda), akses ekonomi, maupun akses pendidikan. Rakyat secara umum tidak memiliki kekuatan besar melawan pemerintah Kolonial Belanda. Rakyat rendahan tidak memiliki akses bersekolah. Mereka juga tidak memiliki kemampuan membaca-menulis-berhitung. Segmen masyarakat yang memperoleh akses pendidikan atau sekolah hanyalah dari anak-anak Belanda, bangsawan kraton, dan pedagang kaya. Oleh karena itu, dalam konteks demokrasi, suasana rakyat hingga seperempat awal abad ke-20 mengalami degradasi dalam segala bentuk (Alfian, 1989).

Menurut kajian Nakamura (2017), Peacock (1986), Alfian (1983), dan Shihab (1998), keputusan KH Ahmad Dahlan untuk membangun lembaga pendidikan tidak terlepas dari karakter dirinya yang sering disebut sebagai *man of action*. Dia tidak fokus pada karya tulis. Dia hanya meninggalkan beberapa catatan, dan cenderung merespons fenomena dengan aksi langsung. Ketertindasan yang dialami warga pribumi dijawabnya dengan upaya membangun literasi warga pribumi, yakni membuat lembaga pendidikan yang dapat diakses oleh pribumi.

Alfian menyebut KH Ahmad Dahlan sebagai pribadi yang pragmatis. Dia akan mengambil atau melakukan sesuatu hal yang dinilainya paling baik, paling benar, memungkinkan untuk dilakukan, dan memberi manfaat. Dia tidak ragu untuk meniru sesuatu gagasan –dari mana pun sumbernya, meski dari Kristen misalnya– sepanjang hal itu bermanfaat untuk gerakan dan masyarakat Muslim (Alfian, 1989: 148-150). Dia berani mengadaptasi aktivitas sosial, baik dalam hal pelayanan pendidikan, kesehatan, dan penyantunan sosial, dari mana pun asalnya (Shihab, 1998). Pendek kata, ia bisa menerima apa pun dari luar Islam atau dari luar Muhammadiyah yang dinilainya bermanfaat, sejauh hal-hal itu tidak bertentangan atau menyimpang dari ajaran agama Islam.

1. *Merintis Kemerdekaan dengan Pendidikan*

Muhammadiyah memiliki tiga ranah kegiatan yang kemudian menjadi *benchmark*, yaitu pendidikan (*schooling*), kesehatan (*healing*), dan pemberdayaan sosial (*feeding*). Komitmen KH Ahmad Dahlan dalam bidang pendidikan dimulai sebelum Muhammadiyah terlahir. Di tahun 1911, di ruang tamu rumahnya, KH Ahmad Dahlan menginisiasi berdirinya Madrasah Diniyah Islamiyah dengan menyatukan santri golongan *putihan* dan *priyayi* golongan *abangan* yang saat itu saling merasa benar sendiri sehingga saling merendahkan satu dengan lainnya (Syaifullah, 2015). Selain itu, sekolah ini juga memberikan kesempatan yang sama untuk siswa laki-laki dan siswa perempuan. Hal ini mencerminkan prinsip

kesetaraan yang dipegang oleh KH Ahmad Dahlan, bahwa di hadapan Tuhan, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama di bidang agama maupun sosial (Ro'fah, 2000).

Tidak hanya memberi pendidikan untuk anak Kauman, KH Ahmad Dahlan juga memberi pelajaran agama Islam di sekolah pemerintahan. KH Soedja' dalam *Cerita Tentang KH Ahmad Dahlan* (1993) menuturkan bahwa setiap Sabtu sore dan Ahad pagi, KH Ahmad Dahlan memberikan pelajaran agama Islam untuk siswa *Kweekschool* Yogyakarta yang memiliki latar beragam keyakinan: Islam, Kristen, Katolik, teosofi, dan ideologi keyakinan lainnya. Dalam memberikan pelajaran agama, KH Ahmad Dahlan menggunakan metode diskusi dan membebaskan masing-masing siswanya untuk bertanya. Selain itu, dalam memberikan jawaban, KH Ahmad Dahlan juga memadukan ilmu agama dengan ilmu modern (Mu'ti dkk, 2015). Lambat laun, KH Ahmad Dahlan juga mengajar di berbagai lokasi secara bergantian, yakni di *Normalschool,* Purwosari-Solo, *Opleeding School* di Madiun, OSVIA di Magelang, dan H.K.S di Purworejo.

Pembaruan paling utama pada pendidikan *ala* KH Ahmad Dahlan adalah pada sistem pengajarannya. Ia mengadopsi sistem pengajaran Belanda: menggunakan meja, bangku, dan papan tulis agar siswa tidak lagi duduk di lantai (Tim Pembina Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, 1990). Metode pembelajaran yang diterapkannya juga tergolong baru di saat itu, yakni tidak menggunakan metode ceramah satu arah melainkan dengan metode dialog agar para siswa bebas bertanya dan berdiskusi. Kurikulum yang diterapkan memadukan ilmu agama dari kitab-kitab klasik dan ilmu pengetahuan karya pemikir dan ulama-ulama modern, bahkan juga mengajarkan menyanyi *do re mi fa sol* kepada muridnya (Soedja', 1993), hal yang sangat tak lazim dilakukan oleh seorang kiai pada zaman itu.

Komitmen KH Ahmad Dahlan untuk meningkatkan mutu pendidikan tidak hanya terfokus kepada anak-anak, namun juga pada perempuan. KH Ahmad Dahlan bukan hanya mengajar anak-anak

perempuan Kauman, namun juga menyediakan tempat tinggal untuk mereka agar mudah dalam mendapatkan tambahan pelajaran. Ro'fah (2000) menyebutkan bahwa tempat tinggal murid-murid perempuan KH Ahmad Dahlan itu sejatinya merupakan asrama perempuan pertama di Jawa. Sekolah perempuan yang dikelola KH Ahmad Dahlan awalnya hanya memiliki enam siswa, semuanya adalah teman-teman dari anaknya. Mereka adalah Siti Bariyah, Siti Dawimah, Siti Dalah, Siti Busyro, Siti Wadingah, dan Siti Badilah Zuber. Selain itu, KH Ahmad Dahlan setiap sore aktif memberikan pelajaran agama kepada kaum perempuan dewasa di Kauman. Untuk mendukung akses pendidikan kepada perempuan, KH Ahmad Dahlan juga menyelenggarakan pendidikan bagi orangtua. Pendidikan ini dimaksudkan sebagai alternatif strategi untuk pendidikan anak-anak perempuan mereka. Pasalnya, hingga tahun 1913 masih sedikit anak perempuan pribumi yang memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Sekolah pemerintah tidak menerima anak perempuan, sedangkan sekolah Belanda hanya menerima anak Belanda dan anak priyayi (Ro'fah, 2000).

Selang beberapa lama, oleh KH Ahmad Dahlan, murid-muridnya dikirim untuk masuk ke HIS, dalam beberapa angkatan. Pada angkatan pertama dikirim tiga orang, yaitu Siti Walidah, Siti Dawimah, dan Siti Bariyah. Pada angkatan berikutnya dikirim Siti Oemniyah dan Siti Munjiyah; disusul oleh angkatan selanjutnya: Siti Badilah, Siti Dauhah, Siti Zainab Damiri, Siti Hayinah, dan Siti Aisyah (Kumalasari, 2017). KH Ahmad Dahlan kemudian mengorganisir murid-murid perempuannya tersebut di dalam suatu perkumpulan yang bernama *Sopo Tresno*. Pada 1917, perkumpulan ini berubah nama menjadi Aisyiyah (Ro'fah, 2000). Selain memberi pelajaran agama, *Sopo Tresno* juga berkhidmat dengan memberikan bantuan biaya dan peralatan pendidikan kepada murid-murid Muhammadiyah yang tidak mampu (Soedja', 1993). Bersamaan dengan itu, KH Ahmad Dahlan juga mengirimkan banyak anak muda untuk menempuh studi di Turki, India, Mesir, dan Madinah (Kumalasari, 2017).

2. *Fatsun Politik Muhammadiyah*

Karakter KH Ahmad Dahlan yang terbuka, toleran, egaliter, dan demokratis sangat mempengaruhi karakter persyarikatan Muhammadiyah. Sikap-sikap tersebut menemani perkembangan awal persyarikatan, sehingga tidak mengherankan bila kemudian juga menjadi karakter-karakter utama Muhammadiyah. Tradisi demokrasi yang khas Muhammadiyah, misalnya, dapat dilacak secara historis dalam perhelatan Rapat Tahunan Muhammadiyah ke-12 (1923).[1] Dalam rapat itu, seleksi kepemimpinan di dalam Muhammadiyah sudah menggunakan pemilihan langsung melalui pemungutan suara. Saat itu, H. Fachrodin memperoleh suara terbanyak. Akan tetapi, di dalam rapat formatur, justru KH Ibrahim yang diberi amanah menjadi Ketua Umum. Tradisi demokrasi ini terus berlanjut hingga sekarang, baik dalam proses pemilihan pimpinan dari Pusat hingga Ranting, maupun dalam penyelesaian persoalan internal dan eksternal Muhammadiyah.

Ilustrasi tentang tradisi demokrasi dalam pemilihan pimpinan juga dapat disimak dari laporan etnografis tentang tradisi demokrasi di Muhammadiyah yang disusun oleh antropolog Korea, Kim Hyung Jun (2010). Laporan itu disusun setelah ia secara rutin mengikuti rapat di PWM DIY selama empat bulan. Menurut Hyung Jun, ada empat unsur yang mendasari tradisi demokrasi di tubuh Muhammadiyah. *Pertama*, sistem pemilihan pemimpin bersifat sangat terbuka dan demokratis. *Kedua*, cara merumuskan suatu keputusan berlangsung secara alami dan sangat teratur. Tiap orang memiliki hak yang sama dalam mengeluarkan opini. Ketika ada opini-opini yang berbeda, dicari jalan tengah sebagai solusi kompromi. Muhammadiyah memang sangat kaya dengan anasir-anasir pemikiran, namun benturan atas anasir-anasir itu kemudian dapat dihindari melalui solusi kompromi yang berfungsi sebagai penyeimbang tradisi demokrasi. *Ketiga*, Muhammadiyah menerap-

---

1 Ketika itu, rapat besar dalam Muhammadiyah belum menggunakan istilah kongres atau muktamar. Rapat besar pun dilakukan satu tahun sekali, sehingga disebut sebagai Rapat Tahunan.

kan sistem otonomi dan hierarki yang unik. Sebagai misal adalah tata cara pengelolaan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). AUM dibangun secara swadaya dan diberi nama Muhammadiyah. Namun setelah AUM tumbuh dan besar, justru pimpinan Muhammadiyah yang meminta sumbangan dari AUM, padahal yang menunjuk pimpinan AUM adalah pimpinan Muhammadiyah. *Keempat*, adanya sikap egaliter, semua pihak menganggap pihak lain sebagai kawan.

Peacock (1986) menilai mekanisme pemilihan demokratis yang dirintis Muhammadiyah sejak awal berdirinya merupakan upaya perubahan kebudayaan, yakni dari kebudayaan feodal menuju kebudayaan yang egaliter. Menurut Peacock, upaya perubahan kebudayaan ini, di samping diwujudkan melalui proses pemilihan pimpinan, juga dilakukan dengan memberi penghargaan atas *waktu* (baca: budaya tepat waktu), serta melalui perubahan model pakaian yang saat itu dianggap menyimpang dari budaya berpakaian orang Jawa. Aspek perubahan model berpakaian ini pula yang menjadi salah satu faktor dari penyikapan pemerintah Kolonial Belanda yang relatif dapat menerima kehadiran Muhammadiyah (Peacock, 1986).

Dalam konteks politik, Muhammadiyah merupakan kekuatan sosial yang selalu diperhitungkan. Eksistensinya tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik lokal, nasional, dan internasional. Sejak kelahirannya di era kolonialisme Belanda, di luar aktivitas dakwah utamanya (*schooling, feeding*, dan *healing*), Muhammadiyah telah memainkan peranan sosial-politik. Meski bukan dirancang sebagai organisasi politik, sejak awal berdiri Muhammadiyah melalui anggota-anggotanya sudah memainkan peranan politik kebangsaan yang cukup signifikan. KH Ahmad Dahlan sendiri merupakan anggota Boedi Oetomo dan Syarikat Islam. Anggota-anggota Muhammadiyah generasi awal lainnya bergabung di dalam kelompok-kelompok pergerakan nasional, tersebar di berbagai organisasi berhaluan nasionalis, Islam, bahkan Marxis (Muarif, 2018). Sebut saja tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti H. Fachrodin, Kasman Singodimejo, Abdul Kahar Muzakir, KH Mas Mansur, dan Ki Bagus Hadikusumo. Mereka aktif dalam

mendorong kemerdekaan Indonesia melalui aktivisme politik dan jurnalistik.

Secara kelembagaan dan organisasi, Muhammadiyah berperan aktif dalam pergerakan nasional, terutama pada era kepemimpinan KH Mas Mansur (1936-1942) dan Ki Bagus Hadikusumo (1942-1953) (Muarif, 2018). Ki Bagus Hadikusumo, Kahar Muzakir dan Kasman Singodimejo adalah sebagian para perumus dasar negara dan berada di antara mereka yang tergabung dalam 'Panitia Sembilan'. Kasman Singodimejo bahkan lantas dipercaya sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), sedangkan Ki Bagus Hadikusumo memainkan peran penting dalam perumusan sila pertama dari Pancasila. Khusus dalam hal ini, Ki Bagus Hadikusumo berperan dalam menjaga keutuhan NKRI dengan mengusulkan frasa 'Ketuhanan Yang Maha Esa' sebagai solusi atas ditolaknya tujuh kata dalam sila pertama Pancasila yang berbunyi 'dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya'.

Sampai di sini patut dicatat bahwa peranan Muhammadiyah dalam gelanggang politik lebih banyak dilakukan oleh kader-kader terbaiknya. Ini tidak berarti secara kelembagaan Muhammadiyah sama sekali absen dalam gelanggang politik. Muhammadiyah pernah 'terlibat' dalam politik kebangsaan di era kolonial, seperti ditunjukkan oleh penolakan HB[2] Muhammadiyah di era pimpinan KH Mas Mansur terhadap *Ordonansi Pencatatan Pernikahan dan Sekolah* (Muarif, 2018). Pada Kongres XXVIII di Medan 1939, Muhammadiyah juga mendukung gerakan kebangkitan nasional yang dipelopori oleh kaum muda yang menggelorakan bahasa persatuan (Muarif, 2018). Sekalipun memiliki peran-peran yang demikian besar itu, Muhammadiyah tetaplah bukan organisasi politik dan tidak terlibat dalam perjuangan perebutan kekuasaan.

Karakter Muhammadiyah amat berbeda dengan, misalnya, karakter Syarikat (Dagang) Islam yang sejak awal memang mengarahkan diri pada aktivisme-aktivisme politik praktis. Tuntutan agar Muhammadiyah menjadi seperti 'SI' seperti diusulkan Haji

2 HB (*Hoofd Bestuur*), Pengurus Besar.

Misbah, mantan anggota Muhammadiyah dan tokoh gerakan kiri dari Solo, tidak pernah mendapat sambutan positif di kalangan Muhammadiyah (Muarif, 2018). Muhammadiyah memang pernah menjadi anggota istimewa dari partai politik Islam Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) sejak 1945- sampai akhir 1950-an. Muhammadiyah juga pernah mendirikan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) setelah rencana rehabilitasi Masyumi ditolak oleh Soeharto. Pendirian Parmusi ini direkomendasikan dalam Sidang Tanwir Ponorogo 1969. Akan tetapi, fakta-fakta ini tetap tidak mengubah haluan organisasi Muhammadiyah sebagai organisasi non-politik. Muhammadiyah tetap konsisten menjadi gerakan dakwah keislaman yang mewarnai politik kebangsaan Indonesia. Amat tepat kiranya jika Alfian (1989) menyebut Muhammadiyah sebagai organisasi pembaruan Islam dengan tiga wajah sekaligus: (1) sebagai gerakan reformasi keagamaan; (2) sebagai agen perubahan sosial; (3) sebagai kekuatan politik. Tanpa harus menjadi organisasi atau partai politik, Muhammadiyah senantiasa memainkan peran-peran politik kebangsaan, berpolitik di aras kebangsaan dan kemanusiaan, dan bukan di ranah politik praktis kekuasaan.

Fatsun politik tersebut berhasil menjaga eksistensi persyarikatan yang kini telah melewati usia lebih dari satu abad. Moralitas politik Muhammadiyah ini dikukuhkan melalui ‘Khittah Ujung Pandang’ dalam Muktamar 1971 yang meneguhkan identitas dan jati diri Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam yang tidak berafiliasi, atau tidak mempunyai hubungan organisatoris, dengan partai politik apa pun. Khittah ini juga memberi keleluasaan bagi kader-kader Muhammadiyah untuk memasuki organisasi politik sebagai hak azasi mereka dengan tetap membawa misi Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam.

Konsepsi politik kebangsaan dalam Khittah Ujung Pandang tersebut pada dasarnya berada dalam satu tarikan nafas dengan rumusan-rumusan tentang relasi Muhammadiyah dan politik yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah kontemporer, seperti Din Syamsuddin dan Amien Rais. Din Syamsuddin pada tahun 1995 mengemukakan bahwa Muhammadiyah pada dasar-

nya menjalankan 'politik alokatif', yakni mengirimkan kader-kader terbaik untuk berkiprah di ranah kebangsaan guna menanamkan nilai-nilai keislaman (Syahputra, 2014). Sementara Amien Rais di tahun yang sama menyatakan bahwa Muhammadiyah menganut '*high politics*' alias politik tingkat tinggi, bukan '*low politics*' alias politik kekuasaan jangka pendek. Politik adiluhung Muhammadiyah, menurut Amien Rais, harus selalu berpegang pada nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kejujuran, serta tidak berorientasi kekuasaan jangka pendek yang cenderung memecah belah.

3. Muhammadiyah dan Perdamaian Dunia

Dalam hal perdamaian dunia, pasca Perang Dunia II, atau sekitar tahun 1945, Muhammadiyah mencoba menyerukan perdamaian dunia melalui lawatan diplomasi yang dilakukan oleh Farid Ma'ruf ketika ia masih belajar di Mesir. Meskipun masih perlu penelusuran lebih jauh dan mendalam, banyak cerita dari para pimpinan Muhammadiyah mengenai kontribusi Muhammadiyah terhadap perdamaian dunia. Misalnya, konflik Palestina-Israel selalu menjadi topik dalam setiap perhelatan Muktamar, selain upaya untuk membantu meringankan beban masyarakat Palestina. Demikian juga ketika terjadi perang Iran-Irak, perang saudara di Lebanon (1984), Perang Teluk, dan beberapa konflik di semenanjung Arabia atau Timur Tengah, serta Asia.

4. Muhammadiyah: Pengayom dan Pemersatu Umat

KH Ahmad Dahlan dikenal sebagai pribadi yang pragmatis. Konsekuensi dari sikap tersebut, ia memiliki karakter terbuka, respek, toleran, dan moderat (Peacock, 1986: 40). Sikap tersebut tampak ketika dia dengan sengaja memberi ruang dalam forum-forum Muhammadiyah kepada tokoh-tokoh yang dianggap bersberangan dengan umat Islam. Misalnya, tokoh sosialisme, komunisme, PKI, bahkan pendeta dan pastur, diberi ruang untuk menyampaikan pikirannya dalam forum-forum Muhammadiyah. Bahkan sepeninggal

KH Ahmad Dahlan yang wafat pada 1923, penyikapan tersebut terus dilanjutkan. Salah satunya adalah ketika *Hoofd Bestuur* Muhammadiyah membantu dan memfasilitasi Ahmadiyah untuk menyampaikan pikirannya kepada masyarakat.

Muhammadiyah juga menjadi pihak pertama yang memberikan pengayoman, pemberian ruang gerak, dan bahkan pembelaan terhadap eksistensi perkumpulan SATV (*Siddiq Amanah Tabligh Vathonah*) yang lahir pada 1913. Selama proses pendirian dan aktivitasnya, perkumpulan ini memperoleh penentangan dari masyarakat Muslim di Solo dan sekitarnya. Tatkala KH Ahmad Dahlan diundang dalam pertemuan SATV di Solo yang dipimpin oleh H. Misbach, selain mengisi pengajian, KH Ahmad Dahlan –yang saat itu sudah diberi amanah sebagai Ketua Umum *Hoofd Bestuur* Muhammadiyah– menyatakan mengakui keberadaan SATV. Bukan itu saja, KH Ahmad Dahlan juga ikut menjaga keberlangsungan gerakan dan pengajian SATV, dan mengakomodir semua kegiatan dari perkumpulan tersebut. Ikut campurnya KH Ahmad Dahlan relatif mampu meredakan penentangan masyarakat Muslim di Solo terhadap SATV. Ini terjadi karena sebagian masyarakat sudah mengenal sepak terjang KH Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah.

Pembelaan KH Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah juga dilakukan terhadap perkumpulan *Ambudi Agama* di Pekajangan, Pekalongan, Jawa Tengah. Ketika itu, *Ambudi Agama* memperoleh kesulitan dalam melakukan kegiatan setelah pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan *Goeroe Ordonantie*. Muhammadiyah kemudian memfasilitasi kelompok *Ambudi Agama* agar aktivitasnya dapat diterima oleh pemerintah Hindia Belanda.

Pada 1927, Muhammadiyah juga memberi ruang dan memfasilitasi kepada Ahmadiyah untuk menyampaikan ajarannya kepada masyarakat, hal yang semula sulit dilakukan oleh Ahmadiyah sejak masuk Yogyakarta pada 1924. Maulana Ahmad dan Wali Ahmad Baig diberi ruang bebas untuk memberi pengajaran di lingkungan warga Muhammadiyah. Deliar Noer (1990:186) mengemukakan bahwa kedatangan Ahmadiyah Lahore ke Yogyakarta pada awalnya memperoleh bantuan dari Muhammadiyah. Ketika itu Wali Ahmad

Baiq tinggal di rumah Haji Hilal (menantu KH Ahmad Dahlan) di Kauman yang juga menjadi salah satu Pengurus Besar Muhammadiyah. Ahmad Baiq kemudian diajak mengikuti Rapat Tahunan Muhammadiyah pada 1924 dan 1925. Herman L. Beck dalam artikel "The Rupture Between the Muhammadiyah and the Ahmadiyya" (2005: 240*)* memberikan gambaran bahwa saat itu Muhammadiyah dapat menerima Ahmadiyah karena dianggap memiliki kesamaan visi dalam hal memurnikan iman dan memodernisasi Islam.

Dalam perjalannya kemudian, karena Ahmadiyah dinilai memiliki ajaran yang berseberangan dengan Muhammadiyah, khususnya mengenai kenabian. Muhammadiyah pun menghentikan advokasinya. Tepatnya pada 5 Juli 1928, Pengurus Besar Muhammadiyah secara tegas mengirimkan maklumat ke seluruh cabang yang isinya melarang adanya pengajaran ilmu dan paham Ahmadiyah di lingkungan Muhammadiyah. Tidak lama setelah sikap penolakan Muhammadiyah itu, terbentuk Gerakan Ahmadiyah Indonesia pada Desember 1928 (yang diakui oleh pemerintah Hindia Belanda pada September 1929), yang kemudian berubah nama menjadi Gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia pada 1937.

Advokasi terhadap minoritas lainnya juga dilakukan Muhammadiyah pada masa-masa awal di beberapa daerah luar Jawa. Misalnya, terhadap kelompok *Sendi Aman* (1925) di Minangkabau, kelompok *Shirat Al-Mustaqim* (1926) di Makassar, dan lain-lain.

***

Pemaparan jejak historis di atas memberi pesan yang cukup kuat bahwa kehadiran Muhammadiyah awalnya dimaksudkan sebagai upaya literasi: bagaimana rakyat dapat membaca-menulis-berhitung. KH Ahmad Dahlan menyadari bahwa ketidakmampuan membaca dan menulis huruf latin menjadi faktor utama sehingga rakyat berada dalam ketertindasan. Upaya ini kemudian merembet pada upaya-upaya lain dalam pengabdian kepada masyarakat, yakni sekolah, panti jompo, panti asuhan, rumah sakit, dan banyak lagi yang lain.

Dalam upaya-upaya awal tersebut, KH Ahmad Dahlan menjadi figur sentral dari pergerakan. Menariknya, sikapnya dikenal pragmatis dan memiliki kepribadian terbuka. Gagasan apa pun dan dari sumber mana pun akan diadopsi sepanjang bermanfaat untuk laju gerakan Muhammadiyah. Sifat-sifat ini akhirnya ikut membentuk karakter organisasi Muhammadiyah, yakni egaliter dan demokratis. Dari karakter itulah fatsun politik kebangsaan Muhammadiyah terbangun, diplomasi perdamaian dunia dilakukan, dan upaya menjadi organisasi yang mengayomi dan membela kaum minoritas terus dilakukan, hingga sekarang.

B. Mengawal Reformasi dan Merawat Demokrasi

Bagian ini menarasikan kontribusi Muhammadiyah dalam mengawal proses politik yang demokratis dan berkeadaban. Sebagai kekuatan 'Islam sipil', Muhammadiyah sukses memainkan peranan kunci dalam memastikan proses transisi demokrasi yang relatif damai pada tahun 1998. Tidak seperti kasus di banyak negara yang gagal mengelola proses transisi demokrasi sehingga berujung 'perang sipil' atau disintegrasi, Indonesia berhasil melewati fase krusial yang penuh turbulensi dengan relatif damai. Hal itu bisa terjadi salah satunya berkat kontribusi besar ormas-ormas keagamaan, termasuk Muhammadiyah.

Selain itu, bagian ini juga menjelaskan relasi Muhamamadiyah dan politik di era pasca-Soeharto. Termasuk di dalamnya adalah kiprah-kiprah Muhammadiyah dalam merawat demokrasi di Indonesia, penguatan masyarakat sipil, dan pendidikan kewargaan.

1. Mendorong Suksesi Nasional

Muhammadiyah senantiasa memainkan peran-peran politik kebangsaan di setiap episode sejarah bangsa. Muhammadiyah berpolitik di ranah kebangsaan dan kemanusiaan, bukan di ranah politik praktis kekuasaan. Fatsun politik ini telah berhasil menjaga eksistensi persyarikatan yang kini telah melewati usia lebih dari

satu abad. Konsepsi politik kebangsaan Muhammadiyah tereja-wantahkan dalam konteks mendorong lahirnya gerakan reformasi di tahun 1990-an. Pada saat kekuasaan Orde Baru di bawah rezim Soeharto semakin terkonsolidasi dan saluran-saluran politik mulai tertutup, Muhammadiyah di awal tahun 1990-an mewacanakan pentingnya suksesi kepemimpinan nasional. Saat itu, Muhammadiyah memandang perlunya menghadirkan kepemimpinan alternatif di level nasional.

Dalam Tanwir Muhammadiyah di Surabaya pada Desember 1993, persoalan suksesi kepemimpinan nasional diangkat sebagai salah satu bahasan utama. Isu suksesi kepemimpinan nasional dibicarakan, dibahas, dan disepakati sebagai persoalan penting dalam sidang-sidang komisi umum Tanwir Muhammadiyah yang ketika itu dipimpin oleh Amien Rais (Jurdi, 2010). Dalam sidang itu, diputuskan dan disepakati beberapa kriteria kepemimpinan nasional di masa mendatang. Namun, kesepakatan ini urung menjadi keputusan resmi sidang Tanwir karena ditentang oleh sebagian peserta, terutama yang berada di bawah komando Lukman Harun (Jurdi, 2010). Kelompok ini terdiri dari para pimpinan Muhammadiyah yang menjadi birokrat Orde Baru dan pendukung Golkar di daerah-daerah. Atas penolakan dari kubu ini, kesepakatan tentang wacana suksesi nasional batal menjadi keputusan resmi Tanwir Surabaya.

Meskipun demikian, bola salju wacana suksesi kepemimpinan nasional terus menggelinding. Wacana suksesi kepemimpinan nasional yang dilempar Muhammadiyah direspons secara antusias oleh publik. Di luar arena sidang Tanwir, wacana suksesi kepemimpinan nasional menggelinding deras di media massa, di kampus-kampus, hingga menjadi tema-tema seminar, dialog, dan diskusi di berbagai kampus (Jurdi, 2010). Sambutan yang positif dan luas atas wacana suksesi kepemimpinan nasional ini sangat terlihat di media-media nasional yang ada saat itu, seperti *Kompas*, *Republika*, *Jawa Pos* dan media lokal seperti *Kedaulatan Rakyat*, *Bernas*, dan *Suara Merdeka* yang terus memuatnya hingga 1994 (Jurdi, 2010). Wacana suksesi kepemimpinan nasional juga secara konsisten

terus digulirkan oleh Muhammadiyah, baik secara organisatoris maupun oleh kader-kader terbaiknya, seperti yang dilakukan oleh Amien Rais.

Mendekati akhir 1990-an, wacana suksesi kepemimpinan nasional mulai bertransformasi menjadi gerakan pro-demokrasi yang menuntut reformasi politik besar-besaran. Pada Mei 1998, bertempat di Gedung DPR, Amien bahkan memimpin demonstrasi mahasiswa yang menuntut reformasi, yang akhirnya memaksa Soeharto meletakkan jabatannya sebagai presiden pada 21 Mei 1998.

Sejak wacana suksesi kepemimpinan nasional menggema hingga pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden RI, Amien Rais menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah periode 1995-2000 melalui Muktamar Aceh dengan perolehan suara 98,5%. Ia menjadi figur sentral dalam gerakan Reformasi dan memimpin demonstrasi-demonstrasi mahasiswa 1998. Amien Rais pun menjadi tokoh dan ikon perlawanan terhadap rezim Orde Baru. Pada 12 Mei 1998, Amien Rais beserta tokoh-tokoh bangsa lainnya seperti Faisal Basri, Goenawan Muhammad, Rizal Ramli, Emil Salim, AM Fatwa, Hatta Rajasa, Alvin Lie Ling Piao, dan lain-lain mendirikan 'Majelis Amanat Rakyat' (MARA) yang beranggotakan 55 tokoh reformis terkemuka dari berbagai latar belakang lintas golongan, agama, dan kelompok sosial. Pada perjalanannya, MARA menjadi cikal bakal dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Di sisi lain, Amien Rais bersama Gus Dur, Sri Sultan HB X, dan Megawati juga digadang-gadang menjadi tokoh kunci di balik suksesnya gerakan Reformasi dan tumbangnya rezim otoriter Soeharto. Penobatan keempat tokoh ini terjadi dalam satu pertemuan yang digelar di Ciganjur, yang disebut sebagai 'Deklarasi Ciganjur', mendorong lebih jauh lagi tuntutan-tuntutan reformasi politik.

2. Mengawal Reformasi Damai

Tumbangnya Soeharto dengan rezim Orde Baru yang dibangunnya membuat kran demokratisasi dan kebebasan terbuka lebar. Sa-

luran-saluran politik alternatif yang selama ini dibungkam, menyeruak ke permukaan. Untuk pertama kalinya dalam tiga dasawarsa terakhir, pers Indonesia menikmati kebebasannya, partai politik didirikan di mana-mana, dan desentralisasi diimplementasikan untuk memperkuat daerah-daerah. Dalam situasi ini, Muhammadiyah turut mendorong perubahan politik ke arah yang demokratis. Salah satu kader terbaiknya, Amien Rais, mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN) yang bercorak inklusif dengan menyatukan aktivis-aktivis reformasi dari berbagai kalangan, lintas profesi, agama, dan suku.

Perlu digarisbawahi bahwa PAN pada dasarnya tidak didirikan oleh Muhammadiyah dan tidak memiliki hubungan organisatoris dengan Muhammadiyah. Namun, oleh banyak kalangan, PAN dianggap memiliki kedekatan emosional dan historis dengan Muhammadiyah. Banyak kalangan menyebut berdirinya PAN 'direstui' oleh Muhammadiyah sebagai ijtihad politik untuk merespons perubahan politik di era Reformasi. 'Restu' ini dikaitkan dengan peristiwa Sidang Tanwir Semarang 1998 (Jurdi, 2010). Setelah terpilih menjadi Ketua Umum PAN, Amien Rais mengundurkan diri sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah. Jabatan itu diserahkan kepada Ahmad Syafii Maarif sejak Agustus 1998.

Meski tidak memiliki hubungan organisatoris dengan PAN, kader-kader Muhammadiyah mengisi jabatan-jabatan penting dalam struktur organisasi PAN periode awal. PAN seperti memiliki hubungan spesial dengan Muhammadiyah. Puncaknya, menjelang pemilu 2004, PP Muhammadiyah mengeluarkan rekomendasi agar warga Muhammadiyah memilih partai politik yang memberi kesempatan dan ruang politik bagi kader-kader Muhammadiyah.

Rekomendasi dalam sidang pleno PP Muhammadiyah itu secara tidak langsung dianggap telah mendorong warga Muhammadiyah untuk memilih PAN. Persepsi ini wajar mengingat situasi saat itu memang dikondisikan untuk persiapan pencapresan Amien Rais. Muhammadiyah secara organisatoris terjun ke gelanggang politik praktis dan menjadi partisan, dengan mendukung kepada

salah satu kader terbaiknya, yakni Mohammad Amien Rais. Lebih eksplisit lagi, dukungan terhadap Amien Rais dilakukan melalui keputusan sidang pleno PP Muhammadiyah yang diperluas, di Yogyakarta pada tahun 2004. Namun, dukungan penuh Muhammadiyah terbukti tidak mampu menolong 'kader terbaiknya' dari kekalahan di pemilu presiden pertama di Indonesia, tahun 2004. Amien Rais memperoleh 14,66% suara nasional dan hanya finis di urutan keempat.

Soeharto memang telah jatuh, namun kekuatan-kekuatan otoritarian baik dari kalangan militer maupun birokrat masih mengendalikan sebagian besar lembaga-lembaga negara di awal era Reformasi. Melihat konteks kelembagaan negara yang tidak begitu kondusif saat itu, kelompok-kelompok masyarakat sipil, termasuk Muhammadiyah, tidak tinggal diam. Utamanya dalam rangka menyambut pemilu pertama di era Reformasi (1999), berbagai kelompok masyarakat sipil menghimpun diri, beraliansi di dalam Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR). Aliansi ini merupakan himpunan dari organisasi-organisasi non-pemerintah yang bertujuan untuk mengawal proses pemilu agar berjalan damai, jujur, adil, dan bersih serta mencegah bangkitnya kembali kekuatan otoritarian, terutama dari pihak militer (wawancara Amir Nashirudin, 22/11/2018). Eksponen utama dari JPPR adalah Muhammadiyah, NU, kelompok lintas agama dari komunitas Kristen, Katolik, serta LSM-LSM progresif di Indonesia. Hingga kini JPPR masih aktif mengawal proses pemilu yang damai dan adil. Terakhir, JPPR yang menjalin kerjasama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), melakukan kampanye dan gerakan menolak politik uang *(money politics)* di berbagai daerah (wawancara Amir Nashirudin, 22/11/2018).

Atas peran Muhammadiyah dalam mengawal proses reformasi damai melalui keterlibatan kader-kadernya dalam gerakan pro-demokrasi, oleh Robert W Hefner (2000), Muhammadiyah bersama NU disebut sebagai salah satu pilar 'Islam sipil'. Tidak seperti di negara-negara 'Barat' di mana kekuatan kelompok-ke-

lompok agama sering kali menjadi penghalang bagi proses demokratisasi, di Indonesia kelompok-kelompok agama –seperti yang direpresentasikan oleh Muhammadiyah dan NU– justru berhasil menjadi kekuatan positif dan konstruktif dalam proses demokratisasi. Peran konstruktif organisasi keagamaan ini terutama terlihat dalam mempromosikan tindakan-tindakan demokratis kepada jutaan anggotanya, memperlemah sisa-sisa kekuatan otoritarianisme yang berusaha bangkit kembali, dan memfasilitasi proses transisi demokrasi damai, serta mendorong dan mengakselerasi konsolidasi demokrasi di Indonesia (Kunkler dan Stephan, 2013). Muhammadiyah dan NU juga berhasil mencegah naiknya kekuatan Islamisme ke tampuk kekuasaan negara di era transisi demokrasi dengan menampilkan kekuatan Islam yang progresif dan pro kepada agenda-agenda demokrasi (Burhani, 2014). Hal ini tercermin dalam sikap PAN dan PKB, dua partai politik yang lahir dari rahim Muhammadiyah dan NU, yang menolak agenda memasukkan kembali ‘tujuh kata dalam piagam Jakarta’ dalam proses amandemen UUD 1945 di awal-awal masa Reformasi.

Kontribusi signifikan organisasi-organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan NU dalam mengawal proses transisi demokrasi damai tidak dapat dilepaskan dari kematangan berpolitik dan kepiawaian bernegosiasi yang dimiliki ormas-ormas ini. Menurut Muhammad Najib, Direktur Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) (wawancara, 9/11/2018), tidak seperti gerakan-gerakan Islam di Timur Tengah seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir yang cenderung menerapkan ‘*zero sum game*’ ketika berhasil meraih kekuasaan, Muhammadiyah dan NU terbukti lebih matang dalam memainkan politik kebangsaan sehingga sukses bernegosiasi dan berkompromi dengan kelompok-kelompok lain dalam mengelola kekuasaan negara. Hasilnya, di era krusial seperti pada masa Reformasi 1998, Muhammadiyah dan NU sukses memainkan peran kunci, dan kader-kader keduanya pun menjadi tokoh utama dalam mendorong demokratisasi. Kedua tokoh besar dari dua ormas ini sukses menduduki posisi po-

litik tertinggi di era Reformasi, Amien Rais menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR-RI) sedangkan Abdurrahman Wahid menjadi Presiden Republik Indonesia.

3. Merawat Demokrasi Berkeadaban

Periode pasca-pemilu 2004 dapat dikatakan sebagai babak baru dalam hubungan Muhammadiyah dan politik praktis. Pasca kekalahan Amien Rais yang didukung penuh oleh PP Muhammadiyah pada 2004, suara-suara kritis untuk mengembalikan Muhammadiyah pada khittah sebagai organisasi non-partisan kembali menguat. Beberapa kader penting menyerukan agar Muhammadiyah kembali pada jalur kultural dan dakwah pencerahan yang selama ini menjadi DNA persyarikatan. Secara organisatoris, pasca 2004, Muhammadiyah memang kembali ke jalur non-politik praktis. Di saat yang bersamaan, di level individual, kader-kader Muhammadiyah justru semakin bersemi dan terproliferasi ke berbagai partai politik, baik yang berbasis Islam maupun nasionalis. Menyongsong pemilu 2009, muncul ijtihad politik dari kader-kader Muhammadiyah. Pada tahun 2006, misalnya, sebagian kader Muhammadiyah dari Angkatan Muda Muhammadiyah mendirikan Partai Matahari Bangsa (PMB). Eksperimentasi politik ini mengalami kegagalan elektoral karena hanya mengantongi suara di bawah 1% pada pemilu legislatif 2009 sehingga tidak memperoleh kursi parlemen di DPR-RI.

Pada pasca pemilu 2009 dapat dikatakan Muhammadiyah telah berhasil menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik. Muhammadiyah tidak dapat diidentikkan lagi dengan salah satu partai politik. Dalam menyongsong pemilu 2014, kader-kader Muhammadiyah terdistribusi ke banyak kekuatan politik. Pilihan politik kader-kader Muhammadiyah dalam pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2009 terbukti sangat beragam. Dengan fakta ini, Muhammadiyah secara organisatoris mengambil sikap netral terhadap semua kekuatan partai politik. Sikap ini secara resmi ter-

cermin dalam pernyataan sikap politik Muhammadiyah yang terdiri dari tujuh poin tentang pemilu 2014. Inti dari pernyataan ini adalah peneguhan sikap politik netral Muhammadiyah. Pernyataan ini dibacakan langsung oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, dan Bendahara Umum PP Muhammadiyah, Zamroni.

Selain itu, pada tahun 2013, PP Muhammadiyah mengambil terobosan organisatoris memperkuat netralitas politiknya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 41/KEP/I.O/B/2013. Surat keputusan ini berisi kewajiban mundur dari kepengurusan Muhammadiyah dan amal usahanya beserta mekanisme organisatoris yang harus ditempuh jika seorang pimpinan atau pengurus Muhammadiyah dan amal usahanya mencalonkan diri sebagai anggota DPR/DPRD/DPD dalam kontestasi elektoral. Meski demikian, Muhammadiyah tetap memberikan kebebasan dan memfasilitasi kader-kadernya yang terjun dalam gelanggang politik praktis. Fasilitasi ini diberikan dalam bentuk pembekalan moralitas politik Muhammadiyah kepada kader-kader Muhammadiyah yang terjun ke politik praktis. Selain itu, komunikasi dan hubungan dengan elit-elit politik juga diintensifkan menjelang pemilu 2014 sebagai ikhtiar pro-aktif terhadap hajatan pesta demokrasi lima tahunan (Syahputra, 2014).

Fenomena proliferasi kader-kader Muhammadiyah ke berbagai partai politik kian jamak terjadi. Menjelang pemilu 2019, kader-kader Muhammadiyah bertebaran di banyak partai politik dengan spektrum politik yang amat beragam. Di samping itu, beberapa kader Muhammadiyah juga menduduki posisi-posisi strategis di partai-partai baru. Raja Juli Antoni, mantan Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan Direktur Maarif Institute, misalnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partai baru yang menyita perhatian publik karena dihuni oleh anak-anak muda generasi milenial. Demikian pula dengan Ahmad Rofiq, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), yang memegang jabatan sebagai Sekretaris

Jenderal Partai Persatuan Indonesia (Perindo), partai yang berdiri pada Februari 2015. Di samping kedua kader Muhammadiyah tersebut, kader lain yang juga sering mengisi lembar-lembar berita politik di tanah air akhir-akhir ini adalah Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah periode 2013-2018 ini yang dipercaya sebagai Koordinator Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) dari pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam pemilihan presiden 2019. Di berbagai tingkatan dari level nasional, provinsi, dan kabupaten, kader-kader Muhammadiyah juga berpartisipasi menjadi calon legislatif yang tersebar di berbagai partai politik.

Keterlibatan kader-kader Muhammadiyah dalam ranah politik praktis juga terjadi dalam kontestasi politik untuk memperebutkan kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di seantero Indonesia. Salah satu ilustrasi menarik yang dapat menjelaskan fenomena ini adalah peran Muhammadiyah dalam pemilihan DPD di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sejak pemilu 2004, Muhammadiyah di Yogyakarta telah berperan dalam kontestasi politik DPD dengan merekomendasikan dan memenangkan salah satu kadernya sebagai calon anggota DPD. Pada pemilu 2004 itu, Ali Warsito ditunjuk oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) untuk menjadi anggota DPD. Ia berhasil melenggang menjadi anggota DPD periode 2004-2009 dengan capaian suara 132.407 suara, hanya di bawah GKR Hemas yang memperoleh suara tertinggi untuk DPD Yogyakarta. Berlanjut di pemilu 2009, kader Muhammadiyah lain, yakni Afnan Hadikusumo mendapat rekomendasi untuk maju sebagai anggota DPD mewakili DIY. Afnan juga berhasil melenggang ke Senayan meski perolehan suaranya tidak sebanyak Ali Warsito. Menyadari suaranya menurun, Afnan kembali maju pada gelanggang kontestasi DPD 2014 dengan bekerja lebih keras bersama seluruh struktur Muhammadiyah dari ranting, cabang, daerah, hingga wilayah (Ilham, 2015). Elit-elit Muhammadiyah di struktur ranting hingga wilayah juga bekerja untuk memenangkan Afnan. Hasilnya, Afnan kembali melenggang ke Senayan dengan

capaian 144.820 suara. Menjelang pemilu 2019, Muhammadiyah Yogyakarta kembali merekomendasikan Afnan untuk maju kembali di gelanggang kontestasi DPD.

Fenomena mendorong kader-kadernya dalam kontestasi DPD tidak hanya terjadi di Yogyakarta, tetapi hampir di semua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah di Indonesia (Amika Wardhana dalam FGD, 3/11/2018). Di Sulawesi Selatan, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel, Syaiful Saleh, maju sebagai calon anggota DPD dengan 'restu' Muhammadiyah. Sementara itu di Jawa Timur, Nadjib Hamid resmi didukung oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur untuk bertarung dalam kontestasi DPD pada pemilu 2019. Eksemplar-eksemplar ini semakin menegaskan bahwa sejak pemilu 2004, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) di level provinsi secara aktif merekomendasikan dan memenangkan kader-kadernya dalam kontestasi elektoral untuk mengisi kursi DPD. Dalam konteks ini, Muhammadiyah dinilai mampu menghadirkan alternatif-alternatif kandidat DPD di berbagai provinsi sekaligus mendinamisasi ruang demokrasi elektoral secara konstruktif (David Effendi dalam FGD, 3/11/2018).

Peran Muhammadiyah dalam politik sejatinya tidak hanya dilakukan dengan 'mengirim' kader-kader terbaiknya ke gelanggang politik praktis, namun juga ditempuh dengan mengawal proses kontestasi politik agar berjalan secara demokratis, damai, dan bermartabat. PP Muhammadiyah berulangkali mengeluarkan maklumat yang menyerukan warga Muhammadiyah khususnya dan bangsa Indonesia umumnya untuk berperan aktif dan mendorong agar kontestasi politik dilakukan secara berkeadaban dengan tetap saling menghargai dan menjunjung tinggi *akhlakul karimah*. Sebagai contoh, di saat Indonesia menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018, PP Muhammadiyah kembali menyerukan agar penyelenggaraan pilkada dilakukan secara profesional, independen, transparan, akuntabel, obyektif, dan adil. PP Muham-

madiyah juga menyeru kepada segenap warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat umumnya untuk berpartisipasi secara aktif dan konstruktif dalam pilkada dengan memilih calon kepala daerah yang amanah, visioner, berakhlak mulia, anti-korupsi, dan berjiwa negarawan.

Sementara itu, dalam rangka menyongsong pemilu 2014 lalu, PP Muhammadiyah bersama seluruh PW Muhammadiyah di seluruh Indonesia mengeluarkan *Pernyataan Bersama* untuk mendorong pemilu yang demokratis, bermutu, konstitusional, dan berkeadaban seraya menjaga kedamaian dan kerukunan di tengah-tengah kontelasi politik yang menghangat. Dalam pernyataan bersama itu, diserukan pula agar warga Muhammadiyah dapat berpartisipasi secara aktif dalam perhelatan pesta demokrasi lima tahunan dengan pikiran dan jiwa yang jernih, serta menjaga kepentingan persyarikatan Muhammadiyah di atas kepentingan golongan dan partai politik.

Muhammadiyah juga berupaya mengawal demokrasi dan kebebasan berserikat dengan jalan mengajukan *Judicial Review* (Peninjauan Kembali) terhadap Undang-Undang Organisasi Masyarakat (UU Ormas) Nomor 17 Tahun 2013 karena UU tersebut dianggap membatasi hak azasi manusia dan kebebasan berserikat masyarakat. Permohonan Muhammadiyah ini dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi pada akhir 2014. Masih dalam konteks mengawal kebebasan berserikat dan hak azasi manusia, Muhammadiyah juga sedang menyiapkan pengajuan gugatan terhadap UU No 16 tahun 2017 (sebelumnya Perppu Ormas No 2 Tahun 2017) yang menggantikan UU Ormas No 17 tahun 2013. UU yang dipakai untuk membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ini dinilai sangat berbahaya bagi kebebasan dan demokrasi, serta rawan disalahgunakan oleh pemerintah sehingga dapat membungkam kelompok-kelompok kritis dan oposisi (Suryana, 2017).

Sementara itu, melalui Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) yang ada di tiap struktur pimpinan, Muhammadiyah men-

jalankan peran-peran politik kebangsaan, seperti pencerdasan publik dan pendidikan politik. Pencerdasan publik, misalnya, difasilitasi oleh eksistensi jurnal *Hikmah* terbitan LHKP sebagai wadah diskusi dan debat pemikiran politik dari kader-kader Muhammadiyah dari seluruh Indonesia. Sedangkan pendidikan politik diselenggarakan melalui dialog-dialog kebangsaan digelar secara rutin bagi para kader di seputar isu-isu politik aktual. Di samping itu, ada pula pembekalan politik bagi para calon legislatif dan kader-kader muda Muhammadiyah, sebagaimana pernah dilakukan LHKP menjelang pemilu 2014, tepatnya pada 4 April 2014 dengan mengusung tema "*Penguatan Kader Politik Angkatan Muda Muhammadiyah dan Strategi Pemenangan Pemilu 2014*". Bukan itu saja, PP Muhammadiyah melalui LHKP juga aktif bekerjasama dengan MPR, yakni dengan mengirimkan kader-kadernya pada *Konrad Adenauer School for Young Politicians* (KASYP) di Singapura.

***

Dari narasi-narasi di atas, dapat dilihat bahwa meskipun Muhammadiyah memiliki identitas sebagai organisasi non-politik, namun dalam perjalanannya, peran gerakan dakwah yang dilakukannya tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik Indonesia, baik di aras lokal, nasional, dan internasional. Di suatu waktu, Muhammadiyah menjaga jarak dengan politik praktis, namun di saat lain, justru merasa perlu terjun langsung ke gelanggang politik praktis.

Terkait dinamika pola relasi Muhammadiyah dan politik tersebut, amat menarik untuk menyimak telaah kritis dari Haedar Nashir (2000) yang kini menjabat sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah (2015-2020). Menurutnya, hubungan antara Muhammadiyah dan politik dapat dipetakan menjadi tiga pola: (1) hubungan formal dan langsung – ditandai dengan keterlibatan Muhammadiyah secara langsung dalam partai politik; (2) hubungan personal dan tidak langsung – ditandai dengan dukungan warga Muhammadiyah yang sangat kuat terhadap seorang figur; (3) hubungan netral, yakni ketika Muhammadiyah secara tegas mengambil jarak dengan semua kekuatan politik yang ada.

Tabel 2.1
Relasi Muhammadiyah dan Politik dalam Kilasan Historis

Formal-Langsung	• Persatuan politik Islam pasca-kemerdekaan Republik Indonesia	• Menjadi anggota istimewa dalam Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)
	• Ditolaknya wacana rehabilitasi Masyumi oleh Rezim Orde Baru	• Mendirikan Partai Muslimin Indonesia melalui Sidang Tanwir Ponorogo 1969
	• Euforia kebebasan politik dan respons terhadap reformasi	• Tokoh-tokoh sentral Muhammadiyah mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN). Langkah ini 'direstui' oleh Sidang Tanwir Denpasar 1998
	• Pemilihan Presiden 2004	• Mengerahkan sumber daya organisasi untuk memenangkan 'kader terbaiknya, 'Moh Amien Rais' dalam Pilpres 2004 melalui Keputusan Sidang Pleno di Yogyakarta, 2004
Personal-Tidak Langsung	• Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sejak Pemilu 2004	• Mendorong warga Muhammadiyah untuk memilih dan mendukung calon DPD yang direkomendasikan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
	• Kekecewaan terhadap PAN yang dianggap tidak mengakomodir kader-kader dan aspirasi warga Muhammadiyah	• Sejumlah kader muda Muhammadiyah dari AMM mendirikan Partai Matahari Bangsa (PMB), yang kemudian gagal lolos ke parlemen pada pemilu 2009 karena hanya meraih suara di bawah 1%
Netral-Independen	• Pemilu 2009, Pemilu 2014, dan Pemilu 2019	• Bersikap netral dan independen terhadap calon presiden dan wakil presiden serta calon anggota legislatif yang berkontestasi dalam pemilu. Di pemilu 2019, kader-kader Muhammadiyah bertebaran baik di partai lama seperti Golkar, PDI-P, PAN, PPP, Nasdem dan PKS, maupun partai-partai baru seperti Perindo dan PSI

Di era Reformasi, Muhammadiyah telah menunjukkan peran sentral dan eksepsional dengan turut mendorong proses transisi demokrasi yang damai dan berkeadaban. Peran ini banyak diapresiasi oleh berbagai kalangan dengan menyatakan bahwa Muhammadiyah dinilai sebagai salah satu dari representasi 'Islam sipil' yang progresif dan pro terhadap agenda-agenda demokrasi. Tidak berhenti di sini, setelah proses demokrasi kian terkonsolidasi, Muhammadiyah melalui kader-kadernya juga turut mewarnai kompetisi elektoral di berbagai level dengan cara-cara yang konstruktif dan positif.

C. Pendidikan

Selama perjalanan satu abad pertama hingga kini, pelayanan pendidikan telah menjadi fokus dan bukti dari keseriusan Muhammadiyah dalam mengupayakan akses pendidikan secara merata. Jejak historis berdirinya Muhammadiyah sendiri menunjukkan bahwa layanan pendidikan yang diselenggarakannya sejak awal diniatkan sebagai pendidikan yang inklusif. Sekolah-sekolah Muhammadiyah kemudian dikenal sebagai sekolah yang inklusif, tanpa memandang latar belakang agama, etnis, gender, kewarganegaraan, jenis kelamin, serta latar belakang ekonomi.

Bagian ini memfokuskan kajian pada peran Muhammadiyah dalam mengembangkan pendidikan yang inklusif, toleran, dan multikultural. Pada uraian awal dibahas fenomena Kristen-Muhammadiyah yang muncul dari sekolah-sekolah Muhammadiyah di wilayah mayoritas non-Muslim. Disusul kemudian dengan bahasan tentang peranan pendidikan Muhammadiyah dalam menarasikan perdamaian dan demokrasi. Bahasan berikutnya adalah mengenai peranan anak muda, perempuan, dan organisasi otonom Muhammadiyah dalam menyebarkan nilai-nilai perdamaian melalui pendidikan formal maupun non-formal.

1. *Kristen-Muhammadiyah dan Pendidikan Interreligius*

Indonesia merupakan negara dengan aneka ragam suku, budaya, bahasa, dan agama. Oleh karenanya, menjadi manusia Indonesia berarti menjadi manusia yang mewarisi sejumlah kearifan dan kecerdasaan kultural dalam mengelola keberagaman (Listia, dkk, 2016). Akan tetapi, keberadaan Pancasila yang menjamin kebebasan menganut dan menjalankan ibadah itu tidak secara otomatis menjamin ko-eksistensi sosial yang harmonis di antara umat beragama. Pasca reformasi politik, terjadi serangkaian aksi anarkis dan konflik komunal bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) yang menelan korban tidak sedikit, seperti konflik di Maluku, Poso, dan Kalimantan Barat. Ratusan rumah ibadah juga luluh lantak, seperti terjadi di Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Barat. Bahkan hingga kini, pengikut aliran agama tertentu yang dianggap "sesat" masih hidup dalam keterasingan dan ketakutan (Mu'ti dan Haq, 2009).

Pluralitas agama sebagai sumber ko-eksistensi sosiologis masyarakat Indonesia perlu terus dikembangkan dalam moda sistem pendidikan masyarakat sipil (Mu'ti dan Haq, 2009). Selain itu, penanaman pemahaman atas rasa keadilan bagi orang lain membutuhkan kepekaan dalam hubungan kemanusiaan. Penumbuhan kepekaan seperti itu dapat dimulai dengan menanamkan kesadaran dan pemahaman atas kehadiran pihak lain yang berbeda (Listia dkk, 2016). Pada konteks ini, pendidikan memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi yang memiliki rasa keadilan terhadap orang lain dan terbuka terhadap perbedaan.

Melalui sistem pendidikan yang inklusif, Muhammadiyah telah cukup lama memulai upaya menghormati pluralisme agama, yakni dengan cara mewadahi siswa non-Muslim untuk bersekolah di Muhammadiyah. Lembaga pendidikan Muhammadiyah secara fungsional memiliki tiga misi yakni pendidikan, dakwah, dan perkaderan (Majelis Dikdasmen PP. Muhammadiyah dalam Mu'ti, 2016). Dalam mewujudkan pendidikan yang merata di Indonesia,

Muhammadiyah juga mendirikan sekolah-sekolah di wilayah yang penduduknya mayoritas non-muslim. Penelitian Abdul Mu'ti dan Fajar Rizal Ul Haq (2009) berjudul *Kristen-Muhammadiyah* menunjukkan sekolah-sekolah Muhammadiyah di tiga kota yang menerima siswa dan guru beragama Islam, Kristen, Katolik, serta menerima dari berbagai suku, yakni di Kupang (NTT), Yapen Waropen (Papua), dan Putussibau (Kalimantan Barat). Praktik pendidikan Muhammadiyah dengan menerima siswa dan guru non-Muslim ini dapat meningkatkan *public awareness* terhadap Islam di kalangan non-Muslim. Atmosfer seperti ini akan berkontribusi positif bagi penciptaan kerukunan antarumat beragama (Mu'ti dan Haq, 2009). Kesadaran 'Kristen-Muhammadiyah' seperti ini juga dapat menjadi medium untuk mengurangi *prejudice* dan kebencian antar umat beragama sehingga mendorong tumbuhnya kesadaran inklusif dan penghargaan terhadap kemajemukan atas dasar perbedaan agama dan suku untuk saling mengulurkan tangan dan bekerjasama serta menyingkirkan primordialisme agama (Mu'ti dan Haq, 2009).

Hasil penelitian Mu'ti dan Haq (2009) menunjukkan bahwa pihak sekolah di SMA Muhammadiyah Kupang (NTT) dan SMK Muhammadiyah Yapen Waropen (Papua) memberikan fasilitas guru seagama bagi siswa/siswi non-Muslim. Sedangkan di SMA Muhammadiyah I Putussibau (Kalimantan Barat), meski sekolah ini tidak menyediakan pelajaran agama Kristen, namun sekolah ini dapat menjadi potret sekolah yang memayungi kemajemukan. Hal ini tercermin dari segi latar belakang agama dan suku para siswanya dengan komposisi sebagai berikut: Muslim (48,89%), Kristen Katolik (46,67%) dan Kristen Protestan (4,44%); dan berdasarkan kesukuan: 51,1% suku Dayak, 42,2% suku Melayu, sisanya merupakan suku Sunda dan Jawa.

Perbedaan suku dan agama di SMA Muhammadiyah I Putussibau tidak memunculkan sikap intoleransi siswa, melainkan justru siswa dapat menerima dan menghargai perbedaan. Hal ini ditunjukkan oleh sikap dapat menerima dari para siswa dan wali siswa non-Muslim atas kebijakan sekolah yang tidak menyediakan

pendidikan agama Kristen di sekolah mereka. Di sekolah ini, siswa non-Muslim memilih untuk mengikuti ujian agama Islam dibandingkan jika harus mengikuti ujian sesuai agama masing-masing yang diselenggarakan di sekolah lain. Menurut Hamid, dalam Mu'ti dan Haq (2009), pendidikan agama Islam di SMA Muhammadiyah I Putussibau justru berperan sebagai media dakwah Islam yang damai, tanpa berpretensi melakukan Islamisasi.

Penelitian senada juga dilakukan oleh Winarsih dkk (2016) dengan judul *Salib Terang di Bawah Sinar Sang Surya*. Penelitian itu dilakukan di Universitas Muhammadiyah Kupang (UM Kupang) yang memiliki 70% mahasiswa non-Muslim (atau sekitar 4.500-an). Hal itu telah berlangsung sejak 1989. Bahkan tidak hanya menerima mahasiswa non-Muslim, kampus ini juga memiliki staf, karyawan, dosen, dan ketua jurusan non-Muslim yang hingga saat ini juga mencapai sekitar 70-an%.[3] UM Kupang sejatinya telah mempraktikkan pendidikan multikultural dan inklusif yang tercermin pada kebijakan untuk mahasiswa non-Muslim dalam berpakaian, pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK), kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi kampus. Mahasiswa non-Muslim tidak diwajibkan berjilbab tetapi mengenakan pakaian yang sopan. Mereka tetap mengambil mata kuliah AIK dengan tujuan yang berbeda dengan mahasiswa Muslim. Selain itu, pihak kampus membebaskan mahasiswa dalam memilih kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi kampus dengan tidak wajib aktif di dalam kegiatan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), meskipun faktanya banyak di antara mereka justru aktif di dalamnya.

Tantangan yang dihadapi UM Kupang adalah bahwa permasalahan multikultural tidak sekadar menyangkut keberagaman agama, melainkan juga perbedaan budaya dan bahasa. Hal ini karena di satu

3 Fenomena yang sama juga terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIKOM) Jayapura, Papua, UM Sorong (Papua Barat), dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Sorong (sekarang sudah berganti menjadi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Papua Barat). Dalam tiga Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) tersebut, mahasiswa Muslimnya justru jauh lebih sedikit daripada jumlah mahasiswa non-Muslim. Demikian juga dengan jumlah staf, karyawan, dan dosennya.

kabupaten ada beberapa bahasa yang digunakan oleh masyarakat. Sebagai upaya menjaga keharmonisan mahasiswa, pengasuh asrama mahasiswa UM Kupang, Muhammad Tamrin, M.Pd.I., mengatur komposisi penghuni per kamar dengan dua Muslim dan dua non-Muslim. Fenomena yang menarik adalah bila Ahad pagi tiba. Di saat itu, mahasiswa Islam keluar kamar mengenakan jilbab untuk menghadiri pengajian di masjid sedangkan mahasiswa non-Muslim keluar kamar dengan Al-Kitab di tangan untuk berangkat ke gereja. Keistimewaan lainnya adalah adanya paduan suara yang beranggotakan mahasiswa Muslim dan non-Muslim. Mahasiswa non-Muslim, dengan sendirinya, ikut menyanyikan Mars Muhammadiyah dengan lirik "*Ya Allah Tuhan Rabbiku, Muhammad Junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah Gerakanku*". Menurut Tamrin, paduan suara beranggotakan non-Muslim yang menyanyikan Mars Muhammadiyah itu dilakukan dalam beragam kegiatan formal UM Kupang yang turut dihadiri oleh banyak orang, orang tua mahasiswa, dan tidak mendapat protes (Suara Muhammadiyah, 2018).

Senada dengan pendidikan Muhammadiyah di tingkat sekolah menengah di Kota Kupang, UM Kupang juga menjadi jendela atas informasi mengenai Muhammadiyah bagi komunitas non-Muslim. Winarsih, dkk (2016) menyatakan bahwa mahasiswa yang menempuh studi di UM Kupang tetap memperoleh mata kuliah AIK. Melalui mata kuliah ini, terjadi pengenalan dan dialog yang terbuka dan cair dengan mahasiswa non-Muslim perihal Islam dan Muhammadiyah. Meski wajib mengambil mata kuliah AIK, pihak kampus memfasilitasi mahasiswa non-Muslim untuk memperoleh materi agama sesuai agamanya masing-masing. Salah satu contohnya adalah menghadirkan romo dan pendeta untuk memberikan mata kuliah agama Kristen dan Katolik. Dalam penelitian itu juga ditemukan bahwa praktik pendidikan multikultural di UM Kupang ini dapat menekan efek resistensi pasca kerusuhan 1998 yang di Kupang waktu itu berlangsung penuh dengan kecurigaan antarkelompok agama.

Selain di UM Kupang, STKIP Muhammadiyah Kalabahi, Nusa Tenggara Timur juga memiliki mahasiswa yang mayoritas beragama Kristen dan Katolik. Terkait dengan pembelajaran agama, pihak kampus menyediakan pengajar agama yang sesuai dengan agama mahasiswa. Mahasiswa non-Muslim menyatakan bahwa tidak memiliki ketakutan sedikit pun dalam menempuh pendidikan di sekolah Muhammadiyah. Beberapa di antara mereka bahkan juga alumni SMA Muhammadiyah.

Dapat dikatakan bahwa sekolah-sekolah di lingkungan Muhammadiyah tersebut –SMA Muhammadiyah Kupang (NTT), SMK Muhammadiyah Yapen Waropen (Papua), SMA Muhammadiyah I Putussibau (Kalimantan Barat), Universitas Muhammadiyah Kupang, STKIP Muhammadiyah Kalabahi – adalah insitusi-institusi pendidikan yang mempraktikkan secara langsung dialog antaragama yang dapat menjembatani antarkomunitas yang berbeda.

Praktik pendidikan multikultur seperti yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah membutuhkan panduan pendidikan antaragama yang komprehensif dan sistematis. Menjawab kebutuhan ini, Center for Dialogue and Coorperation among Civilisation (CDCC) pimpinan Din Syamsuddin menerbitkan tiga buku mengenai pendidikan antaragama (interreligius) untuk SMA, perguruan tinggi, dan non-formal. Fokusnya adalah upaya pencegahan dan mitigasi konflik bernuansa agama. Pendidikan interreligius ini merupakan proses pendidikan yang sumber materinya diambilkan dari nilai-nilai kebaikan yang ada di berbagai agama dan ragam pengalaman dalam menghayati ajaran agama. Tujuan pendidikan ini bukanlah untuk menciptakan agama baru, melainkan untuk membangun kepercayaan dan rasa hormat dalam melihat persoalan-persoalan kemanusiaan sebagai persoalan bersama (Listia dkk, 2016).

Masing-masing buku pendidikan interreligius di atas memiliki pokok-pokok bahasan sendiri-sendiri dengan metode penyampaian yang beragam. Buku *Suplemen Pendidikan Agama untuk SMA: Pendidikan Interreligius*, misalnya, memberikan gambaran rinci tentang metode yang dapat digunakan guru untuk menerangkan masing-

masing pokok bahasan. Metode yang digunakan tidak sebatas penyampaian teori dari guru kepada siswa, namun siswa juga diajak terlibat aktif, seperti melakukan observasi terkait hubungan antaragama di lingkungan terdekat mereka, permainan yang sesuai dengan pokok bahasan, dan lainnya.

Selain membuat buku pendidikan interreligius untuk perguruan tinggi dan SMA, CDCC juga membuat buku pendidikan interreligius non-formal. Buku ini bertujuan untuk membangun hubungan antarmanusia sehingga dapat membentuk masyarakat yang saling menghormati perbedaan dan memunculkan dialog. Buku ini digunakan sebagai panduan bagi fasilitator untuk mengenalkan kepada masyarakat mengenai perdamaian antaragama. Tidak hanya memberikan panduan secara teori, buku ini juga memberikan alternatif pendidikan interreligius melalui permainan, observasi, diskusi, dan menggunakan audio-visual.

Tabel 2.2
Kerangka Umum Modul Pendidikan Interreligius Tingkat SMA

TEMA UMUM	POKOK BAHASAN
• Menjadi manusia Indonesia yang bermartabat dan mencintai lingkungan hidup	• Menjadi manusia yang menjunjung martabat kemanusiaan • Menjadi manusia yang hidup dalam keberagaman budaya dan agama di Indonesia • Menjadi manusia yang melestarikan lingkungan alam
• Memahami dan menyikapi keberagaman serta membangun relasi interpersonal bebas prasangka	• Memahami keberagaman agama-agama • Menyikapi keberagaman agama-agama • Membongkar prasangka dan membangun relasi interpersonal
• Memahami permasalahan bersama dan bekerjasama untuk membangun kesejahteraan masyarakat	• Memahami permasalahan bersama demi membangun kesejahteraan • Bekerjasama dan saling tolong menolong menumbuhkan nilai-nilai solidaritas

Sumber: *Suplemen Pendidikan Agama untuk SMA* (CDCC, 2016)

Tabel 2.3
Modul Pendidikan Interreligius Non Formal

Modul	Tema umum	Tujuan	Kegiatan
• Modul I	• Menjadi Manusia Indonesia Bermartabat dan Mencintai Lingkungan Hidup	• Jatidiri bangsa Indonesia menghargai perbedaan • Memahami kesetaraan sebagai makhluk Tuhan • Mempunyai kepekaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan • Memahami keutuhan ciptaan • Menyadari bahwa dirinya tergantung dengan alam ciptaan • Memiliki kecintaan terhadap alam	• Nonton bareng dan diskusi film • Pembelajaran di luar lingkungan (out bond) • Permaculture (pengenalan) • Go Green (aksi sosial)
• Modul II	• Memahami dan Menyikapi Keberagaman Agama	• Menyadari pentingnya menghormati orang lain • Memahami diri dalam relasi dengan liyan (orang lain) • Memahami jenis-jenis keragamaan di lingkungan sekitar • Mampu hidup bersama dan bekerjasama • Mampu menerima liyan • Mampu membangun kehidupan dan kultur baru mengenai keberagaman	• Permainan Baku Hormat • Tantangan makanan • Kunjungan lintas komunitas dan etnik • Mengorganisir kegiatan budaya lintas agama
• Modul III	• Membongkar Prasangka dan Membangun Relasi Interpersonal	• Mampu membuka diri untuk memperluas pemahaman tentang orang lain • Melalui pemahaman mampu tercipta kerjasama dengan kelompok yang berbeda	• Memilih foto tentang Papua atau daerah lainnya • “Live-In” • Permainan Identitas • Interpretasi terhadap gambar tertentu

• Modul IV	• Memahami Permasalahan Bersama dan Bekerjasama Membangun Kesejahteraan	• Mampu membangun solidaritas dan kepedulian terhadap oranglain • Memecahkan permasalahan untuk kebutuhan bersama • Mengambil keputusan atau berinisiatif membantu liyan (orang lain) • Membangun kehidupan dan kultur baru tentang kerjasama melalui hal-hal sederhana	• Mapping Persoalan bersama di Komunitas • Khotbah Damai • Festival Gotong Royong

Sumber: *Pendidikan Interreligius Non-Formal* (CDCC, 2016)

Kehadiran kelompok Kristen-Muhammadiyah dan *Modul Pendidikan Interreligius* yang diinisasi oleh CDCC menunjukkan bahwa Muhammadiyah –yang seringkali dinilai sebagai gerakan puritan yang menyerukan pemurnian Islam dari sinkretisme dan budaya lokal– dalam praktiknya memiliki sikap toleran terhadap agama lain dan bersikap terbuka tanpa memandang perbedaan suku, ras, budaya, dan golongan. Penelitian Mitsuo Nakamura (2017), James L Peacock (1986), Achmad Jainuri (2002), dan Alwi Shihab (1998) menunjukkan bahwa meskipun Muhammadiyah menekankan pengamalan Islam yang murni, namun para pendiri dan tokoh Muhammadiyah bersikap terbuka dan toleran terhadap tradisi masyarakat dan penganut agama lain. Kemunculan fenomena *Krismuha* (Kristen-Muhammadiyah), misalnya, menjadi bukti bahwa Muhammadiyah memiliki sikap inklusif dan toleran terhadap perbedaan. Melalui praktik-praktik pendidikan multikultural ini Muhammadiyah turut berkontribusi terhadap proses pembangunan perdamaian dengan jalan mengurangi prasangka dan membangun jembatan sosial antarkomunitas agama sehingga terwujud hubungan Islam dan agama lain yang harmonis dan memiliki pemikiran yang terbuka.

2. *Pendidikan Perdamaian dan Demokrasi*

Konflik di masyarakat terjadi karena ketidaksiapan masyarakat dalam menerima perbedaan sehingga sulit menjalani kehidupan yang berdampingan dan berkeadilan. Pendidikan melalui lembaga formal, seperti sekolah dan pesantren, dapat menjadi ruang transfer nilai-nilai perdamaian dan demokrasi. Nilai-nilai perdamaian dan demokrasi dapat disampaikan guru melalui pelajaran pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan. Menyadari pentingnya pendidikan sebagai sarana informasi perdamaian dan demokrasi, Muhammadiyah melalui lembaga pendidikannya dan peranan institusi kulturalnya menginisiasi beragam kegiatan dan penerbitan buku pengayaan yang dapat diterapkan di sekolah.

Lembaga pendidikan yang berperan aktif dalam pendidikan perdamaian dan demokrasi di Muhammadiyah, di antaranya, adalah Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM). Keberadaan PTM ini menjadi penanda *center of excellence* dan *driving force* (kekuatan penggerak) persyarikatan dengan berbagai peranannya di dalam negeri dan di luar negeri (Laporan Muktamar 47, 2015). Terkait pendidikan perdamaian, terdapat beberapa PTM yang memfokuskan diri untuk membahas isu tersebut, seperti Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial Universitas Muhammadiyah Surakarta (PSBPS UMS), Pusat Studi Islam dan Filsafat Universitas Muhammadiyah Malang (PSIF UMM), dan Pusat Studi Agama dan Multikulturalisme (PUSAM UMM). Lembaga-lembaga tersebut menginisiasi program-program dialog antaragama dan antaretnis sebagai bentuk penyebaran perdamaian.

Pada tahun 2002, PSBPS UMS menginisiasi *multiculturalism camp* yang melibatkan siswa-siswi Muslim, Arab (keturunan Al-Arab), dan non-Muslim yang banyak diwakili oleh siswa-siswi beretnis Cina. Tujuan dari kegiatan itu adalah untuk membongkar prasangka, mengurai kekhawatiran atau ketakutan, menumbuhkan kepercayaan hingga kemudian memunculkan keinginan untuk bertemu, berdialog, berteman, dan bekerjasama (wawancara Yayah Khisbiyah, 7/11/2018). Menurut Yayah, PSBPS adalah salah satu lembaga pionir dalam penyemaian nilai-nilai toleransi, mul-

tikulturalisme dan inklusivisme Islam dalam berbagai format program: *halaqah* Tarjih, *halaqah* budaya, pertemuan antar-agama dan antar-etnis. Gagasan ini berawal dari keresahan atas banyaknya konflik di berbagai kota di Indonesia yang disebabkan oleh perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan. Secara khusus, konflik tersebut juga terjadi di Solo. Keresahan tersebut lalu menginspirasi PSBPS untuk mendesain program yang mampu mempertemukan berbagai kelompok di tempat dan waktu yang sama.

Selain mengadakan *multiculturalism camp*, pada tahun 2009 PSBPS UMS juga menerbitkan buku *Pendidikan Perdamaian Berbasis Islam* (PPBI) yang mengalami cetak ulang pada tahun 2011. Penyusunan buku ini merupakan kerjasama antara PSBPS UMS dengan empat sekolah menengah di Solo (SMP Negeri IV, SMP Muhammadiyah I, MTs Negeri II, dan MTs As-Salaam), melibatkan empat kepala sekolah dan 22 guru PAI sebagai penulis buku sekaligus praktisi PPBI. Tujuan dari buku PPBI adalah untuk membantu proses perubahan perilaku (kognitif, afektif, dan psikomotor) dalam kerangka menciptakan kedamaian, tindakan tanpa kekerasan, dan keadilan di atas landasan kesatuan dan kesetaraan kemanusiaan, spirit saling cinta, kasih dan sayang, dan spirit hidup bersama, berdampingan, dan menjalin ikatan sosial melalui penanaman nilai-nilai: prasangka baik, kesediaan mendengarkan dan mempelajari pihak lain, penghargaan terhadap kemanusiaan, ko dan pro-eksistensi melalui toleransi, kerjasama dan kompetisi dalam prestasi, kesediaan untuk rekonsiliasi, memaafkan, dan resolusi konfllik (Abdullah Aly dkk, 2011). PPBI dirancang sebagai buku pengayaan dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Dipilihnya PAI didasarkan pada pertimbangan bahwa mata pelajaran tersebut dapat diandalkan untuk dimanfaatkan sebagai agen sosialisasi nilai-nilai yang mempromosikan nilai-nilai perdamaian, keadilan, amanah, pengorbanan, penghargaan atas perbedaan dan keanekaragaman, dan lainnya.

Di samping melalui buku, kepedulian PSBPS dalam pendidikan perdamaian juga dilakukan melalui beberapa kegiatan yang melibatkan peserta dari berbagai latar belakang. Pada Agustus 2018, misal-

nya, PSBPS mengadakan diskusi pendidikan karakter *welas asih* dengan menghadirkan narasumber dari guru-guru sekolah agama: Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan Konghucu. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali pemahaman, praktik, dan pengalaman guna membangkitkan keterampilan empati siswa (PSBPS, 2018).

Wujud dari pendidikan empati tersebut kemudian melahirkan *Kampanye Gen-E* sebagai bentuk kerjasama antara PSBPS dengan Komunitas Sant'Egidio dan Pharos Observatori. Kegiatan yang bertujuan memberikan edukasi dan sosialisasi *media booklet* mengenai budaya empati ini kali pertama diselenggarakan di SMA Muhammadiyah PK Kotabarat. Rencananya kampanye serupa akan diselenggarakan di sekolah-sekolah lain (wawancara Ali Yafie dan Paksi Hidayatullah, 10/11/2018).

Perhatian terhadap dialog antaragama juga dilakukan oleh PSIF dan PUSAM UMM. Pada Agustus 2017 PSIF UMM mengadakan forum *Training on Interreligious Dialogue for Religious Youth Activists in East Java*, dengan menghadirkan pembicara FX Armada Riyanto (Direktur Sekolah Tinggi Filsafat Widya Sasana Malang) dan Nurbani Yusuf (Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Batu), dan melibatkan 45 anak muda dari berbagai latar belakang agama dan budaya. Tujuan dari program ini adalah agar aktivis muda memiliki wawasan baru tentang konsep hubungan antaragama untuk digunakan sebagai katalisator di tengah isu-isu intoleransi yang berkembang di masyarakat (Pradana, 2017).

Pada Maret dan Oktober 2017, PUSAM UMM menyelenggarakan pendidikan perdamaian melalui *Youth Leadership Peace Camp*. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk kerjasama dengan Equal Access International dan The Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia. Materi *peace camp* di antaranya mencakup pendidikan multikulturalisme, rekonsiliasi dan membangun tim, transformasi dan resolusi konflik, doktrin dan bina damai agama-agama, dialog dan negosiasi konflik, relasi agama-agama di Indonesia, perjumpaan dan pertentangan, *design for change*. Kegiatan

ini melibatkan 60 anak muda dari berbagai latar agama, suku, budaya, dan negara.

Di samping ketiga lembaga tersebut, inisiatif lain datang dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Berawal dari keinginan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang perang dan perdamaian sebagai upaya pembangunan demokrasi, UMY dan Perdana Global Peace Foundation mengadakan sekolah internasional perdamaian global dan resolusi konflik dengan nama Mahathir Global Peace School (MGPS). Sekolah ini diresmikan pada Juni 2013 di UMY, menghadiran pelajar dari berbagai latar belakang budaya dengan bertujuan untuk mendapatkan pemahaman penuh mengenai perdamaian dan keamanan. Materi dalam MGPS terfokus pada strategi untuk mengkonstruksikan perdamaian dunia dalam bidang pendidikan, pemahaman keberagaman, rekonsiliasi konflik, dan pembangunan perdamaian. Target MGPS adalah 40 peserta, terdiri dari 60% pelajar, dosen dari universitas seluruh dunia, 10% dari aktivis, jurnalis dan peneliti, 30% dari NGO yang berhikmat pada isu perdamaian dan resolusi konflik. Harapannya, setelah dua pekan mendapatkan pelatihan, peserta dapat menunjukkan sifat dan konsep perdamaian global, mampu membedakan konsep mengenai perdamaian, keadilan dan resolusi konflik, selain mampu mengetahui tantangan, menciptakan komunitas dan masyarakat yang damai, serta memperkuat jaringan individu maupun institusi untuk pencegahan konflik dan menarasikan perdamaian (Mahathir Global Peace School, 2015).

MGPS dirancang sebagai kegiatan lima periode dengan lokasi di Indonesia dan Malaysia. MGPS I (2013) diadakan di Yogyakarta-Indonesia dengan tema *Global Peace and Conflict Resolution*; MGPS II (2014) di Kuala Lumpur-Malaysia dengan tema *Interstate Relations and Global Justice for Peace and Conflict Resolution*; MGPS III (2015) di Yogyakarta-Indonesia, bertemakan *Migration, Border, and Global Peace*; MGPS IV (2016) di Kedah, Malaysia dengan mengangkat tema *Justice, Prosperity, and Peace for Global Citizens*; dan MGPS V (2017) di Yogyakarta-Indonesia, bertemakan *Peace and Interreligion Dialogue in Worldwide Education*.

Kerjasama UMY dengan Perdana Global Peace Foundation dalam menyelenggarakan MGPS berakhir pada MGPS V (2017). Selanjutnya, untuk melahirkan agen-agen perdamaian, mulai 2018 UMY akan mengadakan MGPS (Muhammadiyah Global Peace School) dengan desain yang tidak jauh berbeda (Surwandono dalam FGD, 5/12/2018). MGPS yang baru ini tetap bersifat inklusif, tidak hanya memberikan pendidikan perdamaian kepada kader Muhammadiyah, namun juga kepada ormas lain, bahkan bangsa yang berbeda. Di samping itu. dalam MGPS 2018 dilakukan perbaikan materi pembelajaran, terutama pada *follow up* kegiatan peserta agar MGPS dapat menciptakan agen perdamaian yang mampu membangun kerja-kerja perdamaian di masing-masing lingkungannya.

Komitmen Muhammadiyah dalam mempromosikan narasi perdamaian juga dilakukan dengan memberikan beasiswa pendidikan untuk anak-anak di negara konflik, seperti di Filipina, Thailand, dan Palestina. Muhammadiyah juga mendirikan sekolah di wilayah konflik, seperti di Myanmar, di samping mengirimkan guru, staf, dan siswa Muhammadiyah di negara tersebut. Lebih jauh lagi, PP Muhammadiyah juga melakukan kerjasama dengan pemerintah Filipina, Thailand, Palestina, dan Myanmar untuk memberikan beasiswa untuk menempuh pendidikan di PTM di Indonesia.

Terkait dengan proses strategi perdamaian, khususnya di Mindanao, Muhammadiyah menjalin kerjasama di bidang pendidikan dengan British Council dan Australian Agency for International Development (AusAID). British Council menyetujui untuk membantu Muhammadiyah dalam memfasilitasi pendidikan yang layak bagi Bangsamoro, sedangkan AusAID bekerjasama dengan UNICEF meluncurkan proyek pendidikan senilai US$ 18 juta untuk membantu sekitar empat juta anak miskin dari enam kota di Filipina. Proyek tersebut dimaksudkan untuk membantu pemerintah dalam mendirikan pusat penitipan anak di tempat-tempat relokasi dengan fokus pada anak-anak terdampak konflik. Selaras dengan ikhtiar ini, Muhammadiyah, bekerjasama dengan Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, membuat program beasiswa untuk mahasiswa Moro

guna melanjutkan studi di beberapa PTM. Beasiswa tersebut sudah berlangsung sejak TA 2013/2014, sebagaimana tertera dalam keputusan PP Muhammadiyah (Medina, 2017). Pada tahun pertama, terdapat 30 mahasiswa Bangsamoro yang menempuh program pascasarjana di beberapa PTM. UMS memberikan beasiswa kepada lima mahasiswa pascasarjana dari Moro, Filipina. Sementara 25 mahasiswa lainnya tersebar di Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), dan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

PP Muhammadiyah juga melakukan kerjasama di bidang pendidikan dengan Pemerintah Thailand. Kerjasama ini berlangsung sejak 2008, di antaranya berupa pengiriman guru dan pelajar Muhammadiyah ke Thailand, pertukaran pelajar, dan pemberian beasiswa pada komunitas Muslim di Pattani. Pada tahun 2012, terdapat 44 mahasiswa dari Pattani yang melanjutkan studi strata 1 di delapan PTM di pulau Jawa: UMY menerima 7 mahasiswa yang mengambil jurusan/program studi Hubungan Internasional, Pendidikan Bahasa Arab dan Inggris, Kedokteran Gigi, dan Studi Islam; UMM menerima 7 mahasiswa yang mengambil jurusan Ekonomi Akuntansi, Pendidikan Bahasa Inggris dan Indonesia, Studi Islam, dan Teknik; UAD menerima 3 mahasiswa yang mengambil jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris; UMS menerima 7 mahasiswa yang mengambil jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Informatika, Keperawatan, dan Farmasi; Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA) menerima 7 mahasiswa yang mengambil jurusan Pendidikan Islam, Pendidikan Bahasa Inggris, Perbankan Syariah, Informatika, dan Farmasi; Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) menerima 9 mahasiswa yang mengambil jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Farmasi, Informatika, dan Ekonomi; UM Surabaya menerima 3 mahasiswa yang mengambil jurusan Keperawatan, dan Pendidikan Bahasa Inggris; dan Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Tangerang menerima 2 mahasiswa yang mengambil jurusan Farmasi (Muhammadiyah, 2012).

Pada 2017, PP Muhammadiyah juga bekerjasama dengan Southern Border Province Administrative Center dan Muslim

Education Development Association of Thailand (MEDAT) guna memberi beasiswa selama 4 semester kepada 20 mahasiswa dari Thailand untuk menempuh pendidikan di UM Surabaya (Sofiana, 2017). Program studi yang dipilih oleh para mahasiswa tersebut di antaranya adalah Perbankan Syariah, Manajemen, Pendidikan Islam, serta Pendidikan Bahasa Indonesia. Berdasarkan penuturan Hawari Lambensah, Sekjen MEDAT, kerjasama ini sudah berjalan sejak 2014 dan sangat bermanfaat untuk pendidikan anak-anak Thailand di Indonesia. MEDAT juga menerima banyak mahasiswa Muhammadiyah Indonesia untuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan praktik kerja di Thailand.

Dr Surwandono, yang merupakan delegasi Muhammadiyah untuk resolusi konflik di Mindanao, menuturkan bahwa pelbagai program beasiswa tersebut akan terus dilakukan. Saat ini beasiswa tidak hanya diberikan kepada mahasiswa Muslim Filipina, namun juga mahasiswa non-Muslim. Kepada mahasiswa Filipina maupun Thailand yang mengambil studi Hubungan Internasional di UMY, Dr. Surwandono memperkenalkan konsep-konsep perdamaian. Harapannya, melalui konsep-konsep tersebut, para mahasiswa tersebut nantinya dapat menerapkannya di lingkungan mereka (Surwandono dalam FGD, 5/12/2018).

Terkait dengan beasiswa mahasiswa dari Palestina, UMY membuka *Language Center* bagi mahasiswa Palestina yang menempuh studi lanjut di Indonesia. Pada tahun pertama, 2015, UMY memberikan beasiswa pembelajaran budaya dan bahasa Indonesia kepada empat mahasiswa Palestina sebelum mereka mengikuti perkuliahan di UGM. Selain itu, UMY juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) di bidang akademik dengan University of Palestine, terkait rencana mengadakan *student exchange*, *staff exchange*, dan kegiatan akademik lain sebagai upaya mendukung Palestina untuk membebaskan diri dari Israel (BPH UMY, 2015).

Pada Juni 2018, Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) juga melakukan penandatangan MoU dengan Jose Rizal University of Philippines (JRU) untuk memberi beasiswa pendidikan

kepada mahasiswa Filipina di UMP, khususnya dalam bidang bahasa dan budaya Indonesia (Jebul Suroso dalam UMP, 2018). Target beasiswa ini tidak hanya mahasiswa, melainkan juga dosen JRU yang berminat belajar di UMP.

Tidak sebatas memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di Indonesia melalui beasiswa, Muhammadiyah juga mendirikan sekolah di lokasi pengungsian. Program ini dimulai 26-29 Oktober 2018 dengan mendirikan dua sekolah di Rakhine State Myanmar. Program ini merupakan bagian dari hasil dari observasi dan dialog dengan warga Rohingnya di Myanmar pada Agustus 2018. Usai diskusi tersebut, disusun program pemberdayaan di Rakhine State, di antaranya berupa pendidikan untuk mendirikan pelatihan guru, pembangunan fasilitas sekolah, dan penyaluran *school kits*. Selain itu, Muhammadiyah juga membangun balai latihan kerja yang ditempatkan di lokasi pengungsian (Wijaya, 2018).

Keterlibatan Muhammadiyah dalam narasi pendidikan perdamaian tidak hanya dilakukan melalui lembaga pendidikan, namun juga melalui institusi kultural, seperti CDCC dan Maarif Institute for Culture and Humanity (MI). MI memiliki visi sebagai lembaga pembaruan pemikiran dan advokasi guna mewujudkan praksis Islam sehingga keadilan sosial dan kemanusiaan dapat menjadi fondasi keindonesiaan sesuai cita-cita sosial dan intelektualisme Ahmad Syafii Maarif.

Fokus kegiatan MI adalah pada upaya menyebarkan isu perdamaian, toleransi, dan inklusivitas melalui beragam media yang menyasar pada anak muda. Salah satunya adalah dengan merilis film bergenre dokumentari drama berjudul *Mata Tertutup* pada 2011. Gagasan dari film *Mata Tertutup* berakar dari sebuah riset MI mengenai radikalisme di kalangan anak muda. Tujuan dari pembuatan film itu sendiri adalah untuk melakukan deradikalisasi dan menumbuhkan kritisisme anak muda (Fajar Riza Ul-Haq dalam Muhammad dan Pribadi, 2013). Pada penelitiannya, Muhammad dan Pribadi (2013) menyatakan bahwa pemutaran film *Mata Tertutup* dilakukan tidak hanya di bioskop, namun juga pada

diskusi-diskusi komunitas, sekolah, pondok pesantren, dan festival film, baik di dalam maupun di luar negeri. Pemutaran film ini diiringi dengan diskusi dengan menghadirkan narasumber yang terdiri dari korban radikalisme seperti korban terorisme, eks-aktivis NII, selain itu menghadirkan juga tokoh agama. Tujuan menghadirkan narasumber dari berbagai pihak ini adalah untuk mengurangi *gap* antara penyintas, pelaku, dan penonton sehingga dapat tumbuh empati atas cerita yang dibangun pada film tersebut.

Tidak hanya melalui film, sebagai lembaga yang berkomitmen melawan kekerasan (*countering violent extremism*), MI juga menerbitkan buku dan melakukan pendidikan perdamaian dan demokrasi secara non-formal. Pada tahun 2012, MI menerbitkan buku *Pendidikan Karakter Mata Pelajaran Agama Islam* dan *Pendidikan Karakter Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan* untuk siswa SMA. Bahasan dari dua buku tersebut terfokus hanya pada 3 dari 18 nilai-nilai pendidikan karakter yang dikemukakan oleh Kemendikbud, yakni toleransi, anti kekerasan, dan inklusif/keterbukaan. Pemilihan tiga nilai tersebut didasarkan pada pertimbangan kondisional bahwa masalah kekerasan, tawuran, dan intoleransi di lembaga pendidikan sudah menjadi kepedulian bersama dari para *stakeholder* dunia pendidikan, seperti pemangku kebijakan, pemerhati, praktisi, dan orang tua siswa (Lestari dan Supriyatno, 2012).

Sebagaimana terlihat pada Tabel 2.4, Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Kewarganegaraan dipilih sebagai medium untuk mentransfer informasi guna menanamkan nilai-nilai perdamaian dan demokrasi kepada peserta didik. Penyampaian dilakukan dengan menggunakan pendekatan cerita, komik, dan berpikir kreatif sehingga lebih menarik dan dapat diterima oleh para siswa SMA.

Di samping buku tentang pendidikan karakter, MI juga menerbitkan buku *24 Minggu menjadi Teladan Bangsa* pada 2014 sebagai upaya untuk memadukan pemaparan teoritik ihwal modal sosial untuk teladan bangsa dengan 12 nilai karakter pelopor kebangsaan. Integrasi antara teori dan praktik ini diwadahi dalam

buku agenda harian berdurasi selama 24 minggu. Buku ini ditujukan untuk generasi muda, khususnya siswa sekolah, guna menerapkan nilai-nilai kebangsaan dengan disertai contoh keteladanan dari para tokoh bangsa.

Tabel 2.4
Pendidikan Karakter untuk SMA

Nilai Karakter	Pendidikan Agama Islam	Pendidikan Kewarganegaraan
Toleransi	• Toleransi • Hak beragama • Hak menjalankan praktik keagamaan • Dakwah: Menagajak Tanpa Memaksa • Berlaku adil terhadap perbedaan	• Bhinneka Tunggal Ika • Kesetaraan • Anti Diskriminasi
Anti Kekerasan	• Anti kekerasan • Demokrasi • Memahami dan mengelola konflik • Mengakui kesalahan • Memberi maaf	• Demokrasi • Kebebasan Pers • Penegakkan Hukum
Inklusif/ keterbukaan	• Berlomba dalam kebaikan • Menghargai karya dan budaya bangsa lain • Inklusif sebagai seangat peradaban islam • Karakter inklusif islam nusantara	• Keterbukaan terhadap perbedaan • Pancasila rumah bersama Indonesia • Keadilan sosial

Sumber: Lestari dan Supriyatno, 2012

Upaya lainnya dari MI dalam melawan radikalisme dan disintegrasi bangsa dilakukan dengan mengadakan *Jambore Pelajar Teladan Bangsa*. Kegiatan tahunan yang dimulai sejak 2013 ini melibatkan 100 pelajar SMA, SMK, atau sederajat. Selama mengikuti kegiatan ini, peserta mendapatkan materi pembelajaran untuk menguatkan karakter, melatih mengatasi konflik, dan mengunjungi panti asuhan yang dikelola oleh non-Muslim. Harapannya, kegiatan tersebut dapat menguatkan empati dan menghormati perbedaan, di antaranya perbedaan agama. Jambore dilaksanakan di

lokasi yang berbeda-beda. Pada tahun 2018 jambore dilakukan pada 8-13 Juli, berlokasi di Garut, Jawa Barat dengan mengambil tema 'Berkhidmat untuk Kebhinekaan: Menguatkan Toleransi Kewargaan di Kalangan Pelajar'.

Kegiatan lainnya adalah jurnalisme kebhinekaan bertajuk "Indonesia: Aksi Pelajar untuk Kebhinekaan Indonesia". Pelatihan jurnalistik ini memadukan nilai-nilai yang ada dalam buku tentang 12 nilai karakter pelopor kebangsaan sebagai upaya untuk mengubah cara berpikir pelajar, disertai dengan pelatihan praktis memproduksi video untuk kampanye kebhinekaan sebagai *counter* terhadap wacana radikalisme keagamaan, sekaligus sebagai bentuk praktis literasi media. Program ini merupakan hasil kolaborasi MI dengan Cameo Project, Kemendikbud, dan Youtube, dan diikuti oleh pelajar SMA/SMK, atau sederajat (kelas 10 atau 11) di Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang, yakni 200 peserta pada hari pertama dan 50 peserta pada hari kedua (Pribadi, 2017).

Tidak hanya menyasar siswa SMA sederajat, pada Juli 2018 MI juga mengadakan program *Sekolah Pemikiran Maarif*, yakni *short-course* untuk mahasiswa akhir S1, *freshgraduate* S1, dan mahasiswa S2. Tujuan dari sekolah pemikiran ini adalah upaya kaderisasi intelektual sekaligus melembagakan gagasan sosial Buya Syafii di ranah keislaman maupun kenegaraan yang mengusung nilai-nilai keterbukaan, kesetaraan dan kebhinnekaan (Permana, 2018).

Di samping itu, pada 9-13 November 2018, MI juga menyelenggarakan kongres nasional bertajuk "*Indonesia Millennial Movement*" (Percaya Indonesia). Dalam forum ini dipertemukan 100 anak muda dari beragam suku, agama, ras, dan antargolongan guna membincangkan dan merumuskan bersama usaha-usaha perdamaian dalam rangka pencegahan terhadap ekstremisme kekerasan (Convey Indonesia, 2018). Forum ini dilaksanakan dalam dua jenis kegiatan, yakni *indoor* dan *outdoor*. Kegiatan *indoor* berupa *TED Talk Show*, *Focus Group Discussion* (FGD), dan *Powerful Public Speaking*, sedangkan kegiatan *outdoor* berupa kunjungan ke Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, eksebisi dan kampanye perdamaian di

Kawasan Kota Tua, Jakarta. Di samping itu, para peserta kongres juga diterima oleh Presiden Jokowi di Istana Bogor (Jordan, 2018).

Selain menarasikan pendidikan perdamaian, Muhammadiyah juga memberikan fokus pada pendidikan demokrasi. Pada 2002, Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan (Diklitbang) PP Muhammadiyah bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (LP3) UMY menerbitkan buku *Pendidikan Kewarganegaraan*. Penerbitan buku ini menjadi salah satu bukti dari kepedulian Muhammadiyah terkait pembangunan dan pengembangan demokrasi di Indonesia untuk masa depan. Bagi Muhammadiyah, pendidikan kewarganegaraan yang dikembangkan di lingkungan amal usaha pendidikannya harus mampu menemukan kembali relevansi nilai-nilai fundamentalnya, yaitu nilai-nilai Islam dan keindonesiaan dengan realitas dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.

3. *Narasi Perdamaian dari Anak Muda dan Perempuan Muhammadiyah*

Kaum muda Muhammadiyah terlibat dan berperan aktif sebagai penyebar perdamaian melalui beberapa komunitas, seperti *Peace Generation (Peacegen)*, *Sekolah Cerdas* (Ceria, Damai, dan Siaga Bencana), dan *Rumah Baca Komunitas* (RBK). Komunitas-komunitas ini terbentuk baik secara individual ataupun melalui ortom Muhammadiyah. Di samping itu, kaum perempuan Muhammadiyah juga aktif dalam menarasikan perdamaian dan keberagaman, baik melalui jalur struktural maupun kultural.

Peace Generation (*Peacegen*) digagas oleh Irfan Amalee, yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah. Lahirnya *Peacegen* sejatinya mengiringi kisah sukses buku *12 Nilai Dasar Perdamaian* (Pelangi Mizan, 2007) yang ditulis Irfan berkolaborasi dengan sahabatnya, Eric Lincoln, pada tahun 2007. Buku tersebut dirancang sebagai modul pendidikan perdamaian dengan pendekatan yang menyenangkan, berbentuk komik, untuk mempromosikan perdamaian dan menjembatani

perbedaan antar komunitas melalui penciptaan hubungan damai di antara generasi muda. Buku itu telah dilatihkan kepada lebih dari 5.000 guru dan diajarkan kepada sekitar 30.000 siswa di berbagai kota di Indonesia, dari Banda Aceh hingga Poso (Amalee, 2015), serta diterjemahkan ke berbagai bahasa, seperti bahasa Aceh, Tagalog (Filipina), Melayu (Malaysia), dan bahasa Inggris (Rahmawati, 2017). Tidak hanya di tingkat lokal dan nasional, buku itu juga diterapkan secara internasional, seperti oleh UNICEF, World Vision, UNESCO, dan lain-lain. Di samping melalui buku, Irfan juga menyampaikan pesan perdamaian melalui *Breaking Down the Walls* (2010), film dokumenter yang mengisahkan kunjungan siswa-siswa sekolah internasional ke sebuah pesantren di Bandung.

Seiring perjalanan memberikan pelatihan atas modul *12 Nilai Dasar Perdamaian,* Irfan dan Eric mendirikan *Peace Generation Indonesia* (*Peacegen*) sebagai payung komunitas bagi orang-orang yang menerapkan modul perdamaian tersebut. Kini *Peacegen* telah memiliki cabang di berbagai daerah di Indonesia hingga di beberapa negara tetangga. Fokus dari gerakan *Peacegen* adalah penyampaian pesan-pesan perdamaian melalui jalur pendidikan formal dan jalur komunitas kepada anak-anak dan pelajar. Pesan-pesan itu diintegrasikan dalam berbagai banyak kegiatan, seperti *Peace camp, Rock The Peace, Walk on Peace Bandung, dan Peacesantren.*

Melalui narasi perdamaian, Irfan Amalee dibanjiri penghargaan, di antaranya *International Young Creative Entrepreneur* 2008 bidang komunikasi dari British Council; *UAJY Muliticulturalism Award* 2010 dari Universitas Atmajaya Yogyakarta; nominasi Ashoka (penghargaan untuk *social entrepreneurship*), 2010; masuk dalam *Top 500 Most Influential Muslim* 2010-2011 dari Royal Islamic Strategic Studies Center, Amman, Jordan; *Hahn and Karpf Peace Award* 2011 dari Brandeis University Boston USA; *Young Creative Entrepreneur Award* dari Kementerian Industri Kreatif dan Pariwisata RI, 2012); *Ashoka Fellowship for Social Enterpreneur* (2017); *Top 6 of ASEAN Social Impact Award 2018* dari Ashoka Foundation; dan *Indika Energy* bidang perdamaian (2018).

Peacegen mengemas pesan perdamaian melalui metode permainan sehingga menjadikannya lebih mudah diterima oleh anak muda. Ninin Karlina, sebagai pegiat Sekolah Cerdas, menuturkan penilaiannya tentang *Peacegen*, bahwa melalui permainan *boardgame peace*, siswa yang terpapar radikalisme dapat dengan mudah memahami perdamaian. Di Solo sejak tahun 2017, *Peacegen* bekerjasama dengan MDMC dan LAZISMU dan GKJ untuk membuat Sekolah Cerdas (wawancara Hilman Latief, 2018). Pada tahun pertama, ditargetkan 20 sekolah sebagai *pilot project*; kemudian menjadi 100 sekolah pada 2018-2019, dan diproyeksikan 10.000 sekolah pada 2019-2029. Sekolah Cerdas tidak hanya memberikan edukasi tentang bencana alam, namun juga bencana kemanusiaan seperti persekusi dan kekerasan di sekolah (Peacegen, 2017) yang dinilai jauh lebih berbahaya karena berpengaruh langsung pada masa depan siswa (wawancara Enny Indriarti, 9/11/2018).

Sekolah Cerdas telah berlangsung di beberapa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Solo. Programnya dilakukan dengan mempertemukan guru-guru dari pendidikan agama (dari berbagai agama), pendidikan kewarganegaraan, dan guru pramuka untuk hadir bersama dalam pelatihan perdamaian. Pelatihan ini dimaksukdan untuk menghilangkan prasangka dan mempertemukan gagasan-gagasan perdamaian melalui pendekatan praktis, bukan sekadar teori (wawancara Wildan, 10/11/2018). Usai mengikuti pelatihan, para guru diharapkan dapat membuat pelatihan di masing-masing sekolah sehingga dapat menambah wawasan siswanya terkait perdamaian. Enny Indriarti, guru di SD Kristen Stabelan 1, memberikan testimoni bahwa dirinya intens mengimplementasikan nilai-nilai perdamaian dari Sekolah Cerdas kepada siswanya. Ketika ada siswa yang bertengkar, misalnya, ia melakukan pendekatan menggunakan nilai-nilai perdamaian.

Berbeda dengan fokus dari *Peace Generation*, Rumah Baca Komunitas (RBK) bergelut dengan rendahnya minat baca generasi muda. Fenomena ini menyulut kegelisahan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) hingga kemudian mereka menginisiasi berdirinya Rumah Baca Komunitas (RBK) pada tahun 2012 di Yogyakarta.

Tujuan RBK tidak sebatas menyediakan bahan bacaan, melainkan juga menjadi sarana belajar untuk masyarakat, baik anak-anak, remaja, hingga dewasa. Meskipun gerakan ini dipelopori oleh IPM, namun RBK tidak membatasi anggotanya dari sekat-sekat organisasi, agama, suku, dan usia.

Selain menyuarakan keberagaman melalui RBK, IPM juga aktif berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyuarakan perdamaian, seperti kegiatan bertajuk "*The Harmony and Peace Walk: Students Stand for Peace*" yang melibatkan 500 kader IPM. Kegiatan yang dilaksanakan di Monas Jakarta Pusat pada Januari 2018 ini merupakan kerjasama antara IPM dengan International Peace Youth Group (IPYG), International Women's Peace Group (IWPC), dan Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL)(IPM, 2018). Kegiatan tersebut merepresentasikan kepedulian IPM pada gerakan nir-kekerasan dan peduli terhadap isu anak-anak, remaja, dan pemuda yang digagas secara internasional guna menyebarkan perdamaian dan toleransi.

Peran perempuan dalam pendidikan inklusif di Muhammadiyah tercermin dari berbagai kiprah Nasyiatul Aisyiyah, ortom remaja putri Muhammadiyah. Pada Oktober 2018, misalnya, bertempat di Jakarta, Nasyiatul Aisyiyah mengadakan *short diplomatic course* dengan tema *Strengthening Nasyiatul Aisyiyah to Promote the Peaceful World*. Kian maraknya anti-pluralitas, anti-keberagaman, intoleransi dan deradikalisasi juga mendorong Nasyiatul Aisyiyah untuk terlibat langsung dalam menciptakan perdamaian dunia, di antaranya dengan bergabung pada *Srikandi Lintas Iman* (organisasi perempuan dari penganut agama yang berbeda) untuk mengkampanyekan perdamaian.

Selain secara organisasional, sumbangsih Muhammadiyah juga dilakukan secara personal oleh tokoh-tokoh perempuan. Yayah Khisbiyah (pendiri dan Direktur Eksekutif PSBPS UMS) misalnya, terlibat secara aktif dalam menarasikan perdamaian di tingkat lokal maupun global. Selain menggagas *Halaqoh* Seni Lokal dan Agama, *multiculturalism camp,* dan PPBI, Yayah juga mengadakan beragam acara lintas iman. Peranan lain dari Yayah Khisbiyah

dalam pendidikan perdamaian adalah mengadakan mata kuliah baru, Psikologi Perdamaian, di UMS.

Program lain yang dirintis adalah *Streghtening Defenders of Pluralism* yang bertujuan memperkuat penggiat-penggiat pluralisme di Indonesia dan dunia melalui kerjasama delapan negara: Indonesia, Pakistan, Nigeria, Korea Selatan, Kuba, Lebanon, Perancis dan Belgia. Kegiatan yang diselenggarakan di Indonesia ini bertemakan "Muda Bersahabat Menuju Indonesia Bebas dan Demokratis" dengan panitia pelaksana PD IPM Kota Yogyakarta dan didukung oleh pegiat PSBPS UMS dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (PSBPS, 2018). Kegiatan ini dilaksanakan pada September 2018 di kantor PP Muhammadiyah dengan menghadirkan Ahmad Syafii Maarif (Dewan Pengarah BPIP RI), Busyro Muqoddas (Ketua PP Muhammadiyah), Hariyono (Plt. Kepala BPIP RI), serta Linda Bustan (Universitas Petra). Sedangkan pesertanya terdiri dari pemuda lintas agama dan budaya, baik pelajar dan mahasiswa yang dilibatkan dalam *small group discussion* dan penyusunan rencana tindak lanjut, dengan tujuan untuk: (1) meningkatkan pemahaman akan prinsip keadilan sosial tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama; (2) meningkatkan wawasan dan memperkuat kesadaran generasi muda tentang nilai-nilai toleransi dan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia yang majemuk; (3) menumbuhkan semangat dan inisiatif bagi generasi muda dan organisasi pelajar serta pemuda untuk berpartisipasi dalam menyebarkan kesadaran anti diskriminasi dan turut mewujudkan keadilan sosial. Hingga saat ini Yayah Khisbiyah aktif dalam berbagai kegiatan perdamaian seperti di CDCC, Komite Internasional untuk Studi Psikologi Perdamaian, menjadi Dewan Direktur Center for Peace and Conflict Studies di Kamboja, International Networks for Engaged Buddhism berbasis di Thailand, dan Buddhist-Muslim Forum yang berbasis di Malaysia.

***

Tampak jelas bahwa pendidikan telah menjadi ujung tombak dari akivitas dakwah Muhammadiyah sejak awal berdirinya. Layanan pendidikan tersebut diselenggarakan dalam prinsip inklusif: meng-

hormati pluralitas masyarakat didik dan membuka diri terhadap semua animo belajar di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Melalui prinsip ini, muncul beragam potret pluralitas siswa di sekolah Muhammadiyah. Dalam hal anutan keberagamaan, misalnya, muncul fenomena Krismuha (Kristen-Muhammadiyah), yakni kelompok peserta didik non-Muslim (Kristen) yang bersekolah di perguruan Muhammadiyah. Fenomena ini jamak ditemui pada lembaga pendidikan Muhammadiyah di NTT, Papua, dan Kalimantan Barat –baik sekolah maupun perguruan tinggi– yang secara alamiah menerima siswa/mahasiswa non-Muslim dari beragam etnis. Alhasil, proses pendidikan di sekolah-sekolah tersebut tidak sekadar berfungsi sebagai media transfer ilmu pengetahuan, melainkan juga sebagai media sosial yang memupuk harmoni dan dialog di antara komunitas agama.

Di samping melalui pelayanan pendidikan di dalam negeri, Muhammadiyah juga aktif memberikan bantuan pendidikan di negara yang terdampak konflik, seperti di Filipina, Thailand, Palestina, dan Myanmar. Keaktifan ini terlihat, di antaranya, dari diberikannya beasiswa secara penuh kepada warga korban konflik. Narasi perdamaian itu bahkan tidak hanya dilakukan secara struktural dalam tubuh Muhammadiyah, tetapi juga secara kultural, seperti yang dilakukan Maarif Institute, CDCC, serta organisasi otonom IPM, Nasyiatul Aisyiyah, dan IMM.

D. Filantropi

Bagian ini menguraikan aktivitas filantropis dari trisula baru Muhammadiyah, yakni Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC), Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM), dan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU), khususnya yang berkaitan dengan upaya-upaya mempromosikan perdamaian dan resolusi konflik, baik di level nasional, regional, maupun internasional. Dari spirit dan jejak filantropi inilah Mu-

hammadiyah berhasil menjadi organisasi yang sangat maju seperti sekarang ini.

1. *Wujud Filantropi Muhammadiyah*

Menurut Hilman Latief (2013), sebagai organisasi Islam senior, Muhammadiyah telah menerapkan kebijakan dan program lembaga filantropi modern, dari optimalisasi pola susunan organisasi hingga pendayagunaan organisasi otonom dan sayap organisasi. Secara umum, gerakan-gerakan filantropi Muhammadiyah dapat dipetakan menjadi dua kategori: (1) filantropi struktural; (2) filantropi kultural. Dua bentuk filantropi tersebut dapat dibedakan melalui dua poin kasus, yakni (a) sifat waktu atau momentumnya, dan (b) sifat kelembagaannya. Dilihat dari sisi momentum, terdapat 2 sifat waktu dari gerakan filantropi Muhammadiyah, yaitu secara rutin, dan insidental. Sedangkan dari sisi sifat kelembagaan, terdapat 2 jenis karakter, yaitu dalam lingkup internal susunan organisasi, dan dalam lingkup lembaga otonom yang dikelola secara mandiri namun masih di bawah koordinasi Muhammadiyah.

Tabel 2.5
Kategori Aktivitas Filantropi Muhammadiyah

	Struktural		**Kultural**
	Organisasi Induk dan Organisasi Otonom	**Lembaga**	
Sifat Waktu/ Momentum	Rutin	Rutin dan insidental	Sewaktu-waktu
Sifat Kelembagaan	Internal	Otonom/ Independen	Otonom/ Independen
Contoh	Ranting dan Cabang	MPM, MDMC, dan LAZISMU	Komunitas kultural Muhammadiyah di berbagai daerah

Sumber: diolah dari data-data temuan

Spirit filantropi Muhammadiyah merupakan manifestasi dari semangat "*Penolong Kesengsaraan Oemoem*" (PKO). Pada frasa tersebut, kata *Oemoem* merupakan representasi dari pekerjaan kemanusiaan tanpa memandang latar belakang sosial. Dalam perkembangannya, spirit gerakan tersebut diperkuat oleh hadirnya LAZISMU (Amar, 2007) yang berada di bawah koordinasi PP Muhammadiyah (LAZISMU, 2018). LAZISMU diinisiasi pada 14 Juli 2002. Sampai tahun 2010, LAZISMU memiliki 30 jejaring, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan di tingkat amal usaha (Arfandi, 2014).

Contoh filantropi institusional Muhammadiyah lainnya adalah Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM), yang memiliki tiga level ruang lingkup, yakni: (1) level makro – mencakup struktur sosial, sistem politik, ideologi, kebijakan pemerintah, dan lingkungan; (2) level meso – pada lingkungan komunitas, norma sosial, dan nilai-nilai kultural; (3) level mikro – pada individual, sistem nilai, sikap kepribadian, pengetahuan, dan keterampilan. Secara umum, peran dari MPM adalah sebagai fasilitator dan koordinator program; inspirator dan motivator; dan mediator dari semua pihak terkait (MPM, 2018).

Baik LAZISMU maupun MPM sama-sama menggambarkan pola aktivitas filantropi institusional, yakni sebagai organisasi atau lembaga filantropi dengan pengelolaan fungsi dan peran secara mandiri namun tetap berada di bawah koordinasi Muhammadiyah. Momentum filantropi struktural ini bersifat rutin dan keberlanjutan, baik pada proses penghimpunan dana maupun pelaksanaan program.

Menurut Hilman Latief (wawancara, 7/12/2018), LAZISMU memiliki kepedulian mendalam untuk mencipta dan mengkultivasi nilai-nilai perdamaian dalam masyarakat, terutama pada upaya pencegahan konflik (*conflict resolution*) dengan memberdayakan masyarakat yang termarjinalisasi. Upaya pemberdayaan LAZISMU diwujudkan dalam pemberian beasiswa kepada komunitas miskin yang tidak terbatas pada yang Muslim, namun juga non-Mus-

lim, misalnya komunitas Kristen di Indonesia Timur (wawancara Hilman Latif, 7/ 12/2018).

Aksi filantropis LAZISMU juga terasa di daerah-daerah konflik, seperti di Rohingnya. Menariknya, menurut Hilman, bantuan-bantuan LAZISMU tersebut tidak hanya untuk komunitas Muslim, namun juga untuk komunitas Budha. Selain itu, LAZISMU tidak hanya mendirikan sekolah bagi komunitas Muslim Rohingnya, namun juga ikut memperbaiki vihara bagi komunitas Budha di Myanmar. Visi inklusif ini bertujuan agar program pemberdayaan LAZISMU tidak memperparah kesenjangan dan tidak menimbulkan kecemburuan baru (wawancara Hilman Latif, 7/12/ 2018).

Selain itu, Muhammadiyah juga memiliki TB Care Aisyiyah, didirikan pada 2004 untuk secara khusus melakukan kegiatan penanggulangan penyakit TB dan HIV. Lembaga *ad-hoc* ini melakukan beberapa *treatment* bagi masyarakat luas, seperti peningkatan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan rutin; dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang TB dan HIV dengan melibatkan kader dan tokoh masyarakat/tokoh agama, pasien TB-HIV, dan masyarakat secara luas, baik dalam hal penanggulangan ataupun tindakan kuratif.

Aksi filantropis persyarikatan Muhammadiyah juga merambah bidang penanggulangan bencana. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia merupakan negara 'cincin api' (*ring of fire*) yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk bencana alam. Menyadari permasalahan tersebut, pada 2007 dirintis Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB) di bawah koordinasi PP Muhammadiyah, atau biasa dikenal dengan sebutan MDMC (Muhammadiyah Disaster Management Center), yang kemudian dikukuhkan melalui Muktamar 2010. Daya gerak MDMC melingkupi tiga aktivitas –mitigasi dan kesiapsiagaan; tanggap darurat; dan rehabilitasi– yang semuanya ditujukan untuk seluruh wilayah NKRI sesuai wilayah hukum persyarikatan, baik di tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten/kota (MDMC, 2018a). Dari segi pendanaan, kegiatan MDMC ditopang dengan sinkronisasi dana-dana kemanusiaan dari LAZISMU dalam

posisi sebagai mitra (Rahmawati Husein dalam FGD, 3/11/2018). Dalam perkembangannya, MDMC melebarkan aktivitasnya hingga ke level internasional, seperti di Myanmar, Thailand, Palestina, Nepal, hingga Filipina. Kegiatan kemanusiaan MDMC tersebut memberi pesan adanya pergeseran mengenai pemaknaan atas penanggulangan bencana, yang awalnya melulu ditafsirkan sebagai 'bencana alam', kemudian dimaknai ulang sebagai 'bencana sosial', termasuk di dalamnya konflik dan perang.

2. Aksi Filantropi di Level Regional dan Internasional

2.1. Dasar Filosofi

Dasar filosofis dari filantropi Muhammadiyah berpusat pada interpretasi atas surat al-Maun. Para kader Muhammadiyah meyakini bahwa terdapat dua kunci kandungan makna di dalam al-Maun, yakni tentang *kadzab,* yang berarti orang yang mendustakan agama, serta *al-yatama* dan *al-masakin*, 'yatim dan miskin'. Kalimat *fa dzaalikalladzii yadu'ul yatiim* bermakna bahwa orang yang menghardik anak yatim dianggap mendustakan agama; dan *wa la yahudhdhu alaa ta'aamil miskin* bermakna bahwa orang yang menolak memberi makan orang miskin dianggap pula mendustakan agama.

Dalam perkembangannya, oleh kalangan intelektual Muhammadiyah, makna dari kata *yatama* dan *masakin* diperluas. Bahwa *yatama*, orang yatim, memiliki padanan makna dengan *orang yang tidak diperhatikan*. Berdasarkan pemikiran ini, dapat diasumsikan bahwa masyarakat yang tidak diperhatikan (marjinal) juga dapat dianggap orang yatim. Kemudian *masakin* itu dikonstruksi sebagai *diam* atau *tidak berdaya*. Artinya, bila masyarakat marjinal dan kelompok tidak berdaya diabaikan oleh mereka yang mampu, maka mereka yang mampu dapat dianggap sebagai pendusta agama.

Menariknya, makna filantropi tersebut tidak berhenti pada *fills the gap,* namun mencakup pula barang-barang yang berguna –sebagaimana arti dari surat al-Maun itu sendiri. Dalam pandangan para intelektual Muhammadiyah, barang yang berguna adalah yang

memiliki fungsi sosial sehingga bisa digunakan oleh orang lain. Artinya, apabila spirit pemberiannya tidak dilandasi oleh niatan untuk memberi barang yang berguna, maka individu tersebut masih dianggap sebagai pendusta agama. Dasar filosofis yang mendalam ini kemudian menjadi dasar bagi pergerakan filantropi Muhammadiyah, baik di level nasional maupun internasional.

2.2. Filantropi untuk Perdamaian

Melalui MDMC, Muhammadiyah telah memberikan sumbangsih nyata dalam konteks penanggulangan bencana di berbagai daerah konflik, baik di aras nasional, regional, hingga internasional. Di level nasional, MDMC terlibat di hampir semua peristiwa bencana alam dengan menggunakan pendekatan non-diskriminasi dan toleransi. MDMC juga menangani bencana sosial, seperti konflik sosial di Sampang dan Lampung. Di level regional dan internasional, MDMC sangat aktif di berbagai forum kebencanaan, seperti dalam Humanitarian Forum Indonesia (HFI), Indonesia Humanitarian Alliance (IHA), serta forum-forum bencana lain di tingkat internasional. Zona-zona bencana sosial seperti Rohingnya Myanmar, Jalur Gaza Palestina, hingga zona bencana alam seperti Nepal dan Filipina menjadi arena kontribusi MDMC.

Muhammadiyah, melalui MDMC, juga menjadi salah satu aktor kunci penting dalam pengembangan pengurangan risiko bencana di level nasional dan regional. Peran kunci ini dimainkan melalui forum-forum penanggulangan bencana. Salah satunya adalah dengan ikut mendirikan dan berperan aktif di dalam Humanitarian Forum Indonesia (HFI). HFI didirikan oleh tujuh NGO, yakni MDMC (Muhammadiyah Disaster Management Center), YTBI (Yayasan Tanggul Bencana Indonesia), YEU (Yakkum Emergency Unit), Dompet Dhuafa, Karina-KWI, WVI (Wahana Visi Indonesia), dan Perkumpulan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM). HFI menjadi kian berkembang setelah beberapa organisasi ikut bergabung, yakni PKPU pada 2010, Chuch World Service (CWS) Indonesia pada 2011, Habitat for Humanity pada 2012, Unit DRR

Union of Churches di Indonesia (Unit PRB PGI), dan Yayasan Rebana Indonesia (jaringan dengan gereja Baptis) pada 2013, Rumah Zakat pada 2014, LPBI NU (Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama) pada awal 2016, dan Baznas Tanggap Bencana. Hingga kini, HFI beranggotakan 15 organisasi. Melalui kerjasama organisasi lintas agama, HFI pun berkembang menjadi forum yang sangat penting dalam penanggulangan bencana di Indonesia (Husein, 2015).

Di samping di tingkat domestik, HFI juga memiliki komitmen untuk mengkampanyekan norma-norma dan prinsip-prinsip kemanusiaan di level regional dan global. Salah satunya adalah dalam penyelesaian konflik Myanmar. Upaya-upaya yang dilakukan HFI melalui jalur diplomasi berhasil menjadi pembuka jalan bagi bantuan-bantuan internasional dari lembaga-lembaga lainnya, termasuk oleh IHA. Di samping itu, Muhammadiyah juga turut mendorong agar HFI juga terlibat dalam filantropi di wilayah Gaza. Untuk konflik Gaza ini, kontribusi Muhammadiyah juga diwujudkan dengan komitmen menyumbangkan bantuan sebesar 2,5 miliar yang didistribusikan bersama LAZISMU dan MDMC pada 2014.

Di samping HFI, peran filantropis Muhammadiyah melalui MDMC di tingkat regional dan internasional juga dilakukan di dalam Indonesian Humanitarian Alliance (IHA), sebuah aliansi lembaga filantropi non-pemerintah di Indonesia yang diarahkan untuk terlibat dalam aksi kemanusiaan global guna mengakhiri krisis kemanusiaan (Rahmawati Husein dalam FGD, 3/11/2018). Aliansi ini beranggotakan MDMC, Dompet Dhuafa, PKPU, NU, Rumah Zakat, Lazis Wahdah, dan Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid. Bersama IHA, MDMC melakukan *humanitarian diplomacy* untuk melindungi hak-hak minoritas di Nepal, Myanmar, dan Bangladesh. Muhammadiyah, melalui jaringan PKPU *initiative* dan Muhammadiyah *Aid*, pun memiliki andil sebagai pilar pendanaan dan bantuan tim kemanusiaan bagi IHA. Pada tahun 2017, IHA memberikan bantuan berupa klinik kesehatan darurat bagi ibu yang

baru melahirkan berikut bayinya di kamp pengungsian Bangladesh (Dompet Dhuafa, 2017).

Muhammadiyah juga aktif berupaya untuk menjadi bagian dari filantropi global. Misalnya, melalui MDMC, Muhammadiyah menjadi peserta dalam *Global Humanitarian Policy Forum* di markas PBB, dua tahun berturut-turut, 2013 dan 2014. Demikian pula dengan peran Muhammadiyah sebagai *steering committe* dalam *World Humanitarian Summit* untuk kawasan Asia bagian utara dan bagian tenggara. Komite ini bertugas menyiapkan forum pertemuan konsultasi regional untuk mencari masukan, rekomendasi, dan contoh terbaik dari praktik bantuan kemanusiaan di tingkat Asia Pasifik yang hasilnya dibawa pada *World Humanitarian Summit* di Turki 2016 (Husein, 2015). Muhammadiyah melalui MDMC juga berperan aktif dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). Bahkan di beberapa tempat, MDMC yang merintis pendirian PRB di daerah-daerah (Husein, 2015).

Keterlibatan MDMC dalam forum-forum bencana di kancah regional dan internasional, salah satunya, didorong oleh komitmen untuk memastikan prinsip-prinsip non-diskriminasi dan toleransi benar-benar diimplementasikan dalam konteks penanggulangan bencana. Terjemahan dari komitmen ini dibuktikan, misalnya, dalam kegiatan tanggap darurat ketika terjadi bencana banjir bandang di Wasior pada 2010. Dalam kasus ini, tim MDMC melakukan pelayanan kesehatan dan pendampingan psikososial, serta pemberian bantuan bersama Karina (Caritas Indonesia), sebuah lembaga kemanusiaan di bawah koordinasi Konferensi Wali Gereja (KWI). Kolaborasi MDMC-Karina diperlukan untuk menembus daerah bencana Wasior yang mayoritas warganya beragama Katolik, sementara Karina memiliki jaringan sosial yang sangat kuat di daerah tersebut (Husein, 2015). Selain itu, pada penanggulangan bencana tsunami Mentawai 2010, tim MDMC melakukan pelayanan kesehatan dan bantuan logistik melalui kerjasama dengan para pendeta Kristen. Kerjasama dengan ke-

lompok Kristen juga dilakukan pada penanggulangan bencana erupsi Gunung Merapi 2010 di Yogyakarta, erupsi Gunung Lokon di Sulawesi Utara 2011, dan erupsi Gunung Rokatenda di Sikka, Nusa Tenggara Timur 2013 (Husein, 2015). Kolaborasi lintas agama dalam penanggulangan bencana ini menjadi bukti nyata dari kerja kemanusiaan MDMC yang tidak tersekat-sekat oleh batas identitas agama.

Dalam *World Humanitarian Day*, Muhammadiyah melalui MDMC mempromosikan buku *Fikih Kebencanaan* yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris (wawancara Budi Setiawan, 8/11/2018). Fikih ini merupakan produk dari Munas Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah ke-29, 2015. Fikih ini memuat kemampuan manajerial dalam pengelolaan diri dan sumber daya pada saat terjadi bencana, termasuk aturan mengenai pemenuhan hak-hak orang yang terkena bencana, hak untuk mengelola kerentanan, hak untuk menerima bantuan darurat, hak untuk perlindungan dan keamanan, dan sebagainya. Lebih detail, fikih ini mengatur tata cara peribadatan dalam situasi bencana, seperti penyucian dalam situasi bencana, tayamum, melakukan shalat di pakaian kotor, doa-doa dalam kasus evakuasi, doa-doa orang yang telah dinyatakan hilang dalam bencana, dana amal untuk orang yang terkena bencana, dan sebagainya (Azhar, 2018).

Atas kiprah dan kontribusinya dalam bidang penanggulangan bencana, MDMC menerima berbagai penghargaan. Tahun 2013 dan 2014, misalnya, MDMC dinobatkan sebagai 'Organisasi Masyarakat Paling Aktif dalam Kegiatan Penanggulangan Bencana' oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tahun 2018, MDMC menyabet penghargaan sebagai 'Ormas Terbaik dalam Penanggulangan Kebencanaan' dari Kementerian Dalam Negeri RI. MDMC juga mendapat penghargaan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atas dukungannya dalam penyediaan pelayanan kesehatan pada korban bencana gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (*Republika*, 2018).

Apresiasi tidak hanya ditujukan kepada MDMC secara kelembagaan, tetapi juga kepada para punggawa yang ikut membesarkan MDMC. Salah satunya adalah Rahmawati Husein, sosok perempuan yang telah lama malang melintang menggeluti bidang kebencanaan dan kemanusiaan. Sepanjang aktivitas karir di bidang kebencanaan, Rahmawati telah menyumbangkan kontribusi dalam hal kemanusiaan di level struktural Muhammadiyah, nasional, dan internasional. Di level struktural Muhammadiyah, ia dipercaya sebagai Wakil Ketua MDMC PP Muhammadiyah dan MLHPB PP Aisyiyah. Di level nasional, ia menjadi salah satu anggota kelompok penasihat bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI. Untuk level internasional, ia ditunjuk sebagai anggota IHA untuk Myanmar dan Bangladesh. Ia juga berkesempatan menjadi *Executive Board Member* dari *Advisory Group* untuk *Central Emergency Response Fund* (CERF) yang dibentuk berdasarkan kesepakatan dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-60 2005. CERF merupakan lembaga filantropi global di bawah PBB untuk situasi darurat kemanusiaan yang bersifat taktis, cepat, dan apolitis (LAZISMU, 2018). Tidak hanya itu, Rahmawati, juga mendapat penghargaan sebagai tokoh inspiratif 'Reksa Utama Anindha' dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 2015 (BPH UMY, 2015).

Andil filantropi Muhammadiyah pada level internasional juga dilakukan di daerah rawan konflik, seperti dalam kasus Rohingya di Myanmar. Dalam kasus ini, Muhammadiyah menginisiasi dibentuknya kawasan-kawasan penampungan pengungsi yang memudahkan para korban mengakses bantuan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Muhammadiyah pun menjadi salah satu distributor bantuan kemanusiaan global pada daerah rawan konflik tersebut. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rabbani (2018), selama berkecamuk konflik Rohingya pada 2017, Muhammadiyah melalui LAZISMU berhasil mengumpulkan dana bantuan lebih dari 20 miliar selama kurang lebih satu bulan untuk disalurkan dalam bentuk bantuan kesehatan bagi pengungsi Rohingya di Bang-

ladesh. Menariknya, aksi filantropi ini juga menyasar tidak hanya Masyarakat Rohingya, tetapi juga masyarakat miskin Myanmar, seperti bantuan kesehatan dan sekolah melalui PKPU. Bantuan kesehatan diberikan dalam bentuk 50.000 paket bantuan nutrisi untuk balita, melalui kerjasama dengan NGO lokal.

Kemudian pada September 2017, Muhammadiyah juga menginisiasi 'pasar perdamaian' di Rakhine State sebagai sarana untuk menjaga iklim politik di masyarakat agar tetap stabil. Pasalnya, tanpa adanya stabilitas, pendistribusian bantuan sosial dan aktivitas sekolah menjadi terganggu. Fungsi dari 'pasar perdamaian' adalah sebagai mediasi ekonomi untuk mempertemukan keunggulan komparatif barang ekonomi, baik dari masyarakat Myanmar maupun Rohingya. Dari proses ini akan terjadi hubungan saling membutuhkan antara orang Myanmar yang memiliki barang dagangan dari kota untuk ditukarkan dengan orang Rohingya yang memiliki barang dagangan dari hasil pertanian. Hubungan keduanya berlangsung atas dasar rasa saling membutuhkan dan saling melengkapi (wawancara Budi Setiawan, 8/11/2018).

Di level nasional, peran filantropi dalam upaya perdamaian dan rekonsiliasi konflik tercermin dari upaya Muhammadiyah dalam membantu korban konflik Kasus Sampang. Ketika kasus tersebut terjadi, kemudian kelompok Syiah mengungsi, Muhammadiyah melalui MDMC berupaya terlibat dengan memberi perhatian khusus pada anak-anak usia sekolah, melalui pendidikan. Hal itu dilakukan untuk menghindari trauma akibat kejadian yang mereka alami sepanjang konflik berlangsung (Rahmawati Husein dalam FGD, 3/11/2018).

Pendampingan MDMC terus berlanjut dengan mendirikan posko di Perumahan Puspagro Sidoarjo, Jawa Timur. Kegiatan ini masih berlangsung hingga saat ini. Termasuk di dalamnya, mengadvokasi korban konflik Sampang dengan membantu santunan biaya kesehatan dan pengurusan administrasi. Urusan administrasi ini menjadi rumit dilakukan karena beberapa warga Sampang

yang menjadi korban konflik tidak membawa surat-surat berharga apa pun (wawancara Budi Setiawan, 8/11/2018). Di samping itu, penguatan ekonomi produktif juga turut dilakukan dengan menjadikan MDMC sebagai mediator antara pencari kerja dan perusahaan atau proyek-proyek lepas penyedia kerja. Selain sebagai fasilitator, dalam urusan ini Muhammadiyah juga memainkan peran penting dalam manajemen keuangan para korban konflik, yakni dengan mengelola gaji mereka guna diarahkan sebagai investasi dan tabungan jangka menengah.

Aktivitas filantropi Muhammadiyah juga dilakukan melalui resolusi konflik dalam konflik Lampung pada 2012, yakni antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang asal Bali. Konflik itu berakar pada konflik ekonomi yang dibalut dengan konflik agama (wawancara Budi Setiawan, 8/11/2018). Filantropi Muhammadiyah dilakukan dengan memberikan edukasi kreatif bagi anak-anak, yakni melalui permainan-permainan yang memungkinkan anak-anak dari kedua pihak dapat bermain bersama. Harapannya, akan tumbuh rasa malu dari orang tua dari masing-masing pihak ketika melihat anak-anak mereka justru dapat bermain bersama secara damai. Cara ini diharapkan dapat mengurangi tensi konflik.

***

Dari pemaparan di atas dapat disarikan bahwa aktivitas filantropi Muhammadiyah diterjemahkan di dalam dua aras kegiatan: (1) secara struktural, yakni pendayagunaan organisasi baik yang berbentuk organisasi otonom atau independen, maupun yang berbentuk majelis di bawah koordinasi PP Muhammdiyah; (2) secara kultural, dengan sifat kelembagaan yang mirip dengan kategori secara institusional namun gerak momentumnya bersifat sewaktu-waktu sebagai respons atas hal-hal tak terduga, seperti bencana alam dan konflik sosial. Selain itu, aktivitas filantropi juga dilakukan secara komunal maupun perorangan di luar struktur Muhammadiyah. Menariknya, baik secara struktural maupun kultural, filantropi Muhammadiyah telah menyasar tidak hanya

'bencana alam' namun juga merambah pada 'bencana sosial', seperti daerah konflik, perang, dan krisis kemanusiaan.

Aktivitas filantropi Muhammadiyah juga telah mencapai di luar wilayah kedaulatan Indonesia (yang notabene bukan wilayah susunan organisasi persyarikatannya). Zona-zona konflik seperti Filipina, Palestina dan Rohingnya telah menjadi area gerakan filantropi dan kemanusiaan MDMC. Di level nasional, MDMC dan LAZISMU terlibat dalam penanganan bencana sosial, seperti konflik Sampang dan Lampung. Kiprah filantropi dan kemanusiaan ini senada dengan pernyataan Muhammad Ali (dalam Latief, 2013) bahwa filantropi berbasis agama, khususnya Islam, pada dasarnya menggunakan landasan modal sosial, yakni semangat (*ghirah*) dan saling percaya *(trust)* antar umat. Dengan demikian, tak dapat dinafikan bahwa kegiatan filantropi umat dapat mencapai luar batas wilayah hukum organisasi dengan dasar semangat solidaritas antar umat dan atas dasar kemanusiaan.

E. Advokasi Minoritas & HAM

Bagian ini merekam advokasi dan pembelaan yang dilakukan Muhammadiyah terhadap kelompok minoritas, baik yang dilakukan secara personal, kelembagaan, dan organisasi; serta advokasi yang berada pada level lokal, nasional, regional, dan global.

1. Advokasi Minoritas dan HAM: Struktural dan Kultural

Peran advokasi sejatinya telah dilakukan Muhammadiyah sejak didirikan. Pada masa itu, advokasi terhadap kelompok minoritas bersifat secara struktural-organisatoris, dilakukan secara resmi oleh organisasi (lihat bagian *Kilasan Sejarah Peran Muhammadiyah*, pada bab ini). Berbeda dengan hal tersebut, khususnya pada masa pasca Reformasi atau akhir 1990-an, advokasi atau pembelaan terhadap minoritas sebagian besar dilakukan secara personal atau kultural. Muhammadiyah secara organisatoris, melalui beberapa

hasil putusan Muktamar, memberi dorongan agar tidak melakukan persekusi terhadap minoritas dan memilih jalan dialog.

Beberapa contoh bisa disebut terkait advokasi personal atau kultural di kalangan Muhammadiyah. Misalnya, pembelaan M. Dawam Rahardjo terhadap kelompok *Salamullah,*[4] yang sempat memunculkan pro-kontra di dalam Muhammadiyah. Dalam hal ini, Dawam mencoba membela hak sipil Lia Eden dan jamaahnya dan mengharapkan tidak mengkriminalisasikannya, atau bahkan menyesatkannya. Contoh lainnya adalah hadirnya Moeslim Abdurrahman dalam sidang MK sebagai saksi ahli dalam *judicial review* terhadap UU No.1/PNPS 1965 (2010). Dia secara tegas, atas pertimbangan antropologis, mendorong agar UU tersebut harus dicabut.[5] Ada beberapa saksi ahli yang dihadirkan oleh pemohon. Moeslim menjadi salah satu dari tiga saksi ahli yang secara tegas meminta agar UU tersebut dicabut. Dua lainnya adalah Garin Nugroho dan Thamrin Amal Tomagola.

Demikian juga dengan aktivitas Buya Syafii Maarif usai menjabat sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah (2005). Dia terlibat dalam banyak gerakan, lembaga, dan aktivitas pembelaan terhadap minoritas. Misalnya, yang belum lama lewat, pada awal Februari 2018, dia mendatangi gereja St. Lidwina Bedog, Gamping, Yogyakarta yang mengalami penyerangan; juga mendatangi Mushalla Fathurrahman di Jambidan, Bantul, Yogyakarta, yang mengalami pembakaran.

---

4 Komunitas agama yang menamakan diri sebagai Komunitas Eden, yang didirikan Lia Aminuddin (atau dikenal dengan nama Lia Eden). Komunitas ini sejak 2002 menyatakan diri keluar dari Islam dan menjadi Komunitas Eden. Lihat, M. Dawam Rahardjo, *Merayakan Kemajemukan, Kebebasan, dan Kebangsaan* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 356. Bandingkan juga, Bahrul Haq Al-Amin, “Kebebasan Beragama di Indonesia dalam Perspektif M. Dawam Rahardjo”, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009.

5 Lihat, *Risalah Sidang Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Mahkamah Konstitusi, 24 Maret 2010. Secara analitis, dapat dilihat, Muhamad Isnur (ed), *Agama, Negara & Hak Asasi Manusia: Proses Pengujian UU 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan/atau Penodaan Agama di Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: LBH Jakarta, 2012), hlm. 170-171.

Contoh lainnya adalah hadirnya Ahmad Najib Burhani sebagai saksi ahli di MK dalam sidang kasus Ahmadiyah pada November 2017 (Basyarat, 2018). Dalam kesaksiannya, ia memperkuat argumentasi akademis agar siapa pun tidak begitu saja mengklaim sesat terhadap Ahmadiyah, dan adalah tidak tepat jika warga Jemaah Ahmadiyah disebut sebagai kelompok aliran sesat. Menurutnya, ada kesalahpahaman dari umat Islam non-Ahmadiyah dalam melihat ajaran Ahmadiyah sehingga menimbulkan prasangka dan tuduhan yang tidak benar terhadap mereka (Burhani, 2017).

Meskipun tidak mengadvokasi melalui jalur hukum/legal, melainkan logistik dan psikologis, beberapa lembaga di lingkungan Muhammadiyah juga melakukan tindakan serupa. Data baru yang terekam menunjukkan, misalnya, advokasi secara rutin dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dengan memberikan bantuan logistik dan psikologis kepada para jamaah Syiah Sampang, Madura ketika mereka mengungsi ke Gedung Olah Raga (GOR) Wijaya Kusuma, Sampang sejak November 2012 hingga dipindahkan ke Sidoarjo (2013). Ketika jamaah Syiah itu tinggal di pengungsian Rusun Puspa Agro, Jemundo, Taman, Sidoarjo, Jawa Timur, MDMC hadir dengan melayani kebutuhan logistik seluruh pengungsi selama tiga tahun penuh (Rahmawati Husein dalam FGD, 3/11/ 2018).

Segaris dengan aksi ini adalah advokasi HAM yang dilakukan oleh PP Muhammadiyah bekerjasama dengan Komnas HAM pada kasus Siyono dan keluarganya yang dianggap memperoleh tindakan tidak manusiawi dari aparat keamanan (April 2016). Kematian Siyono dianggap tidak wajar, oleh karenanya harus dilakukan otopsi terhadap jenazahnya hingga akhirnya ditemukan bekas pemukulan yang diyakini menjadi penyebab kematiannya. Advokasi tersebut para praktiknya bukan hanya dilakukan oleh PP Muhammadiyah dan Komnas HAM, tetapi juga melibatkan PP Pemuda Muhammadiyah dan Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM). Dalam garis yang sama, KOKAM terlibat dalam memperjuangkan nasib petani Rembang dan Ka-

rawang atas tanah mereka yang akan diambil paksa (Setiawan, 2018). Demikian juga halnya dengan aktivitas-aktivitas KOKAM di banyak daerah. Mereka terlibat dalam pengamanan peribadatan yang dilakukan umat agama lain, misalnya pada perayaan Natal (utamanya di Indonesia Timur), dan bahkan terlibat dalam kerja bersama membangun dan memperbaiki rumah ibadah.

Secara kelembagaan (non-struktural) advokasi juga dilakukan oleh Maarif Institute[6] dengan *knowledge advocation*-nya yang mengusung isu kebhinekaan, keberagaman, non-diskriminasi, toleransi, dan inklusifitas. Advokasi tersebut dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan, baik pelatihan, workshop, penerbitan jurnal dan buku, seminar dan konferensi, dan lain-lain.

Dalam sejarahnya, perempuan Muhammadiyah juga melakukan advokasi kemanusiaan dengan fokus pada isu perempuan. Misalnya, pada era 1990an, perempuan-perempuan Muhammadiyah mendirikan sekaligus menggawangi LSM Rifka Annisa di Yogyakarta. Nama-nama yang cukup menonjol saat itu adalah Noordjannah Djohantini, Latifah Iskandar, Sitoresmi Prabuningrat (meskipun kemudian nama terakhir ini mengundurkan diri dari Rifka Annisa). Pada pertengahan 1990-an Ruhaini Dzuhayatin juga bergabung dalam lembaga ini. Pendirian Rifka Annisa ini dapat dimaknai sebagai salah satu cara untuk makin masif melakukan pembelaan terhadap hak perempuan (utamanya dalam lingkup keluarga), yang awalnya menjadi bagian dari program aktivitas mereka di Aisyiyah.

Masih dalam garis advokasi terhadap HAM, khususnya terhadap isu perempuan, terpilihnya Ruhaini Dzuhayatin sebagai Komisioner HAM Organisasi Kerjasama Islam (OKI atau OIC), dan Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC) menjadi hal yang patut dicatat di dalam dokumentasi advokasi terhadap minoritas dan HAM di tubuh Muhammadiyah. Demikian

6 Maarif Institute (atau lengkapnya *Maarif Institute for Culture and Humanity*) didirikan pada 2002 oleh Moeslim Abdurrahman dengan dukungan Ahmad Syafii Maarif (yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah).

pula halnya dengan keterlibatan aktif Rita Pranawati dalam Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang aktif dalam advokasi terhadap hak-hak anak dan pelindungan anak; juga kiprah Dewi Candraningrum dalam melakukan advokasi kepada penduduk di Kendeng, Pati, Jawa Tengah yang sedang mempertahankan tanah-nya dari upaya kooptasi dan akuisisi perusahaan semen.

Secara organisasi, isu advokasi terhadap minoritas selalu mengemuka di hampir setiap Muktamar. Sebagai contoh, dalam hasil putusan Muktamar ke-47 di Makassar 2015, Muhammadiyah menegaskan beberapa hal penting tentang isu advokasi terhadap minoritas. *Pertama*, Muhammadiyah mengedepankan keberagaman yang moderat dan toleran. Muhammadiyah memandang perilaku mengkafirkan pihak lain (*takfiri*) sangat bertentangan dengan watak Islam yang menekankan kasih-sayang (*Berita Resmi Muhammadiyah*, edisi September 2015: 112 dan 117). *Kedua*, Muhammadiyah mendorong adanya dialog Sunni-Syiah yang beradab di Indonesia. Dialog diupayakan untuk meningkatkan saling memahami persamaan dan menghormati perbedaan (*Berita Resmi Muhammadiyah*, edisi September 2015: 113). *Ketiga*, Muhammadiyah mempertegas diri untuk melakukan perlindungan terhadap kelompok minoritas di seluruh dunia. Minoritas bukan hanya dalam konteks agama, melainkan juga etnis dan kelompok-kelompok yang termarjinalkan secara sosial dan ekonomi (*Berita Resmi Muhammadiyah*, edisi September 2015: 127). *Keempat*, Muhammadiyah selalu terlibat aktif dalam penanganan pengungsi di mana pun berada yang terkait dengan berbagai isu, baik agama, etnis, ekonomi, maupun eksploitasi dan perdagangan manusia (*Berita Resmi Muhammadiyah*, edisi September 2015: 129).

***

Demikianlah, keberpihakan atau advokasi Muhammadiyah pada kaum minoritas terlihat sangat kuat. Advokasi itu dilakukan secara struktural dan kultural. Oleh Muhammadiyah, definisi minoritas bahkan diperluas, tidak melulu bermakna pada minoritas berbasis

agama. Mengikuti perkembangan terutama pada masa pasca Reformasi, definisi minoritas kemudian diperluas menjadi pihak yang termarjinalkan, baik secara sosial ataupun ekonomi.

F. Bina Damai dan Rekonsiliasi Konflik

Bagian ini menarasikan kiprah dan kontribusi Muhammadiyah dalam upaya bina damai, rekonsiliasi, dan resolusi konflik baik di level nasional, regional, dan internasional. Di level nasional, Muhammadiyah berperan besar dalam penyelesaian konflik-konflik sosial di Indonesia. Di era transisi demokrasi pasca kejatuhan rezim Soeharto, misalnya, Muhammadiyah terlibat dalam proses penyelesaian konflik di Aceh, Ambon, Papua, dan Poso, empat daerah yang saat itu merupakan *hotspot* konflik di Indonesia. Demikian juga, Muhammadiyah terlibat dalam penyelesaian konflik di level internasional: berperan aktif dalam ikhtiar bina damai dan resolusi konflik di kalangan Bangsamoro, Mindanao di Filipina, Pattani di Thailand, Rohingnya di Myanmar, konflik Palestina-Israel hingga konflik laten di semenanjung Korea. Inisiatif-inisiatif bina damai dan resolusi konflik juga dilakukan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah dengan menyelenggarakan forum-forum dialog antar komunitas agama, pemimpin publik, pengambil kebijakan, akademisi, dan media, maupun turun langsung dalam berbagai diplomasi dan misi perdamaian di berbagai daerah konflik di berbagai negara.

1. Muhammadiyah Sebagai Juru Damai Bangsa

Perkembangan persoalan dan tantangan bangsa yang kian kompleks mendorong Muhammadiyah untuk berbenah dan berubah guna menjawab tantangan zaman. Memasuki abad kedua usianya, pada Muktamar ke-47 di Makassar (3-7 Agustus 2015), Muhammadiyah mencetuskan trisula periode kedua. Trisula pada periode pertama terdiri atas pendidikan (*schooling*), kesehatan (*healing*), dan sosial (*feeding*). Sedangkan trisula periode kedua mencakup

Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM), dan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU). Kemunculan trisula baru ini merupakan salah satu langkah perjuangan Muhammadiyah untuk fokus pada persoalan penanggulangan bencana dan resolusi konflik, pemberdayaan masyarakat, serta mobilisasi dana umat (Syamsuddin dalam Amirrachman, 2015).

Selaras dengan semangat itu, Muhammadiyah terlibat aktif dalam mengupayakan perdamaian di beberapa daerah, baik di level nasional maupun internasional. Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Ahmad Syafii Maarif (1998-2005), misalnya, sangat responsif terhadap persoalan-persoalan kebangsaan dan kemanusiaan. Hal ini terlihat dalam langkah Muhammadiyah yang lebih proaktif dan responsif dalam membantu memecahkan persoalan-persoalan sosial politik bangsa, seperti mengadakan seminar, temu elite Muhammadiyah nasional, dialog elite lokal, dan menetapkan anggota yang mengunjungi daerah konflik dengan tujuan pemetaan konflik maupun membangun dialog.

Muhammadiyah mengejawantahkan konsep *ummatan washatan* ke dalam aksi-aksi nyata bina damai dan resolusi konflik di tengah masyarakat Indonesia dan dunia. Muhammadiyah ingin secara serius menjadi penengah dalam konflik dengan memegang teguh Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*. Pada tahun 2000-an, saat rezim Soeharto jatuh, Indonesia dilanda berbagai konflik komunal di daerah-daerah yang dimarjinalisasi oleh pemerintah pusat, seperti di Aceh, Poso, Ambon, dan Papua, empat daerah yang menjadi episentrum konflik komunal yang paling berdarah di Indonesia di kala itu. Bahkan, di Aceh dan Papua, wacana separatisme dan disintegrasi begitu kuat sebagai akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Merespons situasi genting tersebut, Muhammadiyah mengambil langkah awal dengan menerjunkan tokoh-tokohnya untuk melakukan penjajakan pada masing-masing lokasi konflik guna memperoleh informasi terbaru dalam rangka menetapkan peran yang tepat: 9-13 Februari 2003,

Muchlas Abror mengunjungi Papua; 17 Februari 2003, Rosyad Sholeh dan Dasron Hamid ke Aceh; 27-28 Februari 2003, Haedar Nashir dan Muchlas Abror mengunjungi Ambon; 28 Februari-1 Maret 2003, Dasron Hamid dan Hajriyanto Y Thohari melakukan kunjungan ke Poso.

Tindak lanjut dari penjajakan awal Muhammadiyah tersebut adalah menyelenggarakan seminar nasional bertema "Resolusi Konflik dan Integrasi Nasional" pada Maret 2003. Seminar ini menghadirkan pembicara Chusnul Mar'iyah, ahli resolusi konflik tanah air khususnya Aceh, yang menyampaikan materi berjudul "Conflict Resolution and Social Integration in Conflict Area: Political Perspective". Peserta pada seminar ini adalah perwakilan dari wilayah konflik, seperti PWM Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Sebagai representasi perempuan, Chusnul Mar'iyah yang juga aktif di 'Aisyiyah mengusulkan untuk melibatkan perempuan sebagai salah satu *stakeholder* perdamaian. Hal ini penting karena perempuan memiliki potensi dan peran krusial, baik dalam konflik sosial yang terjadi maupun sebagai juru damai pasca-konflik. Oleh karenanya, dalam mengupayakan perdamaian, sangat penting untuk melibatkan perempuan Muhammadiyah melalui Nasyiatul Aisyiyah.

Lanjutan dari kunjungan penjajakan dan seminar tersebut adalah pertemuan elit Muhammadiyah secara nasional di kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta. Pertemuan ini menghasilkan *Maklumat Muhammadiyah* terkait berbagai permasalahan yang dihadapi Indonesia, termasuk di dalamnya masalah konflik. Beberapa poin terkait rekonsiliasi konflik yang tercantum pada maklumat ini adalah: *pertama*, konflik yang terjadi disebabkan oleh krisis yang belum kunjung berakhir. *Kedua*, pemerintah belum memahami sepenuhnya akar konflik karena konflik melibatkan beragam instrumen seperti politik, hubungan pusat dan daerah, kesenjangan ekonomi, kondisi ketidakadilan, sentimen etnis dan agama sehingga memerlukan pemahaman komprehensif guna me-

nentukan langkah yang tepat. *Ketiga*, program resolusi konflik dan integrasi nasional harus mengedepankan pengelolaan konflik dengan memperhatikan faktor-faktor berikut: konstruksi sosial masyarakat Indonesia; otonomi dan partisipasi politik; kebijakan pemerintah (keamanan masyarakat); inisiatif kelompok-kelompok keagamaan (dialog, pengajaran toleransi); inisiatif masyarakat; dan inisiatif perdamaian melalui perempuan. *Keempat*, konflik keagamaan bukanlah faktor tunggal, melainkan terkait dengan faktor struktural, sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Oleh karena itu agama, dalam batas tertentu, juga dapat menjadi instrumen resolusi konflik dan integrasi nasional. *Kelima*, gerakan keagamaan dapat menjadi moderator yang berfungsi meredam konflik dan menumbuhkan budaya integrasi. *Keenam*, Muhammadiyah perlu memainkan fungsi mediasi dan advokasi dalam mengembangkan resolusi konflik dan integrasi sosial, serta perlu memperkuat proses demokrasi, pengembangan *check and balances*, penyadaran kesadaran penegakan hukum, penumbuhan kelompok-kelompok sosial swadaya, pemberdayaan perempuan, pengembangan relasi-relasi sosial multikultural, pengembangan budaya kewargaan (*civil culture*), dan pencerdasaan masyarakat. *Ketujuh*, negara harus menjalankan fungsinya untuk menegakkan hukum, pelayanan publik, dan perlindungan terhadap warga negara agar kondisi anarkisme di masyarakat tidak mekar (lihat *Suara Muhammadiyah*, No.07, Tahun ke-88, 1-15 April 2003, pada suplemen).

Selain maklumat tersebut, pertemuan itu juga menghasilkan identifikasi sejumlah masalah yang berkembang dan resolusi yang tepat untuk konflik di masing-masing daerah. Dan sebagai bentuk nyata dalam mengupayakan perdamaian, Muhammadiyah membentuk tim untuk diberangkatkan ke daerah-daerah konflik di Indonesia, seperti Aceh, Papua, Maluku, dan Poso. Tim ini nantinya berkonsolidasi dengan pemerintah guna memberikan solusi dalam mengatasi konflik di daerah-daerah tersebut.

PP Muhammadiyah kemudian membentuk dua tim. Tim I dipimpin oleh Ketua PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif, dan

Tim II dipimpin oleh Wakil Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin. Tim I melakukan dialog di Papua dan Aceh sedangkan Tim II melakukan dialog di Maluku dan Poso. Pada proses ini, kedua tim turut melibatkan kelompok perempuan dari Aisyiyah untuk berperan dalam dialog di masing-masing daerah. Program resolusi konflik Muhammadiyah tersebut bersifat moralis dengan pendekatan kemanusiaan, pengalaman agama, politik, dan ekonomi (*Suara Muhammadiyah*, 2003).

Tim I, pimpinan Ahmad Syafii Maarif, kemudian menuju Papua dengan anggota tim Dasron Hamid, Rosyad Sholeh, Chamamah Soeratno, Rahmawati Husein, serta satu orang anggota PGI, yakni Pdt. Engkih Ganda Kusumah. Tim ini berhasil membangun dialog-dialog dengan tokoh dan elit-elit lokal Papua. Hasil laporan dari PP Muhammadiyah itu menunjukkan bahwa persoalan utama konflik di Papua bukan disebabkan oleh pertikaian agama sebagaimana sering muncul di media massa, melainkan akibat kesenjangan, ketidakadilan, dan konflik antara pemerintah pusat dan daerah. Selain ke Papua, Ahmad Syafii Maarif juga memimpin dialog dengan masyarakat Aceh. Tim ini beranggotakan Rosyad Sholeh, Muchlas Abror, Dasron Hamid, Haedar Nashir, Hajriyanto Y. Thohari, Siti Hadirah Ahmad, dan Rahmawati Husein.

Sementara itu, di Tim II, Din Syamsuddin bersama Haedar Nashir, Hajriyanto Y. Thohari, Said Tuhuleley, Wardanah Muhadi, Noordjannah Djohantini, Saud El-Hujjaj, dan Hery Sucipto melakukan dialog dengan tokoh-tokoh di Ambon. Hasil dari dialog itu, antara lain, *pertama*, mendukung suasana kondusif yang tercipta setelah pertemuan Malino agar terus direalisasikan secara konsisten; *kedua*, perlu dilakukan dialog antartokoh di Ambon; *ketiga*, pemerintah (pusat dan daerah) harus menjadi pengayom dan mediator untuk merekatkan integrasi dan meredam konflik; *keempat*, perbaikan sosial ekonomi dan sarana dan prasarana; *kelima*, pemerintah harus bersikap tegas terhadap separatis RMS.

Selain ke Ambon, Din Syamsuddin juga melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah dan umat Muslim di Poso. Beberapa

hasil dari pertemuan itu, di antaranya, adalah umat Islam harus (1) memperkuat hati, keyakinan, kesabaran dan memperkokoh ikhtiar; (2) membangun jaringan komunikasi yang efektif dan efisien, dan selalu bersikap *tabayyun* atas seluruh informasi yang diterima; (3) melengkapi data informasi yang telah terhimpun dalam pokja dan mendorong dalam rangka pemantapan rekonsiliasi konflik (lihat *Suara Muhammadiyah*, No.07, Th. Ke-88, 1-15 April 2003, pada suplemen).

Peran bina damai tidak hanya dilakukan oleh delegasi tim-tim kecil dari PP Muhammadiyah, namun juga melalui struktur-struktur lokal kepemimpinan Muhammadiyah di daerah. Misalkan, di Poso pasca konflik komunal, inisiatif bina damai datang dari perempuan-perempuan lokal yang mengadakan 'pasar perdamaian' pada setiap hari minggu sebagai upaya untuk mempertemukan berbagai kelompok dan komunitas lintas agama, suku, dan etnis. Kehadiran 'pasar perdamaian' ini berhasil mengurangi tensi dan kecurigaan antar anggota masyarakat yang saat itu begitu kuat tertanam di masyarakat Poso. Menurut Rahmawati Husein (FGD, 3/11/2018) perempuan-perempuan Aisyiyah menjadi salah satu penggerak utama 'pasar perdamaian' tersebut. Hal ini mengonfirmasi peran sentral perempuan dalam pembangunan demokrasi di daerah pasca-konflik. Di Aceh, Tengku Imam Suja' yang merupakan Ketua PWM Aceh terlibat aktif dalam upaya resolusi konflik di Serambi Mekah tersebut. Tengku Imam Suja' berperan sebagai mediator dalam perundingan perdamaian antara pemerintah dan GAM. Sedangkan di Maluku, terdapat Drs Idrus T, M.Si. yang terlibat dalam perundingan di Bali dan Malino (lihat *Suara Muhammadiyah,* No.07, Th. Ke-88, 1-15 April 2003, pada suplemen hlm 1).

2. *Bina Damai di Kancah Regional dan Internasional*

Melintasi usia menuju abad keduanya, Muhammadiyah mulai mengepakkan sayap-sayap perdamaian di kancah regional dan internasional. Muhammadiyah berperan aktif dalam proses resolusi konflik dan pembangunan perdamaian di berbagai negara. Misi

perdamaian yang diemban Muhammadiyah di kancah regional dan global ini merupakan manifestasi dari '*Islam rahmanatan lil 'alamin*' yang diterjemahkan dalam kerja-kerja kemanusiaan yang konkret. Kontribusi Muhammadiyah dalam penyelesaian konflik-konflik di dunia juga menjadi pengejewantahan jati diri dari 'kosmopolitanisme Islam' Muhammadiyah yang diamalkan melalui aksi-aksi nyata. Visi kosmopolitanisme Islam ini merupakan tafsir atas konsep 'Islam Berkemajuan' yang diusung oleh Muhammadiyah sejak muktamar ke-47 di Makassar, 2015. 'Islam Berkemajuan' memiliki makna sebagai tekad untuk menjadi gerakan pencerahan yang mampu berdialog, berpikir *outward looking*, dan percaya diri mempromosikan gagasan dan praktik Islam Indonesia ke dunia luar (Mu'ti dkk, 2015).

Salah satu terjemahan utama dari praktik 'Islam Berkemajuan' adalah ikhtiar internasionalisasi organisasi. Ikhtiar ini dimulai sejak era kepemimpinan Din Syamsuddin (2005-2010). Di era itu, PP Muhammadiyah melalui Lembaga Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri (LHKI) menggalakkan pendirian Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) di berbagai negara. Eksistensi PCIM kini sudah tersebar mulai dari Jerman, Inggris, Amerika Serikat, Thailand, Malaysia, Jepang, hingga Australia. Selain itu, Muhammadiyah juga menjadi anggota resmi Dewan Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN ECOSOC) tertanggal 1 Agustus 2011. Muhammadiyah menerima *Special Consultative Status* dari Dewan Ekonomi PBB sebagai perwakilan dari *Non-Government Organization* (NGO) (Ridwan, 2016).

Kiprah internasionalisasi Muhammadiyah di kancah global juga terejewantahkan dalam berbagai bentuk. Muhammadiyah menerjemahkan 'kosmopolitanisme Islam' ke dalam tiga bentuk misi perdamaian dan resolusi konflik, yaitu: (1) turut aktif dalam upaya-upaya penyelesaian konflik secara langsung di zona-zona konflik di berbagai negara; (2) penyelenggaraan forum-forum internasional yang memfasilitasi berbagai pihak (pihak yang berkonflik, tokoh agama, pemimpin dunia, NGO, dan tokoh publik) untuk saling ber-

dialog dan bertukar pikiran mengenai masa depan perdamaian dunia; (3) agensi perdamaian yang dilakukan oleh kader-kader Muhammadiyah di kancah global.

Di level regional, Muhammadiyah turut aktif menyelesaikan konflik di Asia Tenggara seperti konflik Bangsamoro di Mindanao, Filipina dan Pattani di Thailand serta mengirim misi humanitarian dalam konflik Rohingnya, Myanmar. Sementara itu, di level internasional, Muhammadiyah terlibat dalam misi penyelesaian konflik dan pembangunan perdamaian di Republik Afrika Tengah, misi humanitarian di Palestina, dan pemberian pengakuan kemerdekaan untuk Kosovo.

Di Mindanao, Filipina, Muhammadiyah memiliki rekam jejak panjang dalam upaya memediasi kelompok-kelompok yang bertikai dalam konflik antara Bangsamoro dan pemerintah Filipina. Atas peran-peran diplomatik ini Muhammadiyah dinilai turut berkontribusi dalam terciptanya kesepakatan damai melalui *Framework of Agreement 2012* antara Pemerintah Filipina dan MILF (Sandi & Maarif, 2014). Kiprah Muhammadiyah di Mindanao ini dapat dilihat dari keterlibatannya sebagai anggota resmi dalam International Contact Group (ICG) sejak 2009. Komposisi anggota ICG terdiri dari lembaga pemerintah dan non-pemerintah, yang masing-masing terdiri dari empat unsur. Perwakilan dari pemerintah adalah Inggris, Jepang, Turki, dan Arab Saudi, sedangkan dari organisasi non-pemerintah adalah Conciliation Resources, Muhammadiyah, The Asia Foundation, dan the Centre for Humanitarian Dialogue (Ridwan dalam Amirrachman, 2015). Fungsi ICG dalam konflik ini adalah untuk menghadiri dan mengamati proses negosiasi, mengunjungi dan menyarankan pihak yang bernegosiasi, dan bertemu dengan para pihak yang terlibat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada (Fitrah dalam Surwandono, 2013).

Sebagai anggota resmi ICG, Muhammadiyah turut aktif dalam perundingan Moro, Filipina. Muhammadiyah langsung aktif dalam forum internasional ICG I tahun 2009 di Malaysia. Di forum

panel yang dipimpin oleh Tengku Dato Abdul Gafar dari Malaysia itu Muhammadiyah merupakan satu-satunya aktor yang menggunakan narasi dan bahasa keagamaan untuk resolusi konflik (Surwandono, 2015). Panel tersebut dihadiri oleh perwakilan ICG dari the Asia Foundation, Concialiation Resources, the Henry Dunat Centre, Ketua Panel MILF, Mohagher Iqbal, Duta Besar United Kingdom untuk Filipina, perwakilan dari Jepang, serta delegasi Muhammadiyah yang terdiri dari Sudibyo Markus, Imam Robandi, Surwandondono, Ahmad Ma'ruf dan Tri Astuti (Syamsuddin dalam Medina, 2017). Kehadiran ICG di tengah konflik Bangsamoro dan pemerintah Filipina disambut baik oleh berbagai pihak. Kiprahnya sebagai mediator dan negosiator antara pihak-pihak yang berkonflik menjadi pendukung dan suplemen kerja pemerintah Malaysia yang dimandatkan sebagai mediator utama konflik ini (Fitrah, 2012). Pasca perundingan damai di Malaysia tersebut, praktis Muhammadiyah menjadi satu-satunya *Islamic-faith based organization* yang memainkan peran *supporting unit* dalam proses rekonstruksi Bangsamoro.

Sebagai bentuk kelanjutan komitmen dalam ikut menciptakan perdamaian untuk Bangsamoro, Muhammadiyah mengirim tim kecil untuk menjalankan misi perdamaian ke Filipina pada 12-21 Juni 2011. *Scoping mission* yang dibentuk oleh PP Muhammadiyah ini terdiri atas Sudibyo Markus (Lembaga Hubungan Luar Negeri Muhammadiyah), Imam Robandi (Majelis Dikdasmen), Tri Hastuti Rohiman, M.Si (Diklat Aisyiyah), Ahmad Ma'ruf, SE, M.Si (MPM), dan Surwandono (Pakar Bangsamoro dan dosen UMY). Dari kunjungan ini, Muhammadiyah berhasil menyusun *Humanitarian Road Map in Mindanao 2011-2021* (Sandi & Maarif, 2014). Pengiriman *scoping mission* ini membuktikan bahwa Muhammadiyah berhasil menjalankan strategi *multi-track diplomacy* dengan tidak hanya terlibat dalam perundingan-perundingan formal, namun juga terjun langsung ke zona konflik untuk mengetahui kondisi aktual di lapangan. Untuk mencegah kesan Muhammadiyah berpihak kepada salah satu kelompok yang bertikai

di Mindanao, Muhammadiyah mengembangkan '*broad based partnership*' dengan berbagai *stakeholder*, antara lain: (1) *Bangsamoro Development Agencies;* (2) *Consortium of Bangsamoro Civil Society;* (3) *Bangsamoro Leadership and Management Institute (BLMI);* (4) *(Association of Accredited Muslim School Council* (Ridwan, 2016).

Selain itu, sebagai upaya mencari titik temu bagi perdamaian di Mindanao, pada 5-6 April 2013 dan bertempat di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Muhammadiyah menggelar forum dialog bertemakan "Multistake Holders Dialogue on Bangsamoro" dalam rangka mendorong persatuan dan perdamaian Bangsamoro. Forum ini merupakan langkah awal untuk mewujudkan *strategic plan* Muhammadiyah untuk Mindanao dalam kurun waktu 2011-2021. Dialog ini memiliki tujuan utama untuk memberikan masukan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh Transitional Committee Bangsamoro dalam proses penyiapan pemerintahan otonom (*new political entity Bangsamoro)* yang berbentuk ministerial dalam kerangka negara Filipina. Dalam proses ini, Muhammadiyah secara aktif turut serta dalam penyusunan *Basic Law*, serta rekonstruksi dan pelaksanaan pembangunan di entitas politik baru Bangsamoro (wawancara Syafiq Mughni, 8/11/2018). Forum dialog ini dihadiri pula oleh Front Pembebasan Islam Moro (MILF), Kementerian Luar Negeri RI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Henry Dunant Centre Swiss, Duta Besar RI untuk Filipina, perwakilan kedutaan besar dari Jepang, Arab Saudi, Turki, dan Pemda Daerah Istimewa Aceh, wakil dari Uni Eropa, dosen, peneliti, serta mahasiswa. Selain itu, Muhammadiyah juga mengajak perwakilan MILF untuk berkunjung dan meminta masukan dan nasihat dari tokoh-tokoh bangsa di Indonesia, termasuk menemui Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR-RI) yaitu Taufik Kiemas pada 23 Februari 2012.

Tidak hanya melalui jalur formal dialog dan forum-forum internasional, komitmen Muhammadiyah mencari resolusi konflik di Mindanao juga dilakukan melalui forum-forum informal. Bekerjasama dengan CDCC, dan Cheng Ho Multi-Cultural and Edu-

cation Trust, Muhammadiyah mengadakan pembicaraan informal sebagai bagian dari *World Peace Forum* (WPF) di Bogor, Jawa Barat pada 23-25 November 2013. Pertemuan informal yang juga dihadiri oleh Teresita Dalas, Ketua OPAPP (Office of Presidential Adviser on Peace Process) ini menghasilkan kesepakatan mengenai pengembangan *Joint Road Map* antara MNLF dan MILF dengan pemerintah Filipina (Sandi & Maarif, 2014). Dalam upayanya mencari kesepakatan antara pihak-pihak yang berkonflik, Muhammadiyah juga bermitra dengan NGO-NGO di Filipina, seperti misalnya dengan The Philippine Center for Islam and Democracy. Lembaga non-profit dan non-pemerintah yang dipimpin Aminah Rasul ini menjadi mitra Muhammadiyah dalam upaya memediasi konflik di Mindanao.

Kontribusi Muhammadiyah tidak berhenti pada proses tercapainya perdamaian di Filipina. Pasca perjanjian perdamaian, Muhammadiyah tetap mendampingi proses rekonstruksi Bangsamoro di Filipina. Dalam upaya merealisasikan *roadmap 2020,* Muhammadiyah mengirimkan tenaga ahli medis dan guru ke Mindanao untuk berbagi pengalaman dalam mengelola rumah sakit dan sekolah (Syamsuddin dalam Medina, 2017). Muhammadiyah juga mempromosikan program-program kemitraan dengan lembaga-lembaga donor internasional dalam upaya rekonstruksi Bangsamoro di bidang pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Dalam bidang ekonomi (lihat juga bagian 'Pendidikan' bab ini), Muhammadiyah memberikan sejumlah beasiswa dan membuat program-program fasilitasi pendidikan dengan lembaga donor untuk memberdayakan masyarakat Mindanao. Terakhir, di sektor pemberdayaan ekonomi, Muhammadiyah mengajukan proposal untuk pelembagaan *micro finance* berbasis Syariah Islam atau konsep *Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* yang telah dikembangkan terlebih dahulu di Indonesia. Proposal ini muncul sebagai rekomendasi tim *assessment* Muhammadiyah ketika melakukan riset di berbagai komunitas perempuan di Mindanao ketika konflik berkecamuk (Surwandono, 2015). Usulan program ini juga ka-

rena memperhatikan lanskap pekerjaan masyarakat Mindanao yang mayoritas berprofesi di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan sehingga konsep BMT sangat relevan untuk diterapkan. Rekomendasi pengembangan ekonomi *micro finance* juga dapat berkontribusi untuk memoderasi konfrontasi politik dan militer antara faksi-faksi Bangsamoro dan pemerintah Filipina dan ujungnya, untuk menciptakan perdamaian di Filipina Selatan (Surwandono, 2015).

Di Thailand, Muhammadiyah secara aktif melakukan ikhtiar bina damai dalam konflik antara komunitas Muslim Pattani dan Pemerintah Thailand. Ikhtiar itu bermula tahun 2007 saat Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, secara khusus diundang oleh Pemerintah Thailand untuk berkunjung ke negeri seribu Pagoda tersebut. Selama tiga hari kunjungan, Din bertemu Raja Bumibol di Istana Chitralada, menjumpai Perdana Menteri Surayud Chulanont di Bangkok, kemudian berdialog dengan lebih dari 300 ulama dan pemuka Islam di Patani Thailand Selatan untuk membahas agenda promosi Islam yang *rahmatan lil alamin*. Din menyatakan bahwa dalam 'misi perdamaian' di Thailand dia menyerukan kepada Raja Bumibol dan PM Thailand untuk mengedepankan '*soft power*', alih-alih terus menerus menggunakan pendekatan *'hard power'* atau pendekatan keamanan dalam menyelesaikan konflik di Thailand Selatan. Din juga mengaku Raja Thailand meminta secara khusus kepada Muhammadiyah untuk berperan dalam proses perdamaian di Thailand Selatan dengan menampilkan wajah Islam yang berkemajuan, moderat, dan toleran. Secara khusus dalam pertemuan itu juga dibahas upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Muslim di Pattani melalui jalur pendidikan sebagai upaya pembangunan perdamaian yang berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut, Muhammadiyah kemudian mengirimkan guru dan pelajar Muhammadiyah ke Thailand, melakukan pertukaran pelajar, dan pemberian beasiswa kepada komunitas Muslim di Pattani. Program pemberian beasiswa kepada mahasiswa Pat-

tani telah berlangsung sejak 2008 sebagai bentuk kerjasama PP Muhammadiyah dengan Pemerintah Thailand. Program ini merupakan permintaan khusus Raja Bumibol kepada PP Muhammadiyah (wawancara Maarif Jamuin, 27/11/2018). Puluhan hingga ratusan mahasiswa asal Pattani Selatan kemudian dikirim ke berbagai Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) di Indonesia (untuk detail beasiswa tersebut, lihat bagian 'Pendidikan' bab ini).

Selain keterlibatannya di Mindanao dan Thailand Selatan, Muhammadiyah juga turut menginisiasi rekonsiliasi nasional di Republik Afrika Tengah. Pada tahun 2014, sejumlah Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Pengurus Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional (LHKI) berkunjung ke Roma, Italia, untuk membicarakan kerja sama dengan Saint Egidio yang bertujuan menginisiasi rekonsiliasi nasional bagi konflik di negara Afrika Tengah tersebut.[7] Pada acara *Word Peace Forum* V, atas undangan Muhammadiyah, perwakilan Muslim dan Kristen dari Afrika Tengah turut hadir untuk membicarakan *lessons learned* dari berbagai negara terkait resolusi konflik dan pembangunan perdamaian. Pembicara yang hadir dalam forum tersebut, antara lain, adalah Rafiu Ibrahim Adebayo dari University of Ilorin, Nigeria; Jibrin Baba Ndace, jurnalis senior dari Nigeria; Butt Asuquo Essein, penasihat khusus urusan nilai dan etika dari Presiden Nigeria. Dari komunitas agama hadir Ibrahim Hassan dari Organisasi Komunitas Muslim Republik Afrika Tengah untuk Santunan dan Kepemudaan; Pendeta Ludovic Mbana Passanguere dari Perwakilan Gereja Katolik Republik Afrika Tengah; dan Dr. Claudio Mario Betti, Direktur Special Operation Community Sant'Egidio (Marbun, 2014). Perwakilan Muhammadiyah juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga non-pemerintah, salah satunya dengan Heavenly Culture World Peace Restoration of Lights yang mengupayakan unifikasi dan perdamaian abadi di semenanjung Korea (wawancara Syafiq Mughni, 8/11/2018).

Kiprah aktif Muhammadiyah di kancah internasional juga ditunjukkan dengan memberikan dukungan penuh kepada peng-

7 Kunjungan ke Roma dengan misi serupa dilakukan lagi pada 2017 dan 2018.

akuan Republik Kosovo yang dideklarasikan pada 2008. Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin bahkan telah berkunjung berkali-kali ke Kosovo atas undangan Presiden Kosovo, Atifete Jahjaga, yang memintanya untuk melihat kondisi negara pecahan Serbia tersebut dan memperjuangkan pengakuannya. Din Syamsuddin berkesimpulan bahwa sudah saatnya Indonesia mengakui kemerdekaan Kosovo mengingat Kosovo sudah diakui lebih dari 108 negara di dunia. Selain itu, PP Muhammadiyah memandang negara berpenduduk mayoritas Muslim ini bisa menjadi pusat syiar Islam yang damai di jantung benua biru Eropa (Muhammadiyah, 2012). Komitmen PP Muhammadiyah terhadap pengakuan kemerdekaan Kosovo dibuktikan dengan menyelenggarakan seminar bertajuk '*Why Not Recognize Kosovo'*. Bertempat di gedung dakwah Muhammadiyah di Menteng (23/5/2013), seminar ini menghadirkan utusan dari Republik Kosovo; Prof. Bahtiar Effendy selaku Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri PP Muhammadiyah; dan KH. Muhjidin Junaidi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI Pusat). Sebelumnya, pada tahun 2011, Muhammadiyah juga mengundang Dr. Rexhep Boja, mufti Kosovo sekaligus Duta Besar Kosovo untuk Arab Saudi; dan Sekretaris Kedutaan, Mr. Edvin Barjami.

Selain itu, PP Muhammadiyah bekerjasama dengan CDCC dalam WPF V mendesak Pemerintah RI untuk segera mengakui kemerdekaan Republik Kosovo. Pasca penyelenggaraan WPF V, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengajak Duta Besar Republik Kosovo untuk Indonesia, Ahmet Shala, untuk bertemu Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR-RI), Zulkifli Hasan, di kompleks gedung Senayan guna membahas langkah konkret menuju pengakuan Indonesia atas Republik Kosovo (24/11/2014).

Dalam upayanya menyemai perdamaian abadi dunia, Muhammadiyah turut mempelopori kerja sama dan dialog antara komunitas Muslim dan Budha, khususnya di level regional Asia Tenggara. Muhammadiyah menjadi salah satu inisiator dan peserta aktif

dalam Workshop "Overcoming Extremism and Advancing Peace with Justice" di Yogyakarta pada 2015. Acara ini merupakan inisiatif International Forum on Buddhist-Muslim Relations (BMF) yang penyelenggaraannya dibantu oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI). BMF merupakan koalisi organisasi masyarakat sipil yang terdiri atas empat anggota inti, yakni Muhammadiyah, International Network of Engaged Buddhist, International Movement for a Just World, dan Religions for Peace. Organisasi ini bertujuan untuk mempromosikan perdamaian melalui nilai-nilai dan komitmen bersama yang diterjemahkan dalam pendidikan, advokasi, dan dialog serta kerja sama inter-religius. Dalam seminar yang dihadiri oleh berbagai pemimpin kedua agama tersebut, berhasil dideklarasikan '*The Yogyakarta Statement*' yang berisi komitmen pemimpin kedua agama dunia ini untuk memperkuat kerja sama harmonis sebagai landasan untuk membangun perdamaian dan kesejahteraan di dunia, serta menolak segala bentuk penyalahgunaan ajaran agama untuk tujuan diskriminasi, intoleransi, dan kekerasan (Abdelhamid, 2015).

Bentuk kedua dari kontribusi Muhammadiyah dalam pembangunan perdamaian di kancah regional dan global adalah melalui penyelenggaraan forum-forum dialog internasional yang mempertemukan para pemimpin dunia, pengambil kebijakan, kalangan cerdik cendekia tingkat dunia, aktivis perdamaian, media, dan pihak-pihak yang berkonflik dari berbagai belahan dunia. Salah satu bentuk forum dialog paling konsisten dan *distinctive* yang dilakukan Muhammadiyah adalah penyelenggaraan WPF, forum dwi-tahunan yang diselenggarakan atas inisiasi PP Muhammadiyah sejak 2006. Dalam penyelenggaraannya, PP Muhammadiyah bekerjasama dengan CDCC yang berbasis di Jakarta dan Cheng Ho Multi-Culture Trust yang berbasis di Malaysia. Tujuan utama dari penyelenggaraan WPF adalah menyediakan *platform* bersama untuk mendiskusikan kebijaksanaan, *best practices,* dan pemikiran untuk meningkatkan kerjasama dan menghapus prasangka, membangun kesepahaman antar peradaban yang berbeda, serta membangun kesadaran sebagai warga dunia untuk menjaga perdamaian dunia (*Report WPF CDCC,*

2006). Penyelenggaraan WPF telah berlangsung 7 kali putaran: 1) *One Humanity, One Destiny, and One Responsibility* (15-16 Agustus 2006); 2) *Addressing Facets of Violence: What can be done?* (24-26 Juni 2008); 3) *Mainstreaming Peace Education: Developing Strategy, Policy, and Networking* (30 Juni-2 Juli 2010); 4) *Consolidating Multicultural Democracy* (23-25 November 2012); 5) *Quest for Peace: Lessons of Conflict Resolutions* (20-23 November 2014); 6) *Countering Violent Extremism: Human Dignity, Global Injustice, and Collective Responsibility* (1-4 November 2016); dan 7) *The Middle Path for the World Civilizations* (14-16 Agustus 2018).

Berikut ini disampaikan detail penyelenggaraan tujuh WPF tersebut, yang disarikan dari *Summary WPF* terbitan CDCC.

I. *One Humanity, One Destiny, and One Responsibility*

WPF I diselenggarakan di Jakarta, pada 15-16 Agustus 2006, dengan tujuan menyediakan *platform* untuk mendiskusikan kebijaksanaan, *best practices*, dan pemikiran guna meningkatkan kerjasama dan menghapus prasangka, membangun kesepahaman di antara peradaban yang berbeda, serta membangun kesadaran sebagai warga dunia untuk menjaga perdamaian dunia. Tokoh-tokoh dunia yang hadir, di antaranya, adalah Wakil Presiden RI Jusuf Kalla; Aminah Rasul (Philippines Council for Islam and Democracy Founding Member); Sir Iqbal Sacraine (UK); Hasyim Muzadi (NU); Ahmad Syafii Maarif (Muhammadiyah); Johan Galtung (pendiri dan direktur, *Transcend, Norway*); Raja Zafarul Haq (Sekjen *World Moslem Congress*, Pakistan). WPF I ini berhasil menelurkan '*Jakarta Peace Declaration*' yang bertemakan '*One Humanity, One Destiny, One Responsilibity*'.

II. *Addressing Facets of Violence: What can be done?*

WPF II diselenggarakan pada 24-26 Juni 2008 di Jakarta, dengan tujuan merespons berbagai fenomena kekerasan dan mencari formulasi untuk menghapus kekerasan di dunia melalui kerjasama antara pemimpin politik, pemuka agama, aka-

demisi, dan seluruh kekuatan masyarakat sipil. Tokoh-tokoh dunia yang hadir, antara lain, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono; Wakil Presiden RI Jusuf Kalla; Johan Galtung (pendiri dan direktur, Transcend, Norway); Rt. Hon Helen Clark MP (PM Selandia Baru); Hon Kevind Rudd MP (PM Australia); H.E. Jan Peter Balkenende (PM Belanda); Mikhael Gorbachev (mantan Presiden Uni Soviet); Mark Jurgensmeyer (Direktur, Center for Global & International Studies, University of California, Santa Barbara, USA).

III. *Mainstreaming Peace Education: Developing Strategy, Policy, and Networking*

WPF III diselenggarakan di Yogyakarta pada 30 Juni-2 Juli 2010, hasil kerjasama PP Muhammadiyah dengan Cheng Ho Multi-Culture Education Trust, and CDCC. Tujuan dari WPF III adalah menyemai pendidikan perdamaian di semua level masyarakat: individu, keluarga, komunitas, dan dunia. WPF III dihadiri oleh berbagai pemimpin dunia dari berbagai negara.

IV. *Consolidating Multicultural Democracy*

WPF IV diselenggarakan di Bogor, pada 23-25 November 2012, dengan penyelenggara dari PP Muhammadiyah, Cheng Ho Multi-Culture Education Trust, and CDCC. WPF IV bertujuan mempromosikan 'demokrasi multikultural' sebagai *platform* untuk memfasilitasi ruang-ruang dialog di antara berbagai komunitas untuk mewujudkan perdamaian dan harmoni sosial.

Acara ini diikuti oleh 150 peserta, 50 di antaranya adalah peserta dari luar negeri, terdiri atas pemimpin politik, pemuka agama, pengusaha, akademisi, media, dan aktivis NGOs. Tokoh-tokoh yang hadir dalam WPF IV, di antaranya, adalah Jusuf Kalla, Hajriyanto Tohari, Susilo Bambang Yudhoyono, Anwar Ibrahim, Prof. Kumar Ramakhrisna, Aung San Suu Kyi, Marti Natalegawa, Greg Fealy, Robert Hefner, Surin Pitsuwan, George Soros, Simon Xavier.

Salah satu capaian terpenting dari WPF IV adalah diselenggarakannya *'peace meeting'* secara informal antara MILF dan MNLF dengan tujuan untuk mendorong perdamaian berkelanjutan di Filipina Selatan. Dalam pertemuan informal tersebut, PP Muhammadiyah dan Kementerian Luar Negeri RI berperan sebagai perantara. Berikut ini isi dari pertemuan informal tersebut.

'MORO PEACE TALKS'
'Special MNLF-MILF Dialogues Session: Towards Permanent Unity and Peace for the Bangsamoro'

Pertemuan ini diawasi oleh perwakilan Office of the Presidential Adviser on Peace Process (OPAPP) the Comunitas di Sant' Egidio dari Roma dan Muhammadiyah dengan tujuan untuk mencari jalan menuju kesatuan dan perdamaian abadi bagi Bangsamoro, khususnya menurut *Agreement* yang ditandatangani oleh MNLF dan MILF dengan Pemerintah Filipina, masing-masing pada tanggal 2 September 1996 dan 15 Oktober 2012.

Pertemuan ini menghasilkan beberapa keputusan, antara lain: (1) Menghargai upaya perdamaian yang dirintis oleh Muhammadiyah melalui WPF; (2) Pentingnya membangun perdamaian dari nilai-nilai Islam yang *rahmatan lil alamin*; (3) Persoalan Bangsamoro diserahkan ke elit-elit Bangsamoro untuk menyelesaikan persoalan-persoalan: (a) pemerintah *provincial*; (b) teritorial; c) bagi hasil kekayaan sumber daya alam mineral yang ditemukan MNLF, *framework agreement*; (d) pembagian kekuasaan; (e) pembagian kekayaan; (f) proses normalisasi; (4) pentingnya membangun *Joint Road Map*; (5) pentingnya dukungan dari berbagai pihak terkait proses perdamaian di Filipina Selatan: pemerintah Indonesia sebagai *the chairman of* OIC PCSP, fasilitator Malaysia, termasuk Muhammadiyah dan anggota-anggota ICG.

V. *Quest for Peace: Lessons of Conflict Resolutions*

WPFV diselenggarakan di Jakarta, pada 20-23 November 2014 dengan penyelenggara dari PP Muhammadiyah, Cheng Ho Multi-Culture Education Trust, dan CDCC. WPF V bertujuan untuk berbagi pengalaman resolusi konflik dari berbagai kasus di dunia, terutama dari Asia Tenggara, Afrika dan Eropa. Pelajaran-pelajaran ini perlu dibagi untuk bisa memberi panduan bagi pihak-pihak yang sedang berjuang mencapai perdamaian.

Pertemuan ini menghasilkan sesi-sesi pengalaman resolusi konflik dari berbagai belahan dunia: dari Aceh oleh Prof Yusny Saby; dari Ambon oleh Pdt Jack Manuputty; dari Maluku oleh Abidin Wakano. Dalam kesempatan ini, hadir pula delegasi Kosovo, Yang Mulia Duta Besar Kosovo untuk Jepang dan istri. Upaya menghadirkan delegasi Kosovo tersebut adalah ikhtiar percobaan yang dilakukan Muhammadiyah untuk melakukan dukungan bagi pengakuan kemerdekaan Kosovo.

Sharing pengalaman resolusi konflik juga dilakukan dari Filipina dan Thailand Selatan oleh Prof Sukree Langputeh (Wakil Rektor, Pattani University), Thailand; Prof Dr Islamai Luthfi Japakiya, rektor dari Yala Islamic University; H.E. Ging Teresita Quintos Deles sebagai Secretary Chairman of Office of the Presidential Adviser for Peace Process; Ms Valeria Martano dari Community Sant'Egidio Member of ICG. *Lessons learned* dari Kosovo, Serbia, Nigeria, Afrika Tengah, dan Myanmar turut didiskusikan.

VI. *Countering Violent Extremism: Human Dignity, Global Injustice, and Collective Responsibility*

WPF VI diselenggarakan di Jakarta, pada 1-4 November 2016, dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo. Tujuan dari WPF VI ini adalah untuk memahami dan mencari akar dari *violent extremism* yang terkait dengan ketidakadilan global, sekaligus meningkatkan peran perempuan, keluarga, dan komunitas dalam membangun budaya non-kekerasan, serta membangun kolaborasi internasional di bidang penelitian dan program

untuk mendukung perdamaian yang berkelanjutan, terutama bagi anak muda.

VII. *The Middle Path for the World Civilizations*

WPF VII diadakan di Jakarta pada 14-16 Agustus 2018, dengan penyelenggara Kantor Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antar Peradaban dan Antar Agama, PP Muhammadiyah, Cheng Ho Multi-Culture Education Trust, and CDCC. Tujuan WPF VII adalah mendiskusikan pendekatan baru berupa 'Jalan Tengah' dalam membangun perdamaian di dunia yang penuh dengan ekstremisme dan polaritas antara ekstremisme agama dan sekularisme.

WPF VII menghasilkan '*Jakarta Message*' yang menyerukan '*Middle Path*' sebagai pendekatan baru dalam membangun perdamaian dunia di masa mendatang. Dalam hal ini Indonesia dipandang memiliki kredensial untuk mempromosikan 'Jalan Tengah' karena Islam di Indonesia memiliki karakter 'tengahan' atau '*wasathiyah*'. Struktur panel dalam WPF dibagi berdasarkan implementasi 'Jalan Tengah' ke dalam berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, dan budaya. Susunan sesi juga dibagi untuk membahas 'Jalan Tengah' dari perspektif agama dan ideologi nasional.

Forum ini dihadiri oleh pemimpin dunia, pemuka agama, akademisi, media, dan aktivis perdamaian dari berbagai belahan dunia. Dari pemimpin dunia hadir Presiden RI Joko Widodo; Hassan Wirajuda (mantan Menlu RI); H.E Mr Peter M Christian (Presiden Mikronesia); Dr Mar'i Alkatiri (mantan PM Timor Leste); Mahmoud Abbash (penasihat Presiden Palestine untuk Urusan Agama dan Islam); Bouabdallah Glamallah (President of the Supreme Islamic Council, Algeria); Ebrahim Rasoon (Dubes Afrika untuk AS); Bishop Dr Gunnar Stalsett (Panitia Nobel Norway). Dari kalangan sarjana dunia hadir Robert W Hefner, Eunsook Jung, Azra, Mitsuo Nakamura, Rizal Ramli, Habib Chirzin, Komaruddin Hidayat.

Lembaga-lembaga yang terkoneksi dengan Muhammadiyah, baik secara struktural maupun kultural, memiliki peran besar dalam mempromosikan perdamaian dan resolusi konflik. CDCC, misalnya, selain sukses menyelenggarakan WPF sebagai '*flagship*', juga terlibat dalam berbagai aktivisme perdamaian lainnya. Pada tahun 2016, CDCC melalui program *Multireligious Collaboration for the Common Goods* (MCC) dengan dukungan King Abdullah bin Abdulaziz International Centre for Interreligious and Intercultural Dialogues (KAICIID) yang berbasis di Wina dan Religions for Peace (RfP) di New York, juga berhasil menyelenggarakan serangkaian aktivitas untuk menyusun buku modul *Pendidikan Interreligius* (2016).

3. Agen-agen Perdamaian Muhammadiyah

Keterlibatan Muhammadiyah dalam isu-isu perdamaian di kancah global tidak terlepas dari peranan kader-kadernya yang kontribusinya diakui oleh dunia internasional. Tokoh-tokoh kunci seperti Ahmad Syafii Maarif dan Din Syamsuddin kiranya perlu disebut secara khusus karena telah memberi jalan bagi generasi baru Muhammadiyah untuk tampil di pentas perdamaian global. Di bawah kepemimpinan dua Ketua Umum PP Muhammadiyah ini, anak-anak muda Muhammadiyah tampil percaya diri ke pentas global. Ahmad Syafii Maarif menjabat Ketua Umum PP Muhammadiyah untuk periode 1998-2005. Ia juga pernah menjadi Presiden World Conference on Religion for Peace (WCRP); mendapat penghargaan Ramon Magsaysay Award untuk kategori Perdamaian dan Pemahaman Internasional (2008), dan *Hamengkubuwono IX Award* untuk kategori Multikulturalisme (2000). Tahun 2002, bersama beberapa tokoh Muhammadiyah, ia mendirikan Maarif Institute for Culture and Humanity (MI) sebagai gerakan kebudayaan dalam konteks keislaman, kemanusiaan, dan keindonesiaan. MI berkhidmat untuk menjadi 'kaki-kaki' dari gagasan Syafii Maarif. Pada 2015, MI meluncurkan buku *Fikih Kebinekaan* dan *Fikih Antiterorisme* sebagai upaya untuk mengembangkan 'budaya per-

damaian' dan 'non-kekerasan'. *Fikih Kebinekaan* menekankan pada semangat persatuan dan persaudaraan dengan menjunjung prinsip keadilan dan kemanusiaan berdasarkan ajaran Islam yang tertuang dalam Al Quran, Al Hadis, serta ijtihad (Latief, 2015). Sedangkan *Fikih Antiterorisme*, sebagai kesinambungan dan pengembangan dari *Fikih Kebinekaan*, merupakan ikhtiar pembacaan ulang secara kritis atas definisi anti-terorisme dalam perspektif Islam, menggali pandangan Al Quran dan al-Hadits mengenai terorisme dengan menyegarkan kembali pandangan para ulama serta pengkajian kembali konsep-konsep kunci keagamaan yang selama ini di-salahpahami dan disalahgunakan oleh kelompok berideologi teror (Haq, 2017).

Din Syamsuddin menjabat sebagai Ketua Umum PP Muham-madiyah untuk periode 2005-2015. Reputasinya dikenal sebagai tokoh agama yang sangat aktif dalam berbagai dialog antaragama dan perdamaian baik di level nasional maupun internasional. Pada tahun 2007 dia mendirikan Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) guna mempromosikan dialog dan kerjasama antarperadaban, agama, bangsa, dan budaya secara umum (Mu'ti, 2008). Din juga pernah memegang beberapa posisi strategis, yakni President and Moderator of Asian Conference on Religion for Peace (ACRP), Co-President of the World Conference on Religions for Peace (WCRP/RfP), dan Member of Strategic Alliance between Rusia and the Muslim World. ACRP yang berbasis di Tokyo, Jepang bertujuan mempromosikan perdamaian melalui pendekatan keagamaan. Sedangkan WCRP merupakan organisasi internasional perwakilan dari tradisi keagamaan utama dunia yang bertemu untuk belajar dan bertindak atas masalah global yang mempengaruhi perdamaian, keadilan, dan kelangsungan hidup manusia. Berpusat di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat, WCRP pertama kali diselenggarakan di Kyoto pada 1970. Anggota organisasi ini terdiri atas ratusan tokoh-tokoh agama dari berbagai negara di belahan dunia yang bersama-sama mendorong perdamaian melalui pendekatan keagamaan (Amirachman, 2015).

Din Syamsuddin pernah terpilih menjadi salah satu dari 20 tokoh dalam *People Wisdom* versi Rusia. Pada November 2018, Pemerintah Jepang menganugerahkan penghargaan *'The Order of Rising Sun, Gold, and Silver Star'* atas jasa dan kontribusinya dalam mempromosikan interaksi antara Indonesia dan Jepang. Sebelumnya, di tahun 2014, Din juga mendapat penghargaan *Lifetime Achievement Award for Religion and Culture Development* dari Pemerintah Tiongkok. Penghargaan ini diberikan kepada Din Syamsuddin selaku Ketua Umum PP Muhammadiyah dalam forum *World Economic Chinese Forum* di Tiongkok pada 4 Desember 2014. Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Din Syamsuddin dianggap berkontribusi secara signifikan dalam proses perdamaian di Moro, Filipina, dan Thailand Selatan (Amirachman, 2015). Penghargaan lain yang pernah diterimanya adalah *Italian Star* dari pemerintah Italia, 'Tokoh 1434 Hijriah' dari pemerintah Negara Penang, dan penghargaan Tingkat Satu dari Kerajaan Yordania. Penghargaan-penghargaan tersebut menjadi bagian dari pengakuan atas kiprah Din Syamsuddin dalam berbagai forum-forum perdamaian dunia.

Tokoh lain yang turut menyebarkan perdamaian di kancah internasional adalah Shamsi Ali. Alumnus Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Gombara, Sulawesi Selatan ini adalah imam di *Islamic Center of New York* dan pengurus *Jamaica Muslim Center*. Dia termasuk salah satu tokoh yang diundang Presiden George W. Bush setelah insiden 9/11, sebagai perwakilan komunitas Muslim. Ia memperoleh julukan *The Face of Islam* karena dianggap merepresentasikan karakter Muslim yang ramah dan toleran. Peran Shamsi Ali dalam bidang dialog antaragama tidak diragukan lagi. Ia adalah penggagas *International Conference of Imams and Rabbis for Peace* yang diselenggarakan di Spanyol tahun 2006; penggagas *National Summit of Imams and Rabbis of North America* tahun 2007; juga inisiator *Twinning Weekend,* gerakan dialog antaragama yang kini dikembangkan di Eropa dan Australia.

Shamsi Ali juga terpilih sebagai delegasi US *Interfaith Peace Mission* yang mengemban misi perdamaian untuk Palestina dan

Israel. Atas usahanya dalam menyebarkan perdamaian dan upaya menangkal *islamophobia* di Amerika, Shamsi Ali meraih beragam penghargaan, si antaranya, sebagai Duta Besar Perdamaian oleh *International Religious Federation*, masuk sebagai 'Tujuh Tokoh Agama Paling Berpengaruh' versi *New York Times 2006*. Melalui Yayasan Nusantara, Shamsi Ali ingin mengenalkan Islam sebagai agama universal, bukan hanya agama bagi orang Asia Selatan dan Timur Tengah (Nava, 2013).

Tokoh Muhammadiyah lain yang telah lama melintang di bidang perdamaian level internasional adalah Muhammad Habib Chirzin. Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah dan mantan presiden Islamic Forum for Peace, Human Rights and Development ini amat dikenal dengan konsepsinya 'Teologi Perdamaian', yakni teologi yang peduli terhadap situasi konflik dan kekerasan (Habib Chirzin, 1992). Sejak 1980, dia mendirikan Forum on Peace and Development Studies sebagai kendaraan untuk mengkritisi berbagai persoalan ketimpangan, kekerasan, dan pembangunan yang tidak berkeadilan. Habib Chirzin dikenal sebagai pemuka agama Islam dan aktivis perdamaian yang memiliki rekam jejak panjang dalam menangani resolusi konflik dan bina damai di berbagai zona konflik di dunia. Sejak 1980-an dia telah terlibat dalam kerja-kerja perdamaian dan resolusi konflik di Mindanao, juga dalam proses perdamaian di Bangladesh, India, Myanmar, dan Sri Langka. Di Sri Langka, Chirzin terlibat dalam misi perdamaian dengan mengirimkan ulama-ulama Indonesia dari MUI dan ormas-ormas keagamaan ke Sri Langka untuk menginisiasi '*Peacewalk*' bersama tokoh-tokoh agama Budha (wawancara Habib Chirzin, 26/11/2018).

Ketika menjabat sebagai Direktur LPPM di IKIP Muhammadiyah (kini Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka), Habib Chirzin memelopori penerbitan majalah *Peace and Religious Studies* yang kemudian diganjar oleh Sekjen PBB, Javier de Cuellar, dengan penghargaan *Peace Messenger Award* di markas besar PBB, New York (1988). Atas dedikasi dan kontribusinya dalam bidang per-

damaian, dia juga menerima penghargaan *Ambassador for Peace* dari Interreligious and International Federation World Peace (IIFWP). Tahun 2002, dia diundang untuk berbicara di "*World Peace Summit of Religious and Spiritual Leaders in United Nation*" yang menghasilkan resolusi *Millennium Development Goals* (MDGs).

Penyebaran perdamaian melalui deradikalisasi juga diupayakan oleh kader muda Muhammadiyah, yakni Fahd Pahdepie. Melalui bukunya, *Hijrah Bang Tato* yang diangkat dari kisah nyata, Fahd mempromosikan nilai-nilai anti-kekerasan dan perdamaian. Buku dalam bentuk novel ini mengisahkan perjalanan hijrah Lalan atau Bang Tato yang memiliki masa lalu kelam, suka tawuran, merusak toko orang lain, menyiksa orang, dan kejahatan lainnya. Proses hijrah Lalan tidak berjalan mulus. Ia pernah memperoleh doktrin agama yang dengan mudah bisa menganggap orang lain sebagai kafir dan sesat. Lalu, ia bertemu Fahd yang mengubah kehidupannya. *Hijrah Bang Tato* adalah bentuk perlawanan Fahd terhadap budaya kekerasan melalui media cerita populer. Buku ini dianggap sebagai contoh terbaik dalam *counter-narrative act to radicalism and extremism* sehingga banyak pihak mengundangnya untuk berbicara di ranah internasional, seperti *TED Inspired Talk* oleh Australia Global Alumni, *Monash Arts Alumni Summit* oleh Monash University, *Conference of Australian and Indonesian Youth* (CAUSINDY) 2017 di University of Melbourne, dan *Singapore Writer Festival* 2017 (Pahdepie, 2017).

Peranan kader perempuan Muhammadiyah dalam isu perdamaian di kancah global pun tidak dapat diremehkan. Siti Ruhaini Dzuhayatin dan Yayah Khisbiyah adalah dua kader-kader perempuan Muhammadiyah yang memiliki reputasi internasional dalam bidang pembangunan perdamaian dunia. Ruhaini saat ini aktif sebagai Staf Khusus Kepresidenan Bidang Keagamaan Internasional, dan sebagai Pemimpin Komisi Hak Asasi Manusia dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI). Sementara itu, Yayah Khisbiyah konsisten meniti jalur perdamaian melalui lembaga PSB-PS UMS, CDCC, dan Pusat Studi Perdamaian di Kamboja (terkait peran Ruhaini, lihat ba-

gian ‘Advokasi Minoritas dan HAM’, dan terkait peran Yayah Khisbiyah, lihat bagian ‘Pendidikan’, pada bab ini).

***

Tampak jelas bahwa Muhammadiyah sebagai salah satu kekuatan ‘Islam sipil’ terbesar di Indonesia telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi proses perdamaian dan resolusi konflik, baik di level nasional, regional, dan global. Berbagai upaya perdamaian dari kalangan Muhammadiyah bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang integratif, tidak tersekat-sekat oleh perbedaan etnis, bahasa, bangsa, maupun agama.

Pada masa transisi dari Orde Baru menuju Reformasi, Indonesia mengalami konflik horizontal di berbagai daerah. Konflik ini didasari oleh faktor-faktor politik, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, dan agama. Muhammadiyah mengambil peranan penting untuk menjadi juru damai di beberapa daerah di Indonesia, seperti Aceh, Papua, Maluku Utara, dan Poso. Muhammadiyah mengirimkan kader-kader terbaiknya untuk terlibat langsung dialog dengan warga di masing-masing daerah konflik.

Pada masa kepemimpinan Din Syamsuddin, ranah perdamaian yang disyiarkan Muhammadiyah semakin luas, dan mengambil peran penting dan strategis dalam rekonsiliasi konflik di: Mindanao-Filipina, Pattani-Thailand, Rohingnya-Myanmar, kemerdekaan Kosovo, dan Afrika Tengah. Upaya rekonsiliasi ini mulai dengan terjun langsung, mengirimkan *scoping mission* ke berbagai zona konflik hingga secara konsisten dan kontinyu mengadakan forum-forum dialog perdamaian yang melibatkan para pemimpin dunia, pengambil kebijakan, akademisi, media, dan aktivis dari berbagai latar agama, etnis, kebangsaan, dan afiliasi politik untuk mengembangkan kerjasama yang produktif untuk mempromosikan perdamaian dunia.

Peran dan keterlibatan Muhammadiyah dalam isu-isu perdamaian dan resolusi konflik selalu melibatkan kelompok perempuan, melalui Aisyiyah. Selain itu komunitas dan lembaga kultural yang diinisiasi oleh generasi muda Muhammadiyah, seperti Maarif Ins-

titute dan CDCC, juga terlibat aktif dalam menyebarkan perdamaian. Kiprah Muhammadiyah dalam bina damai juga dilakukan melalui agensi-agensi kader-kader terbaik Muhammadiyah yang bekerja tanpa lelah untuk merawat dan mengembangkan perdamaian di Indonesia dan dunia.

G. Reformasi Tata Kelola SDA dan Agraria

Ketimpangan atas penguasaan barang publik dan kesenjangan akses terhadap sumber daya alam (SDA) merupakan salah satu tantangan Indonesia di era pasca Reformasi, terutama dalam hal pengelolaan SDA dan reformasi agraria yang delik permasalahannya sampai saat ini masih cukup pelik. Pembiaran terhadap masalah ini sama artinya dengan pembiaran terhadap potensi konflik sosial, baik manifes ataupun laten, yang dapat mengancam modal sosial di masyarakat dan berpotensi mengakibatkan disintegrasi bangsa.

Merespons hal tersebut, Muhammadiyah berusaha secara aktif memberikan kontribusi bagi upaya-upaya redistribusi lahan, dan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan, seperti melalui perumusan fikih air dan fikih lingkungan, melakukan advokasi dengan jalan meluncurkan 'Jihad Konstitusi' terhadap regulasi yang dipandang memarjinalkan kelompok yang lemah. Tulisan ini menarasikan kiprah-kiprah Muhammadiyah dalam 'meluruskan kiblat bangsa' di sektor tata kelola sumber daya alam, lingkungan, dan agrarian.

1. Peranan Muhammadiyah dalam Reforma Agraria

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 5/1960 telah memberi dasar bagi upaya lebih lanjut pemerintah Indonesia dalam melakukan akuisisi tanah dari pemilik modal melalui skema kompensasi dan distribusi tanah agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Tujuan utama dari reformasi agraria adalah pengurangan ketimpangan dalam penguasaan tanah, berikut mewujudkan tata kelola yang berpusat pada masya-

rakat dan benar-benar pro-masyarakat miskin. Selain itu reformasi agraria juga difungsikan sebagai instrumen perombakan struktur agraria warisan kolonial dan feodal yang dianggap merugikan (Peluso, Afiff, & Rachman, 2008; Widodo, 2017; Rachman, 2011). Agenda reforma agraria di era Sukarno luluh lantak setelah peristiwa gempa politik 1965. Di era Soeharto, agenda reforma agraria tenggelam karena sering diidentikkan dengan agenda Partai Komunis Indonesia (PKI). Setelah kejatuhan rezim Soeharto pada tahun 1998, ada upaya masyarakat sipil dan para aktivis untuk kembali mengusulkan agenda *land reform*. Merespons hal tersebut, melalui TAP MPR RI No. IX/2001, penataan kembali penguasaan, kepemilikan, dan penggunaan sumber-sumber agraria kembali diwacanakan sebagai agenda nasional.

Menelusuri peran Muhammadiyah dalam reformasi agraria di Indonesia bisa dimulai dengan mengkaji buku yang diterbitkan oleh PP Muhammadiyah berjudul *Revitalisasi Visi dan Karakter Bangsa* (2009). Disebutkan dalam buku setebal 56 halaman itu bahwa Muhammadiyah berkomitmen penuh untuk turut serta melaksanakan reformasi agraria dalam rangka 'mengurangi kesenjangan kepemilikan lahan dan mengendalikan konversi lahan yang merugikan rakyat, melalui penataan aset pertahanan, redistribusi lahan serta pemberian akses tanah negara kepada masyarakat' (PP Muhammadiyah, 2009, h. 36). Untuk alasan ini, redistribusi lahan dan pemberian akses tanah negara kepada masyarakat miskin menjadi agenda di dalam prioritas advokasi.

Sebelum buku *Revitalisasi Visi dan Karakter Bangsa* diterbitkan, suatu dokumen berjudul *Land Reform dari Masa ke Masa* menyebutkan bahwa Muhammadiyah bersama tokoh organisasi kemasyarakatan lain seperti NU, akademisi dan aktivis mahasiswa berhasil mendesak Joyo Winoto, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendorong terbitnya Perpres No. 65/2006 sebagai Perpres pengganti versi sebelumnya (No. 36/2005) tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Perpres ini berhasil menjadi landasan hukum bagi upaya redistribusi gradual atas kepemilikan lahan dari total

"keseluruhan Hutan Produksi Konversi (HPK) yang berjumlah 22.140.199 hektar kepada masyarakat lokal seluas 13.411.025 hektar, atau lebih dari 60 persen" (Rachman, 2011). Munculnya inisiasi redistribusi lahan HPK ini diharapkan dapat mengurangi berbagai konflik sosial yang timbul antara masyarakat, perusahaan dan pemerintah, mengingat sejauh ini sering terjadi tumpang tindih klaim pengelolaan antara hutan milik pemerintah, swasta dan lahan garapan masyarakat.

Di level *grassroots,* advokasi Muhammadiyah dalam mempromosikan reformasi agraria terdokumentasikan. Salah satunya adalah kasus pengusiran petani pada Oktober 2016. Pada kasus ini, PP Pemuda Muhammadiyah secara intens melakukan advokasi dengan mengawal dan memberi pendampingan kepada masyarakat petani dalam sengketa lahan dengan PT. Pertiwi Lestari (LAZISMU, 2017; *The Muhammadiyah Post*, 2017). Dukungan yang diberikan tidak sebatas bantuan hukum, melainkan juga mengawal aksi kubur diri yang dilakukan beberapa orang petani di depan Istana Negara. Selain itu, MDMC, LAZISMU, dan IPM juga turut membentuk Posko yang memuat bantuan kesehatan, dapur umum, layanan kesehatan dan sebagainya bagi para petani dan keluarganya yang telah direlokasi. Advokasi yang dilakukan Muhammadiyah terhadap perjuangan kelompok petani ini membuahkan hasil signifikan, yaitu kemenangan mutlak bagi seluruh petani Teluk Jambe, Karawang, dengan menghasilkan kesepakatan pendistribusian sertifikat SHM 18-30 hektar yang diberikan atas nama komunal dan lahan pertanian 1.000-1.200 hektar yang dikelola oleh koperasi dan organisasi setempat, sementara pemerintah mencabut kepemilikan sertifikat tanah atas nama perusahaan yang telah dinyatakan ilegal oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

2. *Jihad Konstitusi dan Fikih Air*

Komitmen simultan Muhammadiyah tidak berhenti sebatas reformasi agraria, melainkan juga turut mengawal reformasi pengelolaan SDA melalui jihad konstitusi dengan menyoroti beberapa

perundang-undangan, antara lain: UU tentang Pengelolaan Air, dan UU tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang dianggap telah mengkomodifikasi barang publik. Salah satu hasil jihad konstitusi yang cukup mendapat sorotan perhatian adalah pembatalan oleh MK terhadap seluruh pasal tentang kedudukan, fungsi, dan tugas Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang tertuang dalam Surat Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 tertanggal 13 November 2012. Surat putusan ini akhirnya dapat menekan pemerintah untuk membatasi kontrak dengan perusahaan swasta dalam pengelolaan sektor migas.

Dalam rangka mewujudkan jihad konstitusinya secara lebih maksimal, Muhammadiyah kemudian menyusun *Fikih Air* yang dikukuhkan dalam Musyawarah Nasional Tarjih ke-28 di Palembang 2014. *Fikih Air* disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid bekerjasama dengan Majelis Lingkungan Hidup (MLH) PP Muhammadiyah, memuat pandangan Islam tentang prinsip universal pengelolaan air, pendidikan perilaku ramah air, dan perilaku ramah air. Secara garis besar, *Fikih Air* berlandaskan pada prinsip-prinsip universal seperti partisipasi semua elemen masyarakat dalam pengelolaan air; pemetaan air berdasarkan kebutuhan manusia yang dikategorikan ke dalam tiga jenis, yaitu air untuk kebutuhan primer (makan, minum, ibadah, sanitasi); air untuk kebutuhan sekunder (irigasi, produksi energi, menjaga ekosistem), kebutuhan tersier; konservasi air; serta perlunya regulasi yang mengatur kepemilikan dan distribusi air yang proposional.

Selain *Fikih Air*, secara lebih luas Muhammadiyah juga sedang menyusun formulasi *Fikih Lingkungan*, yang hasilnya berupa aturan mengenai larangan pencemaran lingkungan, pengelolaan sampah, melakukan penghijauan dan penanaman pohon, pelestarian sumber daya hewani, pengaturan tentang penggundulan hutan, pemanfaatan dan pelestarian SDA (Muhammadiyah, 2012). Upaya ini salah satunya dilakukan oleh Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Inggris Raya yang bekerjasama dengan PPI Birmingham dengan menggelar forum internasional yang

mendiskusikan Fikih Air dan Kebencanaan (Amrullah, 2016). Di samping itu, MLH PP Muhammadiyah bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup juga menyusun buku *Teologi Lingkungan* (2017) yang mendedah konsep hubungan manusia dengan alam, di mana perlindungan dan pemeliharaan alam merupakan kewajiban asasi manusia yang telah dipilih oleh Tuhan sebagai wakil Tuhan di muka bumi.

Untuk mewujudkan komitmen Muhammadiyah terhadap etika lingkungan, Muhammadiyah berkontribusi dalam hal mendorong transparansi jumlah luas lahan, hutan, berikut informasi pengelolaannya kepada publik. Hal ini penting dilakukan agar tidak terjadi *asymetrical information* yang selama ini menjadi sumber konflik di kawasan Perhutani. Hal yang lebih utama untuk diperhatikan adalah dalam konteks penetapan "hutan adat" misalnya, keputusan terkait realisasinya masih mengandalkan peran aktif masyarakat sebagai pemohon. Masih adanya *asymetrical information* tentang proses klaim seperti ini dikhawatirkan akan merugikan masyarakat. Menanggapi hal itu, Muhammadiyah melalui jejaringnya memberikan bantuan pendampingan untuk memastikan praktik pengelolaan lingkungan pada pelbagai tahapan, mulai perencanaan sampai implementasi, agar dapat berjalan sesuai harapan. Upaya konkret ini juga diwujudkan dalam Rencana Tindakan Muhammadiyah untuk Perubahan Iklim dan Penggunaan Air (2015-2020), dengan berbagai agenda sistematis sebagai berikut.

- Mengurangi penggunaan energi (listrik);
- Pelaksanaan 3R di sekolah, universitas dan kantor yang terbagi atas beberapa bagian: 1) mengurangi sampah yang tidak bisa terdegradasi (plastik); 2) mengurangi penggunaan kertas (*paperless office*); 3) mengurangi penggunaan air, menggunakan kembali dan mendaur ulang air wudhu di mushalla dan masjid; 4) mengurangi dan memurnikan limbah kimia dan cairan; 5) daur ulang limbah (bahan organik untuk kompos, dan lain-lain).

- Mencari alternatif energi untuk masyarakat lokal pedesaan. Hal ini dilakukan melalui: 1) pengembangan bioenergi (jatropa); 2) biogas digester; 3) mengenalkan teknologi (peralatan) untuk konverter energi; 4. peralatan untuk sistem distribusi; 5) diseminasi dan pengembangan komunitas;
- Pengembangan ruang terbuka hijau untuk penyerap karbon sekaligus melakukan pemantauan dan evaluasi ketersediaan dan keberlanjutan dalam fungsi ruang untuk hutan kota di beberapa daerah terpilih;
- Pendidikan lingkungan untuk masyarakat berikut kampanye lingkungan generasi muda melalui pendidikan advokasi, pendidikan lingkungan (*muballigh* lingkungan) melalui permainan, komik, animasi, video dan film. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang lingkungan dan perubahan iklim.

Muhammadiyah juga aktif terlibat dalam upaya penyelamatan dan perlindungan lingkungan melalui berbagai gerakan pengurangan deforestasi dan degredasi lahan. Secara kelembagaan munculnya komitmen atas isu lingkungan juga diakomodasi dalam MLH sebagai organ resmi PP Muhammadiyah yang berkelindan bersama Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Pendidikan Nasional, serta instansi-instansi lain yang terkait dengan persoalan lingkungan. Secara lebih subtantif, Muhammadiyah juga melakukan gerakan teologis dan moral yang diimplementasikan dalam bentuk praktik hutan lestari dan berkeadilan yang berlandaskan pada manfaat sosial dengan orientasi berkelanjutan.

Inovasi lainnya yang dilakukan Muhammadiyah adalah menyangkut sosialisasi *gerakan eco-masjid* (masjid ramah lingkungan) di Kota Yogyakarta yang dikembangkan sejak lima tahun terakhir. Upaya masjid ramah lingkungan ini difungsikan dalam rangka membangun dan mengembangkan kepedulian terhadap hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Preskripsi

yang dilakukan Muhammadiyah di setiap masjid, antara lain, adalah bahwa bangunan masjid hendaknya dapat menyerap angin dan cahaya; pengelolaan shadaqah sampah yang difungsikan untuk santunan sembako dan kesehatan, termasuk pembangunan sumur resapan bekas air wudhu, pembuatan lobang biopori; membangun pendidikan karakter anak; dan membangun upaya listrik tenaga surya (Muhammadiyah Enviromental Council, 2018).

Upaya nyata lainnya dari MPM PP Muhammadiyah adalah melakukan pemberdayaan terhadap suku Kokoda di Sorong, Papua Barat. Pemberdayaan ini dilakukan dalam bentuk pembebasan lahan tanah seluas 2 hektar lahan yang difungsikan untuk tempat tinggal suku Kokoda. Hal ini perlu dilakukan mengingat suku Kokoda adalah salah satu suku di Papua yang baru melakukan transformasi sosial dari yang sebelumnya berburu dan nomaden, menjadi menetap. Selain tempat tinggal, pemberdayaan juga dilakukan dengan pendampingan dalam tata kelola pemerintahan desa (Suryana, 2017a). Selain pembebasan lahan, melalui MPM PP Muhammadiyah, juga diupayakan akses jalan dan air bersih, dan akses administrasi sebagai prasyarat utama yang harus dimiliki suku Kokoda, seperti pelatihan teknologi, penggunaan komputer, dan surat menyurat (*Republika*, 2017). Tujuan utama yang ingin dicapai dari pemberdayaan suku Kokoda adalah mengembalikan pengelolaan lingkungan berdasarkan pengetahuan lokal.

***

Persoalan agraria dan SDA, sebagaimana dikatakan Nur Fauzi Rachman (2011:8), ‘telah melestarikan konflik yang berkepanjangan, mengoyak persatuan bangsa, tidak menjamin kepastian hukum yang tak pernah jeda antara negara, pemilik modal dan rakyat’. Dengan demikian, dalam rangka menjaga stabilitas nasional dan integritas sosial antara kelas-kelas sosial yang ada, Muhammadiyah mengambil peran melalui penciptaan lingkungan yang mendukung perdamaian; rekonsiliasi dan mencegah konflik; mengintegrasikan masyarakat sipil; membuat mekanisme *rule of law*;

dan mengatasi masalah struktural dan sosial yang mendasar, yaitu persoalan reformasi agraria yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

H. Simpul Penutup

Beragam narasi yang disajikan dalam bab ini menunjukkan bahwa kiprah Muhammadiyah dalam pembangunan perdamaian dan demokrasi tidak dapat dipandang dengan sebelah mata. Spektrum dan radius kontribusi Muhammadiyah dalam pembangunan perdamaian dan demokrasi, baik melalui struktur organisasi dari pusat hingga ranting maupun melalui kelompok-kelompok kultural, merentang jauh melewati batas geografis dari level lokal, nasional, regional, hingga internasional. Penting untuk dicatat bahwa peran dan kontribusi Muhammadiyah tidak hanya dalam mengakhiri konflik kekerasan atau menciptakan *negative peace* namun jauh lebih penting lagi turut aktif menumbuhkan dan merawat nilai-nilai yang telah menjadi fondasi bagi perdamaian positif (*positive peace*) seperti keadilan sosial, kemanusiaan, toleransi, multikulturalisme, penghargaan dan pembelaan pada minoritas, dan sikap saling percaya antar kelompok masyarakat.

Upaya Muhammadiyah mendorong *negative peace* dilakukan dengan mengirim delegasi-delegasi resolusi konflik dan upaya penyelesaian kekerasan yang melanda berbagai daerah dan negara di dunia. Sementara itu, kiprah Muhammadiyah dalam pembangunan *positive peace* diwujudkan dalam kontribusi besarnya di berbagai bidang seperti pendidikan, politik kebangsaan, filantropi, reforma agraria dan tata kelola sumber daya alam, lingkungan, dan advokasi kelompok minoritas serta HAM.

Oleh karenanya, narasi-narasi kiprah Muhammadiyah dalam berbagai sektor kehidupan di atas harus diletakkan dalam konteks kontribusi Muhammadiyah untuk menumbuhkan dan merawat perdamaian dan demokrasi di aras nasional, regional, dan global. Misalnya, narasi peran Muhammadiyah dalam melakukan pendidikan multikultur yang apresiatif terhadap perbedaan agama,

suku, dan bahasa di Indonesia bagian timur harus dilihat sebagai ikhtiar gerakan modernis ini dalam menumbuhkan sikap toleransi dan saling percaya antar komunitas agama di Indonesia. Ikhtiar ini sangat penting kaitannya dengan pembangunan modal sosial dan inklusi sosial terutama antar komunitas yang memiliki perbedaan agama, suku, dan bahasa. Selain itu, aktivisme filantropis Muhammadiyah yang memiliki sejarah yang sangat panjang dan memberikan manfaat yang sangat luas, juga harus diletakkan dalam konteks upaya-upaya mengurangi ketimpangan dan menghadirkan keadilan sosial yang nyata bagi masyarakat Indonesia dan dunia. Ini merupakan satu faktor yang sangat penting dalam proses pembangunan perdamaian yang berkelanjutan.

Kerja-kerja kemanusiaan dan peradaban di bidang perdamaian dan demokrasi tidak hanya dilakukan oleh struktur Muhammadiyah secara organisatoris, namun juga diperankan dengan aktif oleh 'kultur Muhammadiyah' yang berserakan di berbagai bidang namun tetap aktif bergerak menerjemahkan cita-cita Muhammadiyah ke dalam praksis sosial. Lembaga-lembaga seperti Maarif Institute, Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC), pusat-pusat studi di perguruan tinggi Muhammadiyah, hingga komunitas-komunitas kultural Muhammadiyah merupakan garda terdepan dalam promosi perdamaian dan demokrasi baik di level elit maupun di level *grassroot*. Mereka kerap kali bersinergi dengan struktur Muhammadiyah di berbagai di level untuk mempromosikan perdamaian dan demokrasi di Indonesia dan di dunia.

Akhirul kalam, tulisan ini berikhtiar memotret peran dan kontribusi Muhammadiyah yang sangat luas dari perspektif pembangunan perdamaian dan demokrasi. Tulisan ini berkesimpulan bahwa, sejak awal berdiri hingga kini, Muhammadiyah memiliki peran yang vital dalam proses pembangunan perdamaian dan demokrasi, baik dalam konteks menumbuhkan dan merawat nilai-nilai perdamaian dan demokrasi maupun dalam konteks resolusi konflik dan penyelesaian kasus-kasus kekerasan di level nasional, regional, dan global. (*)

BAB

3 Menyemai Damai, Demokrasi dan Keadaban

Narasi Nahdlatul Ulama, dari Lokal hingga Global

> *... Memperhatikan hal-hal jang berhoeboengan dengan masdjid-masdjid, soeraoe-soeraoe dan pondok-pondok, begitoe joega dengan ihwalnja anak-anak jatim dan orang-orang jang fakir miskin ...*
>
> *... mendirikan badan-badan oentoek memajoekan oeroesan pertanian, perniagaan, dan peroesahaan jang tiada dilarang oleh sjara' agama Islam ...*
>
> (Statoeten Nahdlatoel Oelama 1926)

A. Kilasan Sejarah NU

Nahdlatul Ulama (selanjutnya disebut NU) adalah organisasi sosial-keagamaan yang lahir pada 3 Januari 1926 di Surabaya. Kelahirannya merupakan respons terhadap perkembangan dunia Islam internasional saat itu, yakni tatkala Kekhalifahan Turki Ustmani membubarkan diri dan Saudi Arabia diambil alih oleh Ibnu Sa'ud. Rezim Ibnu Sa'ud mengusung ideologi keagamaan Wahabi yang anti pada segala bentuk pemikiran dan kegiatan yang dianggap *takhyul, bid'ah dan churafat* (TBC). Sebagai implementasinya, rezim ini menghancurkan berbagai situs: makam, *petilasan*, dan ber-

bagai pola kegiatan ibadah yang dipandang membawa kepada kemusyrikan.

Di Hindia Belanda (nama Indonesia saat itu) muncul dinamika baru dalam lingkungan Islam dengan perkembangan keagamaan yang dipengaruhi oleh perkembangan di Arab Saudi. Kurang lebih satu dekade sebelumnya berdiri Muhammadiyah, yang di antaranya juga mengampanyekan penghapusan segala bentuk pemikiran dan kegiatan yang dianggap TBC di dalam agama. Perkembangan ini memperoleh kekuatan politik dengan berdirinya Saudi Arabia yang menjadikan kampanye anti-TBC sebagai agenda politik yang nyata.

Sejumlah ulama di Nusantara mengkhawatirkan perkembangan ini. Mereka kemudian membentuk komite untuk diutus ke Saudi guna memprotes sikap pemerintahan Saudi tersebut. Komite ini dinamakan "Komite Hijaz", dan dipimpin oleh KH Wahab Chasbullah. Komite inilah yang menjadi cikal bakal kelahiran NU. *Nahdlatul Ulama* secara harfiah berarti "kebangkitan ulama". Dalam arti inilah pertama-tama pengertian *Nahdlatul Ulama* berasal. Namun metamorfosa kelahiran NU jauh lebih panjang dari itu, yaitu ketika pemuda Wahab (KH Wahab Chasbullah muda) mendirikan berturut-turut *Tashwirul Afkar* dan *Nahdhatut Tujjar*. Yang pertama adalah grup diskusi anak muda yang membahas agama dan perkembangan politik, dan yang kedua adalah kelompok pengusaha muda yang dimaksudkan untuk membangkitkan perekonomian umat.

NU berkembang pesat karena adanya dukungan dari para kiai berpengaruh, seperti KH Hasyim Asy'ari yang berbasis di Pesantren Tebuireng Jombang dan Kiai Cholil dari Bangkalan, Madura. Awalnya organisasi ini hanya beroperasi di Jawa, tetapi kemudian meluas ke luar Jawa. Organisasi ini didukung oleh jaringan pesantren dan tarekat yang sangat solid dan kuat. Jika awalnya tampak lebih berurusan dengan hal yang sepele, seperti merespons perkembangan Wahabi dan masalah keagamaan lainnya, belakangan perhatian NU melampaui dan meluas kepada soal-soal kemasyarakatan dan bangsa. NU pun kemudian menjelma menjadi

kekuatan sosial politik keagamaan yang sangat penting dan strategis (lih. Bruinessen 1994; Feillard 1999; Fealy 2003).

Pada masa kemerdekaan, NU memiliki peran penting, terutama karena pandangannya yang pro-nasionalisme. Dalam beberapa kasus, NU bahkan terlibat dalam aksi mempertahankan kemerdekaan. Tidak aneh jika pada masa Indonesia merdeka, tokoh-tokoh pendiri NU seperti KH Hasyim Asy'ari, KH Wahab Chasbullah, KH Zainul Arifin, KH Wahid Hasyim, KH Idham Chalid dan beberapa yang lain diangkat sebagai pahlawan nasional.

NU adalah organisasi dengan paham keagamaan *ahlussunnah wal jamaah* yang khas. Dalam bidang hukum keagamaan NU mengacu pada imam mazhab yang empat; dalam bidang aqidah, mengacu kepada pandangan Imam Asy'ari dan Al-Maturidy; dan dalam bidang tasawuf mengacu pada Imam al-Ghazali dan al-Junaid. Pengacuan ini tidak bersifat '*qauly*' saja, yakni mengambil dan menyesuaikan suatu dengan pendapat para ulama tersebut, tetapi juga secara '*manhaji*', yakni juga metodologi dan cara merumuskan sebuah pemikiran. Dengan rumusan ini, NU memiliki basis tradisi keagamaan dan intelektual yang kaya di satu pihak, dan dengan metodologi tertentu, memiliki respons yang cepat dan positif terhadap perkembangan zaman.

Rumusan acuan keagamaan ini melahirkan tradisi keagamaan yang dinamis dan moderat. Misalnya dalam hal berbangsa dan bernegara, NU sudah menganggap bentuk republik yang majemuk seperti sekarang sebagai bentuk final dan sudah sesuai dengan ajaran Islam. Karena itu NU menolak tawaran bentuk negara Islam yang eksklusif dan bahkan selalu menganulir setiap ada usaha ke arah ini. Sebagai realisasinya, NU menerima Pancasila sebagai asas dan sama sekali tidak mempertentangkannya dengan Islam.

Melalui pola pemikiran keagamaan yang kaya ini pula, KH Ahmad Siddiq, salah seorang pemimpin di masa akhir Orde Baru, merumuskan tiga bentuk persaudaraan (*ukhuwah*) yang harus dipelihara dan dipegang oleh warga NU: 1) *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan Islam); 2) *ukhuwah wathoniyyah* (persaudaraan sebang-

sa); dan 3) *ukhuwah basyariyah* (persaudaraan sebangsa). Ketiga bentuk persaudaraan ini harus saling mengisi dan tidak boleh dipertentangkan. Pandangan seperti ini menempatkan (warga) NU menjadi leluasa dan tidak canggung dalam berdampingan dengan elemen bangsa lain yang berbeda, seperti kalangan agama lain, untuk bertemu dan bekerjasama.

Sikap kemasyarakatan NU, seperti yang diterakan dalam *khittah nahdyiyyah*, bercirikan: 1) sikap *tawasut* dan *i'tidal*, yakni sikap yang berintikan pada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama. Sikap ini mencegah NU bersikap ekstrem; 2) sikap *tasamuh*, yakni toleran terhadap perbedaan pandangan, baik dalam masalah keagamaan, lebih-lebih yang bersifat *furu'*, maupun dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan; 3) sikap *tawazun*, yakni seimbang dalam ber*khidmah*: *khidmah* kepada Allah, kepada sesama manusia dan kepada lingkungan; menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa mendatang; 4) *amar makruf nahi munkar*, yakni selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, dan menolak serta mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan. Seperti akan terlihat nanti, sikap kemasyarakatan ini sangat penting dan menjadi landasan bagi banyak aktivis NU dalam berpikir dan melakukan kegiatan.

NU memiliki anggota atau pendukung puluhan hingga ratusan juta. Sulit menghitung jumlah tepatnya, terutama karena sifat NU yang lebih sebagai paguyuban daripada patembayan. Apalagi, NU tidak mewajibkan anggotanya memiliki kartu anggota. Keanggotaan bisa bersifat formal, bisa pula kultural. Mereka yang menganggap diri sebagai NU bisa terentang dari muslim nominal hingga muslim saleh. Hal ini bisa terjadi karena NU memiliki pandangan yang terbuka, tidak hitam putih, termasuk dalam hal beragama.

NU memiliki cabang organisasi di hampir setiap provinsi dan kabupaten, serta sejumlah badan otonom. Lembaga dan cabang secara langsung berada di bawah kepengurusan PBNU. Sedangkan

badan otonom adalah organisasi yang berafilisasi kepada NU tetapi memiliki struktur kepengurusan tersendiri. Di antara badan otonom yang berafiliasi ke NU adalah IPNU (Ikatan Pelajar NU), IPPNU (Ikatan Pelajar Puteri NU), Ansor (organisasi pemuda), Fatayat (organisasi pemudi), serta Muslimat (organisasi perempuan NU). Fatayat berisikan anak-anak muda, sedangkan Muslimat beranggotakan ibu-ibu. Badan-badan otonom ini juga memiliki kepengurusan dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah. Badan-badan otonom inilah yang banyak menghidupkan kegiatan NU dan membuat NU hidup sebagai sebuah organisasi.

Di samping itu, NU memiliki lembaga-lembaga dengan spesialisasi dalam bidang-bidang tertentu. Lembaga ini merupakan perangkat departementasi organisasi NU yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan NU, berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan/atau yang memerlukan penanganan khusus. Tercatat ada delapan belas (18) lembaga yang berada di bawah NU. Sebagian besar lembaga ini juga ada dari tingkat pusat hingga daerah, dan bergerak aktif sebagai bagian dari organisasi masyarakat sipil. Berbeda dengan badan otonom yang banyak melakukan kegiatan keorganisasian terkait kepentingan internal organisasi, lembaga-lembaga ini bergerak lebih luas di berbagai bidang dan di kalangan masyarakat. Dari eksistensi lembaga-lembaga ini, peran NU sebagai organisasi masyarakat sipil bisa dilihat secara luas, konsisten dan terencana.[1]

---

1 Lembaga-lembaga itu adalah: 1) Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU), bertugas melaksanakan kebijakan NU di bidang pengembangan agama Islam yang menganut faham *ahlussunnah wal jamaah*. 2) Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama (LP Maarif NU), bertugas melaksanakan kebijakan NU di bidang pendidikan dan pengajaran formal. 3) *Rabithah Ma'ahid al Islamiyah* Nahdlatul Ulama (RMI NU), bertugas melaksanakan kebijakan NUdi bidang pengembangan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan. 4) Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU), bertugas melaksanakan kebijakan NU di bidang pengembangan ekonomi warga NU. 5) Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU), bertugas melaksanakan kebijakan NU di bidang pengembangan dan pengelolaan pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup. 6) Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU), bertugas melaksanakan kebijakan NU di bidang kesejahteraan keluarga, sosial dan kependudukan. 7) Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU), bertugas melaksanakan kebijakan NU di bidang pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia. 8)

Di luar badan-badan otonom dan lembaga-lembaga di atas, ada lagi satu kelompok masyarakat yang memiliki hubungan dan rumpun kekeluargaan dengan NU, yakni organisasi non-pemerintah (ornop), seperti P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) dan Lakpesdam di Jakarta, dan LKPSM dan Yayasan LKiS[2] serta eLSAD[3] di Surabaya. Greg Barton (2002: 191-2) menunjukkan dengan tepat kekuatan ornop-ornop ini. Kemunculannya, menurut Barton, merupakan suatu inisiatif dan kreativitas karena di antara organisasi-organisasi tersebut tidak ada yang terpusat di dalam NU.[4] Setelah tahun 2000-an, banyak bermunculan ornop-ornop sejenis, seperti Syarikat (Yogyakarta),[5]

Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU), bertugas melaksanakan pendampingan, penyuluhan, konsultasi, dan kajian kebijakan hukum. 9) Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama (LESBUMI NU), bertugas melaksanakan kebijakan NU di bidang pengembangan seni dan budaya. 10) Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU), bertugas menghimpun, mengelola dan mentasharufkan zakat dan shadaqah kepada mustahiqnya. 11) Lembaga Waqaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU), bertugas mengurus, mengelola serta mengembangkan tanah dan bangunan serta harta benda wakaf lainnya milik Nahdlatul Ulama. 12) Lembaga *Bahtsul Masa'il* Nahdlatul Ulama (LBMNU), bertugas membahas masalah-masalah *maudlu'iyah* (tematik) dan *waqi'iyah* (aktual) yang akan menjadi Keputusan PBNU. 13) Lembaga Ta'mir Masjid Nahdlatul Ulama (LTMNU), bertugas melaksanakan kebijakan NU di bidang pengembangan dan pemberdayaan masjid. 14) Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU), bertugas melaksanakan kebijakan NU di bidang kesehatan. 15) Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU), bertugas mengelola masalah *ru'yah*, *hisab* dan pengembangan ilmu falak. 16) Lembaga *Ta'lif wan Nasyr* Nahdlatul Ulama (LTNNU), bertugas mengembangkan penulisan, penerjemahan dan penerbitan kitab/buku serta media informasi menurut faham *ahlussunnah wal jamaah*. 17) Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU), bertugas mengembangkan pendidikan tinggi NU. 18) Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU), bertugas melaksanakan kebijakan NU dalam pencegahan dan penanggulangan bencana serta eksplorasi kelautan.

2 YLKIS berdiri tahun 1994, aktif di dalam pengembangan demokrasi, multikulturalisme dan HAM. Pada tahun 2001, YLKIS mendapatkan *Tasrif Award* dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) karena ide dan penyebaran buletin Jumat damai. Tahun 2002, YLKIS mendapat penghargaan dari Prince Claus, Belanda, karena mempromosikan toleransi dan perdamaian.

3 Berubah menjadi CMARS.

4 Greg Barton keliru dalam memasukkan nama Lakpesdam di Jakarta dan LKPSM Yogyakarta sebagai lembaga jenis kultural ini, karena pada dasarnya keduanya merupakan lembaga-lembaga resmi di bawah NU.

5 Syarikat (Masyarakat Santri untuk Advokasi Rakyat) berdiri tahun 2000, secara khusus bergerak dalam bidang rekonsiliasi antara masyarakat Muslim dan mantan tahanan politik anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) atau mereka yang dituduh sebagai simpatisan PKI, sebagai akibat dari peristiwa politik tahun 1965-66. M.

Fahmina Institute (Cirebon),[6] Wahid Foundation (Jakarta), LAPAR (Makassar), dan Qaryah Thoyyibah (Salatiga),[7] untuk menyebut beberapa. Lembaga-lembaga ini memang tidak memiliki hubungan struktural keorganisasian dengan NU, tetapi para pengelolanya dekat, bahkan sebagian merupakan pengurus di dalam struktur organisasi NU. Dan terutama nilai-nilai dasar yang mereka kembangkan dekat dan sama dengan nilai-nilai NU. Karena itu tidak aneh jika suara lembaga-lembaga ini sering juga dipandang mewakili suara NU. Tulisan ini pun tidak bisa menghindarkan diri dari meneropong peran lembaga-lembaga ini dalam kaitannya dengan peran dan kontribusi kemanusiaan NU.[8]

Imam Aziz, pendiri Syarikat –kemudian menjadi salah seorang Ketua PBNU (2009-14; 2014-19) – memperoleh *Ashoka Fellowship* tahun 2010 dan diganjar anugerah perdamaian dari The Jeju 4.3 Peace Foundation, Korea Selatan, atas inisiatif dan kegiatan rekonsiliasi ini (lihat secara khusus bagian F).

6 Fahmina Institute didirikan tahun 1999, banyak bergerak di bidang pendidikan HAM, pluralisme, dan demokrasi, serta advokasi hak-hak perempuan. Banyak ide cemerlang lahir dari lembaga ini. Tokoh pendirinya KH Husein Muhammad yang menulis banyak buku dan memberikan prasaran seminar nasional maupun internasional, pernah memperoleh penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai "Tokoh Pemberdayaan Perempuan" tahun 2003 dan sejak tahun 2011 hingga 2017 selalu masuk sebagai salah satu dari 500 tokoh muslim berpengaruh di dunia (*The Most Influential Muslems*) dari kalangan ulama yang daftarnya dibuat oleh The Royal Islamic Strategic Studies Center (RISSC), Yordania. Tahun 2013, Fahmina menerima penghargaan dari Yayasan Opus. Bersama Sister Carol Keehan, lembaga kesehatan Katolik AS, mereka menerima $75,000 untuk kegiatan mereka. Fahmina dipilih karena kampanye pemahaman Islamnya yang didedikasikan untuk keadilan dan kesetaraan gender. Fahmina juga mengelola Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon. Lebih jauh tentang lembaga ini bisa dilihat https://fahmina.or.id

7 Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah (KBQT) berdiri tahun 2003. Komunitas yang dikelola Muhammad Baharuddin ini mengembangkan pola pendidikan rakyat alternatif setingkat SMP dan SMU. Selain itu, melalui Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah, komunitas ini juga banyak melakukan advokasi terhadap nasib petani.

8 Dengan alasan tertentu, kami tidak memasukkan Jaringan Gusdurian di sini, karena luasnya basis dan dukungan terhadap jaringan ini, bukan semata NU saja. Ini untuk menghindari keberatan dari para anggota dan pendukungnya yang bukan NU, meski dari segi nama jaringan dan koordinatornya, Alissa Wahid, notebene juga pengurus NU, yakni Wakil Ketua LKK-NU Pusat. Baru-baru ini Jaringan Gusdurian mendapat anugerah *Asia Democracy and Human Rights Award* 2018 dari The Taiwan Foundation for Democracy (TFD). Lihat Kompas.com "Jaringan Gusdurian Raih Asia Democracy and Human Rights Award 2018 ", https://nasional.kompas.com/read/2018/12/11/07144191/jaringan-gusdurian-raih-asia-democracy-and-human-rights-award-2018. (diakses 17 Desember 2018).

B. Beberapa Pemikiran NU Kontemporer

Pada setiap muktamar, NU biasanya akan menggelar '*bahtsul masa'il*, sebuah forum untuk membahas, mendiskusikan dan memberikan respons pada masalah-masalah sosial kontemporer. Di samping itu, ada pula '*bahtsul masa'il*' yang digelar secara tematik, tergantung tema yang sedang aktual dan urgen karena masyarakat perlu memperoleh jawaban segera.

Bahtsul masa'il ini tidak hanya digelar oleh Pengurus Pusat PBNU, tetapi juga oleh pengurus wilayah dan cabang. Kadang kala *bahtsul masa'il* juga dilakukan oleh lembaga-lembaga di bawah NU atau yang dekat dengan NU. Mereka yang terlibat bukan hanya ulama, tetapi juga ahli-ahli yang relevan dengan topik pembahasan. Pandangan NU terhadap suatu masalah secara resmi bisa dilihat dari hasil-hasil *bahtsul masa'il* ini, selain melalui muktamar atau konferensi.[9]

Produksi pengetahuan dan ide, dengan demikian, berjalan sangat dinamis dan besar di dalam NU. Namun dalam tulisan ini, hanya akan dibahas empat hal yang cukup penting, yaitu kedudukan perempuan, gagasan Islam Nusantara dan fikih untuk penyandang disabilitas, serta lingkungan dan sumber daya alam (SDA).

1. Kedudukan Perempuan

Hal yang menarik di dalam NU adalah banyaknya lembaga –badan otonom maupun lembaga-lembaga yang memiliki hubungan kekerabatan dengan NU– yang berkhidmat di dalam kegiatan pengarusutamaan gender dan hak-hak perempuan. Selain Fatayat yang berada di pusat hingga daerah, tercatat pula Lakpesdam, Puan Amal Hayati, Pusat Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Fahmina, dan YLKIS, untuk menyebut be-

9 Hasil-hasil *bahtsul masa'il* dari muktamar ke muktamar, munas dan konbes telah dihimpun dan diterbitkan dalam *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004)* diterbitkan oleh LTN NU dan Kalista, 2007. Tentang Bahtsul Masa'il lihat pembahasan Moesa (2007).

berapa. Menurut seorang pengamat yang juga aktivis perempuan Muslim (Affiah 2016; 2018), kelompok-kelompok perempuan ini memiliki kontribusi dalam *mainstreaming* gender sebagai kebijakan negara. Bahkan lebih jauh, mereka berhasil mendorong produk kebijakan negara seperti Undang-undang Perlindungan kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Neng Dara Affiah menyebut mereka sebagai "perempuan progresif".

Selain lembaga-lembaga tersebut, di lingkungan NU juga terdapat banyak pemikir gender dan perempuan. Bisa disebut di antaranya Sinta Nuriyah Wahid, Maria Ulfah Anshor, Neng Dara Affiah, Ala'i Najib, Masdar Farid Mas'udi, Husein Muhammad, dan Faqih Abdul Qodir. Gagasan-gagasan mereka mendorong kemajuan dan emansipasi besar terhadap kedudukan perempuan di Indonesia, bahkan menjadi inspirasi di dunia internasional, terutama dalam kaitannya dengan bagaimana wacana dan gerakan perempuan mampu mengaitkan dirinya dengan kebijakan pemerintah.

Barangkali bukan kebetulan kalau mayoritas dari lembaga dan para pemikir ini adalah anggota dan pengurus NU, atau setidaknya berasal dari lingkungan NU. Ini karena NU sendiri sangat mendukung wacana dan gerakan perempuan. Hal ini setidaknya tercermin dari beberapa keputusan yang dikeluarkan NU di dalam muktamar, munas atau konbesnya. Salah satu yang penting dicatat misalnya pada tahun 1997 dalam Munas NU di Lombok, NU mengeluarkan keputusan bahwa Islam memberikan hak wanita yang sama dengan laki-laki untuk mengabdi kepada agama, nusa, dan bangsa, serta negara. NU mengakui bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dan sederajat.

Keputusan ini sangat penting karena saat itu di kalangan umat Islam khususnya, perempuan dilarang dan diharamkan memegang kedudukan politik yang membawahi laki-laki. Singkatnya, perempuan haram menjadi pemimpin, entah bupati, gubernur hingga presiden. Keputusan NU mendobrak tabu itu semua. Sejak saat itu, hingga kini, beberapa perempuan bisa menduduki jabatan politik

tanpa dipersoalkan lagi secara keagamaan, atau setidaknya yang mempersoalkannya hanyalah suara minor.[10]

Selanjutnya, pada Muktamar ke-30 di Kediri tahun 1999, NU mengeluarkan keputusan yang memberikan dukungan pada ide kesetaraan gender. Argumentasi dikemukakan adalah bahwa masalah ketidakadilan gender terjadi karena adanya hubungan yang tidak adil di bidang keagamaan, kebudayaan (persepsi masyarakat) dan politik. Yang pertama menunjukkan adanya penafsiran keagamaan yang tidak sesuai dengan asas keadilan gender, bahkan bias gender. Sementara di bidang kebudayaan diakui adanya budaya patriarki, yakni kebudayaan yang memapankan peran laki-laki untuk melakukan dan menentukan apa saja, disadari atau tidak, sementara perempuan selalu diletakkan dalam posisi subordinat. Sedangkan di bidang politik, terdapat praktik-praktik politik yang mendiskriminasi perempuan, marjinalisasi perempuan, dan menutup akses perempuan.

Untuk mengatasi itu semua, NU mendorong upaya terus menerus untuk 1) menafsirkan ulang beberapa *nuktah* dalam pemahaman keagamaan; 2) untuk melihat kembali secara kritis paham-paham kebudayaan yang bias laki-laki (kebudayaan patriarki); dan 3) untuk merombak praktik-praktik politik yang mendiskriminasi perempuan.[11]

Dengan setidaknya dua keputusan progresif di atas, tidaklah aneh jika di lingkungan NU, program perempuan dan gender sangat kuat. Bisa dikatakan bahwa NU dalam hal ini memberikan sumbangan besar dalam penegakan keadilan gender di masyarakat.

Salah satu terobosan baru dari kegiatan gender dan perempuan ini adalah penyelenggaraan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Pertama, yang diselenggarakan di Pesantren Pondok Jambu, Cirebon, 25-27 April 2017 (Affiah, 2018). Setidaknya ada dua hal penting dari kongres ini. Pertama, pengakuan dan pene-

10 Tahun 2001, Megawati Sukarnoputeri naik menjadi presiden, dan setelah itu, beberapa nama perempuan tercatat sebagai gubernur atau bupati/walikota, tanpa atau setidaknya relatif minim yang mempersoalkan secara keagamaan.

11 Argumentasi lebih lengkap bisa dilihat Tim PW LTN Jatim (2007: 669-71).

gasan predikat 'ulama perempuan.' Sebagai sebuah status, ulama perempuan di Indonesia sudah lama ada dan memberikan sumbangan pada dunia pendidikan secara umum dan pada pendidikan kaum perempuan secara khusus. Namun sebagai sebuah 'profesi', kedudukan ulama perempuan seringkali anonim. Eksistensi mereka tertutupi oleh nama-nama suami mereka atau hanya terbatas di lingkungan pesantren atau organisasi saja. Kongres ini mengakui dan menegaskan kedudukan ulama perempuan sebagai sebuah predikat dan profesi yang nyata dan mandiri.

Sebagai konsekuensinya, maka suara ulama perempuan perlu dikemukakan, sekaligus didengarkan. Kongres ini adalah realisasi dan implementasi dari pentingnya mengedepankan dan mendengarkan suara perempuan, lebih khusus lagi suara ulama perempuan. Di dalam kongres ini, ulama perempuan membicarakan masalah, menawarkan ide dan perspektif, mengusulkan pemecahannya, serta terlibat lebih luas dalam penyelesaiannya. Pendek kata, ulama perempuan ingin terlibat dalam setiap masalah, sejak perencanaan hingga penilaian akhir.

Dengan dua catatan itu, tidaklah berlebihan jika dikatakan kongres ini merupakan suatu pekerjaan dan capaian yang besar. Ia bukan saja yang pertama di Indonesia, tapi juga mungkin di dunia.

2. Islam Nusantara

Baru-baru ini, NU memperkenalkan rumusan pemikiran dan pola keagamaan yang disebut Islam Nusantara. Kemunculan ide "Islam Nusantara" lebih merupakan penegasan pada kenyataan sosiologis yang telah lama ada, bahwa ada interpretasi dan ekspresi 'berislam' khas yang dikembangkan di wilayah Nusantara. Islam Nusantara ada sebagaimana secara geografis ada Islam Arab, Islam Turki, Islam anak benua India, Islam Persia, Islam Afrika, Islam gurun Sahara, dan Islam Barat.

Konsep ini secara sederhana bisa dipahami sebagai suatu cara beragama yang secara teologis setia kepada akidah Islam, tetapi

secara sosiologis menyesuaikan dengan waktu dan tempat. Dengan demikian, Islam Nusantara, atau Islam yang berkembang dan dikembangkan di Nusantara bukanlah Islam Arab, bukanlah Islam Turki, bukan Islam Persia dan seterusnya. Islam Nusantara adalah Islam yang dikembangkan sesuai dengan latar belakang sosial dan budaya serta alam Nusantara. Terutama dalam hal ini, kaitannya dengan Arab, Islam memang berasal dari Arab dan bahasa ritualnya juga Arab, tetapi ia bukan Arab. Karenanya, Islamisasi bukan berarti sebagai arabisasi. Tetapi tidak berarti dengan ini, Islam Nusantara anti-Arab, sebagaimana juga tidak anti-Turki, Anti-Persia, dan seterusnya.

Jika dirumuskan dalam beberapa kalimat, watak dari Islam Nusantara adalah: 1) Islam Nusantara menekankan harmoni, menghormati dan bahkan menjalankan tradisi dan budaya lokal melalui mekanisme akulturasi; 2) Islam Nusantara terbiasa dan membiasakan hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain. Islam Nusantara mengayomi dan melindungi pemeluk agama lain; 3) Islam Nusantara meyakini bahwa Indonesia merupakan negara yang Islami dan republik merupakan bentuk final.

Slogan Muktamar NU 2015 yang berlangsung di Jombang berbunyi: “Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia.” Sejak itulah, Islam Nusantara menjadi populer, ramai diperbincangkan, dan juga menyulut kontroversi. Kontroversi muncul karena kesalahpahaman melihat Islam Nusantara sebagai anti-Arab atau sebagai paham atau ajaran baru. Tetapi sebenarnya Islam sudah jauh lebih lama diperkenalkan. Pada tahun 2008, jurnal *Tashwirul Afkar* No 28, yang diterbitkan oleh Lakpesdam telah menerbitkan edisi tentang Islam Nusantara. Gagasan Islam Nusantara juga bisa dihubungkan dengan ide ‘pribumisasi Islam’ yang dikemukakan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sejak awal 1980-an. Dengan demikian, Islam Nusantara jelas bukan sesuatu yang baru.[12]

---

12 Sejak itu ada puluhan buku dan artikel ditulis mengenai Islam Nusantara.

Seorang pengamat bahkan meyakini bahwa jauh sebelumnya telah ada gagasan-gagasan pencarian Islam Indonesia yang bisa dikatakan mendahului gagasan Islam Nusantara. Ia menyebut gagasan "fikih Indonesia" yang dikemukakan oleh ulama, pengajar di IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Tengku Hasbi Ash-Siddiqi; "Hukum Islam Mazhab Nasional" yang digagas oleh ahli hukum Prof. Dr. Hazairin, dan ide "Kontekstualisasi Ajaran Islam" yang dikemukakan oleh Munawwir Sadzali, mantan Menteri Agama tahun 1980an (Burhani 2018).

Islam Nusantara, dengan demikian, tak lebih merupakan penamaan baru untuk gejala dan realitas lama yang telah ada. Kendati demikian, mengapa gagasan ini penting dan menarik, serta menuai kontroversi?

Islam Nusantara yang dikenalkan sekarang ini berada pada momentum yang tepat, yakni ketika radikalisme kekerasan dan terorisme keagamaan merebak baik di Indonesia dan di belahan dunia lainnya. Sementara itu, konsepsi Islam Nusantara menjadi sangat penting karena ia mencegah di bagian paling dini dari pengaruh pemikiran keagamaan yang mendorong Islam untuk 'mengikuti dan menjadi Arab', terutama dalam hal terakhir ini lalu menjadi jihadisme radikal. Islam Nusantara bersimpang jalan, bahkan menentang, radikalisme kekerasan atau terorisme atas nama apa pun. Sembari memberikan kritik terhadap wacana Islam Nusantara, seorang pengamat sangat setuju bahwa Islam Nusantara memiliki kekuatan dan potensi untuk mencegah bahaya radikalisme keagamaan dan terorisme (Burhani 2018).

Sadar dengan potensi dan kekuatan ini, pada 9-11 Mei 2016, NU menggelar *International Summit of The Moderate Islamic Leaders* (Muktamar Internasional Para Pemimpin Islam Moderat). Menurut buku panduan acara yang diterbitkan penyelenggara, tercatat ada 39 ulama dari 39 negara hadir dalam konferensi tersebut. Pada pembukaan, Ketua PBNU KH Dr. Said Aqil Siradj memberikan sambutan dengan judul "Islam dan Kebangsaan." Sedangkan akhir

konferensi ditutup dengan "Deklarasi Nahdlatul Ulama", yang berisi 16 butir pernyataan, sebagaimana berikut ini.

1. Nahdlatul Ulama menawarkan wawasan dan pengalaman Islam Nusantara kepada dunia sebagai paradigma Islam yang layak diteladani, bahwa agama menyumbang kepada peradaban dengan menghargai budaya yang telah ada serta mengedepankan harmoni dan perdamaian.
2. Nahdlatul Ulama tidak bermaksud mengekspor Islam Nusantara ke kawasan lain di dunia, tetapi sekadar mengajak komunitas-komunitas Muslim lainnya untuk mengingat kembali keindahan dan kedinamisan yang terbit dari pertemuan sejarah antara semangat dan ajaran-ajaran Islam dengan realitas budaya lokal di seantero dunia, yang telah melahirkan beragam peradaban-peradaban besar, sebagaimana di Nusantara.
3. Islam Nusantara bukanlah agama atau madzhab baru melainkan sekadar pengejawantahan Islam yang secara alami berkembang di tengah budaya Nusantara dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam sebagaimana dipahami, diajarkan dan diamalkan oleh kaum *ahlussunnah wal jama'ah* di seluruh dunia.
4. Dalam cara pandang Islam Nusantara, tidak ada pertentangan antara agama dan kebangsaan. *Hubbul watan minal iman*: "Cinta tanah air adalah bagian dari iman." Barangsiapa tidak memiliki kebangsaan, tidak akan memiliki tanah air. Barangsiapa tidak memiliki tanah air, tidak akan punya sejarah.
5. Dalam cara pandang Islam Nusantara, Islam tidak menggalang pemeluk-pemeluknya untuk menaklukkan dunia, tetapi mendorong untuk terus-menerus berupaya menyempurnakan *akhlaqul karimah*, karena hanya dengan cara itu Islam dapat sungguh-sungguh mewujud sebagai rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil 'alamin*).

6. Islam Nusantara secara teguh mengikuti dan menghidupkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam yang mendasar, termasuk *tawassuth* (jalan tengah, yaitu jalan moderat), *tawaazun* (keseimbangan; harmoni), *tasaamuh* (kelemah-lembutan dan kasih-sayang, bukan kekerasan dan pemaksaan) dan *i'tidaal* (keadilan).
7. Sebagai organisasi *ahlussunnah wal jama'ah* terbesar di dunia, Nahdlatul Ulama berbagi keprihatinan yang dirasakan oleh sebagian besar warga Muslim dan non-Muslim di seluruh dunia, tentang merajalelanya ekstremisme agama, teror, konflik di Timur Tengah dan gelombang pasang Islamofobia di Barat.
8. Nahdlatul Ulama menilai bahwa model-model tertentu dalam penafsiran Islamlah yang merupakan faktor paling berpengaruh terhadap penyebaran ekstremisme agama di kalangan umat Islam.
9. Selama beberapa dekade ini, berbagai pemerintah negara di Timur Tengah telah mengeksploitasi perbedaan-perbedaan keagamaan dan sejarah permusuhan di antara aliran-aliran yang ada, tanpa mempertimbangkan akibat-akibatnya terhadap kemanusiaan secara luas. Dengan cara menghembuskan perbedaan-perbedaan sektarian, negara-negara tersebut memburu *soft power* (pengaruh opini) dan *hard power* (pengaruh politik, ekonomi serta militer) dan mengekspor konflik mereka ke seluruh dunia. Propaganda-propaganda sektarian tersebut dengan sengaja memupuk ekstremisme agama dan mendorong penyebaran terorisme ke seluruh dunia.
10. Penyebaran ektremisme agama dan terorisme ini secara langsung berperan menciptakan gelombang pasang Islamofobia di kalangan non-Muslim.
11. Pemerintahan negara-negara tertentu di Timur Tengah mendasarkan legitimasi politiknya diambil justru dari taf-

sir-tafsir keagamaan yang mendasari dan menggerakkan ekstremisme agama dan teror. Ancaman ekstremisme agama dan teror dapat diatasi hanya jika pemerintahan-pemerintahan tersebut bersedia membuka diri dan membangun sumber-sumber alternatif bagi legitimasi politik mereka.

12. Nahdlatul Ulama siap membantu dalam upaya ini.
13. Realitas ketidakadilan ekonomi dan politik serta kemiskinan massal di dunia Islam turut menyumbang pula terhadap berkembangnya ekstremisme agama dan terorisme. Realitas tersebut senantiasa dijadikan bahan propaganda ekstremisme dan terorisme sebagai bagian dari alasan keberadaannya dan untuk memperkuat ilusi masa depan yang dijanjikannya. Maka masalah ketidakadilan dan kemiskinan ini tak dapat dipisahkan pula dari masalah ekstremisme dan terorisme.
14. Walaupun maraknya konflik yang meminta korban tak terhitung jumlahnya di Timur Tengah seolah-olah tidak dapat diselesaikan, kita tidak boleh memunggungi masalah ataupun berlepas diri dari mereka yang menjadi korban. Nahdlatul Ulama mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil peran aktif dan konstruktif dalam mencari jalan keluar bagi konflik multi-faset yang merajalela di Timur Tengah.
15. Nahdlatul Ulama menyeru siapa saja yang memiliki iktikad baik dari semua agama dan kebangsaan untuk bergabung dalam upaya membangun konsensus global untuk tidak mempolitisasi Islam, dan memarjinalkan mereka yang hendak mengeksploitasi Islam sedemikian rupa untuk menyakiti sesama.
16. Nahdlatul Ulama akan berjuang untuk mengonsolidasikan kaum *ahlussunnah wal jama'ah* sedunia demi memperjuangkan terwujudnya dunia di mana Islam dan kaum Muslimin

sungguh-sungguh menjadi pembawa kebaikan dan berkontribusi bagi kemaslahatan seluruh umat manusia.

Enam belas pernyataan di atas menunjukkan, di satu pihak, bagaimana konsepsi Islam Nusantara, dan di pihak lain, sikap dan posisi NU terhadap persebaran ektremisme kekerasan dan terorisme yang mengakibatkan terkoyaknya perdamaian dunia. NU siap bekerjasama dengan kelompok siapa dan mana pun sejauh untuk kepentingan perdamaian.

Kendati demikian, NU juga tidak menganggap situasi dunia yang dilandasi konflik keagamaan ini semata-mata karena masalah agama. NU juga mengkritik ketidakdilan dan kesenjangan ekonomi, bahkan meyakini keadaan sosial yang tidak adil itu ikut menyuburkan radikalisme, ekstremisme dan terorisme (Machfoedz, 2016).[13]

Islam Nusantara menggelinding dari sebuah ide menjadi gerakan yang besar. Baru-baru ini, misalnya, sinergi antara Humanitarian Islam, Bayt Ar-Rahmah[14] dan GP Ansor mengeluarkan program "Kirab Satu Negeri" dan "Global Unity Forum" yang dikemas dalam suatu dokumen yang disebut *The Nusantara Manifesto*. Manifesto setebal 40 halaman itu berisi gagasan-gagasan untuk penyegaran paham keagamaan, seruan untuk mengakhiri konflik, dan mendorong perdamaian (lih. Manifesto, 2018).[15]

Selain itu, di Malaysia, dengan sedikit perbedaan penafsiran, Islam Nusantara disambut dengan bersemangat. Hal ini ditunjukkan oleh adanya pergeseran orientasi dari Arab ke Nusantara yang ditandai dengan perubahan monumen IIUM (International

---

13 Teks lengkap deklarasi ini, bisa juga dibaca di http://www.nu.or.id/post/read/68092/inilah-naskah-lengkap-deklarasi-nahdlatul-ulama-kepada-dunia diunduh 10 Desember 2018. Salah satu liputan internasional mengenai pertemuan ini, lihat Topsfield (2016).

14 Bayt Ar-Rahmah adalah lembaga internasional yang diketuai oleh Kiai Haji Yahya Cholil Staquf, Katib Aam Syuriah PBNU. Tujuan lembaga ini adalah memperkenalkan Islam yang ramah dan mempromosikan keadilan sosial. Lebih jauh tentang lembaga ini bisa dilihat situs mereka di http://baytarrahmah.org (diakses 17 Desember 2018).

15 Tentang kampanye Islam Nusantara ke mancanegara ini, lihat Joe Cochrane (2017).

Islamic University Malaysia) dari "buku" menjadi "keris", dan pembukaan program "Nusantara Studies" di ISTAC. ISTAC sendiri berubah nama, dari "International Institute of Islamic Thought and Civilization" menjadi "International Institute of Islamic Civilisation and Malay World" (Burhani, 2018).

3. Fikih Disabilitas

NU memiliki kepedulian kepada kelompok minoritas, yang secara fisik maupun mental seringkali menjadi korban diskriminasi dan stereotipe negatif oleh masyarakat mayoritas maupun negara akibat kebijakan yang kurang berpihak kepadanya. Di antara contoh kasus, yang saat ini menjadi perhatian khusus PBNU, adalah tentang advokasi terhadap penyandang disabilitas.

Kelompok disabilitas masih menghadapi banyak tantangan dan hambatan, terutama dalam menjalankan syariat. Di luar keterbatasan fisik, mental dan intelektual kalangan disabilitas yang jumlahnya lebih dari 6 juta jiwa di Indonesia, mereka menghadapi sejumlah tantangan lain, yaitu cara pandang, diskriminasi di lapangan kerja, dan hambatan dalam menjalankan agama.

Itulah sebabnya, Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) pada Kamis (29/11/2018) me-*launching* buku berjudul *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*. Menurut Sekretaris LBM PBNU, KH Sarmidi Husna, kepedulian kepada penyandang disabilitas merupakan tangung jawab kemanusiaan dan keimanan sebagai seorang muslim.

Dalam sebuah hadis disebutkan, *man lam yahtamma bi amril muslimin, fa laisa minhum* (orang yang tidak berkontribusi pada urusan umat Islam bukan bagian dari mereka). Meskipun hadis ini secara eksklusif ditujukan kepada umat Muslim, namun NU sejak lama telah memahami persoalan kemanusiaan dalam tiga dimensi persaudaraan, yaitu persaudaraan umat Islam (*ukhuwah islamiyah*), persaudaraan antar bangsa (*ukhuwah wathaniyah*), dan persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwah basyariyah*).

Buku *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas* berisi tentang pembacaan kritis PBNU tentang problem disabilitas yang mungkin bisa berbeda dengan pemahaman banyak kalangan. Buku ini juga secara praktis membahas persoalan-persoalan fikih disabilitas pada empat aspek, yaitu ibadah (*ubudiyah*), tata pergaulan (*muamalah*), kebijakan publik (*jinayah siyasah*), pernikahan dan keluarga (*ahwal al-syakhsiyah*).

Diskusi intensif tentang problem disabilitas ini berlangsung cukup lama. "Sebelum Munas NU di Lombok pada tahun 2017 lalu kami didatangi kelompok disabilitas. Kami mengadakan diskusi terbatas dengan mereka. Masalah ini dibawa ke forum Munas NU tapi hanya dibahas di komisi *maudhu'iyah* yang sangat konseptual karena tidak mungkin membahas rinci dengan kesempatan terbatas," tegas KH Sarmidi Husna. Sejak itulah berlangsung diskusi, FGD dengan mengundang perwakilan disabilitas (netra, tuli, dan daksa), kalangan aktivis, intelektual, dan ulama/kiai. Dari forum inilah kemudian lahir buku *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas* yang secara aktual baru ada saat ini.

Oleh PBNU disabilitas tidak dipahami dalam paradigma klasik dan konservatif, baik cara pandang mistis maupun cara pandang naif. Cara pandang mistis menganggap disabilitas sebagai takdir dari Tuhan sehingga manusia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali pasrah menjalaninya. Sementara cara pandang naif melihat disabilitas sebagai akibat dari infeksi penyakit, keturunan, kecelakaan, atau penuaan yang berujung pada pentingnya memberi pendidikan, platihan, kursus, keterampilan dan semacamnya, sehingga mereka bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik.

Cara pandang naif sepertinya terlihat lebih baik ketimbang cara pandang mistis. Namun, kedua cara pandang tersebut sejatinya sama-sama memiliki kelemahan mendasar karena sama-sama memandang disabilitas dengan berbasis pada *charity*, atau belas kasihan, yang ujungnya bermuara pada stigma terhadap kaum disabilitas sebagai kelompok yang lemah, tidak berdaya, tidak memiliki kemampuan, tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti,

tidak beruntung, sakit, tidak normal, tidak lengkap, dan sejenisnya. Stigma ini biasanya diikuti dengan berbagai bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas: diskriminasi tidak hanya pada fasilitas publik yang tidak memberi akses memadai bagi penyandang disabilitas, terutama akses informasi, pendidikan, dan pekerjaan.

Karena itu, PBNU menempuh jalan lain dalam memaknai disabilitas. Cara pandang mistis maupun naif harus diimbangi dengan cara pandang kritis. Artinya, disabilitas bukan hanya soal takdir, tetapi juga bukan semata-mata fenomena manusiawi. Disabilitas merupakan konstruksi sosial-politik.

Hj. Shinta Nuriyah Wahid yang hadir dalam acara *launching* buku *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas* bercerita bahwa sejak terkena musibah pada 1990 ia aktif memberikan penguatan kepada kalangan disabilitas. “Kami dulu keliling Indonesia memberikan kursi roda ke mereka bukan cuma-cuma. Kita minta mereka membayar hanya Rp.25.000. Hal ini tidak ditujukan untuk menarik uang itu, tapi semata-mata bahwa kursi ini tidak dibagikan cuma-cuma,” kata Hj. Shinta.

Maksud pembelian kursi roda itu ingin menghadirkan persepsi di kalangan disabilitas bahwa fasilitas yang mereka dapatkan seperti kursi roda, tongkat, dan sebagainya bukan dibagikan atas dasar kasihan, melainkan melalui transaksi sebagaimana umumnya.

Pada saat ke Jepang Hj. Shinta menyatakan kekagumannya karena infrastruktur di sebuah rumah sakit yang ditemuinya sangat ramah terhadap kalangan disabilitas. Dari pengalaman itu, ia melakukan gerakan ramah disabilitas secara lebih intensif. Ia bercerita bahwa pernah membuat Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional (GAUN) pada tahun 2000, dengan membuat toilet, lift, loket untuk disabilitas. Pada program itu, ia menggandeng Agum Gumelar, Menteri Perhubungan di zaman Gus Dur menjadi Presiden RI.

“Tetapi ketika Gus Dur turun, semua gerakan itu ikut turun. Yang tersisa hanya lift. Itu pun digunakan oleh mereka yang non

disabilitas. Kita yang disabilitas harus antri dengan mereka. Artinya kesadaran masyarakat masih rendah," kata Hj Shinta.

Oleh karena itu, tanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak disabilitas tidak hanya dipikul oleh penyandang disabilitas sendiri dan keluarganya, tetapi juga tanggung jawab masyarakat, ormas dan terutama negara (pemerintah). Dengan perspektif ini, maka membangun situasi sosial yang ramah disabilitas adalah kewajiban, sebagaimana diamanatkan UU No. 8 Tahun 2016. Sayangnya, sampai saat ini, layanan dan fasilitas publik yang ramah disabilitas masih sangat terbatas. Jalan raya, misalnya, tidak sepenuhnya bisa digunakan dengan nyaman oleh penyandang disabilitas. Demikian pula transportasi umum, mulai dari bus (dalam kota maupun antar kota), kereta api, kapal laut hingga pesawat udara. Kondisi ini sangat menyulitkan para penyandang disabilitas, sehingga mereka nyaris selalu butuh bantuan orang lain untuk bisa menjalankan aktivitasnya di luar rumah.

Hambatan lainnya adalah keterbatasan peluang kerja. Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di dunia kerja terlihat dari kurangnya perhatian pemerintah dalam membantu penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan. Badan-badan usaha milik negara pun terkesan tidak peduli terhadap kelompok disabilitas. Kantor-kantor pemerintah masih belum semuanya bisa diakses oleh penyandang disabilitas.

Problem lainnya adalah menyangkut pelaksanaan kewajiban keagamaan. Hambatan kalangan disabilitas dalam melaksanakan hak-hak keagamaan nyaris tidak pernah mendapat perhatian, baik dari pemerintah maupun agamawan. Tempat-tempat ibadah misalnya masjid, nyaris tidak ada yang akseptabel terhadap disabilitas.

Permasalahan-permasalahan itu menjadi refleksi sekaligus keprihatinan bersama, tidak hanya oleh PBNU, tetapi oleh semua lapisan masyarakat untuk memberikan perlakuan adil kepada disabilitas. Fikih disabilitas pun dapat menjadi pemantik dan pintu pembuka untuk memberikan kesadaran tentang pentingnya paradigma kritis tentang disabilitas, dan diharapkan menjadi bahan pertimbangan yang humanis bagi pengambil kebijakan publik.

4. Lingkungan dan Sumber Daya Alam (SDA)

NU memiliki perhatian terhadap masifnya pencemaran lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam (SDA). Pencemaran ini terjadi karena proses industrialisasi yang mencari keuntungan semata dan tidak mempertimbangkan kepentingan rakyat. Dalam Munas Alim Ulama 1992 di Bandar Lampung, NU menetapkan status hukum 'haram' bagi tindakan pencemaran dan memandangnya sebagai tindak kejahatan. Karena itu, mereka menuntut pihak pencemar untuk memberikan ganti rugi dan atau hukuman penjara.

Pada munas yang sama, NU juga memberikan peringatan keras kepada pemerintah untuk benar-benar menjalankan pembangunan demi kepentingan umum. Dalam banyak kasus, menurut hasil munas, "kepentingan umum" itu banyak diabaikan dan dimaknai semata-mata untuk kepentingan pemerintah atau korporasi. Sebagai buktinya, terjadi banyak penggusuran untuk kepentingan lahan pembangunan.

Perhatian NU terhadap lingkungan makin berkembang dan meningkat seiring banyaknya masalah lingkungan, seperti soal pemukiman, lingkungan kerja, pencemaran udara, tanah, dan air. Pada Muktamar NU 1994 di Cipasung, NU mengeluarkan pokok-pokok pikiran mengenai lingkungan, yang jika diringkas dalam satu kalimat adalah suatu himbauan agar pembangunan memperhatikan kenyamanan lingkungan, berkelanjutan, dan memperhatikan aspek kemanusiaan. Suara ini dikemukakan karena pemerintah dipandang tidak becus mengelola SDA sehingga menimbulkan konflik berkepanjangan, kemiskinan, kesenjangan akses, kerusakan alam dan marginalisasi. SDA alam hanya dikuasai dan dikuras oleh korporasi-korporasi yang juga sering mengabaikan kelestarian lingkungan. Industrialisasi ekstraktif lebih banyak merugikan rakyat dan merusak alam. Ketika terjadi konflik dengan rakyat, pemerintah memihak korporasi dan, dengan dukungan militer, melakukan pemaksaan dan kekerasan.

Dalam Muktamar ke-33 di Jombang, NU kembali mengeluarkan beberapa rekomendasi penting terkait SDA. Di antaranya, NU me-

nyerukan moratorium dan peninjauan ulang kebijakan serta izin perusahaan baik pertambangan, perkebunan, atau kehutanan. Kemudian, menyerukan dihentikannya penggunaan kekerasan. Selain itu, secara khusus NU menyerukan pengembalian tanah dan sumber daya air milik rakyat yang dikuasai oleh perusahaan ataupun pemerintah kepada pemilik semula (Nahdlatul Ulama, 2015). Rumusan baku tentang SDA ini sejalan dengan garis perjuangan NU sejak berdirinya.

Selain melalui fatwa, NU biasanya memberikan perhatian kepada masalah lingkungan dan SDA melalui berbagai pernyataan, baik secara resmi maupun melalui wawancara tokoh-tokohnya, terutama ketika muncul masalah yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan atau ketika pecah konflik antara perusahaan dan rakyat, yang merugikan masyarakat, bahkan bisa menimbulkan korban.[16]

Yang menarik, meski memiliki banyak pemikiran progresif mengenai lingkungan dan pengelolaan SDA, NU secara struktural tidak memiliki divisi khusus untuk menanganinya. Fungsi divisi ini justru diperankan oleh aliansi nasional anak muda yang menamakan diri Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA-NU).[17] FNKSDA-NU melihat tata kelola alam dan lingkungan yang terjadi saat ini menimbulkan efek negatif pada keberlangsungan ekologi. Kapitalisme ekstraktif yang beroperasi di berbagai bidang (misalnya, pertambangan mineral dan batubara, migas, dan air) menimbulkan pencemaran lingkungan, pemiskinan, dan marginalisasi penduduk asli. Landasan berpikir FNKSDA-NU ini mirip dengan hasil-hasil munas dan muktamar NU.

---

16 Sebagai contoh ketika petani Sorokonto Kiai Nur Aziz yang bersengketa dengan sebuah perusahaan ditangkap dan diadili, pengurus NU memberikan pembelaan. Lihat https://tirto.id/petinggi-pbnu-bantu-advokasi-kasus-kriminalisasi-petani-surokonto-czEo (diakses 19 Desember 2018).

17 Penggagas FNKSDA adalah para intelektual muda NU antara lain: Hairus Salim, Bosman Batubara, Heru Prasetya, Ubaidillah, Sobirin, Roy Murtadlo, Aan Ansori dkk., pada tanggal 4 Juli 2013 di Pendopo Hijau Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS), Yogyakarta, karena keprihatinan terhadap banyaknya kasus eksploitasi SDA, monopoli perusahaan, dan perusakan lingkungan.

Seperti lembaga lainnya yang serumpun dengan NU, FNKSDA juga tidak memiliki hubungan struktural dan hubungan koordinatif dengan NU. Nama NU diambil didasarkan pada asumsi bahwa yang menjadi korban lingkungan dan SDA kebanyakan adalah warga NU di perdesaan. Kedua, dengan melekatkan nama NU, FNKSDA sekaligus mendayakan NU secara politis untuk memperhatikan masalah yang berkaitan dengan lingkungan dan SDA. Meski menggunakan nama NU, FNKSDA dalam praktiknya tidak sekadar mengakomodir dan mengadovokasi kepentingan warga NU, tetapi juga kelompok masyarakat di luar NU, bahkan di luar Islam. Meski dekat dengan NU, sejauh ini, FNKSDA tidak mau menjadi badan otonom atau lembaga resmi di bawah PBNU. FNKSDA hanya ingin menjalin kerjasama dengan tetap menjadi organisasi independen di luar resmi NU.

Namun demikian, keterlibatan KH Imam Aziz sebagai inisiator FNKSDA cukup menjadi bukti bahwa organisasi ini sebenarnya lahir dari rahim NU. Pengurus harian dan kader muda mereka sebagian besar berasal dari santri-santri yang pernah belajar di pesantren. Penanda lain yang bisa dilihat adalah jaringan dan lingkaran kerja FNKSDA sebagian besar bersama organisasi yang berafiliasi ke NU, seperti YLKiS, Gusdurian, Jamaah NU, Forum Silaturahmi Petani Pesantren (FSPP), dan Lakpesdam.

Pada 7 Desember 2013 di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, FNKSDA melakukan pertemuan nasional untuk kali yang pertama. Dalam pertemuan itu, mereka merumuskan setidaknya tiga tuntutan dan sekaligus menjadi garis perjuangan FNKSDA: 1) menuntut pemerintah menghentikan kapitalisme ekstraktif; 2) menuntut fatwa *fi sabilillah* untuk merebut SDA dari kapitalisme; dan 3) menyerukan *nahdliyin* untuk mempertahankan tanah.[18]

FNKSDA, dengan cepat, melakukan penyesuaian untuk menguatkan gerakan dan memperluas jaringan di berbagai tempat. Kebutuhan utama seperti struktur kepengurusan dan kaderisasi

18 Lihat: https://tebuireng.online/halaqah-fnksda-jihad-melawan-kapitalisme-ekstraktif/ (diakses 19 Desember 2018).

segera dibentuk.[19] juga FNKSDA melakukan berbagai pelatihan untuk merekrut para relawan, yang kebanyakan berasal dari kalangan santri. Proses pengkaderan di masing-masing kota bergantung pada kesanggupan waktu, tempat, dan para peserta. Jika ketiga syarat utama itu dapat terpenuhi maka kaderisasi akan dilakukan. Melalui *platform* besar 'Pesantren Agraria', FNKSDA mampu mentransmisikan gagasan, visi-misi dan strategi gerakan kepada kader yang direkrut dari kampus, petani, atau aktivis. Hingga saat ini, FNKSDA sekurang-kurangnya sudah ada di 20 kota di Indonesia dengan jumlah massa mencapai ribuan.[20]

Pandangan FNKSDA terhadap kerusakan alam adalah capaian dari proses dialektika yang terjadi di dalamnya. Di satu sisi, seperti NU, FNKSDA memiliki basis konkret, yaitu pesantren. Fakta ini memperlihatkan kebutuhan mereka akan produksi dan reproduksi wawasan keagamaan yang lebih konkret dan spesifik ke arah lingkungan. Perjuangan yang mereka lakukan itu memiliki legitimasi "*syar'i*" dengan landasan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Upaya (*ijtihad*) yang mereka lakukan bersumber dari perangkat pengetahuan (tafsir dan *fiqh*) yang telah lama menjadi tradisi ketat di NU sehingga memiliki kemampuan memproduksi fatwa tentang berbagai kasus konflik agraria.

Di sisi yang lain, FNKSDA diisi oleh kalangan anak muda terdidik NU yang mengenyam pendidikan formal sampai ke jenjang doktoral. Beberapa dari mereka bahkan mengenyam pendidikan di Eropa dengan bidang studi geologi. Sisanya bersekolah dengan berbagai disiplin pengetahuan: sastra, tafsir Al Quran, filsafat, maupun hukum. Kapasitas mereka untuk mengkaji persoalan lingkungan dengan basis pengetahuan eksakta mampu dielaborasi dengan kemampuan mereka untuk mengambil hukum fiqh.

---

19 Struktur kepengurusan FNKSDA: Koordinator Komite I, Koordinator Komite II, Biro Ekonomi, Biro Riset dan Litbang, Biro Hukum, Biro Kaderisasi, Sekretaris.

20 Daftar kota FNKSDA: Surabaya, Gresik, Pasuruan, Bojonegoro, Malang, Banyuwangi, Sumenep, Jember, Probolinggo, Jombang, Semarang, Kebumen, Yogyakarta, Cirebon, Bandung, Jakarta, Kalimantan Timur, Makassar, Riau, Ternate.

Modal pengetahuan ini memungkinkan FNKSDA untuk berkontestasi di berbagai persoalan agraria: mengkaji isu, menyampaikan pernyataan sikap, dan mengultimatum berbagai pihak untuk menghentikan pembangunan. Di samping itu, para advokat dan pengacara, baik sebagai anggota ataupun sekadar jaringan kerja, mengambil peran lanjutan yang penting untuk memastikan langkah-langkah hukum jika diperlukan. Dengan kata lain, FNKSDA tidak sekadar menyediakan produk hukum Islam saja. Lebih jauh dari itu, ia juga memiliki komitmen untuk membela masyarakat tertindas dengan berbagai aksi konkret. Di sinilah kita bisa melihat kiprah FNKSDA yang siap untuk menempuh berbagai langkah.

Pandangan dan kiprah FNKSDA teraktualisasi di berbagai kasus penting. Misalnya, dalil perjuangan agraria FNKSDA memberikan satu kesimpulan penting untuk mempertahankan tanah yang sah dari ancaman pemerintah dan korporasi. Mereka membuktikan tinjauan atas teks-teks keagamaan yang otoritatif sebagai dasar legitimasi.[21] Di tataran praktis, pandangan ini kemudian diikuti dengan berbagai aksi, seperti solidaritas untuk warga Temon, Kulonprogo yang menolak New Yogyakarta International Airport (NYIA). Anggota FNKSDA Yogyakarta, selama beberapa bulan, silih berganti mendiami rumah warga untuk berjuang bersama mempertahankan tanah milik mereka. Para advokat dari FNKSDA juga melakukan pendampingan dalam proses negosiasi dan litigasi. Selain itu, kampanye di media sosial untuk menggalang massa dilakukan secara masif.[22]

Kasus tambang Karst di Kendeng, Rembang, Jawa Tengah juga menjadi bagian penting dari komitmen FNKSDA. Selama bertahun-tahun anggota FNKSDA membangun komunikasi dan kerja nyata melawan pembangunan di pegunungan Kendeng. Perjuangan bersama itu bahkan didokumentasikan dengan buku judul *Rembang Melawan: Membongkar Fantasi Pertambangan Semen di Pegunungan*

---

21 Lihat; http://islambergerak.com/2015/12/dalil-perjuangan-agraria/

22 Lihat: http://www.arahjuang.com/2017/12/05/melawan-new-yogyakarta-international-airport-nyia/

Kendeng. Buku ini memberikan gambaran tentang posisi FNKSDA, baik secara individual maupun institusional. Perjuangan bersama itu menemukan titik terang ketika Mahkamah Agung memenangkan warga Rembang,[23] meski pada akhirnya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) justeru memenangkan pihak PT Semen Gresik.[24]

Fokus gerakan FNKSDA untuk membela warga *nahdliyin* di berbagai daerah yang menjadi korban pembangunan sudah dirancang dari awal. Kajian awal FNKSDA memetakan wilayah yang terdampak pembangunan kapitalisme ekstraktif. Beberapa kasus besar di berbagai wilayah tampak menjadi prioritas dari FNKSDA.

Tabel 3.1
Lis Basis NU dengan Kasus Konflik Sumber Daya Alam[25]

Kelompok	**Nmr**	**Daerah**	• Korporasi	**Permasalahan**
Air minum, tambak, dan lingkungan	1	Jombang	• Aqua-danone	Diusir oleh GUSDURian Jombang; alasan bagi hasil dan kompensasi gelap, ancaman kekeringan
Air minum, irigasi, tanah, dan bencana	2	Pati	• Semen Gresik	Warga menolak pendirian pabrik semen
Tambang	3	Jepara	• PT Rantai Mas • CV Guci Mas Nusantara • PT Alam Mineral Lestari	Warga menolak pendirian tambang pasir besi
	4	Kulonprogo	• PT Jogjas Mangasa Mining	Warga menolak pendirian tambang pasir besi

23 Lihat: http://www.mongabay.co.id/2016/10/11/lawan-pabrik-semen-mahkamah-agung-menangkan-warga-rembang

24 Lihat; http://solo.tribunnews.com/2017/08/16/ptun-menangkan-ganjar-sk-gubernur-soal-izin-tambang-semen-di-rembang-dinyatakan-sah

25 Sumber: Notulensi diskusi FNKSDA tanggal 4 Juli 2013.

	5	Banyuwangi	• PT Indo Multi Niaga (IMN)	Konflik tambang emas (Tumpang Pitu)
	6	Kebumen	• PT Mitra Niagatama Cemerlang	Konflik lahan untuk pasir besi
Energi	7	Tenggarong/ Kaltim	• PT. Kaltim Prima Coal, PT Adaro • Indonesia, PT. Kideco Jaya Agung, PT Arutmin Indonesia, PT. Berau Coal dll	Konflik dampak tambang batubara serta blog migas
	8	Jombang	• Exxon	Masyarakat menolak eksplorasi migas
	9	Porong	• PT LBI	Lumpur Lapindo
	10	Cirebon	• PT Chevron	Warga tidak mau ada geothermal
	11	Sumenep	• PT Kangean Energy Indonesi, • Santos, Husky Oil, SPE Petroleum, • PT EML	Konflik migas

C. NU dan Transisi Demokrasi Era Reformasi 1998

NU memiliki peran besar dalam proses trasisi demokrasi 1998 yang ditandai oleh runtuhnya Soeharto yang telah berkuasa kurang lebih 32 tahun. NU mengalami dinamika pemikiran dan aksi politik kebangsaan yang akrobatik, baik dalam hubungannya dengan pemerintah maupun di internal warga *nahdliyin* sendiri. Di satu sisi, NU terutama ketika Abdurahman Wahid (Gus Dur) menjadi Ketua Tanfidziyah PBNU sejak 1984 mengambil peran se-

bagai oposisi kritis terhadap rezim Orde Baru, sedangkan di sisi lain, NU juga tidak sepenuhnya melakukan konfrontasi ekstrim terhadap rezim Orde Baru sebab memikirkan nasib warganya terkait dengan akses infrastruktur dan faktor keamanan.

Pada masa-masa itu, sebagai organisasi yang paling independen dalam sejarahnya, NU sebenarnya berada dalam keadaan bahaya (Hefner, 2000) karena hubungannya dengan rezim Orde Baru mengalami pasang surut nyaris sepanjang Soeharto berkuasa. Meyakini bahwa kekuasaan Soeharto akan habis, Gus Dur mendekati oposisi demokratis pada akhir 1980-an dan secara otomatis masuk ke dalam arena konflik dengan presiden (Bruinessen, 1994). Setelah beberapa percobaan untuk merongrong kepemimpinannya, termasuk manuver beberapa pejabat tinggi militer dan Soeharto membantu Habibie menjatuhkan Gus Dur dalam Muktamar 1994, pada tahun 1996 Gus Dur memutuskan untuk melakukan rekonsiliasi dengan Soeharto (Fealy, 1996).

Selama pemilu 1997, Gus Dur dianggap mengesampingkan aspirasi politik umat Islam di PPP, karena justru ikut membantu memenangkan Golkar. Langkah politik Gus Dur ini memancing reaksi keras dari aktivis pro-demokrasi, termasuk Megawati Soekarnoputri. Megawati sempat menghimbau kepada pendukungnya agar memboikot pemilu, sementara Gus Dur sebaliknya, menyerukan untuk tetap memilih. Terkait sikap kooperatif kepada penguasa ini, Gus Dur menjelaskan bahwa sikapnya yang pro-Golkar selama pemilu 1997 merupakan upaya untuk mencegah terlalu besarnya perolehan suara PPP, karena fenomena itu akan ditafsirkan oleh dunia internasional sebagai kemenangan Islam politik (kelompok islamis) di Indonesia.

Usai pemilu 1997, muncul krisis moneter di Indonesia. Selama bulan-bulan pertama krisis, NU menghindari konfrontasi apa pun dengan pemerintah. Kemerosotan ekonomi itu juga memaksa NU untuk memikirkan kembali sikapnya. Setelah Muktamar di Mataram, Gus Dur kemudian menyampaikan pernyataan yang tajam,

bahwa NU menolak status quo dan menuntut perubahan mendasar dalam sistem politik.

Meskipun memperkirakan Orde Baru akan berlalu dalam waktu dekat, tetapi Gus Dur tetap enggan membangun aliansi besar untuk melawan Soeharto atau militer, demikian pula dengan sikap NU yang ikut merintangi pembentukan koalisi besar anti-Soeharto selama bulan-bulan pertama krisis. NU baru menuntut mundur Soeharto setelah Soeharto ditinggalkan oleh sebagian besar loyalisnya. Melalui strategi ini dapat dimengerti bahwa NU di bawah kendali Gus Dur sejatinya menghindari pertumpahan darah. Sebab jika sejak awal memilih berkonfrontasi dengan pemerintah, maka tidak mustahil korban yang jatuh bukan hanya dari kalangan *nahdliyin*, tetapi masyarakat luas.

Sikap oposisi demokratis Gus Dur di atas tidak sepenuhnya disetujui oleh tokoh-tokoh NU lainnya. Marcus Mietzner (1999) mencatat ada tiga kubu dengan orientasi yang berlainan di tubuh NU. Pertama, para loyalis Gus Dur yang bertumpu pada Wakil Sekretaris Jenderal Arifin Djunaidi. Kubu ini ingin meneruskan strategi mendua Gus Dur dengan tetap memelihara hubungan baik dengan pemerintah sambil memastikan bahwa NU tidak tertinggal jika gerakan pro-demokrasi mulai menggelinding. Kedua, unsur "konservatif" dalam NU yang berpusat pada KH Ilyas Ruchiyat dan KH Sahal Mahfudz yang apolitis. Mereka mengikuti ideologi tradisional NU yang senantiasa menjaga kedekatan dengan pusat kekuasaan untuk membela kepentingan pesantren. Ketiga, unsur di markas NU yang kritis terhadap Gus Dur, yaitu orang-orang yang dekat dengan Sekretaris Jenderal Ahmad Bagdja, bersama dengan organisasi mahasiswa yang berafiliasi dengan NU seperti IPNU, IPPNU, da PMII.

Pada 19 Mei 1998, Soeharto memanggil tokoh-tokoh Islam, termasuk dari kalangan NU, di antaranya Gus Dur, Ahmad Bagdja, KH Ma'ruf Amin, dan KH Ali Yafie. Tokoh-tokoh ini memaparkan situasi genting mutakhir, dan elemen masyarakat menghendaki

Soeharto mundur dengan segera. Permintaan ini ditolak oleh Soeharto, dan sebagai gantinya ia mengusulkan pembentukan Komite Reformasi. Namun usaha ini gagal. Desakan kepadanya untuk turun jauh lebih besar dan tidak bisa dilawan lagi. Pada 21 Mei 1998, Soeharto memutuskan mengundurkan diri, dan menyerahkan mandat kepada Wakil Presiden BJ Habibie.

Di luar situasi benturan politik secara langsung menjelang jatuhnya Soeharto, pada 11 Mei 1998 para kiai sepuh di Langitan Lamongan mengadakan pertemuan. Mereka membicarakan situasi terakhir dan menuntut perlunya perubahan untuk menyelamatkan bangsa dari kehancuran. Saat itu para kiai membuat surat resmi kepada Soeharto yang isinya meminta agar Soeharto turun dari jabatan presiden. Pertemuan itu mengutus Kiai Mu'hid Mujadid dari Jember dan KH Yusuf Muhammad untuk menghadap langsung Soeharto guna menyampaikan surat itu. Namun sebelum pertemuan terjadi, Soeharto telah mengundurkan diri (Ridwan, 2010).

Sejak itu, NU mulai sadar bahwa dirinya harus terlibat dalam persiapan era pasca-Soeharto. NU memanfaatkan kebebasan pasca-Reformasi 1998, meski merasa kurang cocok dengan kepemimpinan BJ Habibie yang tetap dipandang sebagai bagian dari Orde Baru. Di tengah suasana kebebasan politik baru, Gus Dur menerima usul dari banyak tokoh NU untuk memprakarsai berdirinya partai politik sebagai strategi penyeimbang dalam mengendalikan roda pemerintahan yang terlihat masih diisi oleh orang-orang era Orde Baru. Lahirlah kemudian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dideklarasikan pada 23 Juli 1998.

Pada 7 Februari 1999, PKB secara resmi menyatakan Gus Dur sebagai kandidat presiden. Hasilnya, setelah penyelenggaraan pemilu, Sidang MPR-RI 20 Oktober 1999 memilih Gus Dur sebagai Presiden RI didampingi Megawati Sukarnoputri sebagai Wakil Presiden. Meskipun demikian, akibat desakan lawan-lawan politiknya, masa jabatan Gus Dur sebagai presiden tidak berumur panjang, berakhir pada 23 Juli 2001.

1. Gus Dur dan Reformasi Damai

Jabatan singkat yang diemban Gus Dur sebagai Presiden RI meninggalkan jejak dan pengaruh dalam penegakan demokrasi, HAM dan perdamaian, sebagaimana diuraikan berikut ini. *Pertama*, usaha meredam separatisme dengan jalan perdamaian. Jatuhnya Presiden Soeharto akibat krisis ekonomi membuat sendi kekuasaan di Jakarta menjadi lemah. Bagi beberapa daerah, momentum ini dimanfaatkan sebagai kesempatan politik untuk memisahkan diri dari NKRI. Inilah masalah pertama dan utama yang dihadapi Gus Dur ketika menjabat sebagai Presiden RI: berbagai gerakan dan gejolak daerah muncul dengan aspirasi ingin merdeka, utamanya dari Aceh dan Papua (Irian Jaya) yang memang sejak Orde Baru terus melakukan perlawanan bersenjata terhadap kedaulatan RI melalui GAM (Gerakan Aceh Merdeka) di Aceh dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua. Gerakan bersenjata ini, yang sebelumnya menyertakan sebagian rakyat setempat sebagai simpatisan, kemudian menyatu dengan gerakan rakyat yang lebih luas seperti gerakan mahasiswa, NGO, dan segmen masyarakat lainnya. Hasrat merdeka ini menjadi kian menguat setelah Timor Timur –yang diintegrasikan ke NKRI pada 1975– berhasil memisahkan diri dari Indonesia melalui referendum yang diwarnai dengan tindakan kekerasan militer Indonesia. Gus Dur menghadapi dilema, di satu sisi, tidak ingin ada kekerasan, di sisi lain ia berharap Aceh dan Papua tetap menjadi bagian NKRI.

Ahmad Suaedy (2018), yang menulis disertasi mengenai topik tersebut, menyatakan bahwa Gus Dur berusaha menyelesaikan konflik ini secara damai melalui dialog dan diplomasi. Hal itu dilakukan dengan, misalnya, tidak menganggap Aceh maupun Papua sebagai "separatis" sebagaimana sebutan rezim-rezim sebelumnya. Gus Dur menyebut mereka sebagai warga daerah yang kecewa karena ketidakadilan dari pemerintahan pusat. Karena itu Gus Dur bisa menerima dan memahami kekecewaan dan protes mereka. Seiring dengan itu, Gus Dur mengajak GAM dan OPM untuk duduk satu meja, berunding dan berdialog. Dengan ajakan ini, Gus

Dur mengakui eksistensi GAM maupun OPM, mengakui mereka sebagai bagian dari warga negara sendiri, sesuatu yang sama sekali tidak diberikan oleh pemerintahan sebelumnya sehingga menutup jalan berdialog atau pun perundingan. Pada saat yang sama, Gus Dur juga mendukung dan melaksanakan sepenuh hati kebijakan Habibie, presiden sebelumnya, untuk mengakhiri operasi militer yang penuh dengan kekerasan, dengan menarik seluruh pasukan organik dari Aceh dan Papua.

Secara intensif Gus Dur menemui tokoh-tokoh masyarakat Aceh berpengaruh untuk mengajak dialog dan diplomasi, terkadang secara diam-diam dan rahasia hingga stafnya pun tidak mengetahuinya. Di luar itu, Gus Dur melibatkan Henry Dunant Centre for Humanitarian Dialogue (HD) untuk menjadi penengah. Akhirnya, pihak HD bisa menemui Hasan Tiro, perwakilan GAM di Swedia, dan Menteri Sekretaris Negara Bondan Gunawan juga berhasil menemui Muzakkir, panglima GAM di hutan Aceh. Hal seperti ini juga dilakukan Gus Dur pada kasus Papua. Adalah Gus Dur pula yang mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua, mengakomodasi aspirasi masyarakat Papua. Demikian juga bendera Bintang Kejora, sebagaimana bendera GAM, oleh Gus Dur boleh dikibarkan dengan syarat tidak lebih tinggi dari bendera Merah Putih. Dengan jalan dialog dan diplomasi, masyarakat Aceh dan Papua bisa diajak berdamai. Perjanjian-perjanjian dibuat dan disepakati. Aceh dan Papua tetap menjadi bagian NKRI di satu pihak dan kekerasan bisa diminimalisir, di sisi lain, untuk tidak mengatakannya tidak ada sama sekali.[26]

Kedua, penghapusan Dwifungsi ABRI. Salah satu tuntutan pada era Reformasi adalah penghapusan dwifungsi ABRI, aturan yang

26 Lebih lengkap soal ini, bisa dibaca Ahmad Suaedy (2018). Tak aneh dengan ini, tokoh-tokoh NU sering diundang ke beberapa negara untuk membagikan kisah sukses bagaimana menyelesaikan konflik dengan jalan damai. Baru-baru ini, misalnya, KH Husein Muhammad bercerita bahwa ia bersama sejumlah teman NU diundang ke Filipina, bertemu dengan para ulama Mindanao, daerah yang bertikai dengan pemerintah pusat, untuk memberikan pandangan bagaimana semestinya menyelesaikan konflik. Ahmad Suaedy juga menceritakan dia diundang beberapa ke Myanmar untuk memberikan pandangan bagaimana mengatasi masalah Rohingya (perbincangan dengan KH Husein Muhammad dan Ahmad Suaedy).

membolehkan seorang prajurit militer yang masih aktif untuk berkiprah di dunia sipil. Dengan peraturan ini, banyak sekali pejabat militer yang menduduki jabatan sipil. Risikonya, masyarakat sipil dikelola secara militer. Doktrin militer tidak mengenal kritik, karena itu kritik dibasmi sejak dini. Jabatan-jabatan sipil banyak yang diduduki oleh pejabat militer, mulai kepala daerah tingkat desa, kabupaten hingga propinsi, dirjen, menteri, duta besar, dan lain-lain. Monopoli, kolusi dan nepotisme berkembang luas. Pejabat-pejabat militer, juga keluarga dan koleganya, menguasai bisnis-bisnis secara tidak adil.

Penghapusan dwifungsi ABRI menjadi agenda besar reformasi sekaligus sebagai salah satu kunci bagi proses demokratisasi. Pada zaman Habibie, agenda ini belum bisa dipenuhi. Baru di era Gus Dur, agenda penghapusan dwifungsi ini mulai dilaksanakan. Jika militer ingin menduduki jabatan publik, misalnya, ia harus terlebih dulu mempensiunkan diri. Hal ini juga dilakukan Gus Dur ketika merekrut sejumlah petinggi militer untuk menjadi menterinya, dan meminta mereka untuk lebih dulu pensiun.[27]

Perlahan-lahan wakil militer di parlemen juga dihapuskan; ABRI diubah menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia); dan jabatan Panglima TNI, oleh Gus Dur, digilir antar angkatan, dan bukan lagi melulu dari Angkatan Darat seperti sebelumnya.[28] Singkatnya, militer dituntut untuk kembali ke barak dan hanya mengurus masalah yang hanya berkaitan dengan kemiliteran.

Ketiga, penghapusan diskriminasi berdasarkan ras dan etnis. Hal ini ditunjukkan Gus Dur dengan mencabut peraturan pemerintah yang melarang perayaan imlek dan segala atribut budaya Cina. Sebagaimana disebut *Kompas*,[29] langkah Gus Dur ini merupakan

---

27 Seperti dijelaskan Luhut Panjaitan yang ketika itu diminta Gus Dur untuk menjadi Memperindag dalam pertemuan dengan Yayasan Bani Wahid, Jakarta, 2011. Saat itu Luhut masih anggota militer aktif dengan pangkat Letnan Jenderal dan menjabat Duta Besar Indonesia untuk Singapura.

28 Beberapa kajian menunjukkan, penghapusan dwifungsi ini menjadi motif sebenarnya dari penjungkalan Gus Dur dari kursi presiden.

29 Lihat editorial *Kompas*, 10 November 2018.

embrio bagi lahirnya UU Anti Diskriminasi Ras dan Etnis No 4 Tahun 2008 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Keempat, pentingnya jalan tengah dan jalan damai, sebagaimana yang direfleksikan sendiri dalam naik-turun perjalanan Gus Dur sebagai presiden. Ketika naik, Gus Dur sebenarnya merupakan "jalan tengah" dari pertentangan di parlemen antara kubu Islam dan kubu nasionalis. Masing-masing menolak calon yang ditawarkan. Akhirnya Gus Dur muncul sebagai figur yang diterima kedua pihak.

Sementara ketika Gus Dur dipaksa turun, ratusan ribu pendukung Gus Dur yang menamakan diri "pasukan berani mati" sebenarnya siap untuk membela dan mempertahankannya. Tapi bagi Gus Dur, (jabatan) politik bukan sesuatu yang harus dipertahankan, karena kemanusiaan jauh lebih bermartabat. Ia justru meminta agar "pasukan" tersebut membubarkan diri, kembali ke keluarga masing-masing, dan berdoa untuk keselamatan bangsa.

Sumbangsih Gus Dur tersebut sekaligus menjadi kontribusi besar NU dalam mendorong transisi demokrasi menjadi reformasi yang relatif damai. Korban jiwa memang tetap tidak terhindarkan, namun jumlahnya relatif sedikit jika dibandingkan dengan kekhawatiran banyak kalangan yang waktu itu memprediksi terjadinya pertumpahan darah dengan korban yang sangat banyak.

2. *Rekonsiliasi Kultural*

Salah satu problem dalam merawat kehidupan berbangsa dan bernegara adalah bagaimana merekatkan berbagai kalangan yang berbeda agama, etnis, bahasa, ideologi serta kepentingan politiknya. Periode tertentu dari sejarah selalu ada masa pergolakan dan konflik yang membuat kehidupan berbangsa retak, bahkan terancam terpecah.

Dalam sejarah Indonesia, periode seperti ini terjadi berulang kali. Yang terbesar dan meninggalkan trauma dan jejaknya hingga kini adalah pecah peristiwa G-30-S 1965, yang mengiringi kenaikan

Soeharto sebagai Presiden Indonesia. Pada peristiwa tersebut, terjadi pembunuhan tujuh jenderal TNI. Melalui permainan politik yang pelik dan rumit, Partai Komunis Indonesia (PKI), salah satu partai terbesar di Indonesia saat itu, dituduh sebagai dalang pembunuhan sekaligus aksi kudeta untuk menyingkirkan Presiden Soekarno dan mengambil alih kekuasaan. TNI-AD di bawah pimpinan Soeharto kemudian memburu dan menangkap pimpinan PKI, pendukung dan simpatisannya. PKI kemudian dinyatakan sebagai partai terlarang.

Tindakan politik tersebut tak pelak menjalar ke masyarakat sehingga menimbulkan konflik horizontal di kalangan masyarakat luas. Dengan dalih bahwa PKI hendak melakukan kudeta dan melakukan pembunuhan tujuh jenderal tersebut, masyarakat memburu, menangkapi, dan membunuh para pendukung PKI dan simpatisannya, serta orang-orang yang dianggap pernah memiliki hubungan dengan PKI, meski belum tentu pendukung PKI. Ribuan orang menjadi korban. Angka pastinya tidak pernah bisa dipastikan. Sarwo Edhie Wibowo, Kepala RPKAD yang memimpin aksi tersebut bahkan menyebut angka 2 juta orang telah menjadi korban. Jumlah itu belum termasuk mereka yang dipenjara, dibuang ke Pulau Buru, dan tak pernah diadili secara resmi.

Sulit mengatakan tragedi ini sebagai sebuah 'konflik', dalam arti pendukung atau simpatisan PKI berhadap-hadapan secara terbuka dengan lawan-lawannya. Pada kenyataannya, mereka lebih banyak diburu, ditangkap, dibunuh, disiksa, dan dipenjara oleh kalangan milisi sipil, yang didukung bahkan diprovokasi oleh kalangan militer, khususnya Angkatan Darat (Roosa, 2008). Artinya, yang terjadi lebih mirip sebagai pembantaian dari pihak yang kuat, dengan dukungan kekuatan militer.

Pada masa Orde Baru, para "mantan" PKI yang selamat dari pembunuhan kemudian menjadi tahanan politik (tapol), dan setelahnya identitas kependudukan mereka ditandai sebagai ET (eks tapol). Mereka juga kehilangan hak politik dan hak sosial, tidak berhak memilih dan dipilih dalam pemilu, tidak boleh bekerja di

instansi pemerintahan, dan lain-lain. Komunis(me) memperoleh stigma sebagai hal yang sangat buruk: jahat, bejat, tidak beragama, dan lain-lain. Stigmatisasi ini tidak hanya ditujukan kepada para ET, tetapi meluas kepada lingkungan keluarganya. Para ET dan keluarganya kemudian menjadi kelas masyarakat yang paling menderita karena tak memiliki akses ekonomi, politik, pendidikan, dan lain-lain.

Antikomunisme menjadi haluan politik Orde Baru, sebuah pilihan pemihakan terkait konstelasi politik internasional saat itu yang diliputi suasana oleh Perang Dingin antara blok komunis dan blok kapitalis-liberal. Karena itu, alarm kebangkitan komunis selalu diingatkan oleh rezim. Demokrasi pun menjadi terhambat karena kritik, sebagai landasan utama kehidupan demokrasi, dengan mudah dan efektif dimatikan dengan tuduhan komunisme atau disusupi ajaran komunisme. Pemerintahan Orde Baru pun kian kokoh dan menjadi otoriter di atas landasan politik antikomunisme. Di pihak masyarakat sipil sendiri, masalah ini telah meninggalkan trauma dan stigma, serta prasangka politik yang bisa terus memunculkan konflik dan perpecahan.

Dalam suasanan traumatik seperti itu, muncul gagasan perlunya rekonsiliasi nasional, yang secara vokal juga disuarakan oleh Gus Dur, yakni dengan menyampaikan permintaan maaf kepada kalangan anggota PKI, simpatisannya, ataupun mereka yang dituduh sebagai pendukung PKI atas berbagai kekerasan yang telah mereka terima. Pernyataan ini merupakan terobosan yang sangat penting dan luar biasa, terutama di saat politik antikomunisme masih menjadi landasan legitimitas pemerintahan Orde Baru. Pemerintah, dan sebagian masyarakat, terutama dari sayap kanan, mengecam gagasan tersebut. Menurut mereka, seharusnya PKI-lah yang meminta maaf.

Ketika Orde Baru tumbang, momentum rekonsiliasi kembali muncul ke permukaan. Terlebih di masa Gus Dur menjadi Presiden melalui pemilu yang demokratis. Gus Dur kembali berusaha membumikan rekonsiliasi secara kultural. Beberapa langkah pun di-

tempuhnya: 1) memberikan izin pulang kepada para pelarian di luar negeri untuk pulang ke Indonesia dan memperoleh lagi hak kewarganegaraan jika mereka menginginkan. Seruan ini ditujukan baik kepada para aktivis kiri maupun kanan; 2) membubarkan Bakorstanas, sebuah pranata negara bertugas melakukan penelitian khusus (litsus) atas siapa yang dianggap bersih secara politik. Bersih di sini diartikan bebas dari pengaruh politik komunisme (maupun Islam kanan); 3) kembali mengusulkan untuk meminta maaf atas kekerasan yang terjadi pada kalangan pendukung PKI, simpatisan dan mereka yang secara sewenang-wenang dituduh sebagai PKI; dan 4) mengusulkan pencabutan TAP MPRS No XXV/1966 yang merupakan landasan yuridis pelarangan PKI dan sering dipakai untuk memberangus segala hal yang dianggap berbau komunis (lihat Budiawan, 2004, hlm. 46-57).

Rekonsiliasi kultural ini secara simbolik diwujudkan Gus Dur dengan mengundang Pramoedya Ananta Toer untuk makan malam ke Istana Negara, juga kunjungan ke rumah Pramoedya. Pramoedya Ananta Toer adalah sastrawan terkemuka Indonesia yang menjadi korban peristiwa 1965-66. Ia ditangkap dan dibuang ke Pulau Buru selama hampir sepuluh tahun tanpa pengadilan. Namanya kerap disebut sebagai nominator penerima hadiah Nobel Sastra. Pramoedya, dengan demikian, seperti menjadi wakil dari para eks tapol PKI. Undangan dan kunjungan Gus Dur kepadanya menjadi sangat bermakna secara simbolik (lihat Salim 2016).

Sayang sekali langkah dan usulan Gus Dur ini ditanggapi dingin oleh parlemen. Sayap konservatif TNI dan kalangan antikomunis bahkan mengecam usulan itu dan mengkhawatirkan komunisme akan bangkit kembali. Ide pencabutan TAP MPRS bahkan ditolak. Dengan demikian gagasan rekonsiliasi pun mentok, karena mustahil melakukan rekonsiliasi tanpa pencabutan TAP tersebut.

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-09, 2009-14), gagasan rekonsiliasi hampir bisa dikatakan terhenti. Baru kemudian pada pemerintahan Joko Widodo (2014-sekarang) gagasan ini dimunculkan lagi, di antaranya meneruskan membentuk

Komisi Rekonsiliasi Nasional. Tetapi gagasan ini mentok setelah pemerintahan Joko Widodo mendapat kritik, kecaman dan tuduhan keras akan menghidupkan kembali komunisme. Kalangan oposisi, yang didukung sayap konservatif militer dan sayap Muslim garis keras, terus menyerang dan mengecam gagasan ini. Meski Perang Dingin telah berlalu, dan kenyataannya komunisme secara historis telah lenyap, yang tinggal hanya puing-puing, politik antikomunisme selalu dihidup-hidupkan bak hantu. Isu ini menjadi sangat sensitif karena selalu dipakai untuk menyerang orang, sekelompok orang, atau bahkan pemerintah yang memberi angin pada gagasan rekonsiliasi. Pemerintah Joko Widodo kemudian mengambil jalan pragmatis, dengan tak lagi mengungkit-ungkit usaha rekonsiliasi. Dalam suasana itu, permusuhan antar kalangan masyarakat sipil seperti tak pernah ada ujung.

Gagasan rekonsiliasi di level negara memang bisa dikatakan macet. Ide Gus Dur seperti tinggal kenangan. Tetapi di akar rumput, upaya itu sebenarnya telah mulai dilakukan, seperti yang dilakukan oleh Syarikat, sebuah jaringan masyarakat sipil yang memiliki kedekatan dengan NU, yang dipimpin oleh KH M. Imam Aziz (yang kemudian menjadi salah seorang ketua PBNU (2009-2014, 2014-sekarang). Upaya ini dilakukan sejak awal 2000-an. Dalam suatu buku yang mereka terbitkan, istilah "rekonsiliasi kultural" dimaknai sebagai "suatu perajutan kembali hubungan-hubungan sosial yang pernah hancur atau retak sebagai akibat dari warisan masa lalu melalui artikulasi-artikulasi kultural, yang kendati tak terlembagakan tetapi dipahami sebagai kesepakatan-kesepakatan yang mengikat" (Budiawan dkk. 2016: xiv).

Syarikat melakukan kegiatan rekonsiliasi dengan berbagai cara, di antaranya mempertemukan secara langsung antara pelaku kekerasan dan korban. Kedua kelompok yang saling hantam ini kemudian saling memberi kesaksian, bercerita dan biasanya berakhir dengan saling meminta maaf. Kemudian mereka menggelar kegiatan seni atau bekerjasama dalam kegiatan sosial. Tata urutannya sangat tergantung konteks dan keadaan daerah. Bagian sa-

ling memberi kesaksian bisa diletakkan di depan bisa ataupun di belakang. Kegiatan ini dilakukan di berbagai daerah seperti Banyuwangi, Blitar, Jepara, Batang, Wonosobo dan Palu.

Ada dua fokus kegiatan yang dilakukan oleh Syariat. Pertama, dan yang utama, adalah bahwa mereka yang pernah bertikai bisa saling mengakui kesalahan, saling meminta maaf dan bahkan bersedia saling bekerjasama. Kedua, Syarikat menerbitkan buku-buku biografi/otobiografi mantan tapol PKI atau serpihan artikel yang berisi testimoni para korban kekerasan maupun pelakunya melalui *Buletin Ruas*. Dengan terbitan ini, masyarakat bisa membaca lagi sejarah secara lebih kritis, tenang dan alternatif. Isi buku ini dengan jelas mendekonstruksi sejarah resmi yang dibuat oleh pemerintahan Orde Baru yang isinya monolitik menyalahkan PKI dan menggiring masyarakat untuk mau tidak mau membenci PKI (lihat Budiawan 2004: 141-79; Ihsan Ali Fauzi, 2002).

Pada Muktamar NU ke-33 2015, dalam sesi program, NU kembali menegaskan dukungan dan komitmennya ihwal pentingnya rekonsiliasi. Secara ringkas, NU menyatakan:

- Mendorong berbagai upaya rekonsiliasi yang berlangsung secara sosial, kultural dan keagamaan di tengah-tengah masyarakat. Rekonsiliasi berbasis masyarakat ini menjadi tulang punggung rekonsiliasi yang sejati dan berjangka panjang.
- Mengapresiasi komitmen pemerintah untuk menempuh jalan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu melalui jalan yang paling mungkin dan maslahat bagi Indonesia. Ikhtiar untuk keluar dari beban masa lalu ini harus senantiasa mempertimbangkan kepentingan bangsa secara keseluruhan.

Wacana yang ditumbuhkan Syarikat dan NU secara umum mempengaruhi masyarakat secara luas hingga mereka mendukung pentingnya gagasan rekonsiliasi. Hal yang dilakukan Syarikat sampai saat ini menjadi model rekonsiliasi yang secara kutural terus

dijalankan masyarakat, hingga kini. Tentu saja rekonsiliasi kultural ini berbeda dengan rumusan yang standar dengan rekonsiliasi politik misalnya, yang memuat prasyarat dan prosedur tertentu, seperti pembentukan komisi nasional dan penyelenggaraan pengadilan HAM. Di level negara, gagasan rekonsiliasi politik ini masih tertahan, bahkan sebagian berjalan mundur. Di masa mendatang, di dalam momentumnya, ketika gagasan rekonsiliasi politik kembali muncul, sumbangan wacana dan model rekonsiliasi kultural ala Syarikat dan NU akan terasa manfaatnya lantaran telah memberi pijakan optimisme bagi dilangsungkannya rekonsiliasi politik.

D. NU dan Filantropi

Filantropi (bahasa Yunani, *philein* yang berarti 'cinta', dan *anthropos* berarti 'manusia') adalah tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan sehingga orang itu menyumbangkan waktu, materi, dan tenaganya untuk menolong orang lain. Filantropi berbeda dengan *charity*. Filantropi lebih terlihat sebagai gagasan terstruktur dan teratur ketimbang hanya berwujud perilaku memberi kepada orang lain dan terlebih ingin mendapatkan dampak langsung bagi para donator (*direct impact*).

Filantropi, atau dapat disebut dengan istilah kedermawanan, sejatinya merupakan ruh dari NU, sebab eksistensi organisasi ini dihidupi oleh kedermawanan warga dan simpatisannya, baik lewat zakat, infak/sedekah, dan lain-lain. Aktivitas filantropi di internal NU secara konsisten didakwahkan dan disosialisasikan sehingga menjadi komitmen semua warga *nahdliyin* sebab hal itu merupakan anjuran agama. Karena alasan itu pula, filantropi seperti ini kadangkala disebut sebagai filantropi Islam. Komitmen filantropi ini kemudian disalurkan pada kebutuhan di bidang pendidikan, ekonomi, dan kebudayaan.

Di bidang pendidikan misalnya, menurut Amelia Fauzia (2016), sedekah dan keswadayaan (*self support*) telah menjadi tradisi filantropi yang penting di pesantren. Pesantren merupakan

lembaga pendidikan Islam yang melestarikan tradisi filantropi, dengan menjadikan zakat, sedekah, dan wakaf sebagai salah satu unsur pendukungnya. Dari awal kemunculannya, yang diperkirakan dimulai sejak awal abad ke-17, pesantren telah memiliki tradisi kemandirian dan bantuan sukarela. Meskipun tidak semua pesantren dapat bertahan, sistem pesantren dan tradisi filantropi telah bertahan selama berabad-abad.

Secara historis, pesantren dikenal sebagai lembaga pembelajaran yang gratis, atau setidaknya dengan biaya yang relatif murah. Kondisi ini tampaknya mulai mendapat tantangan sejak kuartal terakhir abad ke-20 ketika pesantren modern dan pesantren elite mulai dikembangkan di kota-kota besar. Di tengah tantangan akuntabilitas, pesantren tradisional mengikuti cara yang dilakukan pesantren modern dengan mendirikan yayasan dan organisasi untuk membedakan antara milik pesantren dan kiai, dan antara urusan pesantren dengan urusan pribadi kiai. Perubahan ini kemungkinan didorong oleh adanya pemberian sumbangan yang masif dari masyarakat untuk pesantren.

Berdasar pemahaman di atas, kegiatan filantropi di kalangan NU sesungguhnya telah ada sejak lama. Dalam perkembangannya filantropi NU mengalami dinamisasi bentuk dan variasi, seperti kebangkitan zakat dan gairah perzakatan di NU. Atas dasar Undang-undang Zakat Nomor 38 tahun 1999, maka pada Muktamar Solo 2005 PBNU membentuk Lembaga Amal, Zakat, Infak, dan Sedekah NU (LAZISNU). Sejak itu, perkembangan filantropi Islam di internal NU mengalami perkembangan sangat pesat. LAZISNU melakukan kreasi dan agenda terencana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat NU, khususnya dalam menunaikan zakat maupun infak.

1. *NU Care-LAZISNU*

NU Care-LAZISNU adalah *rebranding* dan/atau pintu masuk agar masyarakat mengenal LAZISNU. NU Care-LAZISNU berdiri pada tahun 2004 sebagai sarana untuk membantu masyarakat,

sebagaimana diamanatkan dalam Muktamar Solo 2005. NU Care-LAZISNU secara formal dikukuhkan oleh SK Menteri Agama No. 65/2005 untuk melakukan pemungutan zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat luas.

Sebagai lembaga nirlaba milik PBNU, NU Care-LAZISNU bertujuan untuk berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan umat; mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana zakat, infak, sedekah serta wakaf (ZISWAF). Itulah sebabnya, NU kemudian aktif melakukan kerja-kerja sosial yang peduli pada korban musibah alam, tragedi kemanusiaan, baik di dalam negeri seperti bencana banjir dan gempa bumi, maupun luar negeri seperti pada kasus korban Muslim Rohingya.

Sampai saat ini, NU Care-LAZISNU telah memiliki jaringan pelayanan dan pengelolaan ZIS (zakat, infak, dan sedekah) di 12 negara (seperti Taiwan, Hongkong, Belanda, Korea Selatan, Jepang, Belgia, Malaysia, Australia, Jerman, Turki, dan lain-lain), 34 provinsi, dan 376 kabupaten/kota di Indonesia. Sebagai lembaga filantropi, NU Care terus berupaya meningkatkan kepercayaan dari para donatur, salah satunya dengan melakukan transparansi keuangan. Semua arus keuangan, pencatatan dan penyaluran dana yang ada dapat dilihat secara *real time* melalui sistem IT.

Kepengurusan LAZISNU sendiri bersifat terstruktur, dari pusat sampai daerah (PWNU hingga ranting). Namun hubungan LAZISNU dari pusat ke daerah bersifat otonom dan koordinatif, bukan instruktif. "Bentuk koordinatif itu berupa pelaporan, misalnya di Lombok ada LAZISNU Lombok, maka untuk ranting yang di bawahnya jika ingin melakukan donasi atau semacamnya hanya melakukan pelaporan dengan PW LAZISNU Lombok," kata Abdul Rauf, sekretaris LAZISNU Pusat.

NU Care-LAZISNU memiliki fokus pada beberapa pilar program. Pertama, di bidang pendidikan melalui Sekolah Pesantren Maju (SPM), yaitu program pendidikan yang berkomitmen menangani sekolah layak huni, siswa berprestasi, dan guru transformatif yang

memiliki kemampuan mengajar-mendidik serta mempunyai jiwa kepemimpinan sosial. Kedua, di bidang kesehatan melalui Layanan Kesehatan Gratis (LKG), yakni program bantuan peningkatan kesehatan berupa pemberian layanan kesehatan secara gratis kepada masyarakat di wilayah operasional NU Care-LAZISNU di Indonesia dan di luar negeri. Ketiga, di bidang pengembangan ekonomi melalui program Ekonomi Mandiri NU Care (EMN), yakni dengan memberikan bantuan pengembangan, pemasaran, peningkatan mutu dan pemberikan modal kerja dalam bentuk dana bergulir kepada petani, nelayan, peternak, dan pengusaha mikro.

2. Koin NU

Aktivitas filantropi lainnya adalah pengumpulan dana sukarela oleh warga *nahdliyin* secara nasional yang dikenal dengan sebutan "Koin NU". Koin NU berjalan alamiah sebagai kegiatan filantropi warga. Meski tergolong sedikit, dari jumlah nominal rupiah perkepala keluarga hanya Rp 100-500/hari dikalikan jumlah warga *nahdliyin* pada daerah tertentu, namun dana yang terkumpul per bulan berjumlah sangat fantastis.

Sejarah Koin NU dipelopori oleh LAZISNU Sragen Jawa Tengah sejak 2015. Gerakan filantropi ini mulanya dimotivasi oleh Kiai Ma'ruf Islamuddin sebagai *mustasyar* MWCNU Karangmalang, Sragen, Jawa Tengah saat memberikan arahan dan pengajian tentang semangat berinfak kepada warga di ranting-ranting NU di Kecamatan Karangmalang, Sragen. Dari ajakan ini, pada tahap pertama berhasil dikumpulkan infak sebesar 7 juta rupiah dari 600 kotak; berlanjut 20 juta rupiah dengan 1000 kotak pada tahap kedua. Permintaan kotak bertambah pada tahap ketiga dan mencapai perolehan 30 juta rupiah. Tahapan-tahapan yang dimaksud adalah pengumpulan rutin tiap *selapanan* (35 hari sekali). Pengumpulan dilakukan di beberapa ranting di saat Kiai Ma'ruf mengisi pengajian.

Gerakan itu perlahan-lahan membuahkan hasil yang tidak bisa dianggap remeh. Secara resmi apa yang diinisiasi Kiai Ma'ruf di-

namakan “Gerakan Koin NU Menuju Nusantara Mandiri” yang diluncurkan oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj pada 14 April 2017. Pada tahun awal, gerakan tersebut berhasil mengumpulkan dana infak senilai 2 miliar rupiah. Saat ini rata-rata per 35 hari terkumpul sekitar 300-400 juta rupiah di tingkat Kabupaten Sragen, sedangkan pengumulan Koin NU tahun 2017 sudah mencapai 5,8 miliar rupiah.

Keberhasilan Koin NU di Sragen itu kemudian menginspirasi LAZISNU daerah-daerah lain untuk melakukan model serupa secara nasional. Koin NU di Pleret Bantul, Yogyakarta, misalnya, sudah terkumpul sebesar 50-60 juta per-bulan. Nominal yang tidak sedikit ini oleh pengurus dilaporkan secara berkala berdasarkan prinsip akuntabilitas, lalu dikelola oleh pengurus cabang setempat setelah berkoordinasi dengan pengurus wilayah, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, seperti pembangunan kantor cabang, klinik kesehatan/puskesmas, pembelian mobil ambulance, santunan beasiswa pendidikan, dan lain sebagainya.

3. NU Peduli dan LPBI NU

Berdasarkan data dari United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR), Indonesia merupakan negara yang paling rawan terkena bencana (gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, dan lain-lain) di dunia. Tingginya kerawanan Indonesia ini dihitung dari jumlah manusia yang terancam risiko kehilangan nyawa jika bencana terjadi. Data UN-ISDR menyebutkan, dalam potensi tsunami misalnya, Indonesia menempati peringkat pertama dari 265 negara di dunia yang disurvei. Risiko ancaman tsunami di Indonesia bahkan lebih tinggi dibandingkan Jepang. Menurut perhitungan UN-ISDR, ada 5.402.239 orang yang berpotensi terkena dampaknya.

Di samping tsunami, Indonesia pun berpotensi terus-menerus menghadapi risiko gempa bumi, letusan gunung berapi, dan banjir. Dengan letak geografis di “Cincin Api Pasifik”, sedikitnya terjadi

satu letusan gunung berapi dan satu gempa besar di negara ini tiap tahunnya; dan tsunami besar bisa terjadi tiap lima tahun. Yang terbaru adalah gempa bumi dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah (Oktober 2018), dan tsunami di Selat Sunda yang menghantam daerah pesisir Banten dan Lampung Selatan (Desember 2018). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, dampak bencana gempa dan tsunami di Palu dan sekitarnya mencapai 2.256 orang meninggal dunia. Bencana di Sulteng meliputi gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang melanda empat daerah, yaitu Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong. Belum lagi korban dari tsunami Selat Sunda yang menelan korban ratusan jiwa meninggal dunia dan ribuan luka-luka, dan memaksa ribuan orang mengungsi.

Sadar atas potensi bencana alam tersebut, Banser –yang berada di bawah Ansor– terus berbenah diri dan kini memerankan diri seperti SAR atau Tagana. Bekerjasama dengan Departemen Sosial, Banser di beberapa daerah menjadi “Sahabat Tagana”. Belakangan bahkan Banser membentuk satuan khusus yang disebut Banser Tanggap Bencana (Bagana).[30] Terjun ke daerah yang terdampak bencana kini menjadi bagian dari kegiatan penting Banser. Sebagai contoh, ketika terjadi letusan Gunung Merapi 2010, Banser menjadi unsur penting dalam kegiatan evakuasi, rekonstruksi dan penyaluran bantuan. Bekerjasama dengan unsur-unsur masyarakat lain –seperti TNI, PMII, Departemen Sosial, gereja, dan lain-lain– Banser mendirikan posko bersama.[31] Perkembangan ini adalah loncatan penting dalam perkembangan Banser. Bisa dibayangkan

30 Satuan ini merupakan salah satu satuan-satuan khusus yang dimiliki Banser untuk memenuhi misinya sebagai organisasi yang bersifat keagamaan, kemanusiaan, sosial kemasyarakatan, dan bela negara sebagaimana termaktub dalam Peraturan Organisasi (PO) Pasal 23. Satuan khusus lainnya adalah Densus 99 Asmaul Husna (Densus 99); Satuan Khusus Banser Penanggulangan Kebakaran (Balakar); Satuan Khusus Banser Lalu Lintas (Balantas); Barisan Ansor Serbaguna Husada (Basada); Barisan Ansor Serbaguna Protokoler (Banser Protokoler); Barisan Ansor Serbaguna Maritim (Baritim). Wawancara dengan Ketua Satkorwil Banser Jateng, Dr. Hasyim Asy’ari.

31 Jika kita *searching* internet dengan kata kunci ‘Banser dan bencana’ akan muncul deretan laporan terkait Banser yang terlibat dalam penanganan bencana, terutama dalam empat tahun terakhir ini.

betapa besar sumbangan Banser jika kecenderungan ini terus meningkat, meluas, serta konsisten dijalankan. Dengan jumlah anggota ratusan ribu anggota, Banser bisa menjadi kelompok relawan terbesar di Indonesia, bahkan di dunia.[32]

Dalam penanggulan bencana, Banser bergerak terutama pada fase darurat (*emergency*). Untuk bantuan pada fase-fase selanjutnya, PBNU memiliki "NU Peduli" yang terintegrasi dengan LAZISNU dalam melakukan penggalangan bantuan (dana/barang) untuk korban bencana. Sedangkan tahap implementasinya dikoordinasikan oleh PBNU dengan lembaga struktural terkait, terutama LPBI NU (Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama).

NU Peduli sejatinya merupakan *branding* PBNU untuk penggalangan dana secara nasional, yang dalam pelaksanaannya juga melibatkan PWNU. Pada praktiknya, masyarakat mendonasi lewat LAZISNU di daerah, namun pendistribusian bantuan akan dilakukan melalui satu pintu dalam program NU Peduli. Di dalam NU Peduli, ada unsur LAZISNU sebagai *fundrising* dan pelaksana program bersama LPBI. Di lapangan LAZISNU akan berkoordinasi dengan LKNU, Maarif, LPTNU khususnya pada kegiatan psikososial, *trauma healing*, dan hal-hal lain sebagai bagian dari *recovery* pasca bencana.

Terkait LPBI NU, pembentukannya dilakukan pada Muktamar NU ke- 32 di Makasar 2010, dan dikukuhkan melalui ketetapan rapat pleno harian PBNU. Setelah Muktamar ke-33 NU di Jombang 2015 dibentuk kepengurusan LPBI NU Pusat berdasarkan SK No. 19/A.II.04/09/2015. Meski baru dibicarakan pada Muktamar 2010 dan diinstitusionalkan pada 2015, kerja-kerja sosial sebenarnya sudah dilakukan sejak 2005 sebagai kegiatan dari lembaga *ad hoc*

32 Menurut Hasyim As'ari, Ketua Satkornas Banser Jawa Tengah, di Jawa Tengah jumlah anggota Banser yang terlatih, artinya pernah mengikuti setidaknya Diklatsar dan berseragam, minimal kaos oblong berlambang Banser, berjumlah kurang lebih 150.000. Kecenderungan ini tampaknya terus meningkat. Misal, menurut seorang ketua Ansor Jawa Barat, Diklatsar Banser Sukabumi minggu lalu diikuti sampai 716 peserta. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Ansor dan Banser juga sangat berkembang di luar Jawa yang selama ini sepi dari kehadiran Banser.

untuk penanganan bencana stunami Aceh. Sejak 2006, kegiatan sosial PBNU ini mendapatkan dukungan penuh dari Australia dan UNOCA (United Nation Office for Coordination of Humanitarian Affairs) Indonesia, salah satu badan di PBB yang bergerak di bidang kemanusiaan. Jadi, melalui LPBI NU, sejatinya NU terlibat aktif dalam menjalankan misi kemanusiaan, yakni melalui *disaster risk management*, yang meliputi penanggulangan di tiga level kebencanaan, yaitu langkah-langkah preventif, *emergency*, dan pasca-bencana. Sebagaimana prinsip dalam kegiatan filantropi dan kemanusiaan, distribusi bantuan LPBI NU dilakukan di atas aras kemanusiaan, diberikan kepada semua kalangan tanpa memandang agama, golongan, aliran, suku, dan sebagainya. Begitu pula dalam tindakan darurat kebencanaan, semuanya dijalankan di atas prinsip kemanusiaan tanpa memandang latar belakang primordial korban. Sedangkan pada penanggulangan pasca-bencana, LPBI NU menganalisa skala prioritas berdasarkan basis kultural NU.

Selain di tingkat pusat, aktivitas penanggulangan bencana juga ada di beberapa daerah. Di Jawa Timur, misalnya, ada SER (Social Emergency Respons) NU, sebuah lembaga kebencanaan yang berdiri jauh sebelum LPBI NU. Fokus dari SER adalah pada kondisi gawat darurat, seperti dapur umum, rehabilitasi, dan *assesment*. Menurut Kamil Tabroni (Penasihat SER-NU di Jatim) relawan bencana SER-NU bahkan banyak yang sudah tersertifikasi. Mereka ini kemudian tersebar ke lembaga-lembaga penanggulangan bencana lain, seperti SAR, TAGANA, dan lain-lain.

E. Pengembangan Pendidikan NU dan Pendidikan Nasional

Institusionalisasi lembaga pendidikan di lingkungan NU berlangsung bersamaan dengan lahirnya NU pada 1926. Namun, rintisan aktivitas pendidikan yang ada di dalamnya sudah ada sebelum itu. Pada tahun 1914, misalnya, KH Abdul Wahab Hasbullah sudah melakukan pengkaderan anak-anak muda, termasuk para kiai (di

antaranya KH Masjkur dari Malang), dengan cara bertukar ide, semacam forum diskusi, yang dikenal dengan *Tashwirul Afkar*, juga melalui *Nahdlatul Wathan* (Kebangkitan Tanah Air) yang memperoleh pengakuan dari pemerintah Hindia Belanda pada 1916, hingga *Nahdlatut Tujjar* (Kebangkitan Kaum Pedagang) yang menyerukan semangat kemandirian kepada masyarakat dalam bidang ekonomi dan ilmu pengetahuan.

Urgensi pendidikan di lingkungan NU terus menjadi perhatian dalam beberapa keputusan di Muktamar. Pada Muktamar 1927, warga NU melakukan penggalangan dana untuk mendirikan madrasah dan sekolah. Setahun kemudian, pada Muktamar 1928, tokoh-tokoh penting NU yang dipimpin oleh KH Wahab Chasbullah mengadakan gerakan peduli pendidikan dengan mengunjungi pesantren-pesantren di Jombang dan Nganjuk, Jawa Timur. Penting untuk dicatat bahwa di masa itu pesantren dengan berbagai kegiatan pendidikan di dalamnya, termasuk yang menggunakan sistem klasikal, sudah berkembang mendahului gagasan sistem pendidikan modern yang dikembangkan oleh organisasi lain, bahkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda). Itulah sebabnya, menurut Nurcholis Madjid (1997), pesantren merupakan artefak peradaban Indonesia yang dibangun sebagai institusi pendidikan keagamaan yang bercorak tradisional, unik, dan *indigenous*.

Gagasan untuk mewadahi satuan-satuan pendidikan dalam sebuah badan hukum sudah sempat muncul pada Muktamar 1929 yang memutuskan perlunya badan khusus di tubuh *Hoofd Bestuur* Nahdlatoel Oelama (HBNO) untuk menangani bidang pendidikan, yang waktu itu diketuai oleh Abdullah Ubaid. Namun gagasan ini baru menemukan bentuknya secara formal tiga puluh tahun kemudian, yakni saat didirikannya Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma'arif NU) pada 1959. Di tahun tersebut, satuan-satuan pendidikan di dalam dan di luar pesantren yang dikembangkan oleh warga NU sudah mengalami kemajuan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Mereka mengembangkan pendidikan sebagai bentuk komitmen terhadap cita-cita ideologis NU. Dalam

konteks ini, posisi struktural PBNU lebih bersifat mengayomi, koordinatif, dan memberi dukungan untuk peningkatan mutu pada pendidikan yang sudah ada. Pada Muktamar ke-30 tahun 1999 di Pesantren Lirboyo Kediri, diputuskan bahwa pendidikan merupakan *mainstream* dalam program kerja NU, mengingat organisasi ini dilahirkan dari serangkaian proses sejarah yang di dalamnya terjadi pergulatan pemikiran keagamaan dan keumatan.

Menurut data yang dihimpun PBNU, hingga tahun 2017 terdapat sekitar 48 ribu lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Lembaga Pendidikan Ma'arif PBNU, dari tingkat SD/MI, SLTP/MTs, maupun SMA/MA sederajat. Sedangkan untuk pondok pesantren, ada sekitar 23 ribu pesantren yang tergabung di dalam Asosiasi Pesantren NU atau Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI NU). Jumlah ini masih dimungkinkan terus bertambah, sebab pesantren-pesantren baru terus bermunculan, di samping terdapat pesantren-pesantren salaf yang enggan diasosiasikan di dalam RMI NU.

Selain kuantitas yang sangat banyak, lembaga pendidikan NU, terutama pesantren, mengembangkan tradisi kultural NU yang memiliki kekhasan. Pesantren sebagai sebuah institusi pendidikan (Wahid, 1978) layaknya lembaga pendidikan nasional umumnya. Hanya saja, pesantren tidak lagi berpusat (dan tidak memiliki hubungan) pada pemerintah, melainkan bisa mandiri. Begitu pula dalam metode pembelajarannya. Sistem pembelajaran pesantren, menurut Zamakhsyari Dhofir (1982), umumnya menggunakan cara tradisional, yang biasa disebut *bandongan* atau *sorogan*, yakni metode pembelajaran keagamaan yang dilakukan oleh kiai dan atau santri senior dengan membaca dan menyimak kitab tertentu, yang diikuti oleh sejumlah santri dalam jumlah yang amat banyak.

Karakter pesantren di lingkungan NU lazimnya memiliki dua corak, yaitu tradisional (*salafiyah*) dan modern (*'ashriyah*). Pesantren tradisional mengacu pada pola pembelajaran yang mengedepankan *kitab kuning* tanpa terlalu menekankan adanya lembaga pendidikan formal semacam madrasah atau sekolah. Sementara pesantren modern menekankan pendidikan formal, meski juga mengaji kitab-kitab berbahasa Arab.

Jumlah pesantren dan lembaga pendidikan yang sangat banyak di lingkungan NU tersebut menunjukkan dengan jelas kontribusi besar NU dalam pengembangan intelektulisme, dan ikut membantu mencerdaskan generasi bangsa. Di satu sisi, sebagai organisasi sipil, NU terlibat aktif dalam upaya-upaya mendidik generasi bangsa, sebagai sumbangsih pada pembangunan pendidikan nasional yang sejatinya menjadi tanggung jawab negara. Di sisi lainnya, pesantren dan lembaga pendidikan di lingkungan NU pun dapat bersinergi dengan program-program pemerintah, baik secara ideologis maupun dalam implementasi praksis misi pendidikan nasional. Berkaitan dengan ideologi, pesantren dan lembaga pendidikan di lingkungan NU tidak mengajarkan perbuatan-perbuatan makar/kriminal yang menjadi "musuh" negara, seperti kasus terorisme karena pesantren dan lembaga pendidikan NU menolak paham terorisme. Sedangkan implementasi dari praksis pendidikan, pesantren bersifat sangat komplementer dengan visi dan misi pendidikan nasional bangsa, seperti penguatan karakter peserta didik dengan cara ikut menyelenggarakan upacara setiap hari-hari tertentu, sinergisitas kurikulum nasional dengan lokal pesantren, dan lain sebagainya.

Sifat pendidikan di lingkungan NU dalam kaitannya dengan kedudukan bernegara di satu pihak dan keberlanjutan kehidupan berbangsa yang majemuk dan plural di pihak lain bisa dirumuskan sebagai berikut. *Pertama*, dengan ribuan jumlah lembaga pendidikan, baik formal maupun informal, dan ribuan hingga jutaan pelajar/santri yang bernaung di bawah NU, maka bisa dikatakan NU telah ikut menyumbang kepada proses pendidikan anak bangsa. NU turut membantu dan menopang tugas dan kewajiban yang semestinya menjadi tanggung jawab negara dalam aspek pendidikan. *Kedua*, sebagai organisasi yang berbasis keagamaan, pendidikan yang dikembangkan NU juga berbasis kepada keagamaan. Kendati demikian, dengan pandangan keagamaan yang terbuka, materi yang diajarkan dan disemaikan kepada anak didik pun merupakan ajaran nilai keagamaan yang terbuka dan berorientasi

kepada perdamaian. *Ketiga*, kedudukan pendidikan di dalam NU sangat bersifat komplementer *vis a vis* pendidikan negara. Pendidikan NU dalam banyak hal justru melengkapi dan memperkuat pendidikan yang dikembangkan negara, seperti dalam hal pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan kebhinekaan, dan perdamaian.

Pendidikan NU telah melahirkan tokoh-tokoh perubahan bangsa, dari sebelum bangsa Indonesia merdeka sampai sekarang. KH Hasyim Asy'ari, misalnya, amat dikenal peranannya dalam dalam sejarah perjuangan kemerdekaan, salah satunya sebagai anggota BPUPKI yang ikut andil dalam merumuskan ideologi negara, Pancasila. Begitu pula KH Abdurahman Wahid (Gus Dur) dikenal luas tidak hanya oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga dunia internasional sebagai pendorong laju perubahan dari sistem otoritarianisme Orde Baru menuju era Reformasi. Tokoh-tokoh lain dari lulusan pendidikan NU sampai sekarang terus bermunculan dan menjadi mesin penggerak seiring perubahan zaman, baik di bidang politik, ekonomi, kebudayaan, dan termasuk pendidikan.

F. Membela Minoritas

1. *Banser dan Pengamanan Rumah Ibadah*

Pada malam Natal, 24 Desember 2000, terjadi peledakan bom di Gereja Eben Heizer, Mojokerto, Jawa Timur. Ini adalah salah satu dari serangkaian pemboman terhadap gereja di masa pasca Reformasi yang dianggap sebagai risiko dari lemahnya negara, di satu pihak, dan meningkatnya eskalasi konflik antarmasyarakat serta munculnya kelompok-kelompok garis keras setelah jatuhnya rezim yang ingin mengambil kekuasaan, di pihak lain.

Hal yang mengejutkan dari peristiwa pemboman itu adalah tewasnya Riyanto, anggota Banser Mojokerto. Dalam laporan media, Riyanto digambarkan mencoba membuang bungkusan plastik yang diduga berisi bom di antara kerumunan jemaat gereja. Usahanya

tidak sepenuhnya berhasil. Bom itu keburu meledak dan menghajar tubuhnya. Ia langsung tewas. Namun diyakini, seandainya Riyanto tidak membawa lari bungkusan plastik tersebut, jemaat gereja yang menjadi korban akan lebih banyak lagi (Salim, 2004).

Banser adalah akronim dari "Barisan Serbaguna". Sebagaimana namanya, Banser adalah sebuah kelompok anak muda yang fungsinya mirip pandu namun berada di bawah organisasi pemuda Ansor, organisasi otonom yang berafiliasi dengan NU. Sebagaimana NU, Ansor dan Banser juga ada hampir di seluruh kota di Indonesia.

Tewasnya Riyanto dalam aksi pengamanan gereja mengukuhkan peran dan reputasi Banser dalam ikut memberikan pengamanan gereja, terutama pada malam Natal, Tahun Baru, dan acara-acara kebaktian atau misa lainnya. Sejak banyaknya pemboman dan ancaman pemboman terhadap gereja, Banser secara sukarela ikut memberikan pengamanan, bersama-sama dengan kepolisian. Praktik ini berlangsung di berbagai kota di Indonesia. Salah satu alasannya adalah lantaran kepolisian kekurangan personel, terutama jika ada tuntutan untuk melakukan penjagaan di berbagai tempat dalam waktu yang bersamaan. Kehadiran Banser dengan demikian sangat dibutuhkan untuk membantu kepolisian.

Kehadiran Banser sering memicu kontroversi, khususnya jika dikaitkan dalam konteks agama. Beberapa kalangan Muslim konservatif mengecam keikutsertaan Banser dalam penjagaan gereja. Mereka menuduh Banser sebagai antek Yahudi dan Kristen karena begitu saja mau berhubungan dan membantu kalangan non Muslim. Mereka juga menuduh Banser hanya mencari duit saja.

Tuduhan ini dibantah oleh Banser. Mereka beranggapan keikutsertaan untuk menjaga gereja adalah bagian dari pengamalan solidaritas sebangsa. Orang-orang Kristen adalah saudara, terutama dalam pengertian saudara sebangsa. Karena itu sudah menjadi kewajiban mereka untuk ikut membantu saudaranya, melalui pengamanan. Selain itu, mereka juga meyakini keikutsertaan menjaga gereja itu sebagai pengejawantahan ajaran Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam. Mereka meyakini kegiatan ini juga sebagai pang-

gilan keagamaan dan kegiatan jihad. Karena itulah, Riyanto yang meninggal pada saat membantu menjaga pengamanan gereja itu sebagai '*syahid*'.

Rentetan pemboman terhadap gereja yang berlangsung dalam dua dekade terakhir di tahun 2000 itu betul-betul menjadi teror yang membuat kalangan umat Kristen ketakutan dan kehilangan rasa aman. Meski aparat akhirnya berhasil menangkap sebagian besar pelaku dan mengungkap motif terornya, ketakutan dan kekhawatiran tidak serta merta pupus, terutama karena jaringan teroris ini memang tidak seluruhnya bisa digulung dan ancaman selalu ada kapan saja. Selain rasa aman, yang juga terancam hilang adalah rasa percaya terhadap umat Islam. Meski berulang-ulang diungkapkan bahwa pemboman dilakukan oleh para teroris, dan hal itu sama sekali tidak mencerminkan keseluruhan umat Islam Indonesia, tidak mudah bagi umat kristiani untuk mempercayainya.

Di sinilah arti penting kehadiran Banser dalam pengamanan itu. Ia menunjukkan secara langsung dan tulus bahwa serangan bom terhadap gereja dan umat Kristiani secara umum sama sekali tidak mewakili suara umat Islam. Dengan demikian, kehadiran Banser lebih bermakna simbolik dan psikologis, yang meyakinkan umat Kristiani bahwa mereka dijaga dan untuk tetap terus menjadi bagian dari Indonesia. Banser menjadi penanda bahwa persaudaraan sebangsa meski berbeda agama bukan hanya mungkin, tetapi nyata dan bisa diwujudkan. Hingga saat ini, Banser selalu hadir untuk membantu pengamanan gereja pada setiap Natal, Paskah dan hari-hari keagamaan lainnya.

Sebagaimana tertera dalam namanya, "serbaguna," kegiatan utama Banser tentu tidak hanya ikut menjaga dan mengamankan gereja, tetapi juga untuk kegiatan-kegiatan lain, seperti mengatur lalu lintas ketika ada acara, terutama dalam kegiatan di lingkungan internal NU. Akhir-akhir ini Banser juga banyak terlibat dalam kegiatan tanggap bencana. Perhatian terhadap bencana ini muncul setelah tumbuh kesadaran bahwa Indonesia berada di "lingkar api"

yang selalu potensial mengalami gempa dan tsunami, selain ancaman longsor, letusan gunung berapi, banjir, dan lain-lain (Salim 2018). Tetapi reputasi Banser lebih sering dikaitkan dengan penjagaan dan pengamanan gereja ini. Dan karena itu pula, ia sering dianggap penting.

2. Pembelaan Minoritas

Memberikan perhatian kepada kalangan agama di luar Islam pada dasarnya telah menjadi watak NU, terutama sejak dipimpin oleh KH Abdurrahman Wahid selama hampir 15 tahun (1984-1999). Selain pemandangan yang sering ditampilkan Banser di atas, NU juga banyak membela kedudukan kalangan minoritas, seperti Ahmadiyah dan Syiah di saat banyak kalangan muslim lainnya, termasuk dalam hal ini MUI, yang menuduh mereka sebagai sesat, dan menuntut serta melegitimasi secara tidak langsung tindak pemberangusan atas mereka.

Seiring dengan perubahan politik dan naiknya populisme dan politik identitas, menyeruak juga beberapa penyerangan terhadap kelompok minoritas, terutama dalam hal ini minoritas Syiah dan Ahmadiyah. Penyerangan terjadi di berbagai daerah seperti di Sampang, Tasikmalaya, Mataram, Banten, Bangil, dan lain-lain. Pada 26 Agustus 2012, misalnya, banyak orang tiba-tiba menjadi tunawisma dan enam orang anak menjadi yatim setelah kampung mereka di komunitas Syiah di dusun Nangkernang, Sampang diserang ratusan orang. Seorang sesepuh warga bernama Hamamah alias Muhammad Khosim juga meninggal dunia saat berusaha menghalau para penyerang, dan puluhan orang lainnya terluka. Massa juga merusak dan membakar rumah-rumah warga. Ini adalah serangan kedua terhadap para pengikut Syiah di Sampang dalam waktu satu tahun. Sebelumnya, pada Desember 2011, rumah dan pesantren mereka dibakar, sedangkan pemimpin mereka, Tajul Muluk, mendekam di penjara karena divonis bersalah melakukan penodaan agama.

Syiah bukan kelompok minoritas pertama di Indonesia yang menjadi sasaran kekerasan. Pada 6 Februari 2011, sekitar 1.500 orang menyerang 21 pengikut Ahmadiyah di Cikeusik, Provinsi Banten. Tiga orang tewas mengenaskan dalam peristiwa itu. Rekaman penyerangan yang kemudian diunggah di media sosial itu menunjukkan aksi massa yang menganiaya para korban, sedangkan sekitar 30 polisi yang berada di lokasi tidak berdaya. Insiden itu adalah puncak dari serangkaian perlakuan intimidatif terhadap pengikut Ahmadiyah.

Menyikapi kasus kekerasan yang menimpa dua kelompok minoritas di atas, PBNU mengutuk keras. Peristiwa tersebut dinilai sebagai tindakan kriminal murni, dan aparat penegak hukum didesak untuk menjalankan penegakan hukum sebaik mungkin.

"Saya melihat (kejadian) itu sebagai kriminal murni, karena dakwah tidak dibenarkan kalau sampai harus saling melukai, apalagi saling bunuh. Oleh karenanya aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, harus bisa bertindak sesuai dengan hukum yang ada", kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di Jakarta, Senin (27/8/2018).

Kelompok minoritas Syiah dan Ahmadiyah oleh kalangan *mainstream* penganut Islam-Sunni dianggap sesat. Namun NU menolak cara penyelesaian konflik lewat cara kekerasan, dan justru menganjurkan agar tetap menjaga keharmonisan di tengah-tengah masyarakat yang plural.

"NU dengan Syiah jelas beda, terlebih dengan Ahmadiyah, jelas berbeda. Tapi dalam pergaulan, kami menolak adanya kekerasan, karena ajakan berubah itu ada metodenya. Dakwah, diskusi yang bermartabat, dan itu semua yang selama ini kami lakukan," tandas KH Said Aqil Siroj.

Stereotipe sesat yang disematkan kepada kelompok minoritas keagamaan tidak bisa dilepaskan dari fatwa MUI pada tahun 2005 yang menyatakan bahwa Ahmadiyah "sesat dan menyesatkan". Fatwa ini kemudian didukung pemerintah dengan terbitnya Surat

Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri –Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung– yang memerintahkan kepada penganut Ahmadiyah untuk menghentikan "penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam."

Sekitar dua pekan sebelum SKB anti-Ahmadiyah diteken pada 9 Juni 2008, Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKBB) memasang iklan satu halaman penuh di sejumlah surat kabar di Jakarta. Iklan itu menegaskan, "Indonesia adalah negara yang menjamin tiap warga bebas beragama (dan itu merupakan) hak asasi manusia yang dijamin Konstitusi". Dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adalah bagian dari AKBB. Gus Dur mendukung gagasan inklusif yang dikandung Pancasila. Menurutnya, gagasan itu merupakan mekanisme terbaik untuk melindungi dan menjamin kebebasan beragama di masyarakat Indonesia. Di bawah pimpinan Gus Dur, NU menjelma sebagai organisasi yang mengedepankan moderasi Islam serta dialog sebagai jembatan menyikapi perbedaan. Dari titik inilah sikap NU tersebut dilanjutkan KH Said Aqil Siradj, pengasuh pondok pesantren Al-Tsaqafah Ciganjur, Jakarta yang kini menjadi Ketua Umum PBNU. Ia memang memandang ajaran Ahmadiyah sebagai Islam yang berbeda dengan NU, dan menyimpang dari Islam, namun mereka juga warga negara Indonesia yang harus dihormati haknya.

KH Mustofa Bisri, kiai dan budayawan yang sempat menjadi Rais Aam PBNU (pengganti almarhum KH Sahal Mahfudz dari 2014 hingga 2015), juga mengecam penyerangan terhadap penganut Ahmadiyah dan Syiah. Menurutnya, jalan yang harus ditempuh NU terhadap ajaran "sesat" ialah melalui dialog. Gus Mus (sebutan akrab KH Mustofa Bisri) mengajak warga NU agar menjaga *khittah nahdliyyah*, yang salah satunya mengajarkan sikap toleran (*tasamuh*), menghargai perbedaan keyakinan, dan tidak mudah diseret ke dalam konflik karena perbedaan keyakinan. Dalam hal ini, yang dibela oleh NU bukan ajarannya, tetapi hak kemanusiaan dan hak sebagai warga negara yang wajib dilindungi.

Berdasarkan prinsip *tawasut* (moderat), *tasamuh* (toleran), *tawazzun* (seimbang), dan *i'tidal* (tegak dan konsisten, di daerah-daerah di mana Ahmadiyah dan Syi'ah mengalami penyerangan itu NU mencoba melakukan rekonsiliasi dan perdamaian. Di Bangil (penyerangan Syiah) dan Tasikmalaya (penyerangan Ahmadiyah), peran rekonsiliasi dan perdamaian dilakukan oleh Ansor dengan cara membantu polisi dalam menjaga kegiatan-kegiatan Syiah dan Ahmadiyah. Lebih jauh, bahkan Ansor mengadakan kerjasama dengan Ahmadiyah dan Syiah, seperti dalam kegiatan sosial pengobatan bersama, forum lintas iman, dan lain-lain.

Sementara di Sampang dan Mataram, peran rekonsiliasi dijalankan oleh Lakpesdam NU. Di Mataram misalnya, mereka menemani dan mendampingi warga Ahmadiyah yang terusir dari kampung, memfasilitasi agar penampungan mereka berada di kota dan dekat dengan komunitas Hindu sehingga menjamin keamanan mereka untuk tidak diserang lagi. Lakpesdam juga membuat kegiatan yang menghubungkan para pengungsi ini dengan warga setempat. Bahkan kelurahan tempat mereka bermukim kemudian mengakui pengungsi Ahmadiyah tersebut sebagai warganya. Ini adalah usaha-usaha yang dilakukan karena usaha untuk mengembalikan mereka ke tempat asalnya belum memungkinkan. Sementara di Sampang, Lakpesdam juga mendampingi para pengungsi Syi'ah yang telah diusir. Usaha mengembalikan mereka ke tempat asal juga masih belum memungkinkan. Karena itu, usaha yang mungkin dilakukan adalah membantu mereka untuk membina hubungan dengan masyarakat sekitar, meningkatkan kesejahteraan dan membantu pengurusan dokumen kewarganegaraan mereka (Mudzakkir 2018)

Kerja-kerja seperti dilakukan Ansor dan Lakpesdam ini sangat membantu para pengungsi, baik Syi'ah maupun Ahmadiyah. Kerja-kerja ini biasa dan kerap dilakukan NU di berbagai tempat di mana kalangan minoritas mengalami persekusi. Karena itu tidaklah aneh jika NU selalu menjadi tempat suaka bagi kalangan minoritas ini, terutama ketika negara cenderung abai dalam memberikan perlindungan kepada warganya.

G. Inisiatif-inisiatif Perdamaian Nasional dan Global

Di level lokal maupun nasional, NU senantiasa mendorong persatuan dan perdamaian. Bahkan, dalam dua dekade terakhir, terutama sejak dipimpin oleh KH Abdurrahman Wahid, NU banyak melakukan inisiatif-inisiatif perdamaian di tingkat regional dan global.

Dengan pandangan keagamaan yang terbuka dan toleran, serta komitmen yang nyata di dalam negeri pada pembelaan hak-hak kalangan minoritas dan perdamaian, NU memiliki otoritas moral untuk terlibat dalam inisiatif-inisiatif perdamaian di tingkat regional dan global. Inisiatif-inisiatif ini dilakukan baik melalui tokoh-tokohnya, organisasi NU, ataupun melalui badan-badan otonom yang ada di dalamnya.

Inisiatif-inisiatif tersebut diwujudkan NU melalui tiga cara. *Pertama*, mengecam tindakan terorisme, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta tidak memberikan permakluman sedikit pun terhadap terorisme. Bagi NU, setiap masalah harus diselesaikan melalui dialog, bukan dengan jalan kekerasan, lebih-lebih membinasakan makhluk lain. Oleh karena itu NU aktif dalam kegiatan pencegahan radikalisme dan terorisme, baik di bagian hilir maupun hulu. Dalam hal ini teologi antiterorisme sangat jelas selalu segaris dengan sikap di lapangan. Kedua, sebagai kelanjutan dari langkah pertama, NU tak pernah memberikan dukungan pada upaya-upaya mobilisasi masyarakat untuk melakukan penyerangan, aksi kekerasan maupun kegiatan jihad, baik di level nasional maupun internasional. NU juga tidak melihat konflik dengan harga mati, menang-kalah, tetapi meletakkan dalam perspektif perdamaian. Ini terlihat pada kasus Israel, di mana pandangan NU lebih moderat dan berorientasi perdamaian.Ketiga, NU melakukan inisiatif-inisiatif perdamaian global dengan membuat pernyataan, kerjasama, dan pengiriman tim perdamaian.

1. *Meredam Arus Ekstremisme Keagamaan: Peran NU-Online*[33]

Ada banyak ikhtiar yang dilakukan NU untuk meredam arus ekstremisme kekerasan, yang dalam beberapa hal menjadi sumber tindakan terorisme dan konflik keagamaan, baik di tingkat nasional, regional maupun global. Seperti dikemukakan di atas, eksistensi NU sendiri, melalui pandangan keagamaannya, merupakan obat penawar atas ektremisme kekerasan yang bersumber dari paham keagamaan.

Salah satu penyubur politik identitas, radikalisme dan terorisme adalah menyebarnya *hoax* dan *hatespeech*. Ukuran kebenaran telah bergeser dan berubah. Saat ini kebenaran cenderung dipandang jika kalau ia sesuai dan cocok dengan keinginan dan harapan politik seseorang, bukan benar menurut ukuran etika dan moral yang umum. Di dalam konteks inilah menyeruak *hoaks* dan berita bohong. Usaha menghadang arus radikalisme keagamaan, salah satunya, adalah dengan memberantas, atau setidaknya meminimalisir pengaruh *hoax* dan ujaran kebencian.

Terkait hal itu, amat menarik melihat peran NU melalui media resmi mereka, *NU Online*,[34] yang berdiri pada 2009 dan ber alamat situs di nu.or.id. Awalnya media ini hanya dibutuhkan sebagai media internal NU dengan berita atau pun esai yang berkait dengan keislaman dan ke-NU-an secara khusus. Tetapi belakangan *NU Online* menghadapi tanggung jawab untuk menghadang arus radikalisme dan terorisme, khususnya yang menyebar melalui berita-berita bohong, berisi fitnah, atau penuh kebencian. Disebutkan oleh beberapa hasil riset, dalam persoalan ini, peran web sangatlah besar, dan yang mengejutkan web-web penyebar *hoax* amat digemari. Beberapa waktu lalu, sepuluh besar web ke-

33 Informasi mengenai *NU Online* di sini bersumber sebagian besar dari perbincangan dengan Ahmad Mukafi Niam (Pemimpin Redaksi), Muhammad Yunus dan Nurdin (keduanya staf redaksi), di kantor *NU Online*, 30 November 2018.

34 NU memiliki banyak media, baik offline maupun online, baik di pusat maupun di daerah. Misal yang terkenal sejak lama adalah Majalah *AULA* yang diterbitkan PWNU Jawa Timur dan *Bangkit* yang diterbitkan PWNU DIY Yogyakarta. Juga ada televisi seperti TV9 yang memancar dari kota Surabaya.

islaman dikuasai web-web seperti ini. Inilah yang merisaukan NU dan menjadi tanggungjawab mereka untuk menandingi suara-suara negatif tersebut. Usaha tersebut relatif mulai menampakkan hasil belakangan ini. Dalam beberapa survei mutakhir berdasar *ranting Alexa*, *NU Online* menduduki rating pertama dari web-web Islam yang paling banyak dikunjungi, menggeser *PortalIslam*, *EraMuslim* dan *Rumaisho*, web-web penyebar *hoax* dan ujaran kebencian yang selama ini paling tinggi dikunjungi.

Menurut pengelola *NU Online*, rata-rata kunjungan ke web itu sudah mencapai 100 ribu per hari atau 3 juta per bulan. Pada November 2018, *NU Online* bahkan dikunjungi 4,1 juta. Yang menarik, 40% dari angka itu adalah *direct visitor*. Artinya, *NU Online* memang menjadi tujuan dari pembaca, yang kebanyakan berasal dari kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Makassar dan Bandung. Bahkan orang Indonesia di AS, Malaysia, dan Inggris juga tercatat banyak mengunjunginya.

NU Online dikelola anak-anak muda yang sangat menyadari kekuatan dari sebuah media *online*, yaitu pada kebaruan secara terus menerus. Web harus bekerja sepanjang 24 jam. Karena itu, mereka juga berprinsip, minimal satu jam sekali harus memposting tulisan baru. Artinya sehari minimal 24 tulisan dan sebulan berarti 720 tulisan. Pada kenyataannya, dalam sebulan mereka mem*posting* lebih dari 1000 tulisan. Itu, menurut mereka, prasyarat minimal web keislaman ini bisa dikunjungi terus.

Untuk alasan ini, mereka harus memiliki banyak penulis. Menurut pengelolanya, *NU Online* memiliki sekitar 100-an penulis muda yang mereka sebut sebagai kontributor dan penulis keislaman.[35] Sembari merawat para penulis ini, dengan rutin mereka melakukan pertemuan evaluasi dan penyegaran, mereka juga rajin membuat pelatihan menulis untuk merekrut para penulis muda, terutama penulis keislaman. Menurut salah seorang pengelola, *NU Online* sudah membuat pelatihan penulisan angkatan ke-7. Setiap

35 Dalam boks redaksi, tercatat ada 40-an nama kontributor yang berasal dari berbagai daerah, baik di Jawa maupun di luar Jawa.

angkatan yang mendaftar bisa sampai 100an anak muda, tetaapi yang bisa diterima hanya 20 orang per angkatan. Para kontributor dan penulis keislaman ini mendapat honorarium, tetapi menurut pengelola *NU Online*, kebanyakan mereka bekerja berdasar kesukarelaan, karena *NU Online* sendiri bukan web komersial.

Isi NU Online, selain berita-berita ke-NU-an, adalah konten keislaman. Mereka mengembangkan wacana keislaman yang terbuka dan luas, serta bertanggung jawab. Misinya adalah agar pembaca memperoleh pengetahuan dan perspektif yang akurat mengenai suatu masalah dari segi keagamaan. Dalam bahasa lain, *NU Online* mengembangkan apa yang disebut sebagai "jurnalisme damai."

Salah satu rubrik menarik di dalam *NU Online* adalah materi khotbah jumat,[36] yang muncul dua minggu sekali. Materi dalam tulisan itu bukan saja banyak dibaca, tetapi juga banyak digunakan oleh para khatib Jum'at. Sebagai misal, tak lama setelah terjadinya gempa bumi dan tsunami di Palu, berkembang opini bahwa musibah ini merupakan kutukan karena sehari sebelumnya ada pertemuan LGBT di Palu. Atau lebih politis lagi, bencana itu adalah bentuk kutukan terhadap Pemerintahan Jokowi. Opini seperti ini banyak beredar di sosial media dan juga dikhotbahkan para khatib.

Menanggapi opini tersebut, *NU Online* mengeluarkan materi khotbah yang berisi pandangan yang lebih proporsional dan rasional bahwa bencana itu merupakan gejala alam, sama sekali bukan kutukan, dan mengajak umat untuk saling peduli dan membantu. Ketika terjadi bencana, dianjurkan untuk saling membantu, sabar dan ridha dengan ketentuan Allah. Bencana juga menjadi momentum untuk *muhasabah* (instrospeksi diri) dan menumbuhkan optimisme, bukan malah menyalahkan orang dan membuat putus asa. Jika bencana dimaknai sebagai teguran, maka hal itu harus diartikan dalam lingkup individual, ditujukan kepada diri sendiri, bukan kepada orang lain. Sebaliknya kepada orang lain,

36 Ada banyak rubrik di dalam *NU Online*, tetapi yang akan dibahas di sini adalah yang relevan dengan topik secara langsung, yaitu ikhtiar menghadang arus ekstremisme kekerasan dan terorisme berbasis keagamaan.

termasuk korban bencana, sikap seorang Muslim semestinya adalah berempati, berdoa, dan menolong semampunya. Bukan mencaci-maki yang bisa menyinggung perasaan mereka yang kini sudah menderita. Kepada diri sendiri, kita bisa lebih banyak mencari kesalahan sendiri, lalu beristighfar, berbenah untuk menjadi pribadi yang lebih baik sebagai hamba Allah sejati. Justru yang berbahaya bukanlah teguran bencana itu sendiri, tetapi sikap sombong dan lupa diri dengan nikmat yang dikaruniakan oleh Allah.[37] Materi khotbah ini ternyata banyak dibaca dan menurut laporan juga banyak dipakai dan dibacakan para khatib dalam khotbahnya.

Selain itu, rubrik menarik lainnya adalah rubrik "anti-hoax". Sebagaimana nama rubriknya, rubrik ini berisi berita-berita dan esai-esai yang (1) membantah berita yang sudah beredar, terutama yang isinya bohong, mengadu domba atau fitnah; (2) mengklarifikasi berita-berita bohong yang beredar; (3) *hoax* merupakan tindakan yang melanggar ajaran agama;[38] dan (4) berisi kegiatan dan panduan untuk menyaring, menghadapi dan menyikapi berita *hoax*.[39]

Kalangan garis keras amat tidak suka dengan pandangan keislaman yang lebih terbuka dan moderat ala *NU Online*. Karena itulah, melalui media sosial, mereka tidak jarang menuduh *NU Online* sebagai anti-Islam atau menjadi corong suara Yahudi dan kaum kafir. Para pengelola *NU Online* mengabaikan suara-suara ini, karena menanggapinya hanya buang energi, "kecuali kalau fitnah mereka keterlaluan," kata pengelola *NU Online*.

---

37 Lihat http://www.nu.or.id/post/read/96676/khutbah-jumat-tiga-sikap-bijaksana-menghadapi-bencana; juga http://www.nu.or.id/post/read/96642/khutbah-jumat-tiga-pelajaran-penting-bencana-alam-bagi-tiap-muslim; dan http://www.nu.or.id/post/read/97149/khutbah-jumat-yang-lebih-gawat-ketimbang-teguran-berupa-bencana. Diunduh 5 Desember 2018.

38 Baca misal http://www.nu.or.id/post/read/98897/ujaran-kebencian-dan-hoaks-sebagai-al-kidzbu- (diunduh 5 Desember 2018).

39 Lihat misalnya berita himbauan KH Said Aqil SIradj, Ketua PBNU, agar tidak mudah termakan fitnah di medson. http://www.nu.or.id/post/read/97467/ketum-pbnu-imbau-warga-nu-tak-gampang-termakan-fitnah-di-medsos- (diunduh 5 Desember 2018).

Selain tulisan, *NU Online* juga memproduksi video yang berisi khotbah atau pengajian dari para kiai atau intelektual moderat. Video ini disebarkan melalui media sosial. "Video tertinggi sudah ditonton oleh 8 jutaan *viewers*, yaitu video Kiai Muwafiq," demikian menurut mereka. Kiai Muwafiq dikenal sebagai kiai yang sangat moderat dan kini namanya sedang naik daun.

NU Online juga memiliki *Fan Page* di *Facebook* dengan pengikut kurang lebih 1,5 juta. "Jadi pembaca kami 4 jutaan itu, baru 40% dari pengikut *Fan Page* kami," jelas salah seorang pengelola. *NU Online* memiliki peran yang efektif dan strategis dalam menghadang arus pandangan radikalisme, khususnya di Indonesia. Mungkin saat ini, *NU Online* adalah web keislaman yang terbesar. Pengelolanya sendiri meyakini, jika bukan kendala bahasa, mereka bisa berkembang lebih besar lagi.

2. Isu Israel dan Perdamaian Global

Salah satu wacana penting yang disumbangkan NU, terutama melalui beberapa tokohnya, adalah pandangan yang lebih terbuka terhadap kedudukan Israel. Masalah Israel dan Palestina merupakan isu penting dan strategis dalam kaitannya dengan perdamaian dunia, dan bahkan dapat dikatakan sebagai episentrum dari gerak perdamaian dunia. Karennya bisa diasumsikan bahwa jika masalah ini bisa dirumuskan dengan baik, maka jalan perdamaian dunia akan lebih lancar. Sebaliknya jika terhambat, maka hampir pasti jalan perdamaian juga menjadi buntu.

Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Kebijakan ini bisa terus bertahan hingga kini salah satunya karena pandangan yang dipegang oleh sebagian umat Islam di Indonesia bahwa Israel adalah zionis-kolonialis, negara yang menjajah dan menduduki wilayah Palestina, dan banyak melakukan kekerasan terhadap warga Palestina. Sikap kebencian, yang pada tingkat tertentu bisa disebut sebagai sikap "antisemitisme", ini memiliki akar yang mendalam. Bukan soal Palestina semata. Salah satunya adalah

adanya prasangka bahwa umat Yahudi telah memiliki agenda besar untuk menguasai dunia dan menaklukkan Islam. Seluruh pemikiran dan teknologi modern bisa dikembalikan kepada agenda tersembunyi itu untuk menghancurkan Islam (Bruinessen 1994).

Dengan demikian, tidak mudah untuk meyakinkan dan menawarkan jalan damai ataupun perspektif moderat dalam masalah Palestina-Israel. Harga mati yang diinginkan adalah Israel hilang dari peta dunia. Masalahnya adalah pandangan yang belum tentu benar ini mempengaruhi hampir seluruh pandangan terhadap orang lain. Padahal, untuk membedakan Yahudi, Israel, atau Zionisme, orang masih sering tumpang tindih. Apalagi jika di dalamnya dimasukkan pula unsur Kristen, Barat, kapitalisme, dan bahkan komunisme, pandangan yang muncul penuh dengan kerancuan sehingga tidak mudah dimengerti makna yang hendak dituju.

Dalam permasalahan itu, posisi NU yang diwakili oleh para tokohnya selalu melihat kemungkinan jalan damai. Israel dilihat dalam perspektif yang lebih jernih dan tidak tunggal. NU percaya bahwa selalu ada jalan untuk perdamaian, dan pilihannya memang hanya itu jika tidak ingin semua hancur. Dalam konteks inilah, kepergian Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), Katib Aam Syuriah PBNU, pada pertengahan 2018 lalu ke Israel harus dipahami. Dan seperti yang sudah biasa terjadi, inisiatif yang memberi ruang sedikit saja untuk menerima dan duduk satu meja dengan Israel, akan menuai kecaman. Gus Yahya diserang dengan berbagai tuduhan, seperti antek-zionis, cuma cari duit, dan dianggap menyakiti umat Islam dan warga Palestina.[40] Dalam hal ini, termasuk pihak yang mengecam adalah MUI. Sementara NU sendiri untuk menetralisir suasana, mengatakan bahwa kepergian Gus Yahya bersifat pribadi, bukan atas nama organisasi, meski percaya bahwa kepergian Gus Yahya membawa misi diplomatik untuk perdamaian Palestina. Pemerintah juga turut menyatakan bahwa kepergian Gus Yahya ber-

40 Untuk mengetahui bagaimana kontroversi kepergian Yahya Cholil Staquf ini, bisa diunduh berita-berita pada minggu kedua bulan Juni 2018 tersebut.

sifat pribadi. Penjelasan itu dikemukakan mengingat Gus Yahya adalah juga anggota Watimpres (Dewan Pertimbangan Presiden).[41]

Dalam sebuah opini yang dikirimkan ke *Republika* (22 Juni 2018), Gus Yahya menjelaskan bahwa ia mendapat undangan dari American Jewish Committee (AJC), organisasi Yahudi internasional terbesar dan mungkin paling tua –berusia sekitar 100 tahun– dan paling berpengaruh.[42] Undangan itu ia penuhi karena merasa bahwa upaya damai adalah salah satu alternatif agar semua pihak tidak sama-sama hancur. Dalam undangan itu, ia diminta untuk memberikan pidato di forum global AJC di Yerusalem.

Sebelum memenuhi undangan itu, Gus Yahya meminta berbagai syarat dan menjajaki kemungkinan berkampanye untuk perdamaian. Seorang teman berjanji akan membantunya untuk kampanye damai ini. Ia juga meminta diperbolehkan mengajak serta Kiai Ahmad Nadlif dari Kajen, Pati, dan Kiai Aunullah Al Habib dari Boyolali. Harapannya, kiai-kiai muda berbakat ini bisa mengambil manfaat di masa depan jika mereka bisa belajar dari perjalanan ini. Satu teman lain yang diajaknya adalah C Holland Taylor, warga AS yang menjadi teman dekat almarhum Gus Dur –juga teman Gus Mus– yang hampir 20 tahun malang-melintang di dunia diplomasi publik internasional dan pernah dipuji *Wall Street Journal* sebagai pembawa panji diplomasi publik masa depan, serta diangkat sebagai duta khusus Gerakan Pemuda Ansor untuk PBB, Amerika, dan Eropa.

---

41 Dalam perbincangan dengan penulis (HS), ketika berkunjung ke rumahnya, Kiai Aqil Sirajd mengetahui kepergian Gus Yahya. Hanya memang biar tidak ribut, kepergiannya lebih diatasnamakan pribadi. “Pokoknya kalau ada manfaat itu untuk umat, kalau tidak, ya sudah itu pribadi saya,” demikian kira-kira penjelasan Gus Yahya.

42 Menurut seorang narasumber kami, AJC sebenarnya bukan organisasi yang moderat dan relatif keras dalam memandang masalah hubungan Israel dengan Palestina. Jadi menurutnya, dari segi ini kampanye Gus Yahya tidak terlalu efektif karena di Israel sendiri, AJC tidak terlalu diterima oleh kalangan Palestina. Menurutnya, sebenarnya Gus Yahya tahu dan sadar akan hal ini. Tetapi ia ingin memanfaatkan secara maksimal dan terutama juga membentuk opini di Indonesia sendiri akan pentingnya jalan perdamaian.

Gus Yahya menuliskan pidatonya atas nama Direktur Urusan Keagamaan pada Bayt Ar-Rahmah, Winston Salem, North Carolina, AS. Dalam pidatonya ia menyatakan bahwa yang diperlukan adalah menemukan nilai transendental yang menjadi aspirasi bersama dari semua agama. Ia mengemukakan dua artikulasi. *Pertama*, tantangan untuk pemimpin dan orang saleh dari semua agama. Di tengah suasana peradaban yang terancam runtuh oleh berbagai konflik, apakah agama punya sesuatu untuk ditawarkan sebagai inspirasi menuju solusi? *Kedua*, seruan kepada dunia, "Mari kita memilih *rahmah*!" Ini adalah nilai inti dalam Islam dan ia yakin nilai itu akan disepakati oleh semua agama. Dengan *rahmah*, pihak-pihak yang bermusuhan akan lebih siap bekerja sama untuk mewujudkan perdamaian yang nyata.

Menurutnya, pidatonya ini menarik perhatian dan memiliki gaung. Buktinya, datang permintaan Presiden Reuven Rivlin untuk bertemu pada Rabu (13/6). Hari berikutnya, Kamis (13/6), Perdana Menteri Benjamin Netanyahu meminta pertemuan. Dalam pertemuan itu, ia memperjelas posisi kedatangannya atas nama pribadi dan harapan tentang perdamaian dan ajakan untuk merengkuh *rahmah*. Dalam pertemuan itu, Gus Yahya juga menyinggung keinginan Benyamin untuk adanya hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel. Tetapi menurut Gus Yahya, hal itu akan sangat tergantung pada masalah Palestina.

Selain itu, Gus Yahya, sesuai rencana, juga menjalankan "kampanye", antara lain, melalui kegiatan bersama The Truman Institute di Hebrew University, The Israel Council on Foreign Relations, dan Mothers for Peace (gerakan gabungan kaum ibu Yahudi dan Palestina untuk menyuarakan perdamaian). Ia juga membuat kerjasama untuk memproduksi video musik (yang diluncurkan dua pekan kemudian) dengan *Koolo 'Lam* (frasa Ibrani yang berarti "Alam Semesta") yang melibatkan 1.000 orang partisipan dari semua agama dan kelompok etnis, bahkan sejumlah orang dari Gaza.

Dengan semua itu, Gus Yahya mengatakan bahwa kedatangannya ke Israel adalah "Untuk Palestina."[43] Mengomentari aksi diplo-

43 Lihat https://www.youtube.com/watch?v=NQQ4MSZ8U28 (diunduh 6 Desember

masi perdamaian Gus Yahya, editorial *Jerusalem Post* (16/6) menulis: "*There are no guarantees that Yahya Staquf will succeed .... But .... someone has to start somewhere.*" (Tidak ada jaminan Yahya Staquf akan berhasil ... tapi ... seseorang harus mulai melakukan sesuatu dari suatu titik).

Sikap Yahya Staquf ini sesungguhnya bukan hal baru. Jauh sebelumnya Gus Dur sudah melakukan hal yang sama. Bisa dikatakan, dalam hal ini ia mengikuti jejak Gus Dur, meski mengambil opsi yang berlainan. Pada Oktober 1994, Gus Dur berkunjung ke Israel untuk menyaksikan perjanjian perdamaian baru antara Israel dan Yordania. Setelah mengunjungi Yerusalem, Gus Dur berkeliling Israel. Sepulang ke tanah air, Gus Dur mengusulkan kepada pemerintah untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Seperti yang dialami Gus Yahya, Gus Dur pun mengalami kecaman dan berbagai tuduhan (Barton 2002: 245). Lebih-lebih Gus Dur lalu diangkat sebagai anggota Simon Perez Foundation, kecaman pun tak pernah habis.

Ketika menjadi presiden Gus Dur mengusulkan perlunya Indonesia membuka hubungan dagang dengan Israel. Usul ini ia kemukakan dalam gelaran Konferensi *Indonesia Nex*t di Jimbaran, Bali, hanya beberapa hari setelah ia dilantik sebagai Presiden RI. Hadir dalam pertemuan itu, Paul Wolfowitz (mantan Dubes RI untuk Indonesia) dan Harold Crouch (ahli militer Indonesia dari ANU Australia). Seperti sebelumnya, gagasan Gus Dur ini ditolak dan ia mendapat banyak kecaman.

Pada tahun 2002, setelah hiruk-pikuk soal wacana itu agak sedikit memudar, Gus Dur mengajukan argumentasinya dalam sebuah wawancara dengan Jennifer Byrne, jurnalis Australia. Kata Gus Dur kurang lebih demikian, "Israel percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Jika pada negara yang tak bertuhan seperti Rusia dan RRC saja kita menjalin hubungan diplomatik, mengapa dengan Israel yang jelas-jelas bertuhan, tidak? ... Orang Islam itu rasional

2018). Termasuk di sini pernyataan Presiden dan PBNU bahwa Gus Yahya pergi atas nama pribadi.

... dan mengakui Israel secara diplomatik, itu rasional." Bagi Gus Dur, agama semestinya tidak menjadi kendala, yang penting adalah rasionalitas untuk memposisikan diri. Maksud dari pernyataan Gus Dur adalah, membuka hubungan diplomatik adalah membuka peta jalan damai bagi Palestina. Hal ini tidak bisa dilakukan jika Indonesia sendiri tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Seorang pengamat muda politik internasional memuji langkah Gus Dur ini. Ia menyamakannya dengan yang dilakukan oleh Erdogan di Turki. Erdogan berasal dari partai sayap kanan yang secara ideologis tidak suka kepada Israel. Meski demikian, ia tidak memutus hubungan diplomatik tersebut, tetapi memanfaatkan secara maksimal untuk mengritik Israel di satu sisi, dan membela Palestina di sisi lain (Umar 2014).[44]

Dengan demikian, terdapat garis yang konsisten antara Gus Dur, Gus Yahya, dan sikap NU secara umum. Sikap ini di masa yang akan datang akan memberikan dampak yang besar kepada kalangan Islam di Indonesia. *Pertama*, untuk membedakan mana Israel dan mana zionisme. *Kedua*, bahwa urusan Israel–Palestina bukan sekadar urusan agama saja. *Ketiga*, untuk memikirkan lebih serius peran Indonesia sebagai penghubung perdamaian dalam konteks konflik Israel–Palestina hanya bisa dilakukan jika Indonesia memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

3. *Inisiatif Perdamaian Global*

Pada 14 November 2017, PBNU melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MOU) dengan The Community of Sant'Egidio, lembaga yang berbasis di Eropa. MOU tersebut ditandatangani oleh Ketua PBNU KH Marsudi Syuhud, sementara dari pihak The Community of Sant'Egidio ditandatangani oleh Marco Impagliazzo.

MoU itu berisi tentang *Interfaith Dialogue, Peace and Reconciliation, Education of Young Generations, Culture of Tolerance and Togetherness, Humanity, and Prevention Drug Abuse*. Dalam hal ini,

44 Bagian ini diambil dari tulisan Ahmad Mardhatillah Umar.

NU akan aktif mendorong perdamaian dan setiap masalah akan diselesaikan secara dialog dan kerjasama. Menurut pengurus NU, MoU ini sebenarnya sudah dilakukan sejak era KH Abdurrahman Wahid.[45] Setahun sebelumnya, NU menggelar *Forum International Summit of Moderate Islamic Leaders* (Isomil) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta. Dalam sesi penutup, pada 10 Mei 2016, dibacakan naskah "Deklarasi Nahdlatul Ulama", yang berisi 16 butir pernyataan yang mendukung pentingnya pandangan Islam moderat dan pertisipasi dalam perdamaian dunia. Pernyataan ini penting karena dikemukakan dalam forum internasional yang dihadiri ulama dunia, antara lain dari Sudan, Libia, Aljazair, India, Rusia, Maroko, Thailand, Inggris, Senegal, Lithuania, Spanyol, Yunani, Korea Selatan, Yordan, Pakistan, Malaysia, Tunisia, Saudi Arabia, dan lain-lain.[46]

Sementara pada Mei 2018, NU menginisiasi pertemuan ulama dari tiga negara yaitu Indonesia, Afghanistan, dan Pakistan. Pertemuan yang dibuka Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan ditutup oleh Wapres Jusuf Kalla ini diselenggarakan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, dan dihadiri oleh 19 ulama Afghanistan, 17 ulama Pakistan, dan 17 ulama Indonesia. Pertemuan ini menghasilkan *Bogor Ulama Declaration for Peace* yang terdiri atas duabelas butir deklarasi. Deklarasi ini dibacakan oleh Qibla Ayaz (Pakistan), Quraish Shihab (Indonesia), dan Ataullah Lodin (Afghanistan). Deklarasi ini jelas menunjukkan komitmen bersama pada perdamaian dunia, di antaranya:

1) Pesan utama Islam bermuara pada prinsip perdamaian, belas kasih, dan kasih sayang. Oleh sebab itu, kami mendukung deklarasi Pakistan-Afghanistan dan berbagai inisiatif perdamaian yang dilakukan oleh para ulama dunia Islam yang mendorong perdamaian, persaudaran Islam, dan penolakan pada kekerasan dan terorisme (butir 2);

45 http://www.nu.or.id/post/read/83254/komitmen-perdamaian-dunia-pbnu-gandeng-lembaga-eropa (diunduh 1 November 2018).

46 http://www.nu.or.id/post/read/68091/isomil-berakhir-dengan-deklarasi-nahdlatul-ulama (diunduh 1 November 2018).

2) Perdamaian adalah perintah Allah dan kaum muslimin memiliki kewajiban untuk mengikuti perintah ini dalam hidupnya, dalam lisan dan jiwanya. Oleh sebab itu, semua konflik dan pertentangan antara kaum muslim harus diselesaikan sesuai dengan kaidah Quran dan Sunnah. Kami para ulama dalam hal ini mengapresiasi dan mendukung tawaran pemerintah Republik Islam Afghanistan, sebagaimana diumumkan oleh Presiden Ashraf Ghani pada saat *Kabul Peace Process* Februari 2018, untuk perdamaian dan rekonsiliasi Afghanistan. Kami juga mengapresiasi negara-negara kawasan, dunia Islam, dan komunitas internasional atas dukungan penuhnya bagi proses perdamaian di Afghanistan (butir 3);
3) Kami mencatat mengenai situasi kondusif di Afghanistan dan menyerukan semua pihak untuk ikut serta dalam pembicaraan langsung perdamaian sesuai dengan pembahasan damai yang termaktub dalam Al Quran, yaitu musyawarah, dan sebagaimana juga diisyaratkan dalam Al Quran Surat As-Syura ayat 38 yaitu bahwa musyawarah adalah ciri-ciri kaum beriman (butir 4).[47]

Daftar inisiatif ini sangat banyak dan panjang. Untuk itu harus dilihat lagi seberapa jauh komitmen NU untuk merealisasikan kegiatan perdamaian tersebut. Setidaknya di tingkat nasional, melalui pemberitaan-pemberitaan, pengaruh ini amat jelas tampak pada pengarusutamaan gagasan dialog dan perdamaian.

H. Simpul Penutup

NU memiliki struktur kepengurusan dari pusat hingga ranting (kecamatan). Di luar itu, ada badan-badan otonom, lembaga-lembaga dengan perhatian tertentu, serta yayasan-yayasan yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan NU. Bisa dikatakan hampir

47 http://numuda.id/2018/05/bogor-declaration-of-peace/ (diunduh 1 November 2018).

semua struktur itu aktif, meski satu sama lain berbeda derajat keaktifannya. Keluasan ini membuat tidak mudah untuk menuliskan peran NU. Perlu ada pemilihan dan pemilahan. Risikonya tentu ada yang terabaikan.

Tulisan ini sengaja memilih unsur-unsur kegiatan NU yang memiliki muatan aspek humanitarian yang kuat dan menonjol. Dengan demikian, aspek kegiatan eksternal lebih banyak menjadi perhatian daripada kegiatan yang bersifat internal. Kedua, perhatian juga diberikan kepada pemikiran atau kegiatan yang berdampak luas, meski bukan arus utama. Ketiga, mungkin bukan kebetulan dalam kasus NU, kegiatan-kegiatan dengan dampak luas pada perdamaian dan kemanusiaan dilakukan oleh aktor-aktor individu dan lembaga-lembaga rumpun keluarga NU yang tidak berada di bawah kepemimpinan NU secara struktural. Bisa dikatakan bahwa kepemimpinan di sini lebih bersifat ide dan kesamaan visi.

Dalam hal ini, kami tidak bisa mengabaikan peran KH Abdurrahman Wahid, Ketua PBNU (1984-1999) dan Presiden RI (1999-2001). Meski telah meninggal hampir satu dekade lalu, pengaruh dan rintisan kegiatan Gus Dur masih terasa hingga sekarang. Sebagai contoh, kunjungan Yahya Cholil Staquf ke Israel pada Juni 2018 yang mengusung misi perdamaian, mungkin tidak akan berani ia lakukan jika dulu Gus Dur tidak pernah melakukannya. Dalam arti ini, dengan segala apresiasi kepada Yahya, sebenarnya ia sekadar meneruskan apa yang pernah dirintis oleh Gus Dur.

Hal yang tidak mudah dipisahkan juga adalah sosok Gus Dur sebagai anggota dan Ketua PBNU serta sebagai Presiden. Dalam hal ini, pendekatan Gus Dur ketika menyelesaikan konflik pemerintah pusat dari dua daerah yang menuntut merdeka dan memisahkan diri dari Indonesia –Aceh dan Papua– dengan menekankan keadilan dan perdamaian masih pantas dikenang dan diteladani hingga kini.

Pola aktor ini ternyata tidak hanya pada Gus Dur, tetapi juga pada banyak figur di dalam NU hingga akhir-akhir ini. Contohnya kembali menyebut Yahya Cholil Staquf dalam kasus di atas atau KH

Imam Aziz di dalam inisiatif-inisiatif rekonsiliasi kultural. Keduanya tercatat sebagai pengurus teras PBNU. Yahya Cholil Staquf adalah Katib Aam Syuriah PBNU dan Iman Aziz adalah salah seorang Ketua PBNU, tetapi keduanya menjalankan aktivitas kemanusiaan dan perdamaian tersebut di luar bingkai NU struktural. Namun, seperti dalam kasus Gus Dur, sulit memisahkan antara mereka sebagai pengurus NU dan sebagai aktivis kemanusiaan. Kenyataannya keduanya tidak saling menentang, dan satu sama lain lebih bersifat komplementer, saling mengisi.

Tulisan ini melihat bagaimana kemanusiaan dan perdamaian di dalam NU berada dalam dua ranah: ranah wacana dan ranah kegiatan. Dalam ranah wacana, NU membuka jalan pada hal-hal yang tidak mungkin dilakukan, baik dari sudut pandang politik maupun keagamaan. NU dalam hal ini memberi inspirasi dan mematahkan kemusykilan-kemusykilan yang dapat menjadi penghalang bagi suatu kemajuan dan gagasan keadilan. Atau dalam hal lain, peran NU mendukung dan mengabsahkan suatu praktik kemajuan. Contoh mengenai hal ini di antaranya adalah diterimanya perempuan menjadi pemimpin politik, meluasnya pengarusutamaan gender di masyarakat, ide Islam Nusantara, dan lain-lain. Di lain pihak, dalam ranah kegiatan, dikemukakan kerja-kerja dan inisiatif perdamaian seperti kegiatan rekonsiliasi dengan kalangan mantan pendukung atau simpatisan PKI, pengamanan rumah ibadah oleh Banser, keterlibatan dalam bantuan bencana, dan lain-lain.

Melalui penghamparan wacana dan aktivisme ini, diharapkan tulisan ini bisa memberikan gambaran bagaimana kegiatan berbangsa-bernegara, kemanusiaan dan perdamaian yang dilakukan di dalam dan oleh NU. Meski sekali lagi penting dicatat, karena keterbatasan ruang dan kesempatan, tulisan ini tidak bisa menyajikan secara luas dan lengkap keseluruhan potret wacana dan kegiatan NU tersebut. (*)

BAB

4 Penutup

Narasi Damai dari Nusantara untuk Dunia

Scott Gilmore, *senior fellow* di the Munk School of Global Affairs, membuat tulisan menarik di *Boston Globe*, 20 Oktober 2016, berjudul: "*Why is the Islamic world still torn by war*?" Dalam tulisannya mantan diplomat senior Kanada tersebut mengungkapkan bahwa di tengah menguatnya tren perdamaian di aras global, termasuk di dunia Barat yang sebelumnya sarat dengan konflik dan peperangan, ia menemukan jejak yang sebaliknya di dunia Islam: tren maraknya konflik dan kekerasan. Dari enam perang sipil yang sedang terjadi di dunia, lima terjadi di dunia Islam – satu yang lain terjadi di Kolombia, sebuah negara di Amerika Latin yang didera konflik berkepanjangan gara-gara pertarungan antar kartel narkoba. Juga terdapat empat konflik sektarian di berbagai negara yang melibatkan kelompok Islam, selain lima konflik bercorak terorisme transnasional yang melibatkan kelompok militan Islam. Gilmore merujuk pada laporan yang dibuat oleh the Council on Foreign Relations' Global Conflict Tracker[1] yang menyebutkan,

1 Update laporan konflik global yang dikeluarkan oleh the Council of Foreign Relations bisa dilihat di https://www.cfr.org/interactives/global-conflict-tracker#!/global-conflict-tracker.

dari 28 konflik global yang saat ini terjadi, 22 di antaranya melibatkan faksi atau negara Islam.

Nah, yang menarik, dalam esainya yang membahas fenomena "masih maraknya konflik dan peperangan di negara-negara Islam di tengah datangnya jaman baru penuh perdamaian di aras global", ia menyebut Indonesia. Negara di garis katulistiwa tersebut disebutnya bersama dengan negeri padat penduduk di Asia Tengah, Bangladesh, sebagai dua contoh perkecualian dari negara-negara Islam yang disebutnya sebagai "*healthy democracies*" alias negara demokrasi yang sehat. Mengikuti dalil bahwa "negara demokratis jarang terlibat dalam peperangan", Gilmore mendapatkan pembuktian karena baik Indonesia maupun Bangladesh saat ini dalam kondisi relatif damai tanpa kecamuk perang.

Tulisan Gilmore tersebut bagai mendapatkan gema yang kuat pada saat Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence mengunjungi Indonesia pada April 2017. Pada saat melakukan kunjungan ke Masjid Istiqlal, masjid terbesar di Asia Tenggara, pendamping Presiden Donald Trump tersebut memuji Islam Indonesia yang disebutnya sebagai: "*Indonesia's brand of moderate Islam an 'inspiration to the world'*" (*Asian Correspondent*, 21 April 2017). "*As the largest majority-Muslim country, Indonesia's tradition of moderate Islam, frankly, is an inspiration to the world*," ujar Pence.

Tilikan analisis Gilmore dan pujian tinggi Pence mengenai Islam Indonesia yang menjadi inspirasi bagi dunia ihwal penerapan Islam yang damai, demokratis dan berkeadaban menemukan narasi yang tebal dalam Bab 2 dan Bab 3 dari buku ini. Dalam tulisan yang menguraikan dan mengulas peran dan kontribusi Muhammadiyah dan NU dalam pembangunan demokrasi dan perdamaian di Nusantara, bahkan juga di aras regional dan internasional, banyak narasi indah yang disajikan dengan gamblang dan menarik. Misalnya, bagaimana kedua organisasi massa Islam terbesar tersebut beserta tokoh-tokoh kuncinya ikut mengawal proses transisi demokrasi melalui gerakan Reformasi yang menuntut turunnya diktator Soeharto dari pucuk kekuasaan setelah

32 tahun berkuasa. Juga bagaimana kedua ormas besar tersebut berperan membangun basis bagi 'budaya damai dan budaya politik demokratis' di negara Indonesia yang membuka lembaran baru demokrasi dalam perjalanan sejarahnya melalui program dan amal usaha di bidang pendidikan, dakwah, sosial dan ekonomi.

Bagian berikut dari Bab Penutup ini akan merangkum secara ringkas narasi panjang di Bab 2 dan Bab 3 ihwal peran dan kontribusi Muhammadiyah dan NU pada fase transisi demokrasi, konsolidasi demokrasi, serta upaya-upaya bina damai baik di aras nasional, regional maupun internasional. Tulisan akan dibuat dalam urutan, pertama, bagaimana Muhammadiyah dan NU menyemai dan menyuburkan demokrasi di Indonesia, dan kedua, bagaimana keduanya menyemai benih dan spirit perdamaian di Nusantara, baik di lokal, nasional, regional dan internasional.

Tulisan akan dilanjutkan dengan diskusi mengenai makna dan relevansi Islam yang damai, demokratis dan berkeadaban yang dihadirkan oleh Muhammadiyah dan NU dalam konteks krisis dunia Islam dan peradaban global. Selain menyajikan harapan besar terhadap Islam Indonesia yang hadir sebagai inspirasi dengan di tengah kerontang peradaban dunia, tulisan ini diakhiri dengan catatan dan refleksi kritis.

A. Dua Menyemai dan Merawat Demokrasi

Pada fase awal transisi demokrasi, Muhammadiyah dan NU menjadi kekuatan penting pendukung dan penyokong gerakan Reformasi seperti yang tersimbolkan dalam aliansi empat tokoh populer yang acap disebut sebagai "Tokoh Ciganjur": KH Abdurrahman Wahid, Prof. Dr. Amien Rais, Megawati Soekarnoputri, dan Sri Sultan Hamengkuwono X. Empat tokoh tersebut bisa disebut sebagai representasi 4 segmen utama dalam peta bumi politik Indonesia: Abdurrahman Wahid mewakili sayap 'Islam tradisional'; Amien Rais mewakili sayap 'Islam modernis'; Megawati Soekarnoputri

mewakili sayap politik kaum nasionalis, dan Sri Sultan HB X merupakan representasi simbolik otoritas politik dan budaya Jawa yang merupakan kelompok etnis terbesar di Indonesia.

Kombinasi antara KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang mantan pimpinan tertinggi NU dengan Prof. Amien Rais, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah merupakan pilar kokoh bagi gerakan pro-demokratisasi di Indonesia. Amien Rais popular dengan panggilan sebagai "Tokoh Reformasi" terutama karena keberaniannya melakukan kritik terbuka terhadap rezim 'Orde Baru' serta menyerukan Soeharto untuk turun dari kekuasaannya sejak awal 1990-an pada saat Soeharto masih berada di pucuk kekuasaan yang ganas. Sementara Gus Dur dengan cerdas dan lincah menggalang dukungan lintas etnis dan agama melalui pendirian Forum Demokrasi (Fordem) yang secara konsisten mengkritik kekuasaan otoriter Orde Baru yang mempraktikkan apa yang disebut Gus Dur sebagai "demokrasi seolah-olah".

Seperti telah diketengahkan pada Bab 1 dan sesekali muncul di Bab 2 dan Bab 3, relasi Muhammadiyah dan NU selalu berselang-seling dari kontestasi, ketegangan, kooperasi, hingga kolaborasi. Sejumlah ketegangan dan kontestasi antara kedua organisasi massa ini acap kali terjadi. Di periode awal berdirinya dua ormas ini, ketegangan-ketegangan lahir karena perbedaan orientasi keagamaan yang diametral, Muhammadiyah mengusung modernisme dan purifikasi Islam sementara kaum *Nahdliyin* teguh memegang dan menghidupi tradisi dan Islam yang cenderung sinkretik dengan budaya lokal. Di era kontemporer, ketegangan antara Muhammadiyah dan NU nampaknya lebih didorong oleh kontestasi kekuasaan akibat perbedaan jalan politik yang ditempuh oleh tokoh-tokoh kedua ormas ini. Misalkan, di era Reformasi, hubungan Amien Rais dan Gus Dur, sebagai figur terbesar dari Muhammadiyah dan NU, mengalami 'pasang surut' dan 'panas dingin'. Keduanya pernah berseberangan ketika Amien Rais menjadi Ketua Dewan Pembina ICMI, sedangkan Gus Dur menolaknya dan mendirikan Forum Demokrasi (Fordem). Namun,

keduanya kembali ‘reuni’ ketika menggalang koalisi ‘Poros Tengah’ yang mengantarkan Gus Dur menjadi presiden. Puncaknya, ketegangan kedua mencapai klimaks saat Amien Rais sebagai Ketua MPR memimpin pelengseran Gus Dur pada tahun 2001. Konflik antar elit ini turut memprovokasi ketegangan-ketegangan sosisal di kalangan *grassroot*.

Kerja sama antara Muhammadiyah dan NU tidak hanya terjadi di level elit, namun juga di kalangan *grassroots*. Di awal Reformasi, dengan misi memperkuat peran masyarakat sipil dalam mengontrol pemilihan umum (pemilu) agar berlangsung jujur, adil, dan demokratis, Muhammadiyah dan NU mengorganisir diri dalam Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), suatu konsorsium organisasi-organisasi masyarakat sipil, LSM, kelompok agama, dan organisasi pemuda yang didirikan di Yogyakarta pada tahun 1999 dengan tujuan untuk melakukan pendidikan pemilih dan penguatan kapasitas politik masyarakat sipi. Kegiatan JPPR meliputi pemantauan, penelitian, survei, dan pendidikan pemilih. Program-program pendidikan pemilih JPPR sering kali melibatkan ratusan ribu relawan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa organ masyarakat sipil yang tergabung dalam JPPR adalah: Ahimsa, Fahmina, IMM, IPM, ISIS, Lakpesdam NU, Labda Yogyakarta, LAPAR Makasar, LK3 Banjarmasin, LKK NU, LKPMP Makasar, LPBTN, LPP Aisyiyah, MADIA, Majelis DIKTI Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Percik Salatiga, PPSDM UIN, PSAP, Pemuda Muhammadiyah, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dan Kantor Berita Radio 68H

Kendati memilihi ranah yang berbeda-beda, Muhammadiyah dan NU –melalui berbagai sayap kelembagaan yang berafiliasi langsung maupun tidak dengannya– juga menjalin kerjasama untuk meng-*counter* gerakan Islam transnasional, seperti salafi-wahabi, HTI, Ikhwanul Muslimin (IM) dan lainnya. Salah satunya adalah penerbitan buku *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Transnasional di Indonesia* yang diinisiasi The Wahid Institute, Maarif Institute, dan Gerakan Bhineka Tunggal Ika – yang diedit oleh Gus Dur,

sedangkan prolog oleh Buya Syafii Maarif dan epilog oleh Gus Mus (KH Mustofa Bisri), di samping itu terlibat juga tokoh-tokoh muda dari Muhammadiyah dan NU seperti Haedar Nashir, Abdul Munir Mulkhan, dan Yahya Cholil Staquf. Buku tersebut memaparkan bagaimana gerakan-gerakan Islam transnasional itu menerobos dan menyusup ke dalam Muhammadiyah dan NU dengan berbagai taktik dan strategi. Upaya untuk membendung arus gerakan itu, Muhammadiyah dan NU mengeluarkan suatu putusan atau fatwa: pelarangan penggunaan amal usaha dan fasilitas Muhammadiyah oleh partai politik terutama oleh PKS dan penolakan NU atas gerakan Islam transnasional yang dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia.

Membandingkan proses transisi demokrasi dan dukungan kelompok Islam di Indonesia dengan di Mesir, Tunisia maupun di Iran belakangan ini, Kunkler dan Stepan (2013) menemukan perbedaan yang kontras. Menurut Kunkler, Muhammadiyah dan NU telah membangun konsensus untuk mendukung demokrasi sebelum transisi demokrasi dimulai di Indonesia. Sedangkan di Mesir, kekuatan utama gerakan demokratisasi Ikhwanul Muslimin (IM) belum menunjukkan komitmen yang sama hingga menjelang roda reformasi digelindingkan. Sementara Stepan menyatakan bahwa meskipun partai Islam moderat An-Nahdha menunjukkan dukungan kuat terhadap demokrasi sejak awal 1990-an, namun tokoh-tokohnya yang bergerak di bawah tanah maupun menjalani pengasingan tidak berkesempatan untuk membangun jejaring organisasional dan program pendidikan demokratis secara rutin. Akibatnya kepercayaan dan dukungan meluas serta praktik demokratis dari masyarakat sipil belum sempat terbangun seperti yang terjadi di Indonesia. Hal yang sama juga ditemukan oleh Kunkler terjadi di Iran.

Demikianlah, dibandingkan dengan tiga negara Islam yang juga sempat menjalani transisi demokrasi tersebut, pengalaman Indonesia jauh lebih cemerlang sehingga Liddle dan Mujani (2013) berani menyatakan bahwa fase transisi demokrasi di In-

donesia berhasil ditamatkan pada tahun 2004 dengan bukti sebagai berikut: pelaksanaan pemilu 1999 secara bebas dan jujur; terpilihnya parlemen baru yang melakukan amandemen terhadap UUD 1945 secara demokratis selama 4 putaran (1999-2001); dan akhirnya penghapusan perwakilan militer di parlemen serta penyelenggaraan pemilu secara demokratis, termasuk pemilihan presiden secara langsung pada tahun 2004.

B. Dua Menyemai dan Merawat Damai

Keberhasilan mengakhiri fase transisi demokrasi berlanjut pada fase konsolidasi demokrasi. Muhammadiyah dan NU juga memainkan peran penting dalam membangun basis bagi 'budaya politik damai dan demokratis' yang dilakukan baik pada aras elit, organisatoris, maupun massa. Upaya tersebut dilakukan baik pada dimensi sikap maupun perilaku yang mendukung dan memperkokoh bangunan demokrasi yang dirintis oleh gerakan Reformasi, melalui berbagai program dan amal usaha yang dilakukannya di berbagai bidang, termasuk pendidikan, dakwah, sosial dan ekonomi. Dari sisi perdamaian, apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan NU tersebut bisa dilihat sebagai ikhtiar membangun 'perdamaian positif' (*positive peace*), yang berarti menghilangkan aneka bentuk kekerasan struktural dan kultural yang ada di masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial: "*true peace is the presence of justice*"

Meski keduanya sama-sama menjalankan peran pembangunan 'perdamaian positif', namun ada karakteristik berbeda dari kiprah keduanya. Muhammadiyah, dengan infrastruktur organisasi dan amal usahanya di bidang pendidikan, kesehatan, dan filantropi nampaknya lebih kuat bergerak dalam pembangunan 'perdamaian positif' di ranah praksis nyata pembangunan perdamaian positif ini telah diuraikan pada Bab 2, misalnya, bagaimana institusi pendidikan Muhammadiyah di Indonesia bagian Timur berhasil merangkul dan diterima luas oleh kalangan non-Muslim. Bahkan di Kupang dan Papua mayoritas perguruan Muhammadiyah dido-

minasi kalangan non-Muslim baik siswa/mahasiswa maupun staf pengajar dan tenaga kependidikannya. Akibatnya lahir fenomena 'Kristen-Muhammadiyah' yang lahir akibat konvergensi dan mencairnya sekat-sekat antara Muslim dan non-Muslim di lembaga pendidikan Muhammadiyah.

Belum lagi peran-peran filantropis yang dilakukan oleh 'trisula baru' Muhammadiyah, yakni MDMC, LAZISMU, dan MPM yang radius kontribusinya bagi terciptanya keadilan sosial dan pemerataan pembangunan begitu luas. Di bidang tata kelola sumber daya alam, upaya Muhammadiyah menghapuskan '*structural violence*' juga nampak jelas dalam 'Jihad Konstitusi' yang digaungkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah di era Din Syamsuddin. Muhammadiyah melalui 'Jihad Konstitusi'-nya berhasil membubarkan BP Migas setelah permohononan *Judicial Review*nya atas UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas dikabulkan. BP Migas dinilai oleh Muhammadiyah telah melenceng dari spirit UUD 1945. 'Jihad Konstitusi' Muhammadiyah juga sukses terhadap UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan UU Nomor Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

Catatan-catatan kiprah dan kontribusi Muhammadiyah dalam pendidikan, kesehatan, filantropi, dan upaya jihad konstitusi sebagai koreksi struktural tata kelola pemerintahan menunjukkan bahwa Muhammadiyah sangat *concern* dengan upaya menghadirkan keadilan sosial. Oleh karenanya, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Muhammadiyah berperan dan berkontribusi besar dalam melakukan pembangunan perdamaian positif.

Di sisi lain, NU juga banyak memainkan peran dan kontribusi besar dalam mendorong terciptanya 'perdamaian positif' dengan pendekatan budaya. Kiprah dan langkah NU tampak menonjol dalam ikhtiar pencegahan (potensi) kekerasan, melawan ekstremisme keagamaan, rekonsiliasi konflik, hingga pengarusutamaan toleransi dan perdamaian. Salah satu contoh fenomenal yang diungkapkan pada Bab 3 adalah peranan gerakan akar rumput seperti Syarikat dalam melakukan rekonsiliasi kultural antara korban dan pelaku

'tragedi 65'. Di saat upaya rekonsiliasi nasional di aras negara menemui jalan buntu, ikhtiar rekonsiliasi 'dari bawah' terbukti berhasil menembus kebuntuan itu. Peran aktif dan kontribusi positif NU telah membantu pemulihan trauma dan merajut kembali ikatan sosial yang telah terkoyak sangat dalam di masa lalu. NU juga menonjol dalam membendung dan menangkal arus ekstremisme keagamaan di Indonesia, antara lain melalui promosi gagasan 'Islam Nusantara' dan kepiawaian kader-kader muda NU dalam memenangkan pertarungan udara di dunia maya untuk membendung arus intoleransi, ekstremisme, dan konservatisme keagamaan.

Di kancah regional dan internasional, distingsi kedua organisasi Islam ini juga terlihat jelas dan saling melengkapi. Muhammadiyah terlihat fokus pada program filantropi dan bantuan kemanusiaan yang diwujudkan dalam pendirian rumah sakit dan sekolah di Rakhine State, Myanmar, dan Palestina, penyediaan ratusan beasiswa penuh untuk komunitas Mindanao di Filipina dan Pattani di Thailand Selatan, dan pemberdayaan ekonomi serta pendidikan di kalangan Bangsa Moro Filipina. Sementara NU memiliki *concern* tinggi dalam ikhtiar mencari resolusi konflik serta upaya bina damai di sejumlah zona konflik internasional seperti di Afghanistan, dengan mengirimkan delegasi-delegasi ulama Indonesia kesana, maupun sebaliknya, mengundang pihak yang bertikai untuk bertemu dan mencari solusi damai di bumi Nusantara. NU juga mencoba mengambil peran meretas jalan damai dalam konflik Palestina-Israel dengan misi perdamaian yang dilakukan oleh Gus Dur, kemudian dilanjutkan oleh Yahya Cholil Staquf.

Ringkasnya, Muhammadiyah lebih *moncer* dalam ikhtiar menghadirkan layanan kemanusiaan dan keadilan sosial sebagai prakondisi bagi terciptanya '*positive peace*'. Sedangkan NU nampak menonjol dalam *second track diplomacy* untuk meretas jalan damai dan resolusi konflik. Meski berbeda, keduanya bersifat komplementer, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Hal itu juga terlihat dalam perbedaan narasi dan diskursus yang belakangan di-

kembangkan oleh keduanya, Muhammadiyah melalui 'Islam Berkemajuan' dan NU melalui "Islam Nusantara" yang bersifat komplementer ketimbang antagonistis.

Peran aktif dan konstruktif di panggung internasional yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan NU tersebut tentu merupakan inspirasi segar dan cemerlang di tengah kecamuk konflik kekerasan dan peperangan berkepanjangan yang melibatkan kelompok dan negara Islam, seperti yang terjadi Timur Tengah dan Asia Tengah. Dengan kata lain, di tengah lemah dan redupnya elan vital peradaban Islam di Timur Tengah dan Asia Tengah, Islam Indonesia telah menawarkan diri sebagai suatu model dari keberagamaan Islam yang damai, demokratis dan berkeadaban bagi dunia.

C. Narasi Damai di Padang Sahara

Dalam buku berjudul *The World in Conflict: Understanding the World's Troublespots* yang diterbitkan oleh *The Economist*, John Andrews (2015: 18) menggambarkan dunia Arab dan Timur Tengah dengan cara yang menarik: "*stretching from the Arabian peninsula in the east to the Atlantic Ocean in the west, with a population of over 400 milions ... almost all are tormented by political and social tension that involve the role of Islam – the religion which, along with the Arabic language ... gives the Arab world a coherence surmounting the national boundaries drawn by the old colonial powers*". Andrews menggambarkan konflik dan peperangan berkepanjangan yang terjadi di dunia Arab, mulai dari konflik klasik antara Sunni dan Syiah, konflik perbatasan antarnegara termasuk antara Israel-Palestina yang menjadi sumbu ketegangan lintas benua, hingga kekerasan terorisme yang dipergelarkan oleh gerakan jihadis yang berafiliasi kepada Al-Qaida hingga ISIS.

Sempat dihela oleh harapan pembaharuan yang dihadirkan oleh gerakan demokratisasi melalui *the Arab Spring* yang memimpikan kebebasan dan perbaikan kesejahteraan, yang diawali dengan ge-

rakan demokratisasi di Tunisia pada Desember 2010, namun berujung muram. Gerakan reformasi di Mesir yang berhasil menjatuhkan kekuasaan diktatorial Husni Mubarak dan menggelar pemilu demokratis yang dimenangkan oleh Ikhwanul Muslimin pada tahun 2012 akhirnya dijungkalkan oleh kudeta militer pada tahun 2013. Bahkan, sejumlah negara yang sempat menggelorakan reformasi politik seperti Yaman dan Somalia, juga Irak dan Libya, akhirnya berujung pada '*fratricidal chaos*' karena ketidakmampuan kelembagaan sosial dan politik untuk menghadapi dan mengelola tantangan akbar sosial ekonomi politik.

Sementara konflik kekerasan berdarah berkepanjangan antara Israel dan Palestina yang menjadi *epicentrum* konflik dan ketegangan global belum juga menemukan titik temu dan bahkan mengalami eskalasi sejak Mei 2018, situasi perdamaian diperburuk dengan terjadinya insiden pembunuhan terhadap jurnalis Jamal Kashogi di Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki pada 2 Oktober 2018. Drama pembunuhan di kantor konsul itu sendiri menunjukkan betapa buruknya perlindungan HAM di kalangan negara-negara Islam, termasuk Arab Saudi, negara yang menjadi penguasa di dua kota suci, Mekah dan Madinah.

Di tengah kecamuk persoalan konflik, peperangan serta buruknya penghormatan terhadap HAM seperti itulah kehadiran Islam yang damai, demokratis dan berkeadaban di Indonesia tampak seperti oase di padang sahara. Ia menjadi mata air inspirasi bagi kemungkinan Islam yang sesuai dengan masa depan peradaban yang menghomati kemanusiaan dan keadilan sosial. Dalam konteks inilah kehadiran Muhammadiyah dan NU sebagai organisasi masyarakat sipil keislaman terbesar di dunia layak mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari dunia internasional; sebagai wajah Islam yang ramah dan berkeadaban, bukan wajah Islam yang marah dan biadab.

Tentu itu tanpa bermaksud mengatakan bahwa Islam Indonesia sudah paripurna tanpa cela. Tentu saja sangat disadari bahwa Islam

di Indonesia mengidap sejumlah persoalan dan tantangan serius yang perlu mendapatkan perhatian dan upaya perbaikan. Seperti diperingatkan oleh Menchik (2018) bahwa baik Muhammadiyah dan NU bisa mendukung aktor dan nilai non-demokratis dalam konteks sosial politik dan historis tertentu. Namun demikian sejumlah capaian dan prestasi fundamental yang berhasil dibangun tetap perlu mendapatkan apresiasi dan pengakuan serta penghargaan di panggung yang lebih luas di aras global.

Dengan semua keterbatasan dan kelemahannya, buku ini hendak mempersempahkan sekelumit kisah sederhana: Narasi Damai dari Nusantara untuk Dunia!

D. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan berbagai temuan data hasil riset tersebut, maka bisa dirumuskan sejumlah rekomendasi yang mencakup aneka isu sebagai berikut.

1. *Menyangkut Hubungan Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama*

Perlunya membangun hubungan yang lebih kuat, dekat dan kolaboratif antara kedua ormas Islam terbesar tersebut. Meskipun hubungan antara keduanya secara umum sudah jauh lebih baik dan kurang bercorak konfliktual seperti pada masa awal berdirinya kedua lembaga tersebut maupun pada fase kontestasi elektoral pada tahun 1950-an, namun relasi yang mengandung ketegangan terkadang masih terjadi khususnya di seputar fase pertarungan elektoral, baik di tingkat lokal maupun nasional. Keterkaitan dan kadang keterlibatan sejumlah tokoh Muhammadiyah dan NU dengan partai politik yang ikut berkontestasi sering ikut memicu relasi yang kurang harmonis ketika upaya mobilisasi politik tersebut menggunakan sentimen keagamaan maupun jejaring ormas keagamaan. Kedi-

siplinan pimpinan kedua ormas keagamaan besar tersebut untuk 'menjaga jarak' dan menahan diri dari keterlibatan ke dalam percaturan politik menjadi kunci dari keberhasilan Muhammadiyah dan NU untuk menjadi 'jangkar etika' di panggung sosial ekonomi politik nasional.

2. *Menyangkut Hubungan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dengan Organisasi Islam Lainnya*

Setelah berhasil berperan sebagai 'jangkar etika' dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Muhammadiyah dan NU juga diharapkan mampu memperluas kekuatan dan dukungan di antara ormas Islam lainnya yang sama-sama memiliki komitmen kuat kepada Islam yang damai, demokratis dan berkeadaban di Indonesia. Jangan sampai poros "Muhammadiyah-NU" berkesan eksklusif dan menutup diri dari pihak-pihak lain sehingga justru mengundang antipati dan bahkan permusuhan dari pihak lain yang sesungguhnya memiliki posisi dan perspektif keagamaan yang serupa dalam kaitannya dengan relasi agama dengan isu perdamaian, demokrasi dan keberadaban.

3. *Menyangkut Hubungan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dengan Umat non-Muslim*

Tentu saja Muhammadiyah dan NU tidak mewakili seluruh umat Islam Indonesia yang sangat beragam. Sebagian dari umat Islam itu terkadang masih menampilkan diri sebagai umat yang tidak percaya diri, merasa minder di satu pihak dan selalu merasa terancam di sisi yang lain. Dalam situasi semacam itu, Muhammadiyah dan NU diharapkan selalu bersifat dan bertindak dewasa, mengayomi, dan melindungi terhadap hak kelompok umat beragama lain. Muhammadiyah dan NU diharapkan bukan menjadi dinding yang menjadi pembatas dan penghalang, namun sebaliknya menjadi jembatan penyambung

dalam hubungan dengan komunitas beragama lain, baik dalam konteks berbangsa dan bernegara, maupun dalam konteks bermasyarakat dan beragama.

4. *Menyangkut Hubungan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dengan Pemerintah*

Berbeda dengan corak relasi konfliktual dan antagonistik seperti di masa rezim otoriter 'Orde Baru', hubungan antara kedua ormas besar Islam tersebut dengan pemerintah di era pasca Reformasi secara umum tergolong baik. Namun demikian, relasi tersebut hingga tingkat tertentu dipengaruhi oleh keterkaitan dan keterlibatan sejumlah pimpinan Muhammadiyah dan NU dengan partai politik, baik sebagai bagian dari koalisi pemerintah maupun koalisi oposisi. Karena itu perlu dibangun relasi yang kokoh saling menghargai dan saling mendukung dari kedua belah pihak, baik dari pihak Muhammadiyah dan NU maupun dari sisi pemerintah, yang tidak terhalang dan tidak terdistorsi oleh proses dan mekanisme politik elektoral. Dengan kata lain, perlu dibangun relasi harmonis dan mutualistis yang didasarkan pada kepentingan kebangsaan, kemasyarakatan dan kenegaraan, bukan atas dasar proses dan kepentingan politik elektoral berjangka pendek. Misalnya, pemerintah perlu bersifat pro-aktif dalam mendukung dan mempromosikan corak ke-Islam-an yang damai, demokratis dan berkeadaban yang diusung oleh Muhammadiyah, NU dan ormas-ormas lain di Indonesia.

5. *Menyangkut Hubungan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dengan Organisasi Islam di Kawasan Regional dan Internasional*

Di tengah wajah Islam di panggung internasional yang kuat diwarnai oleh citra konflik, kekerasan dan terorisme, Muhammadiyah dan NU perlu lebih banyak terlibat dan bertindak

pro-aktif dalam isu-isu keagamaan dan perdamaian di tingkat regional dan internasional. Peran dan kontribusi kedua ormas besar Islam Indonesia tersebut dalam bidang keagamaan, demokrasi dan perdamaian perlu lebih diperdalam dan diperluas cakupan pengaruhnya dengan bersinergi dengan organisasi Islam dan lembaga internasional lainnya. Selain itu, upaya-upaya baik tersebut juga perlu didokumentasikan dengan baik dan didiseminasikan ke dunia internasional, baik melalui forum-forum global *civil society*, organisasi keagamaan internasional (seperti Organisasi Konferensi Internasional-OKI, dan lain-lain), maupun melalui forum-forum multi-lateral yang melibatkan pemerintah Indonesia. (*)

Daftar Narasumber

I. NARASI UMUM

1. **Robert W. Hefner**
   Director Institute on Culture, Religion, and World Affairs (CURA), Boston University, Amerika Serikat, 25 Agustus 2018.
2. **Ihsan Ali-Fauzi**
   Direktur Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina, Jakarta, 29 November 2018.
3. **Ichsan Malik**
   Fasilitator Rekonsiliasi Konflik dan Pengajar Universitas Pertahanan Nasional, Bogor 19 November 2018.

II. NARASI MUHAMMADIYAH

A. Narasumber Wawancara:

1. **Amir Nashiruddin**
   Mantan anggota Sekretaris Nasional JPPR Pusat
2. **Bahtiar Kurniawan**
   Sekretaris MPM
3. **Budi Setiawan**
   Ketua MDMC
4. **Diah Puspitarini**
   PP Nasyiatul Aisyiyah
5. **Enny Indriarti**
   Guru SD Kristen Banjarsari Solo
6. **Habib Chirzin**
   Tokoh Perdamaian
7. **Hilman Latief**
   Ketua LAZISMU
8. **M. Ali Yafi**
   Peneliti PSBPS UMS

9. **Mohammad Shofan**
   Direktur Riset Maarif Institute
10. **Muhammad Najib**
    Direktur CDCC
11. **Muhammad Wildan**
    Guru SMP Muhammadiyah Simpon, Solo
12. **Muhjidin Mawardi**
    Ketua Majelis Lingkungan Hidup
    PP Muhammadiyah
    (Dosen Fakultas Teknik UGM)
13. **Najih Prasetyo**
    Ketua DPP IMM
14. **Ninin**
    Sekolah Cerdas, Solo
15. **Paksi Hidayatullah**
    Peneliti PSBPS UMS
16. **Syafiq Mughni**
    Utusan Presiden untuk Dialog dan
    Kerjasama Antar Agama dan Peradaban
17. **Yayah Khisbiyah**
    PPSBS UMS
    (Dosen Fakultas Psikologi UMS)
18. **Yuli Muthmainnah**
    PP Nasyiatul Aisyiyah

B. Narasumber FGD I (3 November 2018)

1. **Amika Wardhana**
   Majlis MPK PP Muhammadiyah
   (Dosen UNY)
2. **David Effendi**
   Pegiat Rumah Baca Komunitas
   (Dosen UMY)
3. **Muarif**
   Sejarawan Suara Muhammadiyah
4. **Rahmawati Husein**
   Wakil Ketua MDMC
5. **Zuly Qodir**
   BPIP Pancasila
   Dosen UMY

C. Narasumber FGD II (Rabu 5 Desember 2018)

1. **Ahmad Norma Permata**
   Ketua LPCR PP Muhammadiyah
2. **Surwandono**
   Delegasi PP Muhammadiyah di Mindanao
   Dosen UMY

III. NARASI NAHDLATUL ULAMA

1. **Abdul Hakim Jaely**
   Direktur TV9 Surabaya
2. **Abdur Rouf, M. Hum**
   Sekretaris LAZISNU PBNU
3. **Ahmad Mukafi Niam**
   Pemimpin Redaksi NU Online
4. **Ainul Yaqin, MA**
   Wakil Ketua Lakpesdam, DIY
5. **Dedik Priyanto**
   Redaktur Islami.co
6. **Dr. Achmad Munjid**
   Intelektual NU
   (Dosen FIB UGM)
7. **Dr. Ahmad Sueady, MA**
   Wakil Ketua Lakpesdam
   Direktur Abdurrahman Wahid Center UI
8. **Dr. Faturrahman**
   Intelektual NU
9. **Dr. H. Rumadi Ahmad, MA**
   Ketua Lakpesdam
10. **Ghozi Ahmad**
    LKK NU DIY
11. **Hifdzil Alim SH, MA**
    Ketua LBH NU, Yogyakarta
12. **KH Husein Muhammad**
    Pesantren Darut Tauhid, Cirebon
    Fahmina Institut
13. **KH M. Imam Aziz**
    Wakil Ketua PBNU

14. **M. Ali Yusuf**
    Ketua LPBI PBNU
15. **Mamba'ul Bahri S.THi.**
    LPBI
16. **Mohamad Muslich**
    Koordinator Komite II, FKSDA-NU
17. **Mustaghfiroh Rahayu MA**
    Fatayat DIY
18. **Nur Kholik Ridwan**
    Cendekiawan muda NU
19. **Nurdin**
    Staf IT NU Online
20. **Tri Guntur Narwaya**
    Pusham UII

Daftar Pustaka

• Buku dan Dokumen

Abdullah, Amin. 2015. "Peluang dan Tantangan Internasionalisasi Pemikiran Islam Indonesia". *SALAM*, Vol 18:2.

Affiah, Neng Dara. 2018. "Jalan Panjang Isu-Isu Perempuan di Lingkungan NU". dalam Iip D. Yahya (ed). *NU Penjaga NKRI*. Kanisius: Yogyakarta.

_________. 2016. *Potret Perempuan Muslim Progresif Indonesia*. Jakarta: Obor.

Al-Amin, Bahrul Haq. 2009. "Kebebasan Beragama di Indonesia dalam Perspektif M. Dawam Rahardjo". *Skripsi*. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Alfaqi, Mifdal Zusron. Muhammad Mujtaba Habibi, Desinta Dwi Rapita. 2017. "Peran Pemuda Dalam Upaya Pencegahan Korupsi dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah". *Jurnal Ketahanan Nasional*. Vol 23 No 3. Hal 320-337.

Alfian. 1989. *Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Aly, Abdullah, dkk. 2011. *Pendidikan Perdamaian Berbasis Islam*. Surakarta: Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Amalee, Irfan, dkk. 2014. 24 *Minggu Menjadi Teladan Bangsa, Buku Agenda Pelajar Muslim*. Jakarta: Maarif Institute.

Amar, Faozan. 2017. "Implementasi Filantropi Islam di Indonesia". *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*. 1 (1), 1-14.

Amirrachman, Alpha. 2015. "Dialog antar Agama dan Aliansi Strategis antar Peradaban: Sebuah Pencapaian Soft Diplomacy" dalam Alpha Amirrachman, Najib Burhani, dan Azaki Khoirudin. *Kiprah Pencerahan: Karya Unggulan Muhammadiyah 2005-2015*. Jakarta: Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations.

_________, Najib Burhani, dan Azaki Khoirudin. 2015. *Kiprah Pencerahan: Karya Unggulan Muhammadiyah (2005-2015)*. Jakarta: Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations.

_________ dkk (eds.). 2015. *Islam Berkemajuan untuk Peradaban Dunia*. Jakarta: Mizan Pustaka.

Andrews, John. 2015. *The World in Conflict: Understanding the World's Troublespots*. London: The Economist with Profile Books.

Aqdhiwijaya, Eddy, dkk. 2016. *Pendidikan Interreligius Non Formal*. Jakarta: CDCC.

Arfandi, Hafidz. 2014. "Wajah Filantropi Islam di Indonesia (Studi Komparatif Aktivisme Sosial dan Pendayagunaan Filantropi Islam dalam Upaya Menwujudkan Kesejahteraan Sosial pada Muhammadiyah dan Dompet Dhuafa)". *Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.

Aziz, M. Imam. 2003. "Teologi Rekonsiliasi. Mengungkap Kebenaran, Menegakkan Keadilan". dalam *Tashwirul Afkar* Edisi No 15 2003. Jakarta: Lakpesdam.

Barton, Greg. 2014. "The Gülen Movement, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama:Progressive Islamic Thought, Religious Philanthropy and Civil Society in Turkey and Indonesia". *Islam and Christian–Muslim Relations,* Vol. 25, No. 3, 287–301.

__________. 2005. *Progressive Islamic Thought, Civil Society and The Gulen Movement in National Context: Parallels with Indonesia*, Contribution of The Gulen Conference, Rice University, November 12.

__________. 2003. *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. Yogyakarta: LKiS.

Beck, Herman L. 2005. "The Rupture Between the Muhammadiyah and the Ahmadiyya". *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* (*Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*). 161-2/3, 2005.

Benyamin, Benny Ahmad dan Joko Budi Santoso. 2012. *Pendidikan Karakter Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA*. Jakarta: Maarif Institute.

Berita Resmi Muhammadiyah, edisi September 2015.

Bornstein, Jaqueline L. 2008. "Religion And Art as Peacebuilding Tools: A Case Study of The Education of Arts Appreciation Program, Solo, Indonesia". *Dissertation*. United Kingdom: University of Bradford.

Bourchier, David, & Hadiz, Vedi R. 2003. "Introduction" (pp. 1-23). in D. Bouchier, & V. Hadiz (Eds.), *Indonesian Politics and Society*. London: Routledge Curzon.

Bruinessen, M.V. (ed.). 2013. *Contemporary Developments in Indonesia Islam: Explaining the Concervative Turn*. Singapore: ISEAS.

__________. 2011. "Indonesian Muslims and Their Place in The Large World of Islam". *Paper* Presented at the 29th Indonesia Update Conference, Australian National University, Canberra, September 30 – October 2.

__________. 1994a. *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LKiS.

__________. 1994b. "Yahudi dalam Wacana Pemikiran Islam Indonesia Masa Kini". dalam *Agama dan Aspirasi Rakyat*. Seri Dian II Tahun I. Yogyakarta: Dian Interfidei.

Budiawan. 2004. *Mematahkan Pewarisan Ingatan: Wacana Anti-komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca-Soeharto*. Jakarta: ELSAM.

Budiawan, Ruth Indiah Rahayu dan Ahmad Murtajib (ed.). 2016. *Rekonsiliasi Kultural Tragedi 1965: Catatan Pengalaman Syarikat Indonesia*. Yogyakarta: Syarikat.

Burhani, Ahmad Najib. 2018. "Islam Nusantara as a Promising Response to Religious Intolerance and Radicalism." *Jurnal ISEAS* No 21. Singapore: ISEAS Publishing.

_________. 2015. "Internasionalisasi Muhammadiyah". *Majalah Kauman: Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah*, edisi Maret-April 2015, 45-46.

_________. 2014. "Muhammadiyah di Amerika Serikat" *Suara Muhammadiyah*, 01/99, 1-15 Januari 2015, 36-37.

_________. 2014. "The Reformasi '98 and the Arab Spring: A Comparative Study of Popular Uprisings in Indonesia and Tunisia". *Asian Politics and Policy*. Volume 6, number 2 (halaman 199-215).

Chirzin, M. Habib. "Dari Teologi Pembangunan Ke Teologi Perdamaian". *Bestari*, Agustus-Oktober 1992. Suplemen halaman 41-46.

Dhofier, Zamakhsyari. 1982. *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LP3ES.

Diamond, Larry. 1999. *Developing Democracy, Toward Consolidation*. Baltimore and London: The John Hopkins University Press.

Erb, Maribeth, Priyambudi Sulistyanto, Carole Faucher (ed.). 2005. *Regionalism in Post-Suharto Indonesia*, London and New York: RoutledgeCurzon.

Ethier, Diane. 1990. "Processes of Transition and Democratic Consolidation: Theoretical Indicators". in Diane Ethier (ed.) *Democratic Transition and Consolidation in Southern Europe, Latin America and Southeast Asia*. London: The Macmillan Press Ltd. (pp.3-21).

Fatah, Eep Saefulloh. 2000. *Zaman Kesempatan, Agenda-Agenda Besar Demokratisasi Pasca-Orde Baru*. Bandung: Penerbit Mizan.

Fauzi, Amelia. 2016. *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, terj. Eva Mushoffa. Yogyakarta: Gading.

Fauzi, Ihsan Ali. 2002. "On Being a Marxist Muslim: Reading Hasan Raids Autobiography". dalam *Studia Islamika* Vol 9, No 1 (2002). Jakarta: Studia Islamika.

Fealy, Greg. 2003. *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*. Yogyakarta: LKiS.

_________. 1996. "The 1994 NU Congress and Aftermath: Abdurahman Wahid, Suksesi ang the battle for control of NU". dalam Greg Barton dan Greg Fealy (eds.). *Nahdlatul Ulama, Traditional Islam and Modernity Indonesia*. Melbourne: Monash University.

Feilard, Andree. 1998. *NU vis-a-vis Negara*. Yogyakarta: LKiS.

Fitrah, Donna Isyrina. 2012. *Multiply Mediation in the Southern Philippines Conflict*. Leiden University.

Galtung, Johan.1996. *Peace by Peaceful Means: Peace, Conflict and Civilization*. London: SAGE Publicaton.

_________. 1976. *Peace, War and Defense*. Copenhagen: Ejlers.

_________. 1964. “A Structural Theory of Aggression”. *Journal of Peace Research*, Vol. 1 (2), p. 95-119).

_________. 1969. “Violence, Peace, and Peace Research”. *Journal of Peace Research*, Vol 6, No. 3, P. 167-191.

Ghazali, Abd Maqsith. 2003. “Membincang Fikih Rekonsiliasi”. dalam *Tashwirul Afkar* Edisi No 15 2003. Jakarta: Lakpesdam.

Grewal, Baljit. 2003. “Johan Galtung: Positive and Negative Peace”. *Paper*. School of Social Science, Auckland University of Technology.

Guidebook, World Peace Forum. 2018. *The Middle Path for the World Civilizations*. Jakarta: Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations.

_________. 2016. *Countering Violent Extremism: Human Dignity, Global Injustice, and Collective Responsibility*. Jakarta: Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations.

Hadiz, Vedi R. 2003. Reorganizing political power in Indonesia: A reconsideration of so-called ‘democratic transitions’. *The Pacific Review, 16*(4), 591-611.

Haramain, A. Malik. 2004. *Gus Dur, Militer, dan Politik*. Yogyakarta: LKIS.

Hefner, Robert W. 2000. *Civil Islam: Muslims and democratization in Indonesia*. United Kingdom: Priceton University Press.

_________. (ed.). 1998. *Democratic Civility: The History and Cross-Culture Possibility of a Modern Political Ideal*, New Brunswick: Transaction Press.

Huntington, Samuel, P. 1999. *The Third Wave, Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman and London: University of Oklahoma Press.

Husein, Rahmawati. 2015. “Muhammadiyah dan Kemanusiaan: Kontribusi MDMC terhadap Penanggulangan Bencana Global” dalam Alpha Amirrachman, Najib Burhani, dan Azaki Khoirudin. *Kiprah Pencerahan: Karya Unggulan Muhammadiyah 2005-2015*. Jakarta: Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations.

Husna, Sarmidi dkk. Ed. 2018. *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*. Jakarta: LBM PBNU–P3M–Lembaga Disabilitas UB Malang.

Hyden, Goran, 1998. “Building Civil Society at the Turn of the Millennium”. in John Burbidge (ed.), *Beyond Prince and Merchant: Citizen Participation and the Rise of Civil Society*, New York: PACT publication.

Ibn Chamim, Asykuri., dkk. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Ilham, Muhammad. 2015. "Peran Elit Muhammadiyah DIY dalam Pemilu Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014-2019". *Skripsi*. UIN Sunan Kalijaga.

Institute for Economics & Peace. 2018. *Global Peace Index 2018: Measuring Peace in a Complex World*,Sydney: IEP.

Isnur, Muhamad (ed). 2012. *Agama, Negara & Hak Asasi Manusia: Proses Pengujian UU 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan/atau Penodaan Agama di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: LBH Jakarta.

Jainuri, Ahmad. 2002. *Ideologi kaum reformis: melacak pandangan keagamaan Muhammadiyah periode awal*. Surabaya: LPAM.

Jurdi, Syarifuddin. 2010. *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

_________ (ed.). 2010. *1 Abad Muhammadiyah: Gagasan Pembaharuan Sosial-Keagamaan*, Jakarta: Kompas.

Jusuf, Chusnan. 2007. "Filantropi Modern untuk Pembangunan Sosial". *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 12 (01), 74-80.

Kementerian Lingkungan Hidup. 2012. *Teologi Lingkungan*. Yogyakarta: Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah PP Muhammadiyah.

Kersten, Carool. 2015, *Islam in Indonesia: The Contest for Society, Ideas and Values*, New York: Oxford University Press.

Kim Hyung-Jun. 2010. "Rahasia Satu Abad Muhammadiyah". *Kompas*, Senin, 5 Juli 2010.

Kumalasari, Dyah. 2017. "Pendidikan Karakter dalam Perspektif Tokoh Muhammadiyah". *HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, Vol. XV, No. 1 (Oktober 2017).

Kunkler, Mirjam. 2013. "How Pluralist Democracy Became the Consensual Discourse Among Secular and Nonsecular Muslims in Indonesia' in Mirjam Kunkler & Alfred Stepan (eds.). *Democracy and Islam in Indonesia*. New York: Columbia University Press.

Kunkler, Mirjam and Alfred Stepan. 2013. *Democracy and Islam in Indonesia*. NewYork: Columbia University Press.

_________. 2013. 'Indonesian Democratization in Theoretical Perspective' in Mirjam Kunkler & Alfred Stepan (eds.). *Democracy and Islam in Indonesia*. New York: Columbia University Press.

Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Agustus 2015. Disampaikan pada Muktamar Muhammadiyah 47. Makassar.

Latief, Hilman. 2015. "Pendahuluan" dalam Wawan Gunawan Abdul Wahid, Muhammad Abdullah Darraz, Ahmad Fuad Fanani (eds). *Fikih Kebinekaan*. Jakarta: Maarif Institute.

_________. 2013. *Politik Filantropi di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.

Latif, Yudi. 2015. “NU-Muhammadiyah sebagai Jangkar Etika”. *Opini Kompas*, 4 Agustus, hal. 6.

Lestari, Dian dan Hamid Supriyatno. 2012. *Pendidikan Karakter Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk SMA*. Jakarta: Maarif Institute.

Liddle, R. William & Mujani, Saiful. 2013. “Indonesian Democracy: From Transition to Consolidation” in *Democracy and Islam in Indonesia*. Edited by Mirjam Kunkler & Alfred Stepan. New York: Columbia University Press.

_________, 2002. “The Islamic Challenge to Democratic Consolidation”. unpublished paper.

Listia, dkk. 2016. *Pendidikan Interreligius: Gagasan Dasar dan Modul Pelaksanaan*. Jakarta: CDCC.

Maarif Institute. 2018. *Suplemen Modul Jambore Pelajar Teladan Bangsa 2018*. Jakarta: Maarif Institute.

Machfoedz, Maksoem, dkk. 2016. *Deklarasi Nahdlatul Ulama: International Summit of The Moderate Islamic Leaders*. Jakarta: Desk International Summit of The Moderate Islamic Leaders PBNU.

Madjid, Nurcholish. 2008. *Islam, Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Dian Rakyat dan Paramadina.

_________. 2008. *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat dan Paramadina.

_________. 1999. *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, Jakarta: Paramadina.

_________. 1997. *Bilik-bilik Pesantren*. Jakarta: Paramadina.

_________. 1996. “Menuju Masyarakat Madani”. dalam *Jurnal Ulumul Quran 2*, Vol. VII, 51-52.

Mahathir Global Peace School. 2015. *ToR Mahathir Global Peace School 4*. Kedah: Universiti Utara Malaysia.

Mahkamah Konstitusi. 2010. *Risalah Sidang Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: 24 Maret 2010.

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2018. *Himpunan Putusan Tarjih 3*, Jakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah.

_________. 2006. *Fikih Antikorupsi, Perspektif Ulama Muhammadiyah*, Jakarta: PSAP.

Matahati. 2017. “Rohingya Tapal Batas Kemanusiaan”. *Matahati*, Vol. VIII. Oktober 2017.

Medina, Sheila. 2017. “Strategi Muhammadiyah Dalam Proses Perdamaian Konflik Mindanao”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Meitzner, Marcus. 1999. “Antara Pesantren dan Istana: NU dan Perannya dalam Masa Transisi”. dalam Geoff Forrester dan R.J. May, *Jatuhnya Soeharto,* terj. Danang K. Wardoyo, dkk. Jakarta: AJI.

Menchik, Jeremy. 2018 (forthcoming). “Muslim Moderates and Democratic Breakdown in Indonesia”. *Asian Studies Review*.

_________. 2016. *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism*, New York: Cambridge University Press.

Moesa, Ali Mashcan. 2007. *Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama*. Yogyakarta: LKiS.

Mouffe, Chantal. 2005. *On The Political*, London and New York: Routledge.

MPM. 2018. “Profil” diakses dari *www.mpm.muhammadiyah.or.id* pada tanggal 13 Oktober 2018.

MPM. [t.th.]. *Best Practice Jihad Menegakkan Kedaulatan Pangan*. [t.p.]: MPM PP Muhammadiyah.

Mu’ti, Abdul. 2016. “Akar Pluralisme dalam Pendidikan Muhammadiyah”. *Afkaruna*. Vol 12 No 1 Juni. 1-42.

_________, dkk. 2015. *K.H. Ahmad Dahlan (1868-1923)*. Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional.

_________ (ed). 2008. *Crafting the Alliance of Civilizations*. Jakarta: Centre for Dialogue and Cooperations among Civilizations.

Mu’ti, Abdul, Fajar Riza Ul Haq, Fuad Fanani, dan Azaki Khoirudin. 2016. *Kosmpolitanisme Islam Berkemajuan: Catatan Kritis Muktamar Teladan ke-47 Muhammadiyah di Makassar*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

_________. 2009. *Kristen Muhammadiyah: Konvergensi Muslim dan Kristen dalam Pendidikan*. Jakarta: Al Wasat Publishing House.

Mudzakkir, Amin. “NU dan Kaum Minoritas Muslim” dalam Iip D. Yahya (ed.). *NU Penjaga NKRI*. Kanisius: Yogyakarta.

Mughni, Syafiq. 2015. “Muhammadiyah diHadapan Negara :Melihat Peran Diaras Global”. dalam Zuly Qodir (ed.). *Ijtihad Politik Muhammadiyah: Politik sebagai Amal Usaha*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Muhammad, Wahyudi Akmaliyah dan Khelmy K Pribadi. 2013. “Anak Muda, Radikalisme, dan Budaya Populer”. *Jurnal Maarif Institute*. Vol 8 No 1. 132-156.

Muhammadiyah. 2010. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Mujani, Saiful. 2007. *Muslim Demokrat: Islam Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Gramedia.

Munawar-Rachman, Budhy. 2005. *Ensiklopedi Nurcholish Madjid: Jilid 3*, Bandung: Mizan.

Najib, Ala’i. 2003. “Rekonsiliasi Perempuan Islam dan Komunis,” dalam *Tashwirul Afkar* Edisi No 15 2003. Jakarta: Lakpesdam.

Nakamura, Mitsuo. 2017. *Bulan Sabit Terbit di Atas Pohon Beringan: Studi tentang Pergerakan Muhammadiyah di Kotagede sekitar 1910-2010*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Nashir, Haedar. 2000. *Dinamika Politik Muhammadiyah*. Yogyakarta: BIGRAF Publishing.

Nava, Julie. 2013. *Imam Shamsi Ali: Menebar Damai di Bumi Barat*. Jakarta: Noura Books (Mizan Group).

Noer, Deliar. 1990. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.

Nordholt, Henk Schulte and Gerry van Klinken (ed.). 2007. *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia*, Leiden: KITLV Press.

Nurrohmah, Arina. 2017. "Peran Media Berantas Korupsi, Efektifitas Program Madrasah Anti Korupsi Pemuda Muhammadiyah di TvMu". *Prosiding Peran Perguruan Tinggi Dalam Upaya Penanggulangan Korupsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

O'Connell, Brian. 1999. *Civil Society: Underpinnings of American Democracy*, Hanover and London: University Press of New England.

O'Donnell, G, and Schmitter, P.C. 1986. "Tentative Conclusions About Uncertain Democracies". Part IV in O'Donnell, G, Schmitter, C and Whitehead, L. (Eds.). *Transition From Authoritarian Rule: Prospects for Democracy*. Baltimore: John Hopkins University Press. (pp.1-72).

Paskarina, C., Asiah, M., Madung, O G. (2015). *Berebut Kontrol Atas Kesejahteraan: Kasus-Kasus Politisasi Demokrasi di Tingkat Lokal*. Yogyakarta: Polgov.

Peacock, James L. 1986. *Gerakan Muhammadiyah Memurnikan Ajaran Islam di Indonesia*. Jakarta: Cipta Kreatif.

Peluso, N. L., Afiff, L., & Rachman, N. F. (2008). "Claiming the Grounds for Reform: Agrarian and Environmental Movements in Indonesia". *Journal of Agrarian Change, 8*(2), 377–407.

Pemuda Muhammadiyah. *Mekanisme Pendirian Kelas Madrasah Anti Korupsi*. Jakarta: Pemuda Muhammadiyah.

Phadepie, Fahd. 2017. *Hijrah Bang Tato*. Yogyakarta: Bentang Pustaka.

Pierskalla, J.H. & A. Sacks, 2017. "Unpacking the Effects of Decentralised Governance on Routine Violence: Lessons from Indonesia". *World Development* 90, 213-228.

PP Muhammadiyah. 2009. *Revitalisasi Visi dan Karakter Bangsa: Agenda Indonesia Kedepan*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Prasetyo, Hendro dan Ali Munhanif, et al. 2002. *Islam dan Civil Society: Pandangan Muslim Indonesia*, Jakarta: Gramedia.

Pratikno. 2003. "Desentralisasi: Pilihan yang Tidak Pernah Final". dalam Jim Schillers (ed.), *Jalan Terjal Reformasi Lokal: Dinamika Politik di Indonesia.* Yogyakarta: PLOD UGM.

Purwono, Andi, 2013. "Organisasi Keagamaan dan Keamanan Internasional: Beberapa Prinsip dan Praktik Diplomasi Nahdlatul Ulama (NU) Indonesia". *Jurnal Politik Profetik*, Vol 2, No. 2,

Rabbani, A. 2018. "Peran Muhammadiyah dalam Misi Kemanusiaan Internasional". *Skripsi.* Jakarta: Program Hubungan Internasional, UIN Syarif Hidayatullah.

Rachman, N. F. (2011). *Land Reform Dari Masa Ke Masa.* Yogyakarta: KPA.

Rahardjo, M. Dawam. 2010. *Merayakan Kemajemukan, Kebebasan, dan Kebangsaan*. Jakarta: Kencana.

_________. 1999. *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*, Jakarta: LP3ES.

Rahayu, Ruth Indian dkk. 2016. *Menjadi Pelaku Rekonsiliasi Kultural.* Yogyakarta: Syarikat.

Rais, Amien. 1995. *Moralitas Politik Muhammadiyah.* Yogyakarta: Penerbit Dinamika.

Reiter, Dan. 2017. "Is Democracy a Cause of Peace?" *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. Subject: World Politics Online Publication Date: Jan 2017.

Rencana Tindakan Muhammadiyah untuk Perubahan Iklim dan Penggunaan Air (2015 – 2020).

Report, World Peace Forum. 2014. *Quest for Peace: Lessons of Conflict Resolutions.* Jakarta: Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations.

_________. 2012. *Consolidating Multicultural Democracy.* Jakarta: Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations.

_________. 2010. *Mainstreaming Peace Education: Developing Strategy, Policy, and Networking.* Jakarta: Jakarta: Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations.

_________. 2008. *Adressing Facets of Violence: What can be done?.* Jakarta: Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations.

_________. 2006. *One Humanity, One Destiny, One Responsibility*. Jakarta: Bureau for International Relations and Cooperation Central Board of Muhammadiyah.

Republik Indonesia. 2002. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia*. Jakarta.

Republika. "Rubrik Muhammadiyah untuk Bangsa". *Republika*, 26 April 2018, hlm. 4.

_________. "Rubrik Muhammadiyah untuk Bangsa". *Republika*, 14 Desember 2017, hal. 4.

Reychler, Luc, 2010,"Peacemaking, Peacekeeping, Peacebuilding". in Denemark, Robert A (ed.). *The International Studies Encyclopedia*. UK: Wiley-Blackwell Publishing; Oxford.

Ricklefs, M.C. 2013. M*engislamkan Jawa: Sejarah Islamisasi di Jawa dan Penentangnya dari 1930 sampai Sekarang*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

_________. 2012. *Islamisation and Its Opponents in Java: A Political, Social, Cultural and Religious History, c. 1930 to Present*, Singapore: NUS Press.

_________. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*, Jakarta: Penerbit Serambi.

Ridwan, Nur Khalik. 2010. *NU dan Bangsa 1914-2010: Pergulatan Politik dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Ridwan, Wachid. "Muhammadiyah Merambah Dunia: Diaspora Dakwah Jamaah di Tingkat Global" dalam Alpha Amirrachman, Najib Burhani, dan Azaki Khoirudin. *Kiprah Pencerahan: Karya Unggulan Muhammadiyah 2005-2015*. Jakarta: Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations.

Ro'fah. 2000. "A Study of 'Aisyiyah: An Indonesian Women's Organization (1917-1998)". *Thesis*. Canada: McGill University.

Robison, Richard dan Vedi R. Hadiz. 2004. *Reorganizing Power in Indonesia: The politics of Oligarchy in an Age of Markets*. London: RoutledgeCurzon.

Roosa, John. 2008. *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*. Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra.

Rumadi (dkk) (eds). 2016. *Hasil-Hasil Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama*, Jombang, 1-5 Agustus 2015. Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

S Salim, Hairus. 2018. "Banser: Dalam Pusaran Populisme dan Jebakan Batman," dalam Iip D. Yahya (ed.). *NU Penjaga NKRI*. Kanisius: Yogyakarta.

_________. 2004. *Kelompok Paramiliter NU*. Yogyakarta: LKIS.

Sandi, Fadri Ari dan Syamsul Ma'arif. 2014. *Diplomasi Muhammadiyah di Tengah Pusaran Konflik Mindanao Filipina Selatan*. Lampung: Universitas Lampung.

Schwarz, Adam. 1994. *A Nation in Waiting. Indonesia in the 1990s*, Sydney: Allen & Unwin.

Setiawan, Iwan. 2018. *KOKAM: Kesatuan Muhammadiyah di Zaman Bergerak*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Shihab, Alwi. 1998. *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*. Bandung: Mizan.

Simanjuntak, Deasy. 2010. “Who Shall be Raja?: Patronage Democracy in North Sumatra, Indonesia”. Unpublished *Ph.D. Thesis*. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Snyder,Jack. 2000. *From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict*. New York: W.W. Norton.

Soedja’, Muhammad. (1993). *Cerita Tentang Kiyai Haji Ahmad Dahlan*.

Stepan, Alfred. 1986. “Paths Towards Democratization: Theoretical and Comparative Considerations”. Part III in O’Donnell, G, Schmitter, C and Whitehead, L. (Eds.) *Transition From Authoritarian Rule: Prospects for Democracy*. Baltimore: John Hopkins University Press. (pp.64-84).

Suaedy, Ahmad. 2018. Gus Dur, *Islam Nusantara dan Kewarganegaraan Bhineka: Penyelesaian Konflik Aceh dan Papua 1999-2001*. Jakarta: Gramedia.

Suara Muhammadiyah. Edisi 18, Th.Ke-103, 16-30 September 2018.

_________. Edisi No.07, Th. Ke-88, 1-15 April 2003.

_________. Edisi-edisi tahun 1920an hingga 1930an.

Sukoco, Bambang. 2017. “Peran Pemuda Muhammadiyah Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi”. *Prosiding Peran Perguruan Tinggi Dalam Upaya Penanggulangan Korupsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Surwandono. 2015. “Relevansi Pelembagaan Investasi Ekonomi Berbasis Shariah Pada Masyarakat Muslim Mindanao” dalam *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 4, No. 1, April 2015.

_________. 2013. *Manajemen Konflik Separatisme: Dinamika Negosiasi dalam Penyelesaian Konflik Mindanao*. Yogyakarta: Jusuf Kalla School of Government.

Syahputra, Hikmawan. 2014. “Peran Politik Muhammadiyah Tahun 2010-2014”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Universitas Brawijaya Malang.

Syaifullah. 2015. *Pergesaran Politik Muhammadiyah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syoedja’, Muhammad. 1993. *Cerita Tentang Kiyai Haji Ahmad Dahlan*.

Tim Pembina Al Islam dan Kemuhammadiyahan. 1990. *Muhammadiyah Sejarah, Pemikiran dan Amal Usaha*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Pers.

Tim PW LTN PW NU Jatim. 2007. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004)*. Surabaya: LTN NU dan Kalista.

Varshney, Ashutosh, Rizal Panggabean, Mohammad Zulfan Tadjoeddin, 2004. “Patterns of Collective Violence in Indonesia (1990-2003)”. *UNSFIR Working Paper* - 04/03.

Wahid, Abdurrahman. 1983. *Bunga Rampai Pesantren*. Jakarta: Dharma Bhakti.

Wahid, Wawan Gunawan Abdul, Muhammad Abdullah Darraz., Ahmad Fuad Fanani(ed). 2015. *Fikih Kebinekaan*. Jakarta: Maarif Institute.

Wajidi, Farid. 2003. "Syarikat dan Eksperimentasi Rekonsiliasi Kulturalnya: Sebuah Pengamatan Awal". dalam *Tashwirul Afkar* Edisi No 15 2003. Jakarta: Lakpesdam.

Widodo, S. (2017). "A Critical Review of Indonesia's Agrarian Reform Policy". *Journal of Regional and City Planning*, 28 (3), 204-218.

Winarsih, Atik Septi, dkk. 2016. *Salib Terang di Bawah Sinar Sang Surya, Laporan Penelititan Unggulan Jurusan*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Yuda, T. K. 2018a. "Welfare regime and the patrimonial state in Contemporary Asia: visiting Indonesian cases". *Journal of Asian Public Policy, 0*(0), 1-15. doi:10.1080/17516234.2018.1462685.

Zainudi, Ahmad, 2002. *Ideologi Kaum Reformis: Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Periode Awal*. Surabaya: LPAM.

• Internet

Abbas, Mohamad. 2012. *Indonesia is Model Muslims-Cameron*, https://www.reuters.com/article/uk-indonesia-britain-islam-idUKBRE83A1HP20120411, diakses pada tanggal 10 Oktober 2018 pukul 18.50 wib.

Abdelhamid, Aisha. 2015. "A Call for Peace from Buddhist and Muslim Leaders in Yogyaarta Statement'. https://edenkeeper.org/2015/04/07/a-call-for-peace-from-buddhist-and-muslim-leaders-in-yogyakarta-statement/ diakses pada tanggal 20 November 2018.

Alvara Research Center. 2017. "Potret Keberagaman Muslim Indonesia". https://wpmadani.files.wordpress.com/2017/10/potretkeberagamaanmuslimindonesia-alvara.pdf pada tanggal 13 Oktober pukul 08.55 wib.

Amalee, Irfan. 2018. Curriculum Vittae Irfan Amalee. https://drive.google.com/file/d/15NyTNWYJUyjDA3R28HAoYUu35fNN0_r_/view?usp=drive_open diakses pada tanggal 30 November 2018.

_________. 2015. "Profil Singkat Irfan Sebagai Konsultan Penulisan Modul'. http://irfanamaleeblog2.blogspot.com/2015/08/profil-singkat-irfan-sebagai-konsultan.html.

Amrullah, Amri. 2016. Muhammadiyah Cabang Inggris Rumuskan Fikih Lingkungan. https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/02/08/o27od0394-muhammadiyah-cabang-inggris-rumuskan-fikih-lingkungan diakses pada 25 November 2018.

Anonim, 150 Bayi Pengungsi Rohingnya Lahir Setiap Bulannya, https://www.dompetdhuafa.org/post/detail/8258/indonesia-humanitarian-alliance--150-bayi-pengungsi-rohingya-lahir-setiap-bulannya, diakses pada tanggal 23 November 2018.

Anonim. 2013. Ganeng Organisasi Keagamaan, Muhammadiyah Komitmen Turunkan Kematian Ibu Melahirkan. http://www.muhammadiyah.or.id/id/news/print/2934/gandeng-organisasi-keagamaan-muhammadiyah-komitmen-turunkan-kematian-ibu-melahirkan.html diakses pada tanggal 10 Desember 2018.

Anonim. 2016. "Satgas Muda Siapkan Motivator Jihad Anti Korupsi". http://www.muhammadiyah.or.id/id/news/print/5158/satgas-muda-siapkan-motivator-jihad-anti-korupsi.html diakses pada tanggal 30 November 2018.

Anonim. 2017. Dialog Lintas Agama PSIF UMM Gandeng 45 Aktivis Muda se-Jawa Timur. http://www.umm.ac.id/id/berita/dialog-lintas-agama-psif-umm-gandeng-45-aktivis-muda-sejawa-timur.html diakses pada 29 November 2018.

Anonim. 2017. FGD: IGOV and Muhammadiyah Environmental Council about Water Resources Statute Planning. http://jksg.umy.ac.id/fgd-igov-and-muhammadiyah-environmental-council-about-water-resources-statute-planning/ diakses pada 25 November 2018.

Anonim. 2017. Maarif Institute Gelar Jambore Pelajar Teladan Bangsa 2017. http://menara62.com/2017/08/07/maarif-institute-gelar-jambore-pelajar-teladan-bangsa-2017/ diakses pada 20 November 2018.

Anonim. 2017. Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. https://jakarta.go.id/artikel/konten/2516/muhammadiyah-prof-dr-hamka diakses pada 10 Desember 2018.

Anonim. 2018. "Muhammadiyah dan Pemberantasan Korupsi". http://jejakislam.net/muhammadiyah-dan-pemberantasan-korupsi/ diakses pada 26 Oktober 2018.

Anonim. 2018. Indonesia Millenial Movement Gaungkan Kampanye "Percaya Indonesia". https://conveyindonesia.com/indonesia-millennial-movement-gaungkan-kampanye-percaya-indonesia/ diakses pada 30 November 2018.

Anonim. 2018. Menjaga Harmoni dan Multikulturalisme, Best Practice Pengelolaan Asrama Mahasiswa UM Kupang. http://www.suaramuhammadiyah.id/2018/11/25/menjaga-harmoni-dan-multikulturalisme-best-practice-pengelolaan-asrama-mahasiswa-um-kupang/ diakses pada 28 November 2018.

Anonim. 2018. Muda Bersahabat, Menuju Indonesia Bebas Diskriminasi. http://psbps.ums.ac.id/muda-bersahabat-menuju-indonesia-bebas-diskriminasi/ diakses pada tanggal 28 Oktober 2018.

Anonim. 2018. PSBPS Gelar Diskusi Pendidikan Karakter Welas Asih. http://psbps.ums.ac.id/psbps-gelar-diskusi-pendidikan-karakter-welas-asih/ diakses pada tanggal 25 Oktober 2018.

Anonim. 2018. UMP Tawarkan Beasiswa untuk Dosen dan Mahasiswa di Filipina. https://ump.ac.id/Berita-1129-UMP.Tawarkan.Beasiswa.untuk.Dosen.dan.Mahasiswa.di.Filipina.html diakses pada 20 November 2018.

Anonim. Presiden Kosovo Terima Kunjungan Din Syamsuddin. http://www.muhammadiyah.or.id/id/news-1166-detail-presiden-kosovo-terima-kunjungan-din-syamsudin.html diakses pada tanggal 25 November 2018.

Anonim. Program PSBPS UMS. http://psbps.ums.ac.id/programs/ diakses pada 29 November 2018.

Asian Correspondent Staff. 2017. Mike Pence: Indonesia's brand of moderate Islam an "inspiration to the world'. Asian Correspondent, 21 April. https://asiancorrespondent.com/2017/04/mike-pence-indonesias-brand-moderate-islam-inspiration-world/ (accessed on 16 December 2018).

Azhar, Muhammad. 2018. Fikih Kebencanaan. http://www.suaramuhammadiyah.id/2018/08/15/fikih-kebencanaan/ diakses pada tanggal 29 November 2018.

Aziz, Munawir. 2018. "Jejak Indonesia dalam Diplomasi Islam Moderat di Afghanistan". https://nasional.kompas.com/read/2018/03/27/11230631/jejak-indonesia-dalam-diplomasi-islam-moderat-di-afghanistan, diakses pada 15 Oktober 2018.

Basya, M. H. 2014. "Muhammadiyah must boost democratic values". http://www.thejakartapost.com/news/2014/11/18/muhammadiyahmust-boost-democratic-values.html diakses pada 27 Oktober 2018.

Basyarat. 2018. Menjaga Kerukunan Agama, Menjaga Keutuhan Bangsa. http://ahmadiyah.org/menjaga-kerukunan-agama-menjaga-keutuhan-bangsa/ diakses pada 17 November 2018.

BPH UMY. 2015. Dosen UMY Raih Penghargaan Tokoh Inspiratif dari BNPB. http://www.umy.ac.id/dosen-umy-raih-penghargaan-tokoh-inspiratif-dari-bnpb.html diakses pada 29 November 2018.

_________. 2015. UMY Akan Buka Language Center Bagi Mahasiswa Palestina. http://www.umy.ac.id/umy-akan-buka-language-center-bagi-mahasiswa-palestina.html diakses pada 20 November 2018.

Burhani, Ahmad Najib. 2017. "Najib Burhani Bersaksi untuk Ahmadiyah'. https://pustakamu.id/najib-burhani-bersaksi-untuk-ahmadiyah/, diakses pada 10 November 2018.

Cochrane, Joe. 2017. "Indonesians Seek to Export a Modernized Vision of *Islam*". *New York Times*, May 1. https://www.nytimes.com/2017/05/01/world/asia/indonesia-islam.html?smid=tw-share&_r=0. Diakses pada Oktober 2018.

Erdianto, Kristian. 2016. "Pemuda Muhammadiyah Deklarasikan Panca Gerakan Antikorupsi". https://nasional.kompas.com/read/2016/06/19/16533901/pemuda.muhammadiyah.deklarasikan.panca.gerakan.antikorupsi. Diakses pada 13 Oktober 2017.

Fukuoka, Y. (2013). Indonesia's "democratic transition' revisited: a clientelist model of political transition. *Democratization, 20*(6), 991-1013. doi:10.1080/13510347.2012.669894.

Gilmore, Scott. 2016. Why is Islamic World Still Torn by War. October, 20. https://www.bostonglobe.com/ideas/2016/10/19/why-islamic-world-still-torn-war/2ZeWixhA50AnDt4SnemjpM/story.html (accessed on 17 December 2018).

Hamdi, Fahmi. 2012. Lingkungan Dalam Perspektif Islam (Sebuah Pengantar). http://kalsel.muhammadiyah.or.id/artikel-fikih-lingkungan-dalam-perspektif-islam1-sebuah-pengantar-detail-289.html diakses pada tanggal 28 November 2018.

Hanafi, Ristu. 2018. Datangi Gereja Lidwina yang Diserang, Buya Syafii: Saya Kecewa Berat. https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3861020/datangi-gereja-lidwina-yang-diserang-buya-syafii-saya-kecewa-berat?utm_source=whatsapp diakses pada 17 November 2018.

Handito, Dwi Nourma. "Muhammadiyah dan KPK Branding Becak Anti Korupsi". http://jogja.tribunnews.com/2014/04/23/muhammadiyah-dan-kpk-branding-becak-anti-korupsi diakses pada 30 November 2018.

Haq, Fajar Riza Ul. 2016. Fikih Anti Terorisme. https://nasional.kompas.com/read/2016/05/09/05200061/Fikih.Anti.Terorisme diakses pada 25 Oktober 2018.

Ibn Chamim, Asykuri., dkk. 2003. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Isnur, Muhamad (ed). 2012. *Agama, Negara & Hak Asasi Manusia: Proses Pengujian UU 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan/atau Penodaan Agama di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: LBH Jakarta.

Jordan, Ray. 2018. "Jokowi Bertemu Kongres Pemuda di Istana'. https://news.detik.com/berita/d-4297725/jokowi-bertemu-kongres-pemuda-di-istana-bogor diakses pada tanggal 1 Desember 2018.

Landler, Mark. 2009. *Clinton Praises Indonesian Democracy,* https://www.nytimes.com/2009/02/19/washington/19diplo.html, diakses tanggal 23 Oktober 2018.

Lazismu.org. 2018. "Tentang Kami; Program" diakses dari *www.lazismu.org* pada tanggal 13 Oktober 2018.

LAZISMU. 2017. *Respon Petani Karawang, Muhammadiyah Bersinergi Bareng Lembaga Filantropi dan Advokasi*. https://www.lazismu.org/respon-petani-karawang-muhammadiyah-bersinergi-bareng-lembaga-filantropi-dan-advokasi/ diakses pada 28 Oktober 2018.

Marbun, Julkifli. 2014. Belajar dari Konflik Nigeria dan Republik Afrika Tengah. https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/11/22/nffepf-belajar-dari-konflik-nigeria-dan-republik-afrika-tengah diakses pada 25 November 2018.

Masduki, Teten. 2011. "Korupsi dan Demokrasi". https://nasional.kompas.com/read/2011/05/18/02495289/Korupsi.dan.Demokrasi diakses pada 29 November 2018.

MDMC. 2018. "Profil" diakses dari www.mpm.muhammadiyah.or.id pada tanggal 13 Oktober 2018.

_________. 2018a. "Profil" diakses dari www.mdmc.or.id/profil-mdmc pada tanggal 14 Oktober 2018.

_________. 2018b. "Program" diakses dari www.mdmc.or.id/program-kerja pada tanggal 14 Oktober 2018.

Muarif. 2018. "Tokoh-Tokoh Muhammadiyah di Jalur Kiri', diakses dari https://alif.id/read/muarif/orang-orang-muhammadiyah-di-jalur-kiri-b210802p/ pada tanggal 12 Desember 2018.

_________. 2018. "Politik Kebangsaan: Pelopor Nasionalisme Indonesia' diakses dari https://islamberkemajuan.id/politik-kebangsaan-muhammadiyah-pelopor-nasionalisme-indonesia/ pada tanggal 3 Desember 2018.

_________. 2018. "Haji Misbach: Tokoh Muhammadiyah di Kalur Kiri', diakses dari https://alif.id/read/muarif/haji-misbach-tokoh-muhammadiyah-di-jalur-kiri-b210809p/ pada tanggal 1 Desember 2018.

Muhammadiyah. 2012. Muhammadiyah Sebar Mahasiswa Baru Asal Pattani Thailand Selatan Ke 8 PTM. http://www.muhammadiyah.or.id/id/news-1640-detail-muhammadiyah-sebar-mahasiswa-baru-asal-pattani-thailand-selatan-ke-8-ptm.html diakses pada 20 Oktober 2018.

_________. 2010. Ciri Perjuangan Muhammadiyah. http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-176-det-ciri-perjuangan.html, pada tanggal 27 Oktober 2018.

Peace Generation Indonesia. 2017. Sekolah Cerdas. https://www.peace-generation.org/id/projects/sekolah-cerdas diakses pada tanggal 20 November 2018.

Peace Generation. 2018. Our Impact. https://www.peace-generation.org/ diakses pada tanggal 28 Oktober 2018.

Permana, Fuji E. 2018. Maarif Institute Luncurkan Program Sekolah Pemikiran Maarif. https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/education/18/03/29/p6bdix423-maarif-institute-luncurkan-program-sekolah-pemikiran-maarif diakses pada 21 November 2018.

PP NA. 2018. Din: Nasyiatul Aisyiyah Mampu Menjadi Agen-Agen Perdamaian.http://nasyiah.or.id/Berita/baca/232/Din-Nasyiatul-Aisyiyah-Mampu-Menjadi-Agen--Agen-Perdamaian.html.diakses pada tanggal 28 Oktober 2018.

Prambadi, Heru. 2013. Muhammadiyah Dukung Penuh Kosovo. http://umri.ac.id/?p=1406 diakses pada tanggal 10 Desember 2018.

Pribadi, Helmy. 2017. Jurnalisme Kebinekaan #1nDONEsia. http://komunitas.maarifinstitute.org/2017/08/31/jurnalisme-kebinekaan-1ndonesia/ diakses pada 21 November 2018.

PSBPS. 2018. "Muda Bersahabat, Menuju Indonesia Bebas Diskriminasi". http://psbps.ums.ac.id/muda-bersahabat-menuju-indonesia-bebas-diskriminasi/ diakses pada tanggal 28 Oktober 2018.

_________. 2018. "PSBPS Gelar Diskusi Pendidikan Karakter Welas Asih". http://psbps.ums.ac.id/psbps-gelar-diskusi-pendidikan-karakter-welas-asih/ diakses pada tanggal 25 Oktober 2018.

Purwono, Andi. 2013. "Organisasi Keagamaan dan Keamanan Internasional: Beberapa Prinsip dan Praktik Diplomasi Nahdlatul Ulama (NU) Indonesia". *Jurnal Politik Profetik*, Vol 2, No. 2,.

Putri. 2018. The Harmony and Peace Walk: Student Stand for Peace, Kolaborasi PP IPM dengan 3 Organisasi Korea Selatan. https://ipm.or.id/the-harmony-and-peace-walk-student-stand-for-peace-kolaborasi-pp-ipm-dengan-3-organisasi-korea-selatan/ diakses pada tanggal 30 November 2018.

Rabbani, A. 2018. "Peran Muhammadiyah dalam Misi Kemanusiaan Internasional". *Skripsi*. Jakarta: Program Hubungan Internasional, UIN Syarif Hidayatullah.

Rahmawati, Elis. 2017. Peace Generation, Membangun Generasi Cinta Damai. http://inovasi.id/peace-generation-membangun-generasi-cinta-damai/ pada tanggal 28 Oktober 2018.

Saifullah, Mohammad. 2016. *NU Cetuskan Deklarasi Nahdlatul Ulama untuk Perdamaian Dunia,* https://news.okezone.com/read/2016/05/10/337/1384916/nu-cetuskan-deklarasi-nahdlatul-ulama-untuk-perdamaian-dunia diakses tanggal 30 Oktober 2018.

Salim, Hairus. 2016. "Presiden dan Sastra(wan), dengan Pram di Antaranya." http://www.gusdurian.net/id/article/kajian/Presiden-dan-Sastrawan-dengan-Pram-di-Antaranya%20/ Diunduh 5 Desember 2018.

Sandiah, Fauziah A. 2017. "Menyongsong Kopdarnas Penggiat Literasi: Rumah Baca Komunitas 2012-2015". http://mpi.muhammadiyah.or.id/

artikel-menyongsong-kopdarnas-penggiat-literasi-perjalanan-rumah-baca-komunitas-20122015--detail-944.html diakses pada 28 Oktober 2018.

Sofiana, Sulvi. 2017. Dua Puluh Mahasiswa Thailand Dapat Beasiswa Kuliah di Unmuh Surabaya. http://surabaya.tribunnews.com/2017/09/11/dua-puluh-mahasiswa-thailand-dapat-beasiswa-kuliah-di-unmuh-surabaya diakses pada 20 November 2018.

Staquf, Yahya Cholil. 2018. "Diplomasi untuk Perdamaian Palestina-Israel," dalam https://republika.co.id/berita/kolom/wacana/18/06/22/paowl3440-diplomasi-untuk-perdamaian-palestinaisrael diunduh 24 November 2018.

Suaramuhammadiyah.id. 2017. "Survei Alvara: NU, Muhammadiyah dan FPI Tiga Besar Ormas Paling Dikenal Publik". http://www.suaramuhammadiyah.id/2017/02/01/survei-alvara-nu-muhammadiyah-dan-fpi-tiga-besar-ormas-paling-dikenal-publik/, pada tanggal 13 Oktober.

Surwandono. 2016. "Dinamika Konflik, Perjanjian Damai, dan Kesejahteraan". Maret 24. http://surwandono.staff.umy.ac.id/files/2010/07/Bahan-Presentasi-ke-PPMuhammadiyah.ppt.

Suryana, Wahyu. 2017. Muhammadiyah Fokus Judicial Review Perppu Ormas. https://www.republika.co.id/berita/nasional/sang-pencerah/17/08/10/ougkxc291-muhammadiyah-fokus-judicial-review-perppu-ormas diakses pada tanggal 28 Oktober 2018.

Suryana, Wahyu. 2017a. Terima Kasih Warga Suku Kokoda kepada Muhammadiyah.https://www.republika.co.id/berita/nasional/sang-pencerah/17/09/25/owtxzk399-terima-kasih-warga-suku-kokoda-kepada-muhammadiyah diakses pada 25 Oktober 2018.

Suryana, Wahyu. 2017b. *Bakti Muhammadiyah untuk Tanah Papua*. Retrieved from https://www.republika.co.id/berita/nasional/sang-pencerah/17/09/27/owxm6c423-bakti-muhammadiyah-untuk-tanah-papua.

The Muhamhadiyah Post. 2017. Satgas Advokasi Pemuda Muhammadiyah Kawal Petani Karawang Aksi Kubur Diri. http://sangpencerah.id/2017/04/satgas-advokasi-pemuda-muhammadiyah-kawal-petani-karawang-aksi-kubur-diri/ diakses pada 28 Oktober 2018.

Topsfield, Jewel. 2016. "Indonesian summit to promote "renovated' Islam in challenge to global jihadism." May 8. *International Herald Tribune*. Lihat https://www.smh.com.au/world/indonesian-summit-to-promote-renovated-islam-in-challenge-to-global-jihadism-20160508-gop31k.html diakses 17 Desember 2018).

Umar, Ahmad Rizky Mardhatillah. 2014. "Gus Dur, Erdogan, dan Israel," dalam http://www.gusdurian.net/id/article/kajian/Gus-Dur-Erdogan-dan-Israel/ diunduh 24 November 2018.

Wijaya, Danu. 2018. Muhammadiyah Dirikan Sekolah Di Pengungsian Rohingnya Myanmar. https://alimancenter.com/artikel/muhammadiyah-dirikan-sekolah-di-pengungsian-rohingnya-myanmar/ diakses pada 21 November 2018.

www.freedomhouse.org, diakses tanggal 27 November 2018.

www.idea.int, diakses tanggal 27 November 2018.

www.transparencyinternational.org, diakses tanggal 27 November 2018.

***

Biografi Singkat Penulis dan Peneliti

Muhammad Najib Azca – Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM, Direktur Youth Studies Centre Fisipol UGM, dan staf pengajar senior di Departemen Sosiologi UGM. Menyelesaikan S1 di Jurusan Sosiologi UGM pada 1996 dengan skripsi yang diterbitkan oleh LKiS pada 1998 berjudul *Hegemoni Tentara*. Ia melanjutkan studi master di Australian National University dengan tesis berjudul *The Role of Security Forces in Communal Conflict: the Case of Ambon, Indonesia* pada 2003. Ia menyelesaikan studi doktroalnya di University of Amsterdam dengan disertasi berjudul *After Jihad: A Biographical Approach to Passionate Politics*. Publikasi antara lain 'A Return to the Past or a New geopolitical Future? The Implications of Past Communal Conflict for Contemporary Security Debates in Indonesia.' *Journal of Contemporary Asia* (2019, with Rachael Diprose), dan *After the Communal War: Understanding and Addressing Post-Conflict Violence in Eastern Indonesia* diterbitkan oleh CSPS BOOKS (2012 bersama dengan Patrick Barron and Tri Susdinarjanti). Najib dapat dihubungi melalui najibazca@ugm.ac.id

Hairus Salim – peneliti dan penulis esai-esai sosial, budaya dan keagamaan. Basisnya ada di Yayasan LKiS dan Lumbung Informasi Kebudayaan Indonesia (LIKE Indonesia), keduanya di Yogyakarta. Menyelesaikan pendidikan di jurusan Sastra Arab UIN Sunan Kalijaga tahun 1994 dan Pascasarjana jurusan antropologi di Universitas Gadjah Mada tahun 2004. Tulisan populer maupun karya risetnya tersebar luar di berbagai media. Yang terbaru adalah Krisis Keistimewaan (2017, CRCS UGM, ditulis bersama Iqbal Ahnaf). Ia dapat dihubungi melalui hairus9@gmail.com

Mohammad Zaki Arrobi – dosen muda dan peneliti di Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM. Ia menyelesaikan studi Masternya dari Department of Sociology University of Essex, UK pada tahun 2017 dengan beasiswa dari British Chevening. Sebelumnya, pada 2013 skripsinya tentang Islamisme dan gerakan mahasiswa meraih penghargaan Maarif Fellowship dari Maarif Institute, Jakarta. Zaki juga aktif sebagai

peneliti muda di Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM. Ia intens terlibat dalam penelitian tentang multikulturalisme, intoleransi, kekerasan, kewargaan, dan politik identitas. Beberapa publikasinya antara lain: '*Vigilantism as 'Twilight Institution: Islamic Vigilante Groups and the State in Post-Suharto Yogyakarta*' (2019), '*The Making of Islamist-inspired Terrorism and Its Counter-Terrorism in Indonesia*' (2018), *Trump Executive Order Will Spark Radicalization* (2017). Selain aktif di dunia akademik, Zaki juga pernah aktif di Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) di UK dan kini bergiat dalam komunitas Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM). Zaki dapat dihubungi melalui surel zaki.arrobi@mail.ugm.ac.id.

Budi Asyhari – lulusan program master di Prodi Agama dan Lintas Budaya (CRCS), Sekolah Pascasarjana UGM. Sejak 2007 hingga sekarang, ia bekerja sebagai peneliti di almamaternya tersebut. Ia terlibat dalam banyak penelitian CRCS, dari isu agama, pembangunan perdamaian dalam keragaman, dan isu Papua. Beberapa penelitian dan laporan tersebut misalnya adalah *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia* sejak 2008 hingga 2012, *Serial Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia: Politik Pendidikan Agama: Kurikulum 2013 dan Ruang Publik Sekolah* (2014), *Serial Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia: Politik Lokal dan Konflik Keagamaan: Pilkada dan Struktur Kesempatan Politik dalam Konflik Keagamaan di Sampang, Bekasi, dan Kupang* **(2015), dan** *Mutiara Terpendam Papua: Potensi Kearifan Lokal untuk Perdamaian* (2015). Selain aktif di CRCS, ia pernah bergabung dalam tim redaksi Majalah *Suara Muhammadiyah*, dan hingga sekarang masih aktif dalam Tim Asistensi Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah. Sekarang ia sedang menempuh studi S3 di Antropologi UGM. Ia dapat dihubungi melalui budiasy@gmail.com

Ali Usman – lahir di Sumenep, 20 April 1984. Menempuh studi S1 Aqidah dan Filsafat (2003-2007), S2 Agama dan Filsafat (2008-2010) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Aktivitas sebagai dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran (STAISPA) dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, peneliti, editor buku, kolumnis/penulis di berbagai media cetak/*online* (koran, majalah, jurnal, dan beberapa judul buku). Bergiat di Jamaah Nahdliyin Yogyakarta (JNY), SMP Bumi Cendekia, PWNU DIY, dan lain-lain. Email: george_almans84@yahoo.com

Biografi Asisten Peneliti

Joko Arizal –pengajar di Fakultas Falsafah dan Peradaban, Universitas Paramadina. Ia menyelesaikan S1 Falsafah dan Agama, universitas Paramadina melalui program Paramadina Fellowship--dengan donatur Indika Energy, dan S2 Sosiologi, Fisipol, Universitas Gadjah Mada. Semasa mahasiswa, ia aktif di berbagai organisasi dan aktivitas intelektual, baik intra-kampus maupun ekstra-kampus, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Parmagz Pers Mahasiswa Paramadina, Akademi Merdeka Freedom Institute-Friedrich Naumann Stiftung, Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa (SPPB) Megawati Institute, SPK IV CRCS UGM, Asia Interfaith Forum 2018 dan lain-lain.

Amsa Nadzifah –peneliti junior yang tertarik pada isu literasi, perdamaian, dan toleransi agama. Merupakan lulusan Departemen Ilmu Komunikasi 2018 di Universitas Gadjah Mada. Penggagas program The Peace yakni diskusi pekanan di IMM Bulaksumur Karangmalang (UGM-UNY). Amsa kini aktif dalam jejaring perdamaian di komunitas Muhammadiyah.

Airin Mamlakah Kalamika – lahir di Yogyakarta. Merupakan alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM. Dibesarkan di lingkungan Pesantren Amumarta yang memiliki corak tradisi Nahdlatul Ulama. Selain itu, ia juga sebagai pengurus aktif Nahdlatul Ulama. Sejak tahun 2007 terlibat dan menjadi pengurus di salah satu banom yang membawahi pelajar putri NU dari ingkatan anak cabang sampai Pimpinan Pusat. Menjadi ketua Pimpinan Wilayah IPPNU DIY masa khidmad 2012-2015. Saat ini menjadi dosen di Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga.

Tauchid Komara Yuda – mahasiswa pasca sarjana Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Universitas Gadjah Mada. Ia juga tergabung sebagai asosiasi peneliti d Institute for Democracy and Welfarerism. Risetnya berfokus pada kajian rezim kesejahteraan, dengan salah satu fokus pada bidang filantropi dan citizenship.

Ahmad Fadli Adzami – lahir di Cirebon 5 November 1991. Dia alumni Sosiologi UGM. Fadli aktif di berbagai organisasi massa seperti Gerakan Literasi Indonesia (GLI). Tulisan-tulisanya dipublikasi dalam berbagai media. Ia terlibat dalam berbagai gerakan sosial. Saat ini ia aktif di Pesantren Saidian. Minatnya pada berbagai kajian sosial seperti agama, konflik, agraria dan pascakolonial.

“Di tengah-tengah padang sahara kekerasan, ekstremisme, sektarianisme dan kekacauan yang sedang melanda dunia Islam, kehadiran Islam Indonesia yang direpresentasikan oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mampu menjadi oase dan kiblat baru bagi masa depan Islam di dunia. Peran kedua ormas Islam terbesar di dunia ini sangat penting diwartakan agar umat Islam tidak terus menerus berada di buritan peradaban. Buku ini secara apik menarasikan peran keduanya dalam bingkai perdamaian, kemanusiaan, dan demokrasi.”

- **Prof Dr Ahmad Syafii Maarif**, Ketua Umum PP Muhammadiyah 2000-2005, Pendiri Maarif Institute for Culture and Humanity

“Indonesia punya dua karunia sejarah yang tak dimiliki bangsa mana pun lainnya. Pertama, para Bapak Bangsa memancangkan cita-cita peradaban mulia yang dirumuskan dengan sempurna dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, Indonesia punya aktor-aktor gerakan madani yang sungguh ikhlas berkomitmen pada cita-cita peradaban mulia itu dan tak kenal lelah merengkuh segenap warga Bangsa untuk memperjuangkannya, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Di tengah kemelut yang makin tak menentu hari-hari ini, dua hal itulah yang paling dibutuhkan Dunia. Dunia perlu berkaca pada Indonesia, pada Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, yang dinarasikan dengan cantik di buku ini.”

- **KH Yahya Cholil Staquf**, Katib Aam Syuriah PBNU 2015-2020, Co-Founder *Bayt ar Rahmah*, Winston-Salem, Amerika Serikat

“ ... Lewat uraian yang sedemikian komprehensif dan penting, penulis berhasil membuktikan sebuah kenyataan dasar dari demokrasi di Indonesia: bahwa Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama adalah pilar utama dari sebuah Islam berkeadaban yang menjamin dan melestarikan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Bahkan, lewat aktivitas secemerlang ini, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama telah memberikan sebuah pelajaran penting untuk seluruh dunia tentang kompatibilitas Islam dan demokrasi di dunia moderen ini.”

- **Prof Robert W Hefner**, former Director Institute on Culture, Religion, and World Affairs (CURA), Boston University, Amerika Serikat

“ ... Sumbangan unik buku ini ialah membongkar dan dan menjelaskan secara mendetail kontribusi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam bina damai dan mengokohkan budaya demokrasi. Budaya Islam Indonesia yang moderat dan progresif memang penting, tetapi hanya bisa menjadi kekuatan transformasional jika digerakkan lewat masyarakat madani. Dalam hal ini, kedua ormas Islam yang tidak ada tandingan di seluruh dunia Islam ini memberi pelbagai sumbangan berharga pada setiap tingkat.”

- **Prof Greg Barton**, Chair in Global Islamic Politics, Deakin University, Australia

“Islam Indonesia adalah Islam *wasathiyah*, Islam jalan tengah yang inklusif, akomodatif, toleran dan damai. Muhammadiyah dan NU adalah lokomotif Islam Indonesia *wasathiyah*; keduanya tidak hanya merupakan *jam'iyah* dakwah dan pendidikan, tapi *Islamic-based civil society* yang menjadi *bridging and mediating force between state and society*. Dengan begitu Muhammadiyah dan NU berperan instrumental dalam pembangunan *civic culture* dan *civility* yang memungkinkan tumbuhnya budaya politik damai dan demokrasi. Negara-negara Muslim lain beserta umat Islam masing-masing patut belajar dari Islam Indonesia *wasathiyah* dengan Muhammadiyah dan NU sebagai tulang punggungnya untuk membangun religio-politik yang damai dan berkeadaban.”

- Prof Azyumardi Azra, CBE, UIN Jakarta dan anggota AIPI

PUSAT STUDI KEAMANAN DAN PERDAMAIAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA

ISBN 978-602-6205-35-3